



KETAHANAN PANGAN, KEMISKINAN DAN SOSIAL DEMOGRAFI RUMAH TANGGA



Oleh :
Aswatini
Haning Romdiati
Bayu Setiawan
Ade Latifa
Fitranita
Mita Noveria



PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(PPK - LIPI) 2004

Aswatini

Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Sosial Demografi Rumah Tangga.

Penulis : Aswatini, Haning Romdiati, Bayu Setiawan, Ade Latifa, Fitranita, Mita Noveria.

Jakarta: PPK-LIPI, 2004

xvii, 189 hlm, 23cm (Seri Penelitian PPK-LIPI No. 56/2004)

ISSN : 0852-9280

1. Ketahanan pangan 2. Kemiskinan 3. Demografi 4. Kependudukan
I. Judul II. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Pusat Penelitian Kependudukan.

**KETAHANAN PANGAN, KEMISKINAN DAN SOSIAL
DEMOGRAFI RUMAH TANGGA**

Penulis : Aswatini. et al

Desain Cover dan Lay Out isi : Hari Purnomo

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dicetak Oleh : PT. Dikon Arto Sejahtera



A B S T R A K

Undang - Undang Pangan No 7 tahun 1996 menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, juga dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan ini sangat berkaitan dengan keadaan sosial demografi karena berbagai keadaan yang merupakan dampak dari kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan antara lain status gizi dan kesehatan, sangat berpengaruh terhadap variabel-variabel demografi seperti fertilitas dan mortalitas. Karena itu penelitian ini, yang difokuskan pada analisis ketahanan pangan dan kemiskinan serta keterkaitannya dengan kondisi demografi rumah tangga, sangat strategis untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua dari tiga tahun penelitian yang didanai DIP Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi ketahanan pangan dikembangkan indeks ketahanan pangan yang dihitung berdasarkan tiga indikator ketahanan pangan (ketersediaan pangan, keberlanjutan ketersediaan pangan serta kualitas dan keamanan pangan). Pengukuran kondisi kemiskinan mengacu pada konsep kemiskinan yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik, dengan penentuan garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan ini diukur berdasarkan pengeluaran untuk konsumsi makanan, yang setara dengan 2.100 kkal energi dan 50 gram protein, sebagai standar kebutuhan minimum untuk seseorang bisa hidup sehat dan layak. Garis kemiskinan makanan dapat mengindikasikan kemiskinan yang sangat parah, sebagai perwujudan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, yaitu makanan. Analisis demografi rumah tangga difokuskan dalam enam kelompok rumah tangga berdasarkan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan yaitu: (1) rumah tangga tahan pangan tidak miskin, (2) rumah tangga tahan pangan miskin, (3) rumah tangga kurang tahan pangan tidak miskin, (4) rumah tangga kurang tahan pangan miskin, (5) rumah tangga tidak tahan pangan tidak miskin, dan (6) rumah tangga tidak tahan pangan miskin.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan umum keterkaitan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan kondisi sosial demografi rumah tangga, seperti usia, pendidikan dan status migrasi

kepala rumah tangga serta besar dan tipe rumah tangga, hubungan yang terjadi tidak selalu searah. Ada variabel-variabel antara yang perlu dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan-hubungan ini misalnya variabel-variabel yang berhubungan dengan latar belakang ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Selain dari itu, peranan perubahan variabel-variabel demografi seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi juga perlu didalami untuk melihat pengaruh kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan terhadap kondisi demografi rumah tangga.

Kata kunci: Ketahanan pangan; Kemiskinan; Demografi; Kependudukan.

KATA PENGANTAR

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak manusia yang paling mendasar, seperti yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tetapi sampai saat ini masih banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sesuai standar minimum kehidupan yang layak. Masalah ini bukan merupakan fenomena baru, karena sudah muncul dengan berbagai sebab dan tingkat keparahan sepanjang sejarah hidup manusia. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu usaha untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan. Dalam konteks ini, pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya baik dari segi jumlah, mutu, gizi dan keamanannya. Tetapi, pada kenyataannya, kondisi ketahanan pangan yang baik pada tingkat nasional tidak selalu menjamin bahwa semua individu atau rumah tangga memiliki akses untuk memperoleh pangan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkannya. Kondisi ini secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah kemiskinan. Lebih lanjut, kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan ini sangat berkaitan dengan kondisi demografi, yang hubungannya dapat terjadi secara timbal balik.

Studi tentang 'Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Demografi Rumah Tangga' dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur dengan pendanaan DIP 2004. Ini merupakan penelitian tahun kedua dari rencana tiga tahun penelitian yang difokuskan pada analisis ketahanan pangan dan kemiskinan di tingkat keluarga/rumah tangga serta keterkaitannya dengan kondisi demografi. Dengan selesainya laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi data dan informasi untuk pemahaman tentang keterkaitan antara ketahanan pangan, kemiskinan dan kondisi sosial

demografi masyarakat, disamping dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan bagi instansi terkait.

Terlaksananya kegiatan penelitian hingga selesainya penulisan laporan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami tujukan pada lembaga pemerintah, swasta dan perseorangan yang telah membantu dalam memberikan informasi, data dan saran. Kepada peneliti PPK-LIPI yang terlibat serta seluruh staf penunjang yang mendukung perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan studi ini, kami juga mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2004
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan-
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PPK-LIPI)

Dr. Ir. Aswatini, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SKEMA	xii
DAFTAR MATRIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pemilihan Daerah Penelitian	3
1.3 Kondisi Daerah Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	17
1.5 Tinjauan : Penduduk, Pangan dan Kemiskinan	18
BAB II KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN:	25
Konsep dan Ukuran	
2.1. Pendahuluan	25
2.2. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan pada Tingkat Nasional	27
2.3. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan pada Tingkat Masyarakat dan Rumah Tangga	30
2.4. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan: Ukuran-Ukuran yang Digunakan dalam Analisis	35
BAB III KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA	43
3.1 Kecukupan dan Stabilitas Ketersediaan Pangan	44
3.1.1. Persediaan Pangan	44
3.1.2. Keberlangsungan (Kontinuitas) Persediaan Pangan	68
3.2 Akses atau Keterjangkauan terhadap Pangan	71
3.3 Kualitas dan Keamanan Pangan	75
3.3.1 Kualitas Konsumsi Pangan Pokok: "Yang penting kenyang, gizi nomer dua"	77
3.3.2 Keamanan Pangan: Pengolahan dan Penyimpanan	83
3.4 Ketahanan Pangan Rumah Tangga: Kecukupan Kebutuhan Energi dan Protein Didominasi oleh Asupan Karbohidrat dan Protein Nabati	87

BAB IV	KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA	101
4.1	Situasi Kemiskinan	101
4.1.1.	Pengeluaran untuk Kebutuhan Pangan	103
4.1.2.	Pemilikan Lahan Pertanian	112
4.1.3.	Pemilikan Ternak	120
4.2	Ketahanan Pangan dan Kemiskinan	125
4.2.1.	Ketahanan Pangan dan Kemiskinan Pengeluaran Konsumsi Makanan	125
4.2.2.	Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Konsumsi Energi-Protein	129
BAB V	KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN DALAM KONTEKS SOSIAL DEMOGRAFI RUMAH TANGGA	135
5.1.	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga.	135
5.2.	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Kemiskinan	139
5.2.1.	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Lampung	139
5.2.2.	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur	144
5.3.	Besar dan Tipologi Rumah Tangga	146
5.3.1.	Besar dan Tipologi Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Lampung	147
5.3.2.	Besar dan Tipologi Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur	150
5.4.	Komposisi Anggota Rumah Tangga	153
5.4.1.	Komposisi Anggota Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Lampung	153
5.4.2.	Komposisi Anggota Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur	156
5.5.	Distribusi Anggota Rumah Tangga	157
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	161
	DAFTAR PUSTAKA	183

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas tanam, panen, produksi dan rata-rata produksi per Ha tanaman pangan di Provinsi Lampung dan dua kabupaten terpilih, tahun 2000 dan 2001	8
Tabel 1.2 Ketersediaan pangan per kapita per tahun di Kabupaten Lampung Tengah, 1997-2001	9
Tabel 1.3 Perubahan harga komoditi pangan pokok di Kabupaten Lampung Tengah, 1997-2001	9
Tabel 1.4 Ketersediaan pangan per kapita per tahun di Kabupaten Tulang Bawang, 2001	11
Tabel 1.5 Perkembangan desa terentaskan dari kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang, 1998-2001	12
Tabel 1.6 Luas tanam, panen, produksi dan rata-rata produksi per Ha tanaman pangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 1999 dan 2000	13
Table 1.7 Produksi dan konsumsi komoditi pangan utama di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2000	14
Tabel 3.1 Distribusi rumah tangga menurut jenis makanan pokok	45
Tabel 3.2 Distribusi rumah tangga menurut tingkat ketersediaan pangan	53
Tabel 3.3 Distribusi rumah tangga menurut cara perolehan pangan	54
Table 3.4 Distribusi rumah tangga menurut frekuensi makan anggota rumah tangga umumnya	69
Tabel 3.5 Distribusi rumah tangga menurut stabilitas ketersediaan pangan	71
Table 3.6 Distribusi rumah tangga menurut tempat perolehan pangan	72
Table 3.7 Disribusi rumah tangga menurut cara mencapai tempat perolehan pangan	72
Tabel 3.8 Konversi energi, protein, lemak dan karbohidrat tiwul dan beras	81
Tabel 3.9 Konversi energi, protein, lemak dan karbohidrat jagung pipilan, tepung jagung dan beras	82
Tabel 3.10 Persentase rumah tangga di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur menurut tingkat ketahanan pangan	88

Tabel 3.11	Persentase rumah tangga menurut kualitas pangan yang dikonsumsi di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	90
Tabel 3.12	Rata-rata konsumsi energi dan protein anggota rumah tangga per hari berdasarkan kondisi ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	91
Tabel 3.13	Konsumsi karbohidrat dan protein anggota rumah tangga di Provinsi Lampung berdasarkan jenis makanan	94
Tabel 3.14	Konsumsi karbohidrat dan protein anggota rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan jenis makanan	94
Tabel 3.15	Persentase rumah tangga menurut sumber protein yang dikonsumsi rumah tangga, di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	97
Tabel 4.1	Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pangan, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	103
Tabel 4.2	Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator pemilikan lahan pertanian, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	113
Tabel 4.3	Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator pemilikan hewan ternak (sapi atau kerbau), Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	121
Tabel 4.4	Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator pengeluaran, pemilikan lahan dan pemilikan hewan ternak (sapi atau kerbau), Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	124
Tabel 4.5	Persentase rumah tangga menurut kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi pangan, Provinsi Lampung	126
Tabel 4.6	Persentase rumah tangga menurut kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi pangan, Provinsi Nusa Tenggara Timur	126

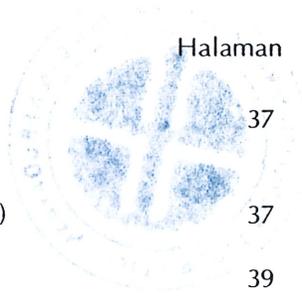
Tabel 4.7	Persentase rumah tangga menurut kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi pangan, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	127
Tabel 4.8	Status rumah tangga berdasarkan konsumsi energi dan protein	130
Tabel 5.1	Karakteristik sosial demografi rumah tangga terpilih di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur	138
Tabel 5.2	Karakteristik rumah tangga terpilih di Provinsi Lampung	140
Tabel 5.3	Karakteristik rumah tangga terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur	145
Tabel 5.4	Besar dan tipologi rumah tangga terpilih di Provinsi Lampung	149
Tabel 5.5	Besar dan tipologi rumah tangga terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur	152
Tabel 5.6	Komposisi anggota rumah tangga terpilih di Provinsi Lampung	154
Tabel 5.7	Komposisi anggota rumah tangga terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur	156

DAFTAR SKEMA

	Halaman	
Skema 1.1	Bagan pemilihan daerah penelitian	5
Skema 1.2	Arah keterkaitan antara kondisi demografi, kondisi ketahanan pangan dan kondisi kemiskinan rumah tangga	23

DAFTAR MATRIK

	Halaman
Matrik 2.1a Stabilitas ketersediaan pangan (beras sebagai makanan pokok)	37
Matrik 2.1.b Stabilitas ketersediaan pangan (jagung sebagai makanan pokok)	37
Matrik 2.2 Indeks katahanan pangan	39





DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman	
Lampiran 1.1	Kondisi ketahanan pangan Kabupaten di Provinsi Lampung, 2001	175
Lampiran 1.2	Kondisi ketahanan pangan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang, Provinsi Lampung 2001	176
Lampiran 1. 3	Kondisi ketahanan pangan Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 2001	177
Lampiran 1.4	Penduduk miskin di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur menurut Kabupaten/Kota (persen)	178
Lampiran 1.5	Penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Kecamatan (persen)	179
Lampiran 2.1	Indikator keluarga miskin dan tidak miskin menurut BKKBN	180

1.1 Latar Belakang

Masalah pangan dan penduduk di Indonesia sudah menjadi perhatian sejak masa penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20, peningkatan penduduk Pulau Jawa yang sangat pesat telah menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya kekurangan pangan dan masalah kemiskinan pada masa-masa yang akan datang. Sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda membuat kebijakan program “kolonisasi”. Salah satu titik berat program kolonisasi adalah perluasan wilayah produksi beras; diikuti kemudian dengan pemindahan penduduk. Contoh sukses dari program kolonisasi berkaitan dengan usaha peningkatan produksi pangan adalah kolonisasi Metro Sukadana di Provinsi Lampung. Daerah ini sekarang merupakan wilayah penghasil beras yang cukup berarti di Indonesia (Soehoed, 2002: 198-200). Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, program kolonisasi ini dikenal dengan Program Transmigrasi.

Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan sangat identik dengan pemenuhan kebutuhan beras sebagai makanan pokok. Tingkat partisipasi konsumsi beras rumah tangga, baik di kota maupun di desa di Indonesia yaitu sekitar 97-100 persen. Ini berarti paling tinggi hanya tiga (3) persen rumah tangga yang tidak mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Bahkan, di beberapa daerah yang semula makanan pokoknya bukan beras, seperti misalnya Maluku, yang semula konsumsi makanan pokoknya adalah sagu, konsumsi berasnya mencapai 100 persen (Harianto, dalam Surono, 2001: 47). Ini merupakan indikasi kurangnya diversifikasi pangan dan adanya perubahan pola makan menuju satu pola konsumsi pangan utama yaitu beras. Dengan jumlah penduduk yang selalu bertambah, serta kurangnya diversifikasi pangan, kebutuhan akan beras sebagai bahan pangan sumber energi utama akan meningkat terus. Meskipun ada beberapa daerah sentra produksi beras seperti Metro Sukadana, tetapi selama periode 1990-2001, produksi beras secara nasional juga terus menurun dengan rata-rata 3,8 persen per tahun (Surono, 2000: 45-46). Dengan demikian ketersediaan beras untuk kebutuhan konsumsi tidak dapat dipenuhi hanya dari produksi dalam negeri dan harus didukung dengan beras impor.

Ketersediaan pangan hanya merupakan salah satu unsur dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai “suatu kondisi dimana

semua orang secara fisik dan ekonomi mampu dan mempunyai akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman dan sehat untuk memenuhi kebutuhan dan pilihannya, sehingga dapat hidup dengan aktif dan sehat” (FAO, World Food Summit 1996). Ada empat kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan pangan yaitu: kecukupan ketersediaan pangan; stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; akses atau keterjangkauan terhadap pangan dan, kualitas serta keamanan pangan tersebut untuk dikonsumsi (FAO, 2002; Kasryno, 2000; Maxwell, 1996). Unsur-unsur dalam konsep ketahanan pangan ini menjelaskan bahwa ketersediaan pangan yang cukup merupakan satu unsur yang penting tetapi tidak cukup untuk menjamin ketahanan pangan. Meskipun pangan cukup tersedia, baik dari produksi maupun impor mungkin banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya sesuai standar kebutuhan minimum untuk hidup aktif dan sehat karena keterbatasan akses, kemiskinan dan pengaruh variabel-variabel sosial ekonomi lainnya.

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, juga dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui pengendalian pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan sangat berkaitan dengan masalah ketahanan pangan dan kemiskinan, meskipun arah hubungan sebab-akibatnya masih banyak diperdebatkan (UNFPA, 1993: 50-51) karena kompleksitas dari hubungan tersebut. Dengan tidak mengenyampingkan kompleksnya hubungan tersebut, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk seperti kebijakan keluarga berencana dan transmigrasi juga seiring dengan kebijakan dan usaha peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Tetapi, terjadinya krisis, dimulai pada tahun 1997, yang berakibat pada menurunnya persediaan dan meningkatnya harga sebagian besar bahan pangan pokok, terutama beras, serta meningkatnya pengangguran dengan pesat, yang juga berdampak pada peningkatan jumlah rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, menyebabkan perhatian dan kebijakan pemerintah banyak diarahkan pada usaha mengatasi masalah kecukupan pangan dan kemiskinan, seperti ditunjukkan oleh berbagai program penanggulangan dampak krisis, dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Hanya sedikit program-program yang langsung berkaitan dengan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan (Booth, 2000: 155-158; Irawan et al, 2001; Hatmaji dan Mursitama, 2003: 265-291). Program JPS ini kemudian dikembangkan menjadi kegiatan jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan dengan memperhitungkan desentralisasi, otonomi daerah dan demokratisasi (Hatmaji dan Mursitama, 2003: 290). Dengan intervensi langsung untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan, diharapkan akan berdampak positif terhadap kondisi kependudukan.

Dalam kaitan dengan kondisi tersebut, penelitian dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang keterkaitan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan kondisi demografi rumah tangga (besaran, komposisi dan distribusi anggota rumah tangga) pada beberapa daerah yang mempunyai tingkat ketahanan pangan berbeda. Selain menambah pemahaman tentang keterkaitan antara masalah ketahanan pangan dan kemiskinan dalam konteks demografi dan kependudukan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan untuk kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan dari fokus demografi dan kependudukan.

1.2 Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di dua provinsi yaitu Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara bertahap dari pemilihan Provinsi, diikuti di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, berdasarkan kondisi ketahanan pangan (*purposive sampling*). Pemilihan di tingkat provinsi ditekankan pada perbedaan kondisi ketahanan pangan dan komoditas pangan utama serta kondisi kemiskinan. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mempunyai ketahanan pangan tinggi dengan produksi padi sebagai kontributor terbesar terhadap kondisi ketahanan pangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mempunyai ketahanan pangan yang tinggi, tetapi relatif kurang dibandingkan Provinsi Lampung, dengan produksi jagung sebagai kontributor terbesar terhadap kondisi ketahanan pangan (Sumarwan dan Sukandar, 1998). Data ketahanan pangan untuk kabupaten-kabupaten di kedua provinsi tersebut menunjukkan secara umum Provinsi Lampung mempunyai kondisi ketahanan pangan yang lebih baik dari Provinsi NTT (Lampiran 1.2 dan Lampiran 1.3). Indikator-indikator kemiskinan juga menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung lebih baik dibandingkan Provinsi NTT (Irawan dan Romdiati, 2000). Berdasarkan data tahun 2000, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung adalah sebesar 26,6 persen sedangkan di NTT sebesar 47,7 persen (Badan Pusat Statistik 2004). Dengan memilih kedua provinsi ini sebagai daerah penelitian diharapkan akan didapatkan pemahaman berdasarkan perbedaan-perbedaan geografis; kemampuan dan jenis produksi pangan maupun kebiasaan-kebiasaan makan serta pola diversifikasi pangan masyarakat.

Melihat kondisi di masing-masing provinsi, ada variasi yang sangat signifikan antar kabupaten dalam provinsi (Tim Peneliti, Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbang Deptan, 2002). Dengan demikian, untuk tiap-tiap provinsi selanjutnya dipilih satu atau dua wilayah/kabupaten yang berketahanan pangan tinggi dan atau sedang/rendah. Selanjutnya untuk masing-masing wilayah/kabupaten dipilih kecamatan dan desa (atau tingkat

administratif yang setara) yang dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan yang tinggi sedang atau rendah/kurang (Skema 1.1).

Untuk Provinsi Lampung dipilih dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Tengah yang mewakili wilayah berketahanan pangan tinggi (risiko rawan pangan ringan) serta persentase penduduk miskin relatif rendah (25,8 persen) dan Kabupaten Tulang Bawang yang mewakili wilayah berketahanan pangan sedang (risiko ketahanan pangan sedang, karena tidak ada kabupaten di Provinsi Lampung yang berketahanan pangan rendah/ risiko rawan pangan tinggi) dan persentase penduduk miskin lebih tinggi (30,5 persen) (Lampiran 1.1 dan Lampiran 1.4). Selanjutnya, untuk Kabupaten Lampung Tengah dipilih kecamatan dan desa berketahanan pangan tinggi (Ngesti Rahayu di Kecamatan Punggur), sedangkan untuk Kabupaten Tulang Bawang dipilih kecamatan dan desa berketahanan pangan rendah (Catur Karya Buana Jaya di Kecamatan Banjar Agung). Untuk Kabupaten Lampung Tengah tidak ada kecamatan yang berketahanan pangan rendah (tingkat risiko rawan pangan tinggi) (Lihat 1.2). Kecamatan terpilih di Kabupaten Tulang Bawang juga lebih miskin (dengan proporsi penduduk miskin 27,5 persen) dibandingkan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah (dengan proporsi penduduk miskin 18,8 persen) (Lampiran 1.5).

Di Provinsi NTT, karena belum tersedia peta ketahanan pangan untuk seluruh Kabupaten dan karena pertimbangan kesulitan geografis untuk mencapai daerah-daerah tertentu, diambil satu kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang berketahanan pangan tinggi (Tim Peneliti Puslitbang Ekonomi Pertanian, Balitbang Pertanian, Deptan, 2002), tetapi dapat ditemukan desa-desa dengan tingkat ketahanan pangan berbeda, tinggi, sedang dan rendah. Dalam kabupaten ini dipilih satu kecamatan yaitu Kecamatan Amanuban Barat yang berketahanan pangan sedang/risiko rawan pangan sedang (Lampiran 1.3), tetapi dalam kecamatan ini diambil dua desa yang berbeda ketahanan pangannya, rendah dan tinggi (Skema 1.1). Pemilihan kedua desa ini juga didasarkan pertimbangan letak geografis yang memudahkan pelaksanaan penelitian.

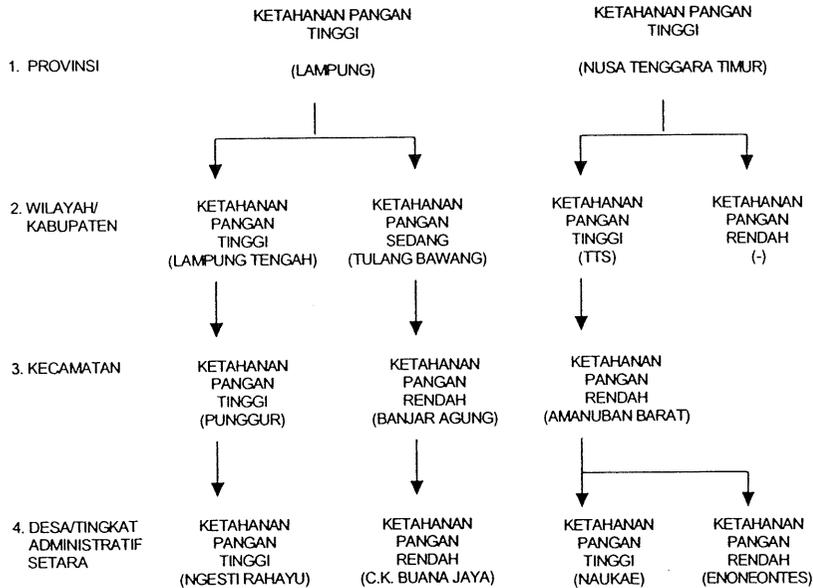
1.3. Kondisi Daerah penelitian

Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur termasuk dalam provinsi dengan status tahan pangan terjamin, tetapi masih ditemukan wilayah-wilayah

Skema 1.1: Bagan pemilihan daerah penelitian

TINGKAT ADMINISTRATIF

TINGKAT KETAHANAN PANGAN



dengan proporsi rumah tangga rawan pangan relatif tinggi, berkisar antara 22 persen sampai dengan 30 persen (Saliem dkk, 2002: 20; Sumarwan dan Sukandar, 1998). Provinsi Lampung yang terdiri dari 10 kabupaten/kota (setelah pemekaran wilayah pada tahun 1999), pada tahun 2000 berpenduduk 6.659.869 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,05 persen pertahun pada periode 1990-2000 (Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2002: iii). Produksi pertanian utama Propinsi Lampung terdiri dari padi, palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau) dan tanaman perkebunan (kopi, tebu, lada, dan kakao) (Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2002: 177).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 14 kabupaten/kota, pada tahun 2000 berpenduduk 3.808.477 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,53 persen pertahun pada periode 1990-2000. Produksi pertanian

utama Provinsi NTT terdiri dari padi dan palawija (jagung, kedelai) (Badan Bimas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, 2001: 37). Secara umum, kondisi ketahanan pangan rumah tangga di kedua provinsi dapat dilihat dari persentase rumah tangga dengan Konsumsi Energi dan Protein (KEP) kurang dari 100 persen (sebagaimana dianjurkan *Recommended Dietary Allowances*). Di Provinsi Lampung terdapat kira-kira 61,7 persen rumah tangga dengan konsumsi energi kurang dari 100 persen dan 29,2 persen rumah tangga dengan konsumsi protein kurang dari 100 persen, sedangkan untuk Provinsi NTT persentasenya sebesar 57,3 persen dan 15,2 persen (Sumarwan dan Sukandar, 1998: 82). Keadaan ini menunjukkan bahwa kekurangan konsumsi energi di Provinsi Lampung lebih besar tetapi konsumsi protein relatif lebih tinggi dibandingkan di NTT, yang dapat disebabkan karena perbedaan pola dan diversifikasi konsumsi pangan penduduk.

Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai ketahanan pangan tinggi. Luas wilayah kabupaten ini 4.789,82 km², terdiri dari 26 kecamatan dan 289 kampung/kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2001 sebanyak 1.051.216 jiwa. Pertumbuhan ekonomi kabupaten ini didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) sebesar 52,39 persen pada tahun 2001. Pertumbuhan sektor pertanian ini (termasuk pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) pada tahun 2001 sebesar 7,62 persen, dengan pertumbuhan terbesar dari sub sektor perikanan (7,75 persen). Besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah juga sangat terkait dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk kabupaten ini yang masih bertumpu pada sektor pertanian (Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, 2002: 15-18). Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan sentra produksi padi terbesar di Provinsi Lampung dengan produksi sebesar 21,96 persen dari total produksi padi di Provinsi Lampung (Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2002: 177). Sesuai dengan potensi wilayah di sektor pertanian pangan, Kabupaten Lampung Tengah bagian timur, terutama di Kecamatan Trimurjo, Punggur dan Seputih Raman akan dikembangkan sebagai lumbung pangan (beras) di Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung (Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, 2002: 43).

Selain padi, komoditas tanaman pangan pokok lainnya yang merupakan produksi utama Kabupaten Lampung Tengah adalah jagung dan ubi kayu. Pada tahun 2001, produksi jagung di Kabupaten Lampung Tengah memberi kontribusi sebesar kurang lebih 28 persen terhadap produksi jagung di Provinsi Lampung, sedangkan ubi kayu memberi kontribusi kira-kira sebesar 32 persen. Dilihat dari luas lahan untuk tanaman pangan, data tahun 2000 dan 2001

menunjukkan ada peningkatan luas tanam komoditi padi sawah, jagung dan ubi kayu. Rata-rata produksi per Ha ketiga komoditi ini juga meningkat (Tabel 1.1). Peningkatan luas tanam dan produktifitas lahan ketiga komoditi ini tentunya sangat menunjang untuk mempertahankan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah.

Dilihat dari kebutuhan energi/kapita/hari, produksi beras Kabupaten Lampung Tengah sudah dapat mencukupi kebutuhan energi penduduknya. Dengan menggunakan standar kebutuhan energi sebesar 2.100 kkal dan protein 46,50 gram/kapita/hari (direkomendasikan dalam Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1978), jika semua kebutuhan kalori ini dipenuhi dari pangan pokok beras, maka kebutuhan konsumsi beras per kapita per tahun (365 hari) adalah 216,7 kilogram.¹ Dengan demikian, sejak tahun 1997 sampai tahun 2001, produksi beras Kabupaten Lampung Tengah sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Hanya untuk tahun 2000 terjadi sedikit kekurangan, dimana produksi beras hanya memberi persediaan untuk konsumsi sebesar 214,43 kilogram/kapita/tahun (Tabel 1.2). Selain dari itu, produksi komoditi bahan pangan pokok lainnya seperti ubi kayu dan jagung juga cukup tersedia.

¹ Berdasarkan tabel konversi Modul Konsumsi Susenas 2002, satu (1) kilogram beras setara dengan 3.622 kkal energi dan 84,75 gram protein. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan 2.100 kkal energi jika semua kebutuhan tersebut dipenuhi dari konsumsi beras, seseorang minimal membutuhkan untuk mengkonsumsi beras sebanyak 216,7 kilogram dalam setahun. Untuk memenuhi kebutuhan protein dibutuhkan konsumsi beras sebanyak 199 kg/kapita/tahun. Dengan demikian, konsumsi beras sebesar 216,7 kg/kapita/tahun sudah dapat memenuhi standar kebutuhan energi dan protein.

Tabel 1.1. Luas tanam, panen, produksi dan rata-rata produksi per Ha tanaman pangan di Provinsi Lampung dan dua kabupaten terpilih, tahun 2000 dan 2001

Luas panen, produksi dan rata-rata produksi per Ha tiap jenis tanaman pangan	Provinsi Lampung		Kabupaten Lampung Tengah		Kabupaten Tulang Bawang	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Padi sawah						
Luas tanam (Ha)	t.t	t.t	77.959	87.558	t.t	t.t
Luas panen (Ha)	388.383	398.927 ¹⁾	74.494	72.005	58.702	58.901
Produksi (Ton)		1.739.761 ¹⁾	316.786	361.018	246.246	247.264
Rata-rata produksi per Ha (Kw)		43,61	42,52	50,01	41,95	41,98
Padi ladang						
Luas tanam (Ha)	t.t	t.t	29.074	27.304	t.t	t.t
Luas panen (Ha)	108.267	102.191 ¹⁾	28.456	27.304	21.822	12.801
Produksi (Ton)	t.t	252.928 ¹⁾	78.226	75.147	51.658	32.715
Rata-rata produksi per Ha (Kw)	t.t	24,75	27,49	26,54	23,67	25,56
Jagung						
Luas tanam (Ha)	t.t	t.t	92.783	109.957	t.t	t.t
Luas panen (Ha)	378.497	400.258 ¹⁾	87.862	106.870	31.154	19.037
Produksi (Ton)	1.122.954	1.109.326 ¹⁾	255.409	315.167	120.769	67.010
Rata-rata produksi per Ha (Kw)	29,67	27,72	29,07	29,68	38,76	35,20
Ubi kayu						
Luas tanam (Ha)	t.t	t.t	83.838	109.529	t.t	t.t
Luas panen (Ha)	257.506	316.998 ¹⁾	80.897	110.197	88.799	77.422
Produksi (Ton)	2.924.418	3.613.919 ¹⁾	923.607	1.154.658	1.360.223	1.179.356
Rata-rata produksi per Ha (Kw)	113,57	114,00	114,17	104,78	153,18	152,33

Catatan: t.t: data tidak tersedia

¹⁾ Angka Tetap Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2002.

Pemda Kabupaten Lampung Tengah, Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, 2002.

Bappeda Kabupaten Lampung Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2002.

Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2002.

Tabel 1.2. Ketersediaan pangan per kapita per tahun di Kabupaten LampungTengah, 1997-2001

Jenis bahan makanan pokok	Ketersediaan per kapita per tahun (kilogram)				
	1997	1998	1999	2000	2001
Beras	235,86	262,87	230,34	214,43	244,73
Jagung	272,18	254,00	266,10	227,31	264,63
Ubi kayu	73,19	760,80	517,91	786,07	1022,71

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2002, Tabel 5.1.24.

Tetapi ketersediaan atau kecukupan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok penduduk secara makro (di tingkat nasional/provinsi) dan meso (di tingkat kabupaten) tidak secara langsung mengindikasikan terpenuhinya kebutuhan pangan atau tercapainya ketahanan pangan di tingkat keluarga karena kondisi ini juga dipengaruhi oleh akses dan keterjangkauan atas komoditi pangan tersebut. Salah satu kondisi yang mempengaruhi akses/keterjangkauan keluarga terhadap pangan adalah daya beli dan tingkat harga komoditi pangan pokok tersebut. Untuk Kabupaten Lampung Tengah, data harga komoditi pangan pokok beras dan jagung menunjukkan kenaikan sejak tahun 1997, tetapi harga komoditi ubi kayu tidak menunjukkan perubahan yang mencolok (Tabel 1.3).

Tabel 1.3. Perubahan harga komoditi pangan pokok di Kabupaten LampungTengah, 1997-2001

Jenis bahan makanan pokok	Harga (rupiah/kilogram)					% kenaikan harga 2000-2001
	1997	1998	1999	2000	2001	
Beras	535	1.920	2.302	2.066	2.126	2,82
Jagung	380	926	814	930	1.182	27,10
Ubi kayu	150	300	158	191	221	15,71

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2002, Tabel 5.1.28.

Daya beli masyarakat, dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan kenaikan dari Rp. 3.053.796,- pada tahun 2000 menjadi Rp 3.462.853,- pada tahun 2001, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 13,39 persen. Tetapi berdasarkan harga konstan

tahun 1993, pendapatan per kapita hanya naik sebesar 2,97 persen, dari Rp 1.111.972,- pada tahun 2000 menjadi Rp. 1.145.050,- pada tahun 2001. Kenaikan pendapatan ini dapat dikatakan masih seimbang dengan kenaikan harga beras antara tahun 2000 dan 2001, yang berarti tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan makanan pokok tersebut, terutama beras. Selain dari itu, kondisi sarana/prasarana transportasi lokal relatif dapat menunjang hubungan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan Ibukota Kabupaten (Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, 2002: 20-21), sehingga dapat juga menjamin kelancaran transportasi untuk suplai komoditi pangan pokok tersebut. Kelembagaan penyaluran pangan di Kabupaten Lampung Tengah juga didukung keberadaan DOLOG.

Kondisi kemiskinan penduduk Kabupaten Lampung Tengah secara umum dapat dilihat dari proporsi keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera I. Pada tahun 2000, dari total jumlah keluarga di Kabupaten Lampung Tengah, 30,5 persen tergolong keluarga pra sejahtera sedangkan pada tahun 2001 sebesar 27,6 persen. Proporsi Keluarga Sejahtera I pada tahun 2000 sebesar 58,1 persen dan pada tahun 2001 sebesar 55,1 persen. Dari 282 desa/kampung di Kabupaten Lampung Tengah, sebanyak 63 (22,3 persen) dikategorikan sebagai desa tertinggal. Proporsi keluarga miskin sebesar 58,43 persen dari jumlah total kepala keluarga (Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, 2002: 20-21; 39-40).

Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang merupakan hasil pemekaran wilayah pada tahun 1997, yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 7.770,88 Km², merupakan kabupaten terluas, mencakup 22 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung. Secara administratif, kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan definitif dan 3 kecamatan pembantu, yang mencakup 203 desa definitif dan desa persiapan. Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2001 adalah 711.886 orang. Pertumbuhan ekonomi kabupaten ini masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 63,92 persen pada tahun 2000 (berdasarkan harga berlaku). Pertumbuhan PDRB kabupaten ini pada tahun 2000 sebesar 7,08 persen dan pertumbuhan sektor pertanian (termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan) sebesar 3,84 persen (Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2001).

Produksi komoditi pangan utama di Kabupaten Tulang Bawang adalah ubi kayu, dengan kontribusi sebesar kurang lebih 33 persen terhadap total produksi se Provinsi Lampung. Tetapi, ubi kayu umumnya tidak dikonsumsi sebagai bahan pangan utama, melainkan untuk industri tapioka (aci). Produksi beras

(sawah dan ladang) di kabupaten ini memberi kontribusi sebesar 14 persen terhadap total produksi Provinsi Lampung sedangkan produksi hanya jagung memberi kontribusi sebesar 6 (enam) persen. Luas panen ketiga komoditi ini antara tahun 2000 dan 2001 menunjukkan sedikit peningkatan untuk padi sawah tetapi untuk komoditi lainnya (padi ladang, jagung dan ubi kayu) terjadi penurunan, sedangkan untuk rata-rata produksi per Ha tidak terjadi perubahan yang mencolok (Tabel 1.1). Penurunan luas panen yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi rata-rata per Ha tentunya mengganggu stabilitas ketersediaan pangan tersebut untuk menunjang ketahanan pangan wilayah.

Dengan menggunakan standar kebutuhan energi sebanyak 2.100 kkal dan 50 gram protein/kapita/hari, produksi beras di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2001 sebenarnya sudah dapat mencukupi kebutuhan penduduknya yang berjumlah 711.886 orang (Tabel 1.4). Tetapi ketersediaan ini tidak menjadi jaminan tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga karena ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti keterjangkauan terhadap pangan (akses di daerah terpencil dan daya beli masyarakat). Dilihat dari kondisi jalan di Kabupaten Tulang Bawang yang sebagian besar termasuk klasifikasi jalan kabupaten dengan jenis permukaan tanah (Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2002: 108), akses masyarakat di desa-desa bukan penghasil komoditi pangan tentunya akan lebih sulit.

Tabel 1.4. Ketersediaan pangan per kapita per tahun di Kabupaten Tulang Bawang, 2001

Jenis bahan makanan pokok	Produksi (ton)	Ketersediaan konsumsi/kapita/tahun (kilogram)
Padi	279.979	393,29
Jagung	67.010	94,13
Ubi kayu	1.179.356	1.656,7

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2002.

Daya beli masyarakat, dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan kenaikan dari Rp. 2.434.234,- pada tahun 1999 menjadi Rp 2.718.919,- pada tahun 2000, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 11,69 persen. Tetapi berdasarkan harga konstan tahun 1993, pendapatan per kapita hanya naik sebesar 0,20 (Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2002: 131-132). Dengan asumsi harga komoditi pangan di Kabupaten Tulang Bawang sama dengan harga di Kabupaten Lampung Tengah, kenaikan pendapatan

yang relatif kecil ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Kondisi kemiskinan penduduk Kabupaten Tulang Bawang secara umum dapat dilihat dari data perkembangan desa miskin. Dari tahun 1998 sampai tahun 2001, terjadi peningkatan desa yang terentaskan dari kemiskinan di kabupaten ini (Tabel 1.5). Menurut perkembangannya, antara tahun 1998-2001 terjadi penambahan desa Swa-sembada dari 87 buah menjadi 124 buah (Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2002: 4).

Tabel 1.5. Perkembangan desa terentaskan dari kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang, 1998-2001.

Tahun	Perkembangan desa		Terentaskan (maju)
	Kurang berkembang	Sedang berkembang	
1998	8	37	57
1999	6	36	60
2000	6	30	66
2001	5	16	81

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2002.

Kabupaten TTS

Kabupaten TTS mempunyai luas wilayah 3.947,00 km² yang sebagian besar merupakan wilayah daratan. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan induk dan 4 kecamatan pembantu dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 200. Seperti Kabupaten Lampung Tengah, pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini juga didukung oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 60,12 persen (atas dasar harga konstan tahun 1999), dimana sub-sektor tanaman pangan menyumbang sebesar 49,91 persen terhadap PDRB. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB juga didukung oleh mata pencaharian sebagian besar penduduk yang terkonsentrasi di sektor pertanian (termasuk peternakan, perkebunan dan perikanan).

Potensi pertanian di Kabupaten TTS umumnya terdiri dari lahan kering dan hanya kira-kira 1,3 persen merupakan lahan sawah yang tersebar di 11 kecamatan. Jenis tanaman pangan utama yang diusahakan di Kabupaten TTS terdiri dari padi (sawah dan ladang) dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar), dimana jagung merupakan komoditi utama dengan produksi terbesar. Jagung juga merupakan komoditi pangan utama yang mengalami peningkatan produksi sehubungan dengan peningkatan luas panen dan produktifitas, dibandingkan komoditi pangan utama lainnya seperti padi dan ubi kayu

(Tabel 1.6). Daerah produksi padi terbesar di Kabupaten TTS adalah Kecamatan Mollo Selatan, diikuti Kecamatan Mollo Utara, Amanuban Selatan dan Amanuban Tengah. Jagung paling banyak dihasilkan di Kecamatan Amanuban Selatan, Amanuban Utara, Mollo Utara, Amanuban Tengah dan Mollo Selatan sedangkan ubi kayu dihasilkan di Kecamatan Amanuban Timur, Mollo Utara, Amanuban Barat, Amanuban Selatan dan Amanuban Utara (Badan Bimas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, 2001: 40-42).

Tabel 1.6. Luas tanam, panen, produksi dan rata-rata produksi per Ha tanaman pangan di Kabupaten Timor Timur Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 1999 dan 2000

Luas panen, produksi dan rata-rata produksi per Ha tiap jenis tanaman pangan	TAHUN	
	1999 ²⁾	2000
Padi sawah dan ladang		
Luas panen padi sawah(Ha)	2.331	2.209
Luas panen padi ladang (Ha)	316,6	300
Produksi padi sawah dan ladang(Ton)	4.683 (beras)	4.285 (beras)
Rata-rata produksi per Ha padi sawah(Kw)	28,50	27,52
Rata-rata produksi per Ha padi ladang (Kw)	17,71	17,10
Jagung		
Luas panen (Ha)	28.396,5	35.808
Produksi (Ton)	59.997,6	75.591
Rata-rata produksi per Ha (Kw)	21.08	21,11
Ubi kayu		
Luas panen (Ha)	22.387,8	20.277
Produksi (Ton)	203.886,6	183.203
Rata-rata produksi per Ha (Kw)	91.24	90,35

Catatan : 1) Luas panen padi sawah dan padi ladang.

2) Diperhitungkan berdasarkan kenaikan/penurunan pada tahun 2000

Sumber: Badan Bimas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, 2001.

Berdasarkan produksi bahan pangan, tingkat ketersediaan energi dan protein di Kabupaten TTS pada tahun 2000 adalah sebesar 3.598 kkal energi dan 73,57 gram protein (Badan Bimas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, 2001: 61). Angka ini sudah melebihi kebutuhan standar 2.100 kkal energi dan 50 gram protein. Kebutuhan ini dipenuhi dari produksi seluruh tanaman pangan termasuk jagung dan ubi jalar. Ketersediaan pemenuhan kebutuhan kalori dan protein ini tidak menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga karena beras masih merupakan makanan pokok utama yang paling banyak di konsumsi penduduk di Kabupaten TTS, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan beras/padi masih terjadi kekurangan (Tabel 1.7.). Meskipun tidak ada sentra produksi beras di

Kabupaten TTS, tetapi kemudahan untuk mendapatkannya dari sentra produksi di kecamatan-kecamatan lainnya di luar Kabupaten TTS, pasar ibukota kecamatan atau melalui Operasi Pasar oleh DOLOG setempat, menyebabkan penduduk tetap mempertahankan pola konsumsi beras ini. Selain itu, mungkin beras masih dianggap sebagai komoditi pangan utama yang lebih baik kualitasnya dibandingkan jagung dan ubi kayu. Karena itu, sarana dan prasarana transportasi akan sangat menentukan pola distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) secara merata di Kabupaten TTS dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Masyarakat Kabupaten TTS sendiri, seperti juga umumnya masyarakat Provinsi NTT mengenal jagung sebagai makanan pokok utama yang dikenal sebagai jagung bosa dan/atau jagung ketemak. Tetapi saat ini jagung umumnya dikonsumsi pada waktu-waktu terjadi gangguan produksi padi seperti masa kekeringan, kemarau panjang atau adanya serangan hama (Badan Bimas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, 2001: 75-76). Melihat kondisi produksi dan konsumsi ini, untuk menjamin ketahanan pangan wilayah Kabupaten TTS perlu ditingkatkan diversifikasi pangan, agar dapat mengurangi ketergantungan konsumsi pada komoditi beras karena beras bukan merupakan komoditi produksi utama di Kabupaten TTS.

Tabel 1.7. Produksi dan konsumsi komoditi pangan utama di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2000.

Jenis pangan	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Kelebihan (+)/kekurangan (-) (Ton)
Beras (sawah dan ladang)	4.285	36.069	- 31.785
Jagung	75.591	14.304	+ 61.287
Ubi kayu	183.203	7.967	175.235

Sumber: Badan Bimas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, 2001.

Dibandingkan dengan Provinsi Lampung, kondisi kemiskinan di Provinsi NTT lebih parah. Dengan menggunakan garis kemiskinan standar 1998, pada tahun 1999 Provinsi NTT menempati urutan 26 menurut persen penduduk miskin di Indonesia dengan proporsi penduduk miskin sebesar 42,2 persen. Pada tahun yang sama Provinsi Lampung menempati urutan ke-18 dengan proporsi penduduk miskin sebesar 27,4 persen (Irawan dan Romdiati, 2000: Tabel 7).

Kecamatan dan desa penelitian

Di daerah penelitian Kabupaten Lampung Tengah dipilih kecamatan dan desa berketahanan pangan tinggi yaitu Kecamatan Punggur dan Desa Ngesti Rahayu. Untuk Kabupaten Tulang Bawang dipilih kecamatan dan desa berketahanan pangan rendah (risiko rawan pangan tinggi) yaitu Kecamatan Banjar Agung dan Desa Catur Karya Buana Jaya. Pemilihan kedua kabupaten selain didasarkan pertimbangan kondisi ketahanan pangan juga pertimbangan letak geografis yang dapat memudahkan pelaksanaan penelitian lapangan (catatan: letak Kabupaten Lampung Tengah bersebelahan dengan Kabupaten Tulang Bawang).

Kecamatan Punggur terdiri dari sembilan (9) kampung/desa/kelurahan, berjarak 19 km dari Ibukota Provinsi dan 16 km dari Ibukota Kabupaten, Gunung Sugih. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini pada tahun 2003 sebanyak 8.194 dan jumlah penduduk 31.266 jiwa. Mata pencaharian utama penduduknya adalah bertani dengan komoditi pertanian utama padi, diikuti jagung, ketela pohon serta buah-buahan dan sayur-sayuran (Monografi Kecamatan Punggur, 2003).

Desa Ngesti Rahayu merupakan salah satu desa di Kecamatan Punggur dengan luas wilayah 613,75 ha, terletak 3 km dari Ibukota Kecamatan dan 13 km dari Ibukota Kabupaten. Desa ini dapat dicapai dengan mudah dengan kendaraan roda empat karena kondisi jalan yang relatif dapat dilalui. Jumlah penduduknya pada tahun 2000 adalah 2.541 jiwa, terdiri dari 653 kepala keluarga. Mata pencaharian utama penduduknya adalah petani tanaman pangan terutama petani sawah dengan luas total lahan sawah 408,75 Ha. Sarana pendidikan yang tersedia di desa hanya sampai tingkat Sekolah Dasar, sehingga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus ditempuh di Ibukota Kecamatan (Profil Desa Ngesti Rahayu, 2000).

Kecamatan Banjar Agung terdiri dari 17 desa/kampung, terdiri dari 5 Desa Swakarsa dan 12 Desa Swasembada, dengan luas wilayah 32.085 Ha. Ibukota Kecamatan ini terletak 25 km dari Menggala, Ibukota Kabupaten Tulang Bawang. Di kecamatan ini masih terdapat desa-desa yang agak sulit dicapai karena kondisi jalan yang masih berupa tanah. Salah satu desa dengan kondisi jalan seperti ini adalah Desa Catur Karya Buana Jaya yang merupakan desa terpilih sebagai lokasi penelitian. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini pada tahun 2002 sebanyak 15.334 dengan jumlah penduduk 61.722 jiwa. Usaha pertanian di kecamatan ini umumnya merupakan pertanian lahan kering dengan luas lebih dari 10.000 Ha dan perkebunan (swasta dan rakyat) dengan luas lebih dari 13.000 Ha, sedangkan sawah (tadah hujan/rendengan)

hanya terdiri dari 761 Ha. Selain dari itu, penduduk yang bermata pencaharian peternak (sapi, kambing dan babi) juga cukup banyak (kurang lebih 25.000 orang) (Monografi Kecamatan Banjar Agung, 2002).

Kampung/Desa Catur Karya Buana Jaya terletak 16 km dari Ibukota Kecamatan dan 32 km dari Ibukota Kabupaten. Luas kampung ini adalah 2.115 Ha, dengan jumlah kepala keluarga pada tahun 2001 sebanyak 1.366 dan jumlah penduduk 5.185 jiwa. Pada tahun 2000/2001 terdapat 1.076 keluarga Pra-sejahtera dan 290 keluarga Sejahtera di kecamatan ini. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kebun dengan hasil utama kelapa, kopi dan karet dan petani lahan kering dengan hasil utama ubi kayu dan jagung. Sarana pendidikan yang tersedia adalah Sekolah Dasar dan satu (1) Sekolah Menengah Pertama Swasta (Monografi Desa/Kampung Catur Karya Buana Jaya, 2001).

Untuk Kabupaten TTS dipilih satu kecamatan yaitu Kecamatan Amanuban Barat yang berketahanan pangan sedang/risiko rawan pangan sedang (Lampiran 1.3), tetapi dalam kecamatan ini diambil dua desa yang berbeda ketahanan pangannya yaitu Desa Enoneontes yang mencerminkan desa dengan ketahanan pangan rendah dan Desa Naukae yang mencerminkan desa dengan ketahanan pangan tinggi.

Kecamatan Amanuban Barat terdiri dari 14 desa dengan luas wilayah 229,3 km persegi. Jumlah kepala keluarga di kecamatan ini sebanyak 6.403 dengan jumlah penduduk 29.479 jiwa. Dari 6.403 kepala keluarga, terdapat 5.389 kepala keluarga miskin. Produksi pertanian utama di kecamatan ini adalah jagung, yang juga merupakan bahan pangan pokok penduduk kecamatan ini. Secara umum, masalah utama yang dihadapi Kecamatan Amanuban Barat adalah kekurangan pangan, yang mulai dirasakan pada Bulan Juni 2002, disebabkan kegagalan panen jagung pada musim tanam 2001-2002. Desa-desa yang menghadapi masalah kekurangan pangan ini adalah Desa Lakat, Supul, Pusu, Enoneontes, Tubuhue, O'of, Nulle dan Tetaf. Desa Naukae, berdasarkan produksi komoditi pangannya, mempunyai ketahanan pangan lebih baik dari Enoneontes. Secara umum produksi jagung di Desa Naukae pada tahun 2002 melebihi konsumsi yang dibutuhkan penduduk desa tersebut sedangkan untuk Desa Enoneontes kekurangan produksi sebesar 75 persen dari total produksi (Pemda Kabupaten TTS, Kecamatan Amanuban Barat).

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ada tiga fokus perhatian dalam penelitian ini yaitu ketahanan pangan, kemiskinan dan kondisi demografi rumah tangga. Ketahanan pangan suatu masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk masuk pada pengukuran tingkat kemiskinan (Senauer dan Roe, 1997). Definisi ketahanan pangan (FAO, World Food Summit, 1996)² menunjukkan bahwa titik berat kondisi ketahanan pangan berada pada tingkat individu atau keluarga/rumah tangga. Penelitian tahun 2004 ini merupakan penelitian tahun kedua dari tiga tahun penelitian. Penelitian tahun pertama yang dilaksanakan pada tahun 2003 telah menghasilkan temuan-temuan tentang:

- Kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah di daerah penelitian. Berdasarkan indikator-indikator ketahanan pangan, dihasilkan indeks komposit ketahanan pangan rumah tangga dalam tiga (3) kategori, yaitu (1) rumah tangga tahan pangan; (2) rumah tangga kurang tahan pangan dan (3) rumah tangga tidak tahan pangan.
- Keterkaitan antara ketahanan pangan dengan kemiskinan di tingkat rumah tangga dan wilayah di daerah penelitian. Kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran untuk konsumsi pangan berdasarkan garis kemiskinan yang dikembangkan/ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik untuk provinsi terkait, berdasarkan hasil Susenas 2000. Komposit indeks ketahanan pangan dan kemiskinan memberikan 6 kategori rumah tangga yaitu (1) rumah tangga tidak miskin dan tahan pangan; (2) rumah tangga tidak miskin tetapi kurang tahan pangan; (3) rumah tangga tidak miskin tetapi tidak tahan pangan; (4) rumah tangga miskin tetapi tahan pangan; (5) rumah tangga miskin dan kurang tahan pangan serta (6) rumah tangga miskin dan tidak tahan pangan.
- Ciri-ciri rumah tangga menurut kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang keterkaitan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan kondisi demografi di tingkat rumah tangga. Penelitian tahun 2004 ini merupakan penelitian tahun kedua, yang khususnya bertujuan untuk:

1. Mengkaji dengan lebih mendalam kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan di tingkat keluarga di daerah penelitian.
2. Memahami keterkaitan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan di tingkat keluarga.

² Definisi Ketahanan Pangan menurut FAO (1996):

"Suatu kondisi dimana semua orang secara fisik dan ekonomi mampu dan mempunyai akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman dan sehat untuk memenuhi kebutuhan dan pilihannya, sehingga dapat hidup dengan aktif dan sehat".

3. Mengkaji keterkaitan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan variabel-variabel demografi dan kondisi demografi rumah tangga.

Data yang digunakan untuk analisis dalam laporan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer untuk mendapatkan pemahaman tentang ketiga kondisi di atas merupakan data empiris mengenai kondisi ketahanan pangan, kemiskinan dan kondisi demografi keluarga/individu. Informasi yang dikumpulkan dalam pengumpulan data primer ini mencakup informasi tentang kondisi ketahanan pangan keluarga, kemiskinan keluarga dan ciri-ciri demografi individu dan keluarga di daerah penelitian. Data yang dikumpulkan di tingkat keluarga ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan metode survei, menggunakan instrumen daftar pertanyaan/kuesioner. Untuk setiap desa penelitian, dipilih secara acak 200 keluarga/rumah tangga. Dengan demikian untuk seluruh daerah penelitian jumlah sampel keluarga sebanyak 800 keluarga. Tetapi karena beberapa kendala teknis, jumlah sampel keluarga di Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur hanya 391. Selain dari itu, untuk mendapatkan data mengenai besarnya jumlah energi dan protein yang dikonsumsi anggota rumah tangga (sebagai salah satu indikator ketahanan pangan) sebanyak 3 (tiga) rumah tangga dalam masing-masing kategori kombinasi ketahanan pangan dan kemiskinan (tahan pangan tidak miskin, tahan pangan miskin dstnya), yang terdiri dari 6 kategori, dipilih untuk pengamatan jumlah dan jenis bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Dengan demikian total jumlah rumah tangga terpilih sebanyak 18, untuk masing-masing desa penelitian. Rumah tangga ini dipilih secara purposif dari populasi sampel penelitian tahun 2003 (sebanyak 200 rumah tangga di setiap desa penelitian), dengan memperhatikan umur, jenis kelamin dan jenis pekerjaan kepala rumah tangga. Pengamatan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Data kualitatif dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dengan informan terpilih, yang terdiri dari individu-individu yang mewakili keluarga maupun informan kunci lainnya. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif adalah pedoman wawancara. Pendalaman secara kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan lebih mendalam dari hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel-variabel ketahanan pangan, kemiskinan dan demografi.

1.5. Tinjauan: Penduduk, Pangan dan Kemiskinan

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak manusia yang paling mendasar, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun

1948: “setiap orang berhak memperoleh pangan yang cukup”. Tetapi sampai saat ini masih banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sesuai standar minimum kehidupan yang layak, atau dengan kata lain berketahanan pangan rendah. Masalah ketahanan pangan yang rendah ini bukan merupakan fenomena baru, karena sudah muncul dengan berbagai sebab dan tingkat keparahan sepanjang sejarah hidup manusia. Thomas R Malthus, pada tahun 1798, misalnya, pada satu sisi, membahas masalah kebutuhan pangan dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk. Dalam buku yang berjudul “*An Essay on the Principle of Population*”, Malthus mengemukakan tesis utamanya bahwa kapasitas kemampuan manusia untuk meningkatkan produksi pangan dan barang-barang subsisten lainnya jauh lebih rendah dari kapasitas kemampuannya untuk reproduksi biologis (beranak pinak). Penduduk cenderung akan terus bertambah, mendesak keseimbangan pemenuhan kebutuhan pangan secara subsisten dan baru dapat dihentikan melalui suatu *checks*, antara lain berupa perang, kelaparan, wabah penyakit, kematian dini dan berbagai bentuk kesengsaraan lainnya. Malthus menyusun suatu formulasi dan menyimpulkan bahwa diseluruh dunia ini manusia akan bertambah menurut perhitungan deret ukur: 1,2,4,8,16, 32, 64, 128, 256, sedangkan produksi makanan hanya bertambah menurut perhitungan deret tambah: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan seterusnya, sehingga akan terjadi kesenjangan yang besar antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan. Malthus tidak pernah memperkirakan bahwa pembukaan lahan pertanian baru dan perkembangan teknologi akan dapat meningkatkan kemampuan manusia untuk memproduksi pangan. Selain dari itu, pengaturan kelahiran anak diantara pasangan usia subur akan membantu menurunkan tingkat fertilitas dan pertumbuhan penduduk secara umum (Boque, 1969; Malthus, 1970; 2004; United Nations, 1973).

Dalam masyarakat modern seharusnya masalah ketahanan pangan ini tidak muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketersediaan sumberdaya alam, dapat dimanfaatkan untuk mengeliminasi dengan biaya yang relatif tidak terlalu mahal (*eliminate it at moderate costs*). Seperti dikemukakan oleh Huxley (1956, dalam Huxley, 2004), setiap kenaikan jumlah penduduk yang besar di dunia selalu diiringi dengan suatu penemuan atau ciptaan besar di bidang pertanian yang dapat meningkatkan produksi pertanian (dalam hal ini pangan). Pembukaan lahan pertanian baru serta kemajuan teknologi pertanian selama abad ke-19 dan paruh abad ke-20 telah dapat meningkatkan produksi makanan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Tetapi keadaan ini tidak dapat diharapkan akan berlanjut terus karena tetap ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat dielakkan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan produksi pangan ini, sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan penduduk dunia selalu mengejar menyamai dan melampaui setiap peningkatan produksi makanan. Untuk mengatasi masalah

ini diperlukan suatu pemikiran, bagaimana mencari keseimbangan yang baru, antara lain melalui pengendalian pertumbuhan penduduk (Huxley, 1956 dalam Huxley 2004: 104-106).

Berdasarkan prediksi akan meningkatnya krisis pangan, sudah hampir setengah abad, perhatian terhadap tingginya angka pertumbuhan penduduk memicu diskusi pada pemikiran bagaimana membuat pertumbuhan penduduk dunia menjadi stabil. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1960, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Swedia serta Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations/UN*) meluncurkan dana internasional yang besar untuk program kependudukan yang difokuskan pada penurunan angka pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara berkembang, melalui pengendalian kelahiran. Pada tahun 1994, poling yang dilakukan oleh UN mendapatkan bahwa 91 persen dari negara-negara di dunia yang kurang memiliki kebijakan kependudukan nasional, menyatakan bahwa mereka akan memformulasikannya. Ini menunjukkan meningkatnya perhatian global terhadap masalah kependudukan, meskipun kebijakan tersebut belum tentu diterjemahkan dalam program implementasi. Sekarang ini, lebih dari separuh negara-negara berkembang dan kurang lebih 130 pemerintahan negara-negara di dunia memberi subsidi untuk pelayanan keluarga berencana (Ashford dan Noble, 1996: 2).

Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar melaksanakan program keluarga berencana dalam usaha untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduknya. Pada masa Pemerintahan Presiden Suharto, Indonesia menganut kebijakan kependudukan yang 'anti natalis', dimana program keluarga berencana (KB) menjadi prioritasnya. Target pemerintah adalah mencapai penurunan tingkat fertilitas (*Total Fertility Rate/TFR*) sampai 50 persen pada tahun 2000, dari angka fertilitas sebesar 5,6 pada tahun 1971. Pada tahun 1994, Indonesia sudah dapat mencapai TFR sebesar 2,8. Dampak dari penurunan TFR ini adalah turunnya angka pertumbuhan penduduk Indonesia dari 2,3 persen per tahun pada tahun 1961 menjadi 1,6 persen per tahun pada tahun 1995 (Kantor Meneg Kependudukan dan BKKBN, 1996; BKKBN, 1996). Tetapi, menurunnya angka pertumbuhan penduduk tidak dengan sendirinya mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia.

Penurunan jumlah penduduk atau angka pertumbuhan penduduk bukanlah merupakan sebuah tujuan akhir yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebuah alat untuk mengantarkan manusia mencapai sasaran hidup yang lebih umum, yaitu kepada kesejahteraan hidup, jauh dari kemiskinan. Kemiskinan sendiri dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti misalnya tingkat kematian yang tinggi (termasuk juga tingkat kematian bayi), tingkat

kesehatan yang rendah, kekurangan gizi, rendahnya pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, kondisi perumahan yang buruk, kurangnya akses terhadap sumber daya, tidak adanya jaminan akan hak-hak politik dan hukum serta berbagai kesengsaraan lainnya. Dengan kata lain, kemiskinan dapat disamakan dengan kualitas hidup yang rendah, dibawah kondisi yang secara normal dapat diterima (Soerjani, 2000). Dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan serta hidup yang berkualitas, usaha untuk mengatasi pertumbuhan penduduk tidak dapat berdiri sendiri tetapi juga diperlukan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pengendalian kualitas penduduk, seperti pemenuhan kebutuhan pangan serta pengentasan dari kemiskinan.

Sudah beberapa dekade ini, para ahli memperdebatkan apakah kemiskinan merupakan penyebab atau akibat dari pertumbuhan penduduk. Studi-studi yang sudah dilakukan saat-saat terakhir ini menunjukkan kompleksnya hubungan antara kedua isu tersebut. Di beberapa negara yang mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi dan struktur umur penduduk yang muda, pertumbuhan penduduk (tingkat fertilitas yang tinggi) dapat saja menghambat usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan kelompok miskin (Ashford dan Noble, 1996: 9). Secara makro, data demografi dan ekonomi jangka panjang di 45 negara berkembang menunjukkan bahwa tingginya tingkat fertilitas meningkatkan angka kemiskinan absolut melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penumpukan distribusi konsumsi pada kelompok penduduk tidak miskin (Eastwood dan Lipton, 2003). Sebaliknya, keluarga-keluarga miskin mungkin saja mempunyai banyak anak karena perempuan, yang menanggung beban terberat dalam melahirkan dan mengurus anak, tidak mempunyai peran dalam pengambilan keputusan untuk mengatur kehamilannya (Eastwood dan Lipton, 2003). Karena itu, meskipun arah hubungan sebab akibat ini masih banyak diperdebatkan, tetapi umumnya dapat diterima bahwa hubungan tersebut dapat terjadi timbal balik; dengan menurunkan tingkat fertilitas (pertumbuhan penduduk) akan membantu mengentaskan kemiskinan atau sebaliknya bahwa pengentasan kemiskinan akan berdampak pada penurunan fertilitas (pertumbuhan penduduk) (McNicoll, 1999). Hubungan ini juga ditegaskan dalam Rencana Tindak Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 (*The Programme of Actions of the 1994 International Conference on Population and Development*), dalam pembahasan tentang "Penduduk, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kemiskinan" yang menyatakan bahwa usaha untuk memperlambat pertumbuhan penduduk dan usaha untuk mengurangi kemiskinan saling menguatkan (United Nations, 1995). Dalam konferensi ini, juga disepakati bahwa peningkatan status perempuan dan kesehatan penduduk akan membawa perubahan ke arah yang positif terhadap kedua kondisi tersebut (kependudukan dan kemiskinan) (United Nations, 1995).

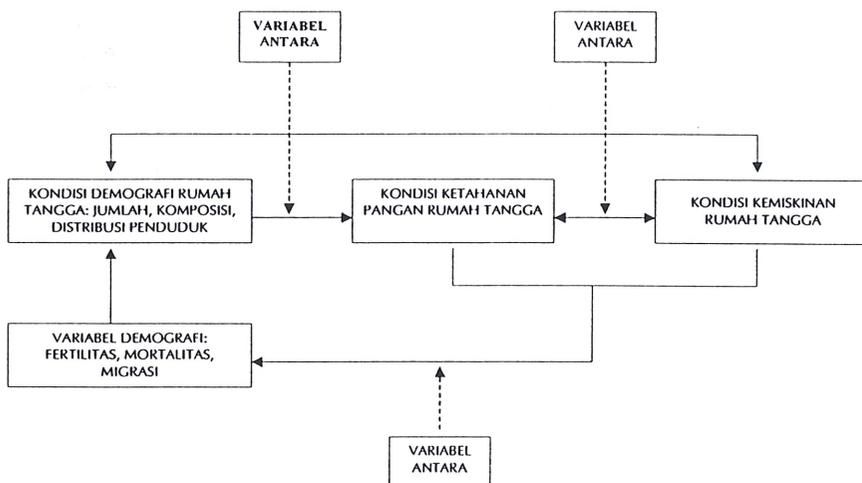
Kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangannya, yang menentukan kondisi ketahanan pangan, sangat dipengaruhi oleh kemiskinan, dalam arti yang lebih khusus, akses yang dimiliki penduduk. Karena itu, berbagai usaha dalam program-program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan memperluas akses penduduk terhadap berbagai kesempatan dan sumberdaya, diasosiasikan juga dengan usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tetapi temuan di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, yang menurut dugaan juga harusnya meningkatkan ketahanan pangan (menghapus bahaya kelaparan) pada kenyataannya tidak berdampak sama untuk kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Pada kelompok penduduk rentan seperti petani yang tidak memiliki lahan dan petani kecil, petani bagi hasil, penduduk daerah *slum* di perkotaan serta perempuan dan anak-anak, kebijakan ini bahkan membuat keadaan bertambah buruk karena umumnya kondisi ketahanan pangan yang dicapai sebagai dampak perbaikan kondisi ekonomi tersebut lebih difokuskan pada keberlanjutan ketersediaan pangan di tingkat nasional dalam jangka panjang dan kurang memperhatikan kelompok-kelompok sosial berbeda yang ada dalam suatu negara (RAWOO, 1986).

Meskipun pada tingkat nasional bahan makanan cukup tersedia, tetapi dapat saja terjadi dimana banyak ditemukan kondisi rawan pangan karena kurangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber produksi seperti tanah, air, input pertanian, modal, infrastruktur, kelembagaan dan teknologi yang merupakan indikator kondisi kemiskinan. Meningkatkan ketahanan pangan secara nasional karenanya harus diiringi (termasuk didalamnya) usaha-usaha untuk membantu kelompok miskin meningkatkan akses terhadap sumber produksi tersebut yang dapat meningkatkan daya beli mereka atau sering disebut dengan '*food entitlement*'. Kondisi ketahanan pangan di suatu negara karenanya juga harus di analisis (*asses*) dengan melihat akses di tingkat individu dan rumah tangga. Dengan demikian, kondisi ketahanan pangan yang dicapai di tingkat makro (nasional) bukan merupakan kondisi yang 'semu' tetapi mempunyai dampak yang merata pada setiap kelompok sosial di masyarakat.

Keterkaitan yang erat antara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan sehat sesuai dengan standar kebutuhan manusia, dengan kondisi kemiskinan, menimbulkan pertanyaan tidak saja berkaitan dengan kuantitas makanan yang dikonsumsi tetapi juga terhadap kualitasnya, dalam arti nilai nutrisi (gizi). Masalah utama yang muncul dari tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi adalah kekurangan gizi yang berdampak terhadap kondisi kesehatan dan angka kematian penduduk secara umum. Untuk perempuan, masalah lebih penting yang dihadapi

berhubungan dengan kondisi kesehatan reproduksi dan fertilitas. Masalah-masalah ini lebih jauh akan berdampak terhadap kemampuan individu atau kelompok untuk bekerja, yang memungkinkan mereka untuk keluar dari masalah kemiskinan dan kekurangan pangan. Secara umum, kedua kondisi ini (kemiskinan dan rawan pangan) juga berhubungan dengan perubahan kondisi demografi penduduk secara makro, yang mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk, melalui perubahan variabel-variabel demografi yang terpengaruh yaitu fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan migrasi sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara kondisi demografi penduduk, kebutuhan pangan dan kondisi kemiskinan mempunyai hubungan timbal balik yang kompleks. Hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh variabel-variabel antara yang dapat mempengaruhi masing-masing kondisi tersebut secara sendiri-sendiri maupun secara bersama. Skema 1.2. di bawah ini secara garis besar menunjukkan hubungan yang dapat terjadi antara ketiga kondisi tersebut.

Skema 1.2. Arah keterkaitan antara kondisi demografi, kondisi ketahanan pangan dan kondisi kemiskinan rumah tangga





2.1. Pendahuluan

Konsep ketahanan pangan yang telah diterima secara luas di tingkat internasional adalah 'suatu situasi dimana semua rumah tangga pada setiap saat memiliki akses (baik fisik maupun ekonomi) untuk memperoleh pangan yang cukup, aman dan sehat bagi seluruh anggota rumah tangganya' (FAO, 1996). Memperhatikan pengertian tersebut, titik berat kondisi ketahanan pangan ada di tingkat rumah tangga, meskipun pembahasan ketahanan pangan tidak terlepas dari konteks sasaran yang lebih luas, yaitu masyarakat, wilayah dan nasional. Indonesia mengadopsi definisi tersebut dan dalam Undang-undang RI No 7 tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau". Maxwell (1996) mengemukakan empat komponen dalam ketahanan pangan, yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas (3) keamanan, dan (4) keberlanjutan. Ketersediaan pangan dimaksudkan bahwa secara rata-rata, pangan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi di tingkat nasional, wilayah dan rumah tangga. Aksesibilitas yang merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan mengandung arti bahwa setiap rumah tangga mampu memenuhi kecukupan pangan keluarga sesuai dengan kebutuhan gizi sehat. Keamanan mengacu pada kualitas pangan yang memenuhi kebutuhan gizi, sedang keberlanjutan dimaksudkan bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pada periode yang terbatas, tetapi juga untuk waktu dan generasi mendatang. Empat komponen ketahanan pangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain.

Anderson, 1996 (dikutip dari Tabor dkk, 2000:62) menyatakan bahwa ketahanan pangan terjamin sepanjang waktu jika ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan terjaga terus menerus, sehingga tidak terjadi kerawanan pangan. Kondisi rawan pangan mempunyai dimensi transitori (*transitory food insecurity*) dan dimensi kronis (*chronic food insecurity*). Rawan pangan transitori terjadi jika konsumsi pangan individu berada di bawah tingkat kebutuhan minimum karena terjadinya (adanya) fluktuasi suplai pangan dalam jangka pendek (antar atau dalam satu musim) atau fluktuasi permintaan (pendapatan untuk membeli bahan pangan). Kondisi rawan pangan kronis terjadi jika individu secara kronis kekurangan sumberdaya/ akses (pendapatan) untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan minimum (Rawoo, 1986: 6-7). Karena itu, untuk meningkatkan ketahanan

pangan dari tingkat rumah tangga sampai di tingkat nasional perlu diperhatikan kedua kondisi di atas.

Seperti halnya konsep ketahanan pangan, konsep kemiskinan juga bervariasi tergantung pada fokus studi dan pendekatan yang dipakai. Meskipun terdapat berbagai konsep kemiskinan, ukuran kemiskinan yang telah diterima secara luas didasarkan pada tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok/dasar minimum. Kemiskinan menurut World Bank (1990) diukur dengan cara membandingkan tingkat pendapatan penduduk/rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Merujuk pada pengertian ini, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup dasar, sedangkan kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang sesuai dengan yang diperlukan (Quibria, 1991). Standar hidup yang merupakan salah satu konsep dasar yang dipakai dalam menentukan garis kemiskinan adalah suatu konsep yang multidimensi, mencakup kebutuhan bahan makanan dan bukan makanan (kesehatan; pendidikan, perumahan, transportasi, bahan bakar dan barang-barang atau jasa pokok lainnya). Oleh karena itu, kemiskinan merupakan suatu fenomena yang multidimensi, mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial dan psikologi. UNDP (1997) juga telah menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya melibatkan persoalan kesejahteraan materi belaka, tetapi juga mencakup faktor perluasan akses dan kesempatan (sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup dasar, antara lain pangan, pendidikan dan kesehatan).

Jika dilihat dari pendekatan yang dipakai, konsep kemiskinan dapat dilihat dari pendekatan obyektif dan subyektif. Dalam pendekatan obyektif, ukuran kemiskinan (diterjemahkan dalam tingkat kesejahteraan) ditentukan berdasarkan pada nilai-nilai normatif yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, konsep kemiskinan dengan pendekatan subyektif mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendasarkan pada persepsi/penilaian individu atau rumah tangga terhadap taraf dan kondisi kehidupan mereka sendiri. Baik pendekatan obyektif dan subyektif memerlukan suatu pembatas dalam menentukan apakah seseorang atau rumah tangga masuk ke dalam kelompok miskin atau tidak miskin, yang dikenal dengan garis kemiskinan. Terdapat banyak ukuran untuk memperkirakan tentang garis kemiskinan, tetapi perkiraan garis kemiskinan yang mudah dipahami adalah dengan menggunakan pendekatan kebutuhan minimum, kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok (Sumodiningrat, 1999). Walaupun konsep ini bukan merupakan ukuran terbaik karena hanya bisa menggambarkan ukuran kemiskinan kasar, penggunaan pengukuran dengan pendekatan kebutuhan

pokok minimum bermanfaat untuk menggambarkan tingkat kehidupan masyarakat dan mulai dikenal luas sejak tahun 1970-an.

Dalam konteks ketahanan pangan dan kemiskinan, Bourignon (1999, dikutip dari Rothschild, 2001:3) menyatakan bahwa kemiskinan fisik terkait dengan kelangsungan hidup, yang dapat diartikan sebagai kapasitas individu atau rumah tangga untuk membeli pangan dan semua kebutuhan pokok dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dasar. Merujuk pada pengertian ini, meskipun kondisi ketahanan pangan pada tingkat nasional dalam keadaan baik, kondisi ini tidak selalu menjamin bahwa semua individu atau rumah tangga memiliki akses untuk memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhan. Sebagian penduduk atau rumah tangga di daerah pedesaan tidak mempunyai ketahanan pangan yang baik karena tidak bisa memproduksi pangan sesuai dengan kebutuhannya, sementara kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan pangan juga rendah. Rendahnya kemampuan daya beli terhadap kebutuhan pangan juga dihadapi oleh sebagian penduduk kota. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengukur ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, terutama ketika terjadi ketimpangan kondisi sosial ekonomi antar rumah tangga.

Tulisan pada bagian ini bertujuan untuk menguraikan konsep dan ukuran ketahanan pangan dan kemiskinan pada tingkat nasional (Indonesia), kabupaten dan desa (masyarakat dan rumah tangga). Kritisi terhadap konsep dan ukuran kemiskinan yang dipakai pada berbagai tingkatan tersebut juga dikemukakan dalam tulisan ini.

2.2. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan pada Tingkat Nasional

Konsep ketahanan pangan yang digunakan secara internasional belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa ketahanan pangan menurut definisi internasional mencakup komponen-komponen ketersediaan, aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan. Dari empat komponen ketahanan pangan, komponen keberlanjutan belum dimasukkan dalam konsep ketahanan pangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan disebutkan bahwa definisi ketahanan pangan adalah 'kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutunya), aman, merata dan terjangkau'. Konsep ketahanan pangan ini tidak berubah hingga tahun 2002, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Memperhatikan definisi ini, maka konsep ketahanan pangan di Indonesia melibatkan tiga komponen: yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas dan (3) kualitas dan keamanan. Ketersediaan pangan adalah

tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Aksesibilitas mencakup akses fisik dan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan, sedang kualitas dan kemananan merujuk pada pangan yang bermutu dan aman bagi kesehatan. Tetapi, Timmer (dikutip dari Tabor, 2000) berpendapat bahwa selama tiga dasawarsa yang lalu, ketahanan pangan pada tingkat nasional secara praktis didefinisikan pada ketersediaan beras dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau. Beras bukan hanya sebagai makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia, tetapi juga masih menjadi porsi terbesar dari pengeluaran rumah tangga, khususnya di kalangan rumah tangga miskin (Surono, 2001:3). Terkait dengan ini, maka swasembada beras digunakan sebagai alat utama untuk memberikan jaminan bahwa beras tersedia dalam jumlah cukup dan harga terjangkau, bahkan oleh penduduk miskin.

Ketahanan pangan yang hanya berfokus pada ketersediaan beras merupakan pengertian yang sempit karena tidak memasukkan kebutuhan-kebutuhan bahan makanan lain yang paling esensial, seperti lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu yang diperlukan sebagai sumber protein, lemak, energi dan bahan gizi lainnya, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Dengan demikian konsep ketahanan pangan di tingkat nasional masih berfokus pada ketersediaan dan aksesibilitas, dan belum banyak menyentuh pada kualitas yang memenuhi kebutuhan gizi yang termasuk dalam komponen keamanan pangan. Walaupun dalam UU no 7/1996 dan PP no 68/2002 secara eksplisit disebutkan setiap rumah tangga memiliki akses memperoleh pangan yang bermutu dan aman, tetapi komponen keamanan belum mendapatkan perhatian yang sama besar dengan komponen ketersediaan dan aksesibilitas. Demikian pula dengan komponen keberlanjutan juga belum diperhatikan. Hal ini terlihat dari kembalinya Indonesia dari negara yang sudah mencapai swasembada beras menjadi negara pengimpor beras yang terjadi sejak akhir tahun 1980-an dengan jumlah yang semakin meningkat dan mencapai puncak pada tahun 1998 (Simatupang dkk, 1999). Dalam periode 1986-1990, Indonesia mengimpor beras sebanyak 105,6 ribu ton, meningkat menjadi 944,6 ribu ton (1991-1995) dan melonjak menjadi 2.426,7 ton pada periode 1996-1998. Perbedaan konsep ketahanan pangan semacam ini diperkirakan juga terjadi dalam tingkatan yang lebih mikro (wilayah, masyarakat dan rumah tangga).

Lebih lanjut, ketahanan pangan merupakan hak asasi manusia, sehingga pemerintah harus menjamin agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kemampuan dan akses untuk memenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator kemiskinan. Dengan menjamin kebutuhan dan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin terhadap pangan, berarti juga mengurangi insiden kemiskinan. Tetapi kemiskinan mengandung pengertian yang lebih luas

daripada ketahanan pangan. Kemiskinan bukan hanya melibatkan komponen pangan/makanan, tetapi juga komponen bukan pangan/makanan (meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, pakaian dan barang tahan lama yang esensial).

Konsep kemiskinan yang dipakai pada tingkat nasional merujuk pada konsep kemiskinan makro yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Konsep ini menggunakan pendekatan obyektif, yaitu merujuk pada data pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk menentukan garis kemiskinan yang selanjutnya dipakai sebagai acuan untuk menghitung penduduk miskin. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran yang diperlukan oleh individu untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2.100 kalori/kapita/hari, ditambah dengan kebutuhan bukan makanan yang paling esensial (Irawan et al, 2000:245). Standar kebutuhan minimum makanan ini merujuk pada rekomendasi dari Widya Karya Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 1978 yang diyakini telah dapat memenuhi kriteria hidup sehat dan layak. Untuk standar minimum konsumsi bukan makanan belum bisa ditentukan secara pasti karena adanya dinamika pola konsumsi golongan terbawah dengan tingkat kesejahteraan di bawah standar hidup yang mencukupi secara normatif, sehingga selalu direvisi setiap tiga tahun sekali (Irawan dan Romdiati, 2000:196). Dengan demikian, garis kemiskinan juga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga-harga komoditi dasar, sehingga berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Konsep kemiskinan BPS ini memberikan ukuran kemiskinan absolut, atau *head count index*. Garis kemiskinan untuk makanan menurut perhitungan BPS yang didasarkan pada data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2002 adalah Rp 93.351,-/kapita/bulan untuk daerah perkotaan dan Rp73.030,-/kapita/bulan untuk daerah perdesaan. Angka ini diperoleh dari perhitungan data konsumsi dan pengeluaran dari 15 macam komoditas makanan. Garis kemiskinan bukan makanan adalah berturut-turut Rp 37.148,- dan Rp 23.482,- untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Konsep dan ukuran kemiskinan BPS pada tingkat makro cenderung bersifat agregat dan didasarkan asumsi-asumsi tertentu, sehingga sulit diterapkan untuk tujuan operasional dalam menentukan jumlah dan kelompok sasaran pada wilayah administrasi terendah. Penentuan kelompok sasaran (penduduk/rumah tangga/keluarga miskin) sangat penting bagi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Merespon persoalan ini, Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) mengembangkan konsep kemiskinan dengan menggunakan keluarga sebagai unit analisis. Penentuan keluarga miskin atau bukan miskin didasarkan pada kriteria tahapan keluarga

sejahtera yang diukur dengan menggunakan indikator ekonomi dan bukan ekonomi. Terdapat 22 indikator yang digunakan yang secara garis besar terbagi dalam aspek pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi diantara anggota rumah tangga, transportasi, tabungan, informasi dan peran sosial (lihat Lampiran 2.1). Dengan mendasarkan pada indikator-indikator ini, BKKBN mengklasifikasikan keluarga menjadi 5 kategori, yaitu keluarga pra-sejahtera (pra-KS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III) dan keluarga sejahtera III+ (KS III+). Termasuk keluarga miskin adalah keluarga pra-KS dan KS I. Ukuran kemiskinan BKKBN ini dikenal dengan data mikro karena bukan hanya memberikan ukuran kemiskinan pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat keluarga. Namun, ukuran kemiskinan BKKBN memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait dengan definisi kebutuhan psikologis dan sosial serta metodologi pengumpulan data (Raharto dan Romdiati, 2000:271).

Data kemiskinan makro BPS maupun data mikro BKKBN dihasilkan dari ukuran dengan menggunakan pendekatan obyektif yang dikembangkan berdasarkan nilai normatif yang tidak memperhatikan perbedaan kondisi antar daerah/wilayah dan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Untuk dapat memberikan pemahaman tentang kemiskinan dalam kaitannya dengan kondisi masyarakat di wilayah tertentu perlu dikembangkan konsep dan ukuran kemiskinan berdasarkan pendekatan subyektif. Walaupun pendekatan ini hanya sesuai untuk diterapkan pada studi mikro yang umumnya menggunakan ukuran kualitatif, data dan informasi yang diperoleh dapat memberikan pemahaman tentang masalah/fenomena kemiskinan di daerah-daerah yang memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda.

2.3. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan pada Tingkat Masyarakat dan Rumah Tangga

Konsep kemiskinan dan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga sangat terkait erat. Walaupun kemiskinan merupakan suatu konsep yang lebih luas dari ketahanan pangan, tetapi suatu rumah tangga sering dianggap miskin karena kurang tahan pangan (Rothcschild, 2001). Pangan merupakan komoditas penting dan strategis karena merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang utama. Karenanya, suatu rumah tangga dianggap memiliki ketahanan pangan baik jika rumah tangga tersebut mempunyai ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang layak, dan aman dikonsumsi, atau mempunyai kemampuan ekonomi untuk membeli kebutuhan pangannya dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kunci dari karakteristik ketahanan pangan dalam suatu rumah tangga adalah *secure access at all times to sufficient food* (terjaminnya

akses pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang waktu) Dengan demikian ketahanan pangan rumah tangga selalu terkait dengan tiga aspek, yaitu (1) kecukupan pangan dalam arti dapat memenuhi kalori yang dibutuhkan untuk hidup yang sehat, (2) akses terhadap pangan sepanjang waktu dan (3) keamanan yang mengandung arti aman untuk pemenuhan kebutuhan makanan yang cukup sepanjang waktu. Beberapa aspek yang tercakup dalam ketahanan pangan rumah tangga adalah produksi dan konsumsi serta distribusi dan harga, walaupun terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tersebut tidak sepenuhnya dikenal oleh masyarakat. Berikut diuraikan konsep ketahanan pangan dan kemiskinan di empat (4) desa penelitian di dua provinsi yang sangat berbeda dalam hal ketahanan pangan, yaitu di Provinsi Lampung yang merupakan daerah dengan kondisi ketahanan pangan baik dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kondisi ketahanan pangan kurang baik (relatif terhadap Lampung).

Kasus Provinsi Lampung

Konsep pangan dan kemiskinan menurut masyarakat Desa Catur Karya Buana Jaya dan Ngesti Rahayu di Provinsi Lampung tidak terlepas dari kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga di dua desa penelitian diukur dari kemampuan suatu rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat bertahan lebih lama beberapa rumah tangga (terutama di Desa Catur Karya Buana Jaya) mengkombinasikan konsumsi beras dan ubi kayu. Satu rumah tangga umumnya dianggap tahan pangan apabila dapat mencukupi kebutuhan akan konsumsi berasnya. Namun, dengan mengkombinasikan beras dengan ubi kayu satu rumah tangga dianggap pula telah dapat mencukupi kebutuhan akan pangannya (tahan pangan) selama jumlah kombinasi pangan yang dikonsumsi memenuhi standar kebutuhan, yang dilihat dari berapa kali anggota rumah tangga dapat makan dalam sehari. Dengan demikian, kecukupan pangan dan ketahanan pangan dalam suatu rumah tangga juga ditentukan dari kemampuan rumah tangga untuk menyediakan pangan tetapi tidak selalu tergantung pada komoditi beras sebagai makanan pokok yang paling utama. Untuk memenuhi kebutuhan akan pangan tersebut sebagian masyarakat mendapatkannya dari produksi sendiri, karena mayoritas rumah tangga di desa-desa penelitian adalah petani. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk membeli jika produksi tidak mencukupi.

Produksi pangan sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam menunjukkan bahwa, musim ditengarai merupakan salah satu faktor penting yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keadaan suatu masyarakat, dianggap miskin atau tidak

miskin. Musim kemarau diibaratkan sebagai masa yang dapat membuat kehidupan suatu rumah tangga mengalami keadaan yang serba kekurangan atau paling tidak kehidupan rumah tangga hanya "pas-pasan". Keadaan musim yang dianggap kurang menguntungkan ini dikaitkan dengan kemampuan suatu rumah tangga untuk tetap dapat mempertahankan hidup dengan indikasi masih tetap bisa makan dengan wajar, misalnya diungkapkan oleh salah seorang informan berikut ini.

Sebagai pedoman ya kalau 6 bulan kemarau masih bisa makan (dapat dianggap tidak miskin), tapi yang lain 3 bulan kemarau sudah kelabakan, masalah makan nggak masalah bagi saya karena orang itu walaupun padinya banyak ada yang pake tiwul, tapi yang jelas kemarau 6 bulan dia masih lancar (dengan mengkombinasikan makan nasi dan tiwul)

Iklim mempengaruhi produksi pertanian yang berakibat pada terganggunya keamanan pangan dalam suatu rumah tangga. Musim kemarau yang panjang berpengaruh terhadap produksi pertanian mereka terutama padi. Karena makanan pokok mayoritas rumah tangga di desa-desa penelitian adalah beras, rawan ketahanan pangan sangat dirasakan ketika masa paceklik (musim kemarau) atau bahkan di musim hujan areal sawah terkena bencana banjir. Saat demikian, rumah tangga petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sehingga sebagian dari mereka terpaksa mengkonsumsi pangan selain beras³. Beras merupakan prioritas utama kebutuhan makanan pokok dalam keluarga. Kalau persediaan pangan dianggap cukup, berarti bahwa persediaan beras untuk keluarga dapat tercukupi. Tetapi jika persediaan beras yang ada kurang mencukupi maka beras akan dicampur dengan ubi kayu, sehingga masa ketersediaan bahan pangan dapat diperpanjang. Persediaan pangan beras dalam satu rumah tangga dapat diukur dari jumlah yang dapat disediakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dalam waktu tertentu. Untuk kebutuhan beras selama satu (1) tahun, dalam satu rumah tangga (rata-rata) harus tersedia beras sebanyak 1 sampai 4 kwintal, tergantung dari banyaknya anggota rumah tangga. Dengan tersedianya kebutuhan pangan tersebut maka rumah tangga tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan akan pangan. Selain makanan pokok beras sebagian rumah tangga mengaku mengkonsumsi ubi kayu sebagai makanan pokok. Menurut masyarakat kebutuhan ubi kayu untuk satu rumah tangga selama satu tahun diperkirakan setara dengan tanaman ubi kayu seluas 0,25 ha.

³ Pada umumnya petani di daerah penelitian ini menanam padi hanya satu kali dalam satu tahun selebihnya mereka menanam palawija. Setiap 2 tahun sekali mereka dapat menanam padi selama 2 kali dalam satu tahun, karena keterbatasan air untuk mengairi sawah.

Dalam konteks kemiskinan, pandangan masyarakat tentang kemiskinan berbeda antara suatu kelompok dengan lainnya. Ini disebabkan cara pandang atau cara penilaian yang berbeda, karena beberapa indikator dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu keluarga dapat dikategorikan miskin atau tidak. Indikator kemiskinan yang umumnya digunakan dalam suatu masyarakat antara lain adalah dapat terpenuhinya kebutuhan dasar atau kebutuhan akan pangan yang dapat diukur dari produksi pangan yang dihasilkan keluarga, frekuensi makan, dan daya beli yang diukur dari pendapatan keluarga serta harga pangan setempat. Indikator lainnya adalah keadaan rumah, pemilikan lahan dan ternak, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan. Tetapi konsep kemiskinan yang banyak dipahami masyarakat di daerah penelitian di Provinsi Lampung umumnya didasarkan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, khususnya beras, yang diukur dari ketersediaan bahan pangan tersebut (dari produksi), kemampuan untuk membeli kebutuhan pangan tersebut ataupun pemilikan lahan yang dapat menghasilkan produksi pangan tersebut. Semua kondisi ini dibandingkan dengan suatu kondisi standar yang biasanya berlaku dalam kelompok masyarakat. Rumah tangga yang dianggap berkecukupan atau tidak miskin adalah yang memiliki persediaan makanan pokok untuk kebutuhan selama 6 bulan.

Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara tradisional konsep ketahanan pangan pada dasarnya tidak dikenal oleh masyarakat di dua desa penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai kekurangan pangan, penduduk di daerah penelitian lebih cenderung mengacu kepada konsep umum, yaitu kekurangan bahan makanan pokok. Dilihat dari jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, dapat dikatakan bahwa jagung adalah makanan pokok utama masyarakat di daerah penelitian. Hal ini juga dapat disimpulkan dari kata-kata yang sering diungkapkan masyarakat setempat seperti "kalau belum makan jagung, belum kenyang" atau "kalau tidak makan jagung, cepat lapar". Selain jagung, masyarakat juga biasa makan makanan lainnya sebagai pengganti jagung seperti ubi kayu dan pisang yang juga banyak ditanam di ladang maupun lahan pekarangan. Tetapi meskipun ubi kayu dan pisang biasa dikonsumsi, kedua makanan ini hanya dianggap sebagai makanan pokok ketika kekurangan jagung atau sebagai makanan selingan. Selain jenis makanan tersebut, pada beberapa tahun belakangan ini, terutama dengan masuknya program beras miskin (raskin), penduduk di daerah penelitian juga mulai terbiasa mengkonsumsi beras sebagai pengganti jagung.

Secara umum, kondisi kekurangan pangan sangat berhubungan dengan ketersediaan makanan pokok utama. Sebuah rumah tangga dianggap

mengalami kekurangan pangan bila tidak lagi mampu makan jagung setiap hari. Seperti diungkapkan oleh seorang narasumber:

“Makanan pokok disini jagung dan ubi kayu, tapi istilah di sini masyarakat dikatakan kekurangan pangan bila dia semata-mata konsumsi setiap hari ubi saja, hanya sesekali baru makan jagung”

Sebagaimana umumnya masyarakat di daerah pedesaan, masyarakat di desa-desa penelitian juga belum mempunyai kesadaran yang cukup tentang kualitas pangan dan kebutuhan gizi yang seimbang. Gizi lebih diartikan sebagai “makan kenyang”. Pola makan yang sudah dilakukan sejak turun temurun dianggap sudah memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu hasil ternak lebih banyak digunakan untuk dijual atau untuk konsumsi pada saat pesta, baik pesta adat maupun pesta keagamaan.

Pada umumnya masyarakat makan dua kali sehari, yaitu pada tengah hari, pada waktu bekerja di kebun dan malam hari setelah selesai kerja kebun. Menurut narasumber di Desa Enoneontes, mereka makan pagi hanya bila bepergian keluar desa, untuk penahan lapar di jalan. Makan pagi biasanya berupa ubi kayu yang direbus, dimakan dengan kelapa atau pisang rebus. Untuk makan siang dan malam hari biasanya ubi kayu atau jagung yang direbus dengan sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Beras biasanya hanya dikonsumsi orang dewasa sesekali bila ada persediaan. Umumnya beras lebih diutamakan untuk konsumsi anak balita karena lebih mudah diolah menjadi makanan lunak.

Bagi masyarakat di desa-desa penelitian, untuk menentukan kriteria keluarga yang dianggap miskin dan berkecukupan bukanlah hal yang mudah. Secara konseptual, umumnya masyarakat menganggap rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu kemiskinan umumnya hanya dihubungkan dengan hasil kebun dan pemilikan ternak. Seorang responden mengatakan “keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai hasil kebun dan ternak”. Pada masa sekarang hewan yang banyak dternakkan adalah sapi dan babi. Masyarakat menganggap ternak sebagai simpanan untuk memenuhi kebutuhan hidup lain seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan masyarakat lainnya. Pemilikan lahan pekarangan maupun pertanian kurang dianggap sebagai indikator kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya semua rumah tangga memiliki lahan yang cukup luas, namun tidak semua rumah tangga dapat mengolahnya dengan baik. Kurangnya pemanfaatan lahan ini selain disebabkan karena faktor topografi yang kurang menguntungkan, juga karena tingkat pengetahuan yang dimiliki dan teknologi pengolahan yang dilakukan petani pada umumnya masih sangat sederhana.

Mengacu pada konsep kemiskinan masyarakat setempat tersebut, menurut kepala Desa Enoneontes, di desanya ada sekitar 35-40 persen rumah tangga yang dapat dikatakan rumah tangga miskin. Sedangkan di Desa Naukae, menurut kepala desanya, tidak ada keluarga miskin, jika dilihat dari kecukupan pangan. Ini dibuktikan dengan adanya kesadaran penduduk untuk membayar pajak setiap tahun yang disisihkan dari hasil panen mereka.

Kriteria yang digunakan masyarakat lokal untuk menentukan keluarga miskin berbeda dengan kriteria yang digunakan oleh pemerintah daerah yang mengacu pada kriteria BKKBN. Menurut Camat Amanuban Barat, semua desa di daerahnya mendapat bantuan raskin, termasuk Desa Enoneontes dan Naukae. Tetapi, menurut kepala desa dan masyarakat setempat, karena mereka kurang memahami kriteria keluarga miskin yang dibuat pemerintah, maka disepakati bantuan raskin dibagikan kepada semua penduduk secara merata. Hanya beberapa rumah tangga yang dianggap betul-betul tidak mampu yang mendapat beras secara utuh yaitu 20 kg/bulan.

2.4. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan: Ukuran-Ukuran yang Digunakan dalam Analisis

FAO (1997) telah menetapkan empat komponen ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas/keterjangkauan, keamanan dan keberlanjutan. Kecuali komponen keberlanjutan, semua komponen telah diperhatikan dalam aspek ketahanan pangan di Indonesia. Untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dalam studi ini digunakan 3 (tiga) indikator utama yaitu ketersediaan, keberlanjutan dan keamanan pangan. Ketiga indikator ini merupakan indikator utama untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. Indikator aksesibilitas/keterjangkauan tidak dimasukkan dalam penghitungan/pengukuran indeks ketahanan pangan karena indikator-indikator ketersediaan dan keberlanjutan sebenarnya juga sudah menggambarkan ada/tidaknya akses rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Selain dari itu, variabel-variabel yang menentukan aksesibilitas/keterjangkauan ini juga sangat banyak dan bervariasi antar rumah tangga, seperti asal/cara mendapatkan bahan pangan (membeli atau produksi sendiri); dari mana mendapatkan (jika membeli), pasar, warung dan sebagainya, dimana (jarak) yang harus ditempuh untuk mendapatkan, dengan cara bagaimana mendapatkan (beli tunai, berhutang dan sebagainya), dan transportasi untuk mendapatkan. Karenanya, ukuran ketahanan pangan dalam analisis di sini mencakup tiga indikator yaitu ketersediaan, keberlanjutan dan keamanan pangan. Ketiga komponen tersebut dipakai untuk analisis ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan tiga komponen ketahanan pangan tersebut, untuk mendapatkan satu indeks ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai dalam analisis ini mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok di perdesaan (seperti daerah penelitian) biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya (Suharjo dkk, 1985:45). Perbedaan jenis makanan pokok yang dikonsumsi antara dua provinsi sebagai daerah penelitian membawa implikasi pada penggunaan ukuran yang berbeda, seperti berikut ini.

- (a) Di daerah penelitian dimana penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok (Provinsi Lampung) digunakan referensi waktu 120 hari sebagai batas untuk menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki persediaan makanan pokok cukup/tidak cukup. Alasan yang mendasari penentuan periode waktu tersebut adalah jarak antar panen padi, selama 120 hari. Dengan demikian suatu rumah tangga yang memiliki persediaan beras untuk kebutuhan keluarga selama 120 hari, dikategorikan sebagai rumah tangga dengan ketersediaan pangan cukup. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak memiliki persediaan beras untuk kebutuhan hingga 120 hari, diklasifikasikan sebagai rumah tangga dengan ketersediaan pangan kurang cukup. Rumah tangga yang tidak memiliki persediaan beras, dikategorikan sebagai rumah tangga dengan persediaan pangan tidak cukup.
- (b) Di daerah penelitian dengan jenis makanan pokok jagung (Provinsi Nusa Tenggara Timur) digunakan batas waktu selama 360 hari sebagai ukuran untuk menentukan apakah rumah tangga mempunyai ketersediaan pangan cukup/tidak cukup. Ini didasarkan pada masa panen jagung di daerah penelitian yang hanya dapat dipanen satu kali dalam tahun.

Disadari bahwa ukuran ketersediaan pangan yang mengacu pada jarak waktu antara satu musim panen dengan musim panen berikutnya hanya berlaku pada rumah tangga dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok. Dengan kata lain, ukuran ketersediaan makanan pokok tersebut memiliki kelemahan jika diterapkan pada rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan dari sektor non pertanian.

Keberlanjutan

Indikator keberlanjutan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari frekuensi makan. Dengan asumsi bahwa di daerah

penelitian masyarakat mempunyai kebiasaan makan 3 (tiga) kali sehari, frekuensi makan sebenarnya dapat menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga. Seperti sudah disinggung sebelumnya, dalam satu rumah tangga, salah satu cara untuk mempertahankan ketersediaan pangan dalam jangka waktu tertentu adalah dengan mengurangi frekuensi makan atau mengkombinasikan bahan makanan pokok (misal beras dengan ubi kayu). Penelitian yang dilakukan PPK-LIPI di beberapa daerah di Jawa Barat juga menemukan bahwa mengurangi frekuensi makan merupakan salah satu strategi rumah tangga untuk memperpanjang ketahanan pangan mereka (Raharto, 1999; Romdiati, 1999). Lebih lanjut, kombinasi antara ketersediaan makanan pokok dengan frekuensi makan (3 kali per hari disebut cukup makan, 2 kali disebut kurang makan, dan 1 kali disebut sangat kurang makan) sebagai indikator kecukupan pangan, menghasilkan indikator stabilitas ketersediaan pangan yang dapat dilihat pada matrik 2.1a dan matrik 2.1b.

Matrik 2.1a: Stabilitas ketersediaan pangan (beras sebagai makanan pokok)

Jangka waktu persediaan makanan pokok beras	Frekuensi makan		
	≥3 kali	2 kali	1 kali
≥ 120 hari	Stabil	Kurang stabil	Tidak stabil
1-119 hari	Kurang stabil	Tidak stabil	Tidak stabil
Tidak ada persediaan	Tidak stabil	Tidak stabil	Tidak stabil

Matrik 2.1.b: Stabilitas ketersediaan pangan (jagung sebagai makanan pokok)

Jangka waktu persediaan makanan pokok jagung	Frekuensi makan		
	≥3 kali	2 kali	1 kali
≥ 360 hari	Stabil	Kurang stabil	Tidak stabil
1-359 hari	Kurang stabil	Tidak stabil	Tidak stabil
Tidak ada persediaan	Tidak stabil	Tidak stabil	Tidak stabil

Penggunaan frekuensi makan sebanyak 3 kali atau lebih sebagai indikator kecukupan makan didasarkan pada kondisi nyata di desa-desa penelitian, dimana rumah tangga yang memiliki persediaan makanan pokok 'cukup' pada umumnya makan sebanyak 3 kali per hari. Jika mayoritas rumah tangga di Desa Enoneontes hanya makan dua kali per hari, kondisi ini dapat juga

merupakan suatu strategi rumah tangga agar persediaan jagung tidak segera habis. Dengan frekuensi makan tiga kali sehari, kebanyakan rumah tangga tidak bisa bertahan untuk tetap memiliki persediaan makanan pokok hingga panen berikutnya.

Keamanan pangan

Keamanan dapat dilihat dari kualitas pangan yang memenuhi kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan seperti ini sangat sulit dilakukan karena melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda. Penelitian ini tidak difokuskan pada pengukuran kandungan gizi makanan yang dikonsumsi dalam rumah tangga sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari 'ada' atau 'tidak'nya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati. Berdasarkan kriteria ini rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
2. Rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau protein nabati saja.
3. Rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk protein (baik hewani maupun nabati)

Ukuran kualitas pangan dalam tulisan ini tidak mempertimbangkan jenis makanan pokok. Alasan yang mendasari adalah karena kandungan kalori dan karbohidrat antara beras, jagung dan ubi kayu/tiwul sebagai makanan pokok di desa-desa penelitian tidak berbeda secara signifikan (Lihat uraian dalam Bab III).

Aksesibilitas terhadap pangan

Meskipun aksesibilitas tidak dimasukkan sebagai indikator dasar pengukuran ketahanan pangan, tetapi dapat diukur dari beberapa variabel. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, aksesibilitas dalam ketahanan pangan dapat diartikan akses ekonomi maupun non-ekonomi. Akses ekonomi mengacu pada kemampuan ekonomi rumah tangga untuk memperoleh pangan, misalnya dengan cara membeli atau memproduksi sendiri. Akses non ekonomi mengacu pada kondisi fisik/geografis yang terkait dengan kemudahan rumah

tangga perolehan pangan, misalnya seperti kondisi sarana/prasarana transportasi untuk mendapatkan bahan pangan (jika rumah tangga harus membeli). Selain dari itu, akses juga dapat dilihat dari kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan gizi sehat. Dengan demikian, indikator aksesibilitas terhadap pangan dapat dilihat dari:

1. cara rumah tangga untuk mendapatkan makanan pokok yang terbagi dalam kategori membeli, memproduksi sendiri dan meminjam.
2. tempat mendapatkan makanan pokok yang secara garis besar terbagi dalam dua kategori, yaitu di dalam desa dan di luar desa.

Ketahanan pangan

Indikator ketahanan pangan dihitung dengan cara mengkombinasikan tiga indikator ketahanan pangan (ketersediaan pangan, keberlanjutan frekuensi makan dan keamanan pangan: konsumsi protein hewani dan/atau nabati). Kombinasi antara ketersediaan pangan dan frekuensi makan memberikan indikator stabilitas ketersediaan pangan. Selanjutnya kombinasi antara stabilitas ketersediaan pangan dengan keamanan/kualitas pangan, yang dilihat dari konsumsi protein hewani dan nabati memberikan indeks ketahanan pangan seperti terlihat pada matrik 2.2. berikut.

Matrik 2.2: Indeks ketahanan pangan

Stabilitas pangan	Konsumsi protein		
	Hewani dan nabati (baik)	Hewani atau nabati (kurang baik)	Tidak hewani, tidak nabati (tidak baik)
Stabil	Tahan	Kurang tahan	Tidak tahan
Kurang stabil	Kurang tahan	Tidak tahan	Tidak tahan
Tidak stabil	Tidak tahan	Tidak tahan	Tidak tahan

Berdasarkan matrik tersebut, maka rumah tangga di desa-desa penelitian dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki persediaan pangan/makanan pokok stabil (diukur dari persediaan makan selama jangka masa satu panen dengan panen berikutnya dengan frekuensi makan 3 kali atau lebih per hari) dan memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati

2. Rumah tangga kurang tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki:
 - persediaan pangan/makanan pokok stabil, tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein hewani atau nabati saja
 - persediaan pangan/makanan pokok kurang stabil dan mempunyai pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
3. Rumah tangga tidak tahan pangan adalah rumah tangga yang dicirikan oleh:
 - persediaan pangan stabil, tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati
 - persediaan pangan kurang stabil dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau nabati, atau tidak untuk kedua-duanya.
 - persediaan makanan tidak stabil, walaupun memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
 - persediaan makanan tidak stabil dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau nabati, atau tidak untuk kedua-duanya.

Kemiskinan

Konsep kemiskinan mengacu pada kemiskinan yang dipakai oleh BPS. Penentuan garis kemiskinan makanan berdasarkan data pengeluaran konsumsi dari Susenas sudah memadai dan diterima secara luas oleh banyak pihak, yaitu mendasarkan pada batas konsumsi kebutuhan makanan pokok yang setara dengan nilai 2.100 kalori energi yang direkomendasikan untuk seseorang bisa hidup sehat dan layak. Garis kemiskinan makanan dapat mengindikasikan kemiskinan yang amat parah, sebagai perwujudan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, yaitu makanan (Irawan dkk, 2000:52).

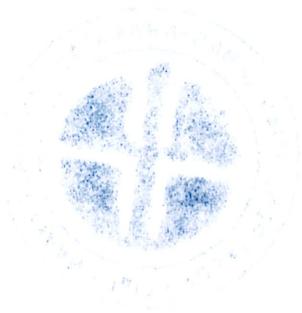
Dengan mendasarkan garis kemiskinan untuk makanan, rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran makanan lebih rendah dari batas garis kemiskinan di masing-masing daerah penelitian. Untuk Provinsi Lampung, garis kemiskinan makanan di daerah perdesaan adalah Rp 67.776,- per kapita per bulan, sedang untuk perdesaan Nusa Tenggara Timur adalah Rp 62.437,- per kapita per bulan (perhitungan berdasarkan data SUSENAS 2002 , BPS).

Disamping mendasarkan pada konsep pengeluaran konsumsi makanan dari BPS, penelitian ini juga mengukur kemiskinan dari pemilikan lahan pertanian dan pemilikan ternak. Dari sisi pemilikan lahan pertanian dipergunakan luas lahan sawah, luas ladang dan kombinasi keduanya. Dari hasil penelitian

Desa Sriharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Singarimbun dan Penny (1984:96) menyimpulkan bahwa rumah tangga dengan anggota rumah tangga sebanyak 5 (lima) orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mengolah lahan sawah seluas 0,7 ha dan lahan kering seluas 0,3. Lebih lanjut, dengan mendasarkan kesetaraan luas lahan 1 Ha lahan sawah dengan 2 Ha lahan kering dan pada produksi lahan pertanian, maka kombinasi lahan pertanian sawah dan lahan kering tersebut identik dengan luas sawah 0,85 ha dengan catatan sawah tersebut bisa memproduksi dua kali padi dan satu kali palawija per tahun, atau 1,7 ha lahan kering, karena lahan kering hanya bisa ditanami satu kali padi dan dua kali palawija. Mendasarkan pada konversi ini, ukuran kemiskinan lahan yang dipakai dalam studi ini adalah bahwa rumah tangga yang memiliki sawah $<0,7$ ha dan ladang $<0,3$ ha, atau sawah $<0,85$ ha, atau ladang $<1,7$ ha diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin.

Penggunaan variabel pemilikan ternak untuk indikator kemiskinan didasarkan pada referensi bahwa ternak memiliki manfaat cukup besar dalam membantu mengatasi kesulitan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hasil penelitian di empat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende dan Sumba Barat) menemukan bahwa penduduk yang digolongkan sebagai penduduk miskin adalah petani dengan pemilikan ternak sedikit (Sayogyo, 1994:128). Kemiskinan ternak dalam studi ini mengacu pada pemilikan ternak besar (sapi, kerbau). Rumah tangga yang tidak memiliki ternak diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin, sedang rumah tangga yang memiliki ternak minimal satu ekor, diklasifikasikan sebagai rumah tangga tidak miskin.





KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA

Pangan merupakan kebutuhan paling dasar manusia yang harus dipenuhi untuk melanjutkan kehidupannya. Tetapi, di beberapa bagian negara di dunia masih terjadi kelaparan dimana sebagian penduduknya tidak dapat makan cukup agar dapat hidup sehat. Kepedulian terhadap masalah kekurangan pangan mulai muncul ketika dunia menghadapi krisis pangan pada awal tahun 1970-an yang kemudian memunculkan konsep mengenai ketahanan pangan pada konferensi FAO tahun 1974. Pada tahun 1996 FAO mengeluarkan konsep ketahanan pangan baru yang ditengarai ke dalam 4 indikator yaitu kecukupan dan stabilitas ketersediaan pangan, akses keterjangkauan terhadap pangan, kualitas serta keamanan pangan serta keberlanjutan ketersediaan (FAO, 1996). Suatu rumah tangga atau individu dikatakan tahan pangan apabila mempunyai persediaan pangan yang cukup dan stabil tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, mempunyai akses yang baik terhadap pangan serta mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan aman. Konsep ketahanan pangan ini banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam memantau tingkat ketahanan pangan di negaranya.

Undang - Undang Pangan No 7 tahun 1996 menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuat pemetaan kondisi ketahanan pangan untuk mengetahui derajat ketahanan pangan di tingkat wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten) di seluruh Indonesia. Indikator yang digunakan pada pemetaan tersebut mengacu pada ketahanan pangan di tingkat wilayah sehingga lebih terfokus pada penyediaan pangan di tingkat wilayah. Tetapi kondisi ketahanan pangan di tingkat wilayah ini tidak dapat menunjukkan kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Saliem dkk (2002) di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa ketahanan pangan di tingkat wilayah tidak menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta individu karena di dalam wilayah yang tahan pangan masih dapat dijumpai rumah tangga yang tidak tahan pangan. Oleh karena itu penelitian mengenai ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga diperlukan. Tulisan ini akan mengukur tingkat ketahanan pangan rumah tangga di dua wilayah yang diteliti, yang mempunyai tingkat ketahanan pangan wilayah berbeda yaitu Provinsi

Lampung mewakili provinsi tahan pangan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk provinsi kurang tahan pangan.

Analisa ketahanan pangan rumah tangga dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menentukan tingkat ketahanan pangan rumah tangga dengan membuat indeks ketahanan pangan berdasarkan tiga indikator ketahanan pangan yang diturunkan dari konsep ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 1996 (lihat Bab II). Pendekatan kualitatif dilakukan untuk memperdalam analisa terhadap derajat ketahanan pangan rumah tangga yang diperoleh dari studi kuantitatif.

3.1. Kecukupan dan Stabilitas Ketersediaan Pangan

Kecukupan dan stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga menurut FAO 1996 adalah suatu kondisi dimana setiap rumah tangga mempunyai ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup secara terus menerus tanpa ketidakpastian sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh seluruh anggota keluarga. Konsep ini mengandung arti bahwa rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang mempunyai persediaan pangan yang cukup dan kontinyu sepanjang waktu dan dapat memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. Dalam penelitian ini konsep kecukupan dan stabilitas ketersediaan pangan tersebut diterjemahkan ke dalam dua variabel yaitu (1) untuk berapa lama persediaan pangan pokok yang dimiliki rumah tangga dan (2) frekuensi makan anggota rumah tangga. Variabel lama persediaan pangan rumah tangga akan digunakan sebagai *proxy* untuk menentukan tingkat kecukupan ketersediaan pangan rumah tangga, sedangkan variabel frekuensi makan digabungkan variabel ketersediaan sebagai *proxy* untuk menentukan tingkat kestabilan ketersediaan pangan.

3.1.1. Persediaan Pangan

Persediaan pangan pokok yang dimiliki oleh suatu rumah tangga dipengaruhi oleh cara rumah tangga memperoleh pangan pokok tersebut. Rumah tangga di perdesaan terutama di daerah pertanian pada umumnya memenuhi kebutuhan pangan pokok secara subsisten. Oleh karena itu penentuan tingkat kecukupan ketersediaan pangan di daerah perdesaan dilakukan dengan mempertimbangkan lamanya atau jarak waktu antara satu musim tanam pangan pokok tersebut dengan musim tanam berikutnya (Suharjo dkk, 1986:143). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa suatu rumah tangga di perdesaan mempunyai persediaan pangan yang dianggap cukup apabila mempunyai persediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi rumah tangga selama jangka waktu dari satu musim tanam sampai dengan musim tanam berikutnya tanpa terputus.

Dasar penentuan tingkat ketersediaan pangan sangat terkait dengan jenis pangan pokok yang dikonsumsi. Karena itu penentuan tingkat ketersediaan pangan rumah tangga dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis makanan pokok mayoritas rumah tangga di masing-masing lokasi penelitian. Jika mengacu pada hasil survei (Tabel 3.1), diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di kedua desa penelitian di Lampung yaitu Desa Catur Karya Buana Jaya (Cakar Buaya) dan Desa Ngesti Rahayu mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehingga lama persediaan pangan pokok rumah tangga di kedua desa ini berpedoman pada lama jarak waktu antara musim tanam padi. Sementara itu mayoritas rumah tangga di kedua desa penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Desa Naukae dan Desa Enoneontes mengkonsumsi jagung sehingga penentuan tingkat ketersediaan pangan untuk provinsi ini didasarkan pada waktu tanam jagung.

Tabel 3. 1. Distribusi rumah tangga menurut jenis makanan pokok (persen)

Jenis Makanan pokok	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Beras	79.0	100.0	89.5	0.0	0.0	0.0	45.3
Jagung	0.0	0.0	0.0	100.0	98.4	99.2	49.1
Ubi kayu	21.0	0.0	10.5	0.0	1.6	0.8	5.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	200	200	400	201	190	391	791

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Diversifikasi Pangan Pokok

Lampung : Makan tiwul

Hasil survei di atas juga menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga di Desa Cakar Buaya mengkonsumsi ubi kayu (biasanya dibuat menjadi tiwul) sebagai makanan pokok. Selain mengkonsumsi tiwul, dalam studi kualitatif ditemui bahwa ada pula rumah tangga di desa ini yang mengkonsumsi campuran tiwul dan beras. Tiwul atau nasi tiwul dapat dikonsumsi langsung

sebagai pangan pokok seperti nasi beras atau dicampur dengan parutan kelapa sebagai kudapan.

Wawancara mendalam di Desa Cakar Buaya menunjukkan bahwa rumah tangga mengkonsumsi campuran beras dengan tiwul sebagai *copying strategy* untuk memperpanjang umur persediaan beras dalam rumah tangga mereka. Pada umumnya rumah tangga mengkonsumsi beras saja pada saat panen padi, yaitu sekitar 2-3 bulan, dan 10 bulan selebihnya mengkonsumsi campuran beras dengan tiwul. Pada tahun 2004 ini, hasil panen menurun karena saat memasuki musim tanam padi terjadi banjir, terutama untuk daerah yang berada di pinggir sungai. Dengan demikian, petani yang biasanya mendapat panen 5 kwintal gabah, tahun ini panennya menurun bahkan ada yang tidak dapat panen sama sekali, sehingga harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhannya. Umumnya penduduk membeli beras 5-10 kg/bulan, tergantung uang tunai yang dimiliki (biasanya sehabis panen karet) dan bila jatah beras miskin (raskin) sudah habis (setiap rumah tangga miskin mendapat jatah membeli raskin 12,5 kg/bulan dengan harga Rp. 15.000,-)⁴.

Di Desa Cakar Buaya, dapat dikatakan faktor kemampuan ekonomi rumah tangga lebih berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan pokok sehingga proporsi rumah tangga yang (terpaksa) mengkonsumsi ubi kayu/tiwul sebagai makanan pokok cukup besar (Tabel 3.1). Salah satu penyebab keterbatasan persediaan beras rumah tangga adalah faktor kesuburan tanah yang akan dibahas dengan lebih rinci pada bagian selanjutnya.

Mencampur beras dengan tiwul biasa dilakukan sebagian rumah tangga agar beras bisa dihemat sampai musim panen berikutnya dan ini juga merupakan salah satu strategi agar mereka senantiasa dapat makan sehari tiga kali. Perbandingan campuran beras dengan tiwul bervariasi, kadangkala dengan perbandingan "parosan" (sama banyak), 3 cangking beras dicampur dengan 3 cangking tiwul atau lebih banyak tiwul daripada berasnya, yaitu 3 berbanding 1 (3 untuk tiwul dan 1 untuk beras). Bagi yang belum terbiasa mengkonsumsi tiwul, sehabis mengkonsumsi makanan tersebut dikatakan terasa panas di dalam perut, tetapi karena tidak ada pilihan, penduduk terpaksa mengkonsumsinya. Kutipan wawancara mendalam dengan salah seorang petani di Desa Cakar Buaya berikut ini dapat memperjelas kondisi tersebut

⁴ Mengenai jumlah beras raskin yang diterima penduduk bermacam-macam, ada yang menyebutkan sebulan membeli 10 kg dengan harga Rp.10.500,-.

Kotak 1: Beras sebagai campuran

Tanya (T): Mungkin saya mau sedikit tahu nih, kalau ibu sendiri dengan keluarga ini sebetulnya makanan pokoknya apa sih bu?"

Jawab (J): Makanan pokoknya itu singkong, bahan dari singkong dibikin tiwul, gitu pak.

T: Hmm.....Jadi peran utamanya singkong bu, ya, dibikin tiwul?

J: Iya dibikin tiwul.

T: Selain dibikin tiwul, biasanya dibikin apa lagi, bu?

J: Iya kalau sempat, tenaganya itu ya kadang bikin kerupuk.

T: Itu buat makan juga?

J: Buat makan.

T: Jadi yang utama, makanan yang utama itu ya tiwul itu?

J: Makanan pokok itu ya tiwul itu.

T: Kalau beras gimana bu?

J: Yah beras itu hanya untuk campuran. Yah... kalau ada itu paling banyak 1/2 kg. Kalau nggak ya.....secanting gitu.

T: Kalau berasnya, 1/2 kg tiwulnya berapa itu, bu?

J: Tiwulnya itu kadang ya 3/4 kg ...ya... 3 canting gitu, kadang 1 kg".

T: Jadi 1 banding 3 gitu bu, ya?

J: Ya.

Sumber: Kutipan wawancara mendalam dengan keluarga petani yang kepala keluarganya perempuan, Desa Cakar Buaya.

Pada umumnya kebutuhan singkong rumah tangga di desa ini dapat dipenuhi dengan mudah karena sebagian besar rumah tangga mempunyai kebun singkong. Kebun singkong ini juga berfungsi sebagai "lumbung hidup" atau tempat penyimpanan. Pada umumnya rumah tangga yang mengkonsumsi singkong dari kebun sendiri tidak memanen singkong sekaligus. Singkong hanya dicabut dari kebun pada saat dibutuhkan, jika tidak, dibiarkan tetap hidup di kebun. Sementara itu bagi rumah tangga yang tidak mempunyai kebun singkong, singkong mudah dibeli (ada penjual keliling) dan harganya relatif murah (1 kg singkong Rp 150,-). Mereka juga bisa minta pada tetangganya yang memiliki kebun singkong. Dari sisi perhitungan ekonomi, mengkonsumsi tiwul memang lebih hemat karena tiwul memberikan rasa kenyang yang relatif lama, sedangkan harganya lebih murah. Tetapi proses pembuatan/pengolahan tiwul/oyek cukup rumit dibandingkan pengolahan padi. Pada umumnya penduduk membuat tiwul sebanyak 3 kg (sekali olah) untuk persediaan selama 3 hari.

Ada pula rumah tangga yang mengkonsumsi tiwul lebih karena faktor kebiasaan, bukan karena keterpaksaan akibat kesulitan ekonomi. Seperti yang dipaparkan oleh salah seorang informan pada rumah tangga yang tergolong tahan pangan dan tidak miskin, kadangkala tiwul juga dikonsumsi sebagai makanan kudapan. Umumnya tiwul dimakan dengan kelapa muda dan gula jawa atau dengan ikan asin dan sambel terasi. Tiwul atau oyek sudah biasa dikonsumsi penduduk, sejak kedatangan mereka di desa tersebut. Bahkan, sebelum pindah ke Lampung, di daerah asalnya (kebanyakan dari Wonogiri, Jawa Tengah) mereka juga mengkonsumsi tiwul. Tiwul atau oyek bahan dasarnya adalah singkong, perbedaannya hanya dalam cara mengolahnya saja.

.....Kalau disini makan tiwul sudah umum, apalagi kalau orang Solo itu walaupun sawahnya luas makannya tetap makan tiwul sebab kalau makan nasi putih saja kondisinya tidak kuat.

(Kutipan wawancara dengan seorang kepala rumah tangga petani di Desa Ngesti Rahayu).

T: Apa ibu pernah mengalami jenis makanan beras diganti dengan makanan lain?

J: Pernah diganti dengan tiwul tapi itu hanya pada saat kepingin saja dan dimakan dengan campurannya ikan dan sambal.

T: Bukan karena tidak mampu membeli beras?

J: Tidak.

(Kutipan wawancara dengan keluarga seorang supir, Desa Ngesti Rahayu).

Karena sudah terbiasa mengkonsumsi tiwul, penduduk sudah merasa cukup (kenyang) tanpa harus mengkonsumsi beras. Bahkan, apabila hanya makan nasi saja tanpa dicampur tiwul dirasakan "tidak marem" karena tidak mengenyangkan. Bila dicampur tiwul dikatakan rasanya lebih "mantap". Namun ada juga yang mempunyai anggapan bahwa makan tiwul itu 'tidak pantas' terutama bagi orang kota (*....orang kok makan tiwul gitu, kan nasi aja udah ada, ya kalau orang sini udah umum pak, tapi kalau ada tamu diketawain itu makanan apaan...*). Tiwul juga dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara anggota rumah tangga perihal mengkonsumsi pangan pokok. Bahkan seorang anak usia 1,5 tahun sudah dibiasakan untuk mengkonsumsi tiwul (sebelum mencapai usia tersebut biasanya mereka diberi nasi).

Di Desa Ngesti Rahayu, makanan pokok penduduk adalah beras (tanpa dicampur dengan tiwul). Desa ini relatif lebih subur dibandingkan dengan Desa Cakar Buaya. Dalam setahun petani di desa ini dapat panen padi 1 atau 2 kali diselingi dengan panen tanaman palawija. Pola makan tidak berbeda jauh dengan di Cakar Buaya, umumnya sehari makan tiga kali dengan makanan pokok nasi. Ada pendapat umum di Desa Ngesti Rahayu bahwa bila belum makan nasi dianggap belum makan ('marem'). Ada juga beberapa rumah tangga yang kadang-kadang mengganti nasi dengan mie instan untuk sarapan pagi (selain itu mie juga digunakan sebagai lauk-pauk). Pada saat paceklik, masih ada juga beberapa rumah tangga di Desa Ngesti Rahayu yang terpaksa mencampur beras dengan tiwul. Umumnya memasuki bulan 9, 10, 11 dan 12 (musim tanam), beras sudah harus dicampur dengan tiwul karena persediaan sudah menipis. Menurut beberapa narasumber, apabila persediaan padi/gabah tinggal 50 kg, harus sudah mulai mengirit konsumsi beras. Umumnya agar beras 'awet' persediaannya, dalam seminggu ada 2-3 kali menu campuran nasi tiwul sebagai selingan. Dengan cara demikian beras lebih dihemat penggunaannya. Beras untuk kebutuhan konsumsi dua hari bisa untuk makan empat hari. Selain itu, porsi makan juga dikurangi, tidak sebanyak saat persediaan beras masih banyak (namun frekuensi makan diusahakan tetap 3 kali sehari).

Simpanan gabah atau padi yang dimiliki penduduk bukan hanya sebagai persediaan makanan pokok, tetapi juga sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual ketika harga jual sedang tinggi. Hasil penjualan gabah digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya, termasuk untuk keperluan sekolah anak. Menurut penuturan seorang narasumber, menyimpan gabah lebih menguntungkan daripada uang, karena uang tidak akan bertambah nilainya bila hanya di simpan di rumah (kecuali di bank), sebaliknya gabah harganya setiap hari berubah-ubah dan dapat meningkat dari Rp.1.000,-/ kg menjadi Rp1.100,-/ kg. Terutama pada masa paceklik, harga jual gabah bisa menjadi berlipat-lipat dari harga biasanya.

Baik di Desa Ngesti Rahayu maupun Cakar Buaya, di samping mengkonsumsi makanan pokok, sebagian besar rumah tangga juga terbiasa mengkonsumsi makanan selingan (biasa disebut "krowotan"), seperti pisang goreng, ubi, talas atau singkong rebus. Makanan ini biasanya dimakan diantara waktu makan pagi dan makan siang (sekitar pukul 9 pagi). Pangan untuk krowotan tersebut juga merupakan hasil kebun, bukan jenis makanan yang dibeli. Meskipun hanya sebagai makanan selingan, tapi mengkonsumsi pangan tersebut juga mengenyangkan dan untuk sebagian penduduk hal tersebut

diperlukan karena mereka harus bekerja keras setiap harinya sehingga membutuhkan banyak asupan makanan (karbohidrat) sebagai sumber energi.

Nusa Tenggara Timur: Makan ubi dan pisang

Di kedua desa Penelitian di Nusa Tenggara Timur (NTT), selain mengonsumsi jagung bose (jagung yang sudah diolah) sebagai makanan pokoknya, rumah tangga di desa Naukae dan Enoneontes, juga biasa mengonsumsi jenis pangan umbi-umbian (seperti singkong, ubi jalar) dan pisang (seringnya jenis pisang rote) sebagai makanan tambahan. Umumnya mereka makan jagung hanya dua kali dalam sehari, siang dan malam, sedangkan makan paginya berupa umbi-umbian atau pisang. Penduduk makan jagung tiga kali sehari hanya pada waktu setelah panen, dimana persediaan jagung masih cukup banyak. Pola makan seperti ini ditemukan baik di Desa Naukae maupun Enoneontes meskipun kondisi ketahanan pangan di Desa Naukae relatif lebih baik dibandingkan di Enoneontes.

Pada saat penelitian ini berlangsung (tahun 2004), hasil panen di kedua desa tersebut dapat dikatakan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena cuaca yang buruk dan curah hujan yang kurang. Dalam kondisi demikian, sebagian besar rumah tangga harus mengonsumsi beragam jenis pangan agar mereka tetap dapat bertahan (tidak kelaparan). Beras juga dikonsumsi oleh sebagian rumah tangga di kedua desa tersebut, namun hanya sebagai tambahan saja, bukan sebagai bahan pangan pokok (biasanya dicampur dengan jagung). Kebiasaan mengonsumsi beras ini sudah berlangsung sejak lama dan semakin sering sejak turunnya bantuan beras murah atau beras miskin (raskin) dari pemerintah⁵. Selain dari raskin, warga di kedua desa tersebut juga mendapat bantuan beras dari sebuah Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dari Amerika yang sudah dua kali menurunkan bantuan beras berikutan minyak goreng dan lain-lainnya. Bantuan ini diberikan sehubungan dengan program dari LSM tersebut yang berupa bimbingan dan bantuan pada penduduk untuk bertanam sayuran.

Adanya bantuan pangan berupa beras yang diterima penduduk membawa dampak terhadap adanya kecenderungan peralihan pola makan dari jagung ke beras. Kecenderungan ini mulai dirasakan terutama sejak beras dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) mulai didistribusikan, di samping faktor ketersediaan beras di pasaran yang cukup banyak dan mudah untuk didapatkan. Pada beberapa rumah tangga, bahkan sebagian anak-anaknya tidak mau lagi

⁵ Mekanisme untuk mendapatkan raskin, warga harus terlebih dulu menyetorkan uang sebesar Rp.20.000,- untuk 15 Kg beras kepada aparat di desa dan apabila sudah terkumpul seluruh dana pembelian raskin dari warga, baru kemudian dibelikan beras raskin. Raskin belum akan dibelikan apabila belum terkumpul seluruh uang pembelian tersebut. Mekanisme pembelian dengan cara demikian dianggap dapat mempererat tali persaudaraan di antara sesama warga (ada tenggang rasa).

mengonsumsi jagung selama di rumahnya masih ada persediaan beras. Dengan demikian beras senantiasa disediakan di rumah walaupun hanya sedikit saja. Apabila umumnya anak balita diberikan jagung titi (jagung yang dibuat tepung dan lebih lembut sehingga menyerupai bubur), saat ini sudah banyak rumah tangga yang menggantikannya dengan beras, karena pengolahannya lebih mudah.

Bantuan beras miskin (raskin, dulu sebutannya beras OPK), seperti yang dikemukakan beberapa narasumber, di satu sisi sangat membantu warga yang membutuhkannya, namun di sisi lain justru membuat tingkat ketergantungan pada beras menjadi tinggi. Di beberapa perayaan pernikahan maupun kematian yang biasa diselenggarakan penduduk, beras sudah mulai menggeser jagung. Di kalangan orang-orang muda, ada anggapan bahwa mengonsumsi jagung kurang 'bergengsi'⁶. Akibatnya kebutuhan akan beras menjadi lebih besar dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan dari lahan persawahan yang ada. Dengan kemampuan ekonomi terbatas, masyarakat tidak akan mampu menjamin ketersediaan beras yang kontinyu untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selain dari itu, untuk memenuhi kebutuhan beras, juga harus mendatangkan dari daerah lain. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat (di tingkat kecamatan) untuk mengurangi ketergantungan akan beras adalah dengan mengadakan pencanangan adat untuk kembali kepada makanan lokal, yaitu jagung, seperti dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat di Desa Naukae sebagai berikut:

..... keputusan adat Camat sendiri yang mencanangkan ini, kalau pesta tidak boleh beli beras dari toko itu, harus kembali kepada makanan lokal. Mari kita sama-sama makan jagung supaya jangan dibiasakan makan beras, kalau orang lain ya silahkan...

(Kutipan wawancara dengan seorang Tokoh Masyarakat Desa Naukae).

Meskipun pada tahun 2004 dapat dikatakan terjadi gagal panen jagung, tidak ditemukan kasus kelaparan atau rumah tangga yang hanya makan sekali dalam sehari, baik di Enoneontes maupun Naukae. Hal ini disebabkan karena sebagian besar rumah tangga memiliki kebun selain kebun jagung, yang hasilnya dapat dikonsumsi seperti ubi, singkong dan pisang. Memiliki kebun jagung maupun

⁶ Menurut informasi yang disampaikan oleh seorang Tokoh Masyarakat bahwa ada kecenderungan dari orang-orang muda sekarang untuk meninggalkan pertanian. Ada perubahan aspirasi di kalangan muda bahwa menjadi pegawai kantor dianggap lebih cerah masa depannya dibandingkan menjadi petani. Sehingga lahan pertanian banyak ditinggalkan karena orang-orang mudanya pergi ke kota, sementara yang tinggal di desa kebanyakan hanya para orang-orang tua saja yang sudah tidak begitu mampu mengolah lahan secara intensif.

umbi-umbi lainnya diwajibkan secara adat di NTT sebagai salah satu strategi mempertahankan ketahanan pangan. Makanan selingan juga dikenal di sebagian rumah tangga di kedua desa penelitian di NTT. Umumnya mereka mengkonsumsi kue pisang atau pisang rebus sebagai makanan selingan.

Seperti sudah diuraikan sebelumnya dalam penentuan lama persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga disesuaikan dengan jenis makanan pokok mayoritas di masing-masing lokasi penelitian dan jarak waktu antara satu musim tanam dengan satu musim tanam jenis makanan pokok tersebut. Tingkat persediaan pangan rumah tangga dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok rumah tangga yang mempunyai ketersediaan pangan cukup, kurang cukup dan tidak cukup (lihat Bab II).

Hasil pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat ketersediaan pangan dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sebagian besar (52 persen) rumah tangga di Desa Ngesti Rahayu tergolong mempunyai persediaan pangan cukup, 27,5 persen kurang cukup dan sisanya tidak cukup. Sementara itu persentase rumah tangga yang tergolong cukup mempunyai persediaan pangan di Desa Cakar Buaya hanya 4 persen, dan sebagian besar (sekitar 70 persen) tergolong mempunyai persediaan pangan kurang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan beras sebagai dasar penentuan tingkat persediaan pangan di kedua desa yang menjadi daerah penelitian di Lampung, tingkat ketersediaan pangan dalam rumah tangga di Desa Ngesti Rahayu lebih baik dari pada di Desa Cakar Buaya.

Di NTT, sebagian besar (66,8 persen) rumah tangga di Desa Naukae termasuk rumah tangga yang mempunyai ketersediaan pangan cukup, 32.1 persen kurang cukup dan hanya 1.1 persen yang tergolong mempunyai persediaan pangan tidak cukup. Sedangkan di Enoneontes hanya 0.5 persen rumah tangga yang tergolong mempunyai persediaan pangan cukup dan sisanya (99.5 persen) tergolong rumah tangga kurang cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga di Naukae mempunyai persediaan pangan (jagung) lebih baik dibandingkan rumah tangga di Enoneontes. Hasil ini juga sesuai dengan data Provinsi yang menunjukkan bahwa Desa Enoneontes termasuk desa kurang tahan pangan sementara Desa Naukae tergolong desa tahan pangan.

Tabel 3.2. Distribusi rumah tangga menurut tingkat ketersediaan pangan (persen)

Tingkat ketersediaan pangan	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Cukup	4.0	52.0	28.0	0.5	66.8	32.7	30.3
Kurang cukup	70.0	27.5	48.8	99.5	32.1	66.8	57.6
Tidak cukup	26.0	20.5	23.3	0.0	1.1	0.5	12.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	200	200	400	201	190	391	791

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Hasil survei diatas menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pangan pada rumah tangga di empat desa penelitian berbeda-beda. Perbedaan tingkat ketersediaan pangan dapat disebabkan oleh berbagai hal Chung (1997, dalam Setiawan, 2004) menemukan bahwa ketersediaan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan sumberdaya seperti faktor alam (*natural*), faktor yang bersifat sosial (*physical*) dan faktor manusia. Termasuk dalam faktor alam antara lain luas atau ketersediaan lahan dan kualitas lahan yang sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanah serta kondisi pengairan. Faktor yang bersifat sosial antara lain pola penguasaan lahan dan kelembagaan sosial. Selain itu ketersediaan pangan juga dipengaruhi oleh faktor produksi baik *on farm* maupun *off-farm*. Faktor-faktor tersebut akan digunakan untuk menjelaskan kondisi ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.

Faktor Alam

Tanah kurang subur

Kualitas lahan, ketersediaan lahan serta iklim merupakan faktor alam yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Jika kualitas lahan kurang baik atau tidak subur akan menyebabkan produksi pangan yang dihasilkan kurang optimal atau bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Jika lahan berkualitas baik, kaya unsur hara, cukup pengairan serta didukung oleh iklim yang baik maka hasil yang diperoleh akan melimpah (Suhardjo dkk, 1986). Faktor-faktor alam yang telah disebutkan di atas juga mempengaruhi persediaan pangan rumah tangga di lokasi penelitian.

Di Desa Cakar Buaya, kondisi tanah yang kurang subur dan berkadar humus rendah menyebabkan sangat sedikit rumah tangga yang memproduksi pangan pokoknya sendiri karena kondisi tanah tersebut tidak cocok untuk ditanami padi. Hal ini juga terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa kira-kira 75 persen rumah tangga yang menjadi sampel memperoleh pangan

pokok (beras) dengan cara membeli. Sebagian besar rumah tangga menanam lahan mereka dengan singkong dan karet karena kedua tanaman tersebut yang paling cocok untuk tumbuh pada lahan yang mereka miliki. Kebutuhan uang tunai juga mereka peroleh dari penjualan hasil tanaman tersebut namun penghasilan yang mereka peroleh tidak cukup untuk membeli kebutuhan beras dalam jangka 120 hari sehingga sebagian besar rumah tangga di desa ini termasuk dalam kelompok rumah tangga yang kurang atau tidak cukup mempunyai persediaan pangan.

Lahan yang tersedia untuk ditanami padi di desa ini hanya tanah rawa yang pengairannya tergantung pada curah hujan karena tidak adanya pengairan teknis. Luas areal tanah rawa yang tersedia pun terbatas dan produktivitasnya rendah, sekitar 2,7 ton padi/Ha, meskipun dapat berproduksi dua kali dalam setahun. Pada tahun 2003 luas rawa yang dapat ditanami padi di desa ini hanya 20 ha sehingga produksi yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Kondisi ini menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan desa secara keseluruhan terhadap pasokan beras dari luar desa. Selama ini sebagian besar kebutuhan beras dipasok oleh desa-desa terdekat terutama Desa Rawajitu.

Berbeda dengan Desa Cakar Buaya, kondisi tanah di Desa Ngesti Rahayu cukup subur dan cocok untuk ditanami padi dengan areal tanam yang cukup luas. Mayoritas rumah tangga (68,5 persen) dapat memproduksi beras sendiri (Tabel 3.3) Produksi yang dihasilkan oleh desa ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terkadang produksi padi yang dihasilkan juga di ekspor keluar desa bahkan sampai ke Pulau Jawa. Kondisi ini menyebabkan persentase rumah tangga yang termasuk kategori cukup, cukup tinggi.

Tabel 3.3. Distribusi rumah tangga menurut cara perolehan pangan

Cara memperoleh pangan	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Membeli	76.0	25.5	50.8	0.5	3.2	1.8	26.5
Berhutang	4.5	5.5	5.0	0.5	1.1	0.8	2.9
Produksi sendiri	18.5	68.5	43.5	99.0	95.8	97.4	70.2
Lainnya	1.0	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4
Jumlah	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	200	200	400	201	190	391	791

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Meskipun kondisi tanah cukup subur, tetapi ketersediaan pengairan sangat berpengaruh terhadap produksi padi. Di Desa Ngesti Rahayu, sebagai contoh, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga sangat terpengaruh oleh kondisi pengairan sawah-sawah yang dimiliki/diolah petani. Sawah-sawah yang terdapat di desa ini sangat tergantung pada sistim pengairan dari Waduk Tegineneng yang menjadi satu-satunya sumber pengairan tidak hanya bagi Desa Ngesti Rahayu tetapi juga sebagian desa-desa lainnya di Kecamatan Punggur. Namun waduk ini tidak bisa memenuhi kebutuhan air desa-desa yang dialirinya. Kurangnya debit air yang dihasilkan waduk ini menyebabkan adanya pergiliran pengairan sawah untuk masing-masing desa sehingga mempengaruhi pola tanam dan produksi pertanian yang dihasilkan. Setiap tahunnya Desa Ngesti Rahayu mendapat giliran pengairan yang berbeda, jika pada tahun tertentu desa ini mendapat pengairan satu kali yang berarti bisa bertanam padi satu kali setahun maka pada tahun berikutnya mendapat giliran dua kali. Pada tahun 2002 lalu, Desa Ngesti Rahayu hanya mendapat satu kali pengairan sehingga petani hanya bisa menanam padi satu kali dan kemudian bertanam palawija berupa singkong atau sayur-sayuran dua kali. Kemudian pada tahun 2003 desa ini mendapat pengairan sebanyak dua kali sehingga petani dapat menanam padi dua kali dan satu kali palawija dalam satu tahun. Pada saat desa ini memperoleh giliran menanam padi dua kali maka persediaan beras rumah tangga akan lebih terjamin dibandingkan pada waktu mendapatkan giliran satu kali tanam. Pada saat mereka hanya bisa memproduksi padi satu kali satu tahun (*rendeng*) maka rumah tangga akan berhati-hati dalam menggunakan beras agar persediaan beras cukup sampai musim panen berikutnya, misalnya dengan mengurangi jumlah gabah yang dijual. Sementara itu pada saat mendapat giliran dua kali tanam padi (*gadu*) maka rumah tangga dapat dengan leluasa memanfaatkan hasil panen padi, untuk konsumsi, dan sebagian dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Meskipun demikian, sebagian besar hasil penjualan panen pertama akan dimanfaatkan untuk mempersiapkan musim tanam padi berikutnya sebagaimana terungkap dari wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di desa tersebut.

.....Ya betul, justru masyarakat bila dapat satu kali panen akan lebih berhati-hati, hasilnya kebanyakan disimpan dan lebih sedikit yang dijual, tapi kalau dapat jatah 2 kali maka kebutuhan untuk tanam yang kedua diambil dari situ.

Namun pada saat musim gadu tidak semua rumah tangga menggunakan kesempatan untuk bertanam padi dua kali dalam setahun karena dianggap kurang menguntungkan. Hasil yang diperoleh dari dua kali panen hampir hanya lebih sedikit dari hasil satu kali panen karena pengaruh serangan hama seperti tikus sering terjadi. Menurut mereka menanam padi yang kedua

di musim padi dianggap seperti *berjudi*, kadang-kadang untung kadang-kadang rugi. Karena hasil yang tidak jelas ini sebagian dari mereka banyak yang tidak menanam padi tetapi menanam palawija. Hasil tanaman palawija ini biasanya dipergunakan untuk membeli beras sampai panen berikutnya.

Seperti halnya di Lampung, salah satu penyebab perbedaan tingkat kecukupan dan ketersediaan jagung di kedua desa di daerah penelitian di NTT adalah perbedaan kualitas tanah, meskipun kedua desa ini berada dalam satu wilayah Kecamatan, Amanuban Barat. Kondisi tanah di Desa Naukae secara umum lebih sesuai untuk tanaman jagung bila dibandingkan dengan tanah di Desa Enoneontes sehingga produksi jagung yang dihasilkan oleh tanah dengan luasan sama di Desa Enoneontes lebih kecil bila dibandingkan dengan produksi di Desa Naukae. Jika satu hektar tanah di Naukae dapat menghasilkan 400-500 kuda atau sekitar 5-6 ton jagung, di Enoneontes hanya bisa menghasilkan 200 kuda atau sekitar 2 ton. Istilah "kuda" yang digunakan sebagai satuan lokal untuk menghitung berat jagung juga berbeda jika dikonversi menjadi kg. Satu kuda di Naukae sama dengan 12 kg sedangkan satu kuda di Enoneontes sama dengan 10 kg.

Untuk membantu meningkatkan produksi jagung di Enoneontes, warga desa berupaya menggunakan pupuk kimia agar hasil yang diperoleh lebih besar namun harga pupuk kimia yang cukup tinggi mengurangi akses masyarakat untuk menggunakan pupuk tersebut. Karena itu, pemerintah desa setempat mengusahakan pengadaan pupuk alam/kandang sehingga harganya lebih murah tetapi hasil yang didapatkan tetap meningkat.

Pengaruh iklim: Musim hujan atau musim kemarau yang berkepanjangan

Faktor alam lain yang berpengaruh pada persediaan pangan rumah tangga adalah pengaruh iklim. Iklim atau cuaca yang buruk akan berdampak negatif pada persediaan pangan rumah tangga. Di Desa Cakar Buaya, kemarau yang panjang menyebabkan produksi singkong, sayuran ataupun palawija menjadi berkurang atau tidak menghasilkan sama sekali sehingga penghasilan yang diperoleh rumah tangga juga sangat berkurang. Kondisi ini berdampak langsung pada persediaan pangan rumah tangga karena kemampuan rumah tangga untuk membeli pangan juga menjadi berkurang. Jika kondisi ini terjadi, salah satu *copying strategy* yang dilakukan oleh rumah tangga di Cakar Buaya untuk mengatasi kesulitan pangan adalah dengan mencampur beras sebagai makanan pokok utama dengan tiwul. Makan tiwul sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di desa ini.

Di NTT, kondisi iklim yang tidak normal akan berdampak buruk pada persediaan pangan rumah tangga seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pejabat di kabupaten sebagai berikut:

Jadi kita kan hampir 80% hasil petani kan lahan kering, jadi status pangan itu dipengaruhi oleh curah hujan, jadi kalau curah hujannya normal itu hasil pangannya bagus bu, kalau sudah terganggu sedikit itu sudah gagal panennya itu.

(Kutipan wawancara dengan salah seorang aparat Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten TTS).

Musim hujan atau kemarau yang berkepanjangan menyebabkan produksi jagung berkurang. Pada tahun 2002 dan tahun 2004, di NTT terjadi kemarau panjang yang menyebabkan produksi jagung berkurang yang berdampak pada kurangnya persediaan jagung rumah tangga. Produksi jagung yang biasanya dapat mencapai 200 kudu per ha hanya dapat menghasilkan 100 kudu. Pada saat kondisi ini terjadi rumah tangga melakukan penyesuaian agar ketersediaan jagung tetap terjaga. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah jagung yang dikonsumsi dan mengkonsumsi jenis makanan lain seperti ubi atau pisang agar persediaan jagung rumah tangga bisa bertahan sampai musim panen berikutnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang kepala rumah tangga di Desa Naukae:

.....waktu panen Bulan Maret tahun 2002 hasilnya sedikit (karena kemarau panjang) sehingga setelah diukur mereka makan sedikit-sedikit sampai panen lagi.

Selain kemarau panjang, musim hujan secara terus-menerus juga berdampak buruk pada produksi jagung. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang kepala rumah tangga petani sebagai berikut:

Ini terjadi kerusakan itu, begini bapak, kalau misalnya hujan tiap bulan, tiap bulan hujan terus maka sampai saat tanam jagung yang merana, tetapi kalau misalnya sampai bulan ke-enam atau bulan ke-tujuh stop hujan itu berarti tahunnya baik.

(Kutipan wawancara dengan salah seorang kepala rumah tangga di Naukae)

Kondisi cuaca yang dianggap baik oleh masyarakat setempat untuk menanam jagung adalah jika hujan terjadi sebelum musim tanam pada Bulan Juni atau Juli dan sesudah waktu panen pada Bulan Maret atau April. Tetapi, jagung yang menjadi pangan pokok di kedua desa penelitian di NTT ini baru mulai ditanam penduduk pada awal musim penghujan yaitu antara Bulan Oktober, November dan Desember setiap tahunnya dan panen pada Bulan Maret, April atau Mei. Penduduk setempat mempunyai kebiasaan menanam jagung pada Bulan Oktober. Kebiasaan ini menurut salah seorang pejabat setempat kurang baik karena sebenarnya penduduk sudah bisa melakukannya pada Bulan Juli, yang juga merupakan bulan dengan musim terbaik sepanjang tahun untuk menanam jagung. Namun hal ini tidak dilakukan karena biasanya pada bulan tersebut diadakan pesta. Kebiasaan penduduk mulai mengolah lahannya pada Bulan Oktober tersebut juga diungkapkan oleh salah seorang pejabat di NTT:

Penduduk biasa mengolah lahannya Bulan Oktober, padahal bisa memulai Bulan Juli, namun biasanya Bulan Juli banyak pesta sehingga penduduk terlena,.... Mereka juga mengharapakan turunnya bantuan raskin.

(Kutipan wawancara dengan seorang aparat pemerintah di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten TTS).

Faktor Sosial

Persediaan pangan rumah tangga juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat sosial antara lain pola pemilikan dan penguasaan lahan. Ada rumah tangga yang memiliki lahan sawah dan pekarangan; hanya memiliki lahan pekarangan; tidak memiliki lahan tetapi bisa menyewa tanah; atau tidak mempunyai lahan sama sekali. Adanya kelembagaan pangan seperti lumbung padi serta aturan adat yang berlaku juga dapat sangat membantu rumah tangga pada saat mengalami kekurangan persediaan pangan.

Pemilikan dan penguasaan lahan

Pemilikan lahan menjadi salah satu indikator bagi masyarakat di lokasi penelitian untuk menentukan tingkat kondisi ekonomi suatu rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki lahan yang luas dianggap mempunyai kemampuan untuk mempunyai persediaan pangan yang cukup dan bisa memenuhi kebutuhan hidup lainnya dari hasil lahan pertanian yang mereka

miliki. Sementara itu, rumah tangga yang hanya memiliki lahan sempit biasanya tidak memperoleh hasil yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehingga mereka juga bekerja di bidang lain atau pada orang lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Pemilikan lahan terutama pemilikan sawah dan lahan pekarangan sangat berpengaruh pada persediaan pangan rumah tangga di Desa Cakar Buaya. Rumah tangga yang mempunyai persediaan pangan cukup biasanya adalah rumah tangga yang memiliki sawah, meskipun sawah tersebut adalah sawah lebak/rawa. Selain sawah, rumah tangga tersebut biasanya juga mempunyai lahan lainnya untuk menambah penghasilan rumah tangga atau mempunyai penghasilan lain dari pekerjaan lainnya sehingga produksi padi yang dihasilkan tidak ada yang dijual untuk memenuhi keperluan rumah tangga lainnya.

Kotak 2 : Punya sawah dan pekarangan

Salah satu rumah tangga yang mempunyai persediaan pangan untuk waktu 120 hari adalah keluarga Bapak A yang memperoleh persediaan beras dari hasil produksi sendiri. Sawah yang dimiliki oleh Bapak A ini adalah sawah rawa seluas 3.750 m² yang pengairannya sangat tergantung pada hujan. Dalam satu tahun sawah tersebut hanya ditanami satu kali yang menghasilkan 1 ton gabah, ekuivalen dengan 700 kg beras. Seluruh hasil panen padi tersebut digunakan untuk makan dan cukup untuk kebutuhan anggota keluarganya yang berjumlah 5 orang selama satu tahun, sedangkan uang tunai untuk keperluan sehari-hari diperoleh dari hasil kebun karet, singkong dan juga upah membajak di sawah orang. Di samping memiliki sawah rawa, keluarga Bapak A juga mempunyai kebun karet seluas 1,75 ha yang sudah bisa diambil getahnya (sudah bisa dideres). Hasil karet dijual 2 sampai 3 kali sebulan dengan harga Rp. 3.700,- per kg. Selain karet, keluarga ini juga mempunyai kebun singkong seluas 1,5 ha. Sekali panen bapak A bisa memperoleh 14 ton singkong yang dijual ke pabrik pembuatan aci dengan harga Rp. 160,- per Kg. Selain berkebun sewaktu-waktu Bapak A juga menerima upahan membajak dengan upah sebesar Rp. 40.000,- untuk 0,25 ha sawah.

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung, PPK-LIPI, 2004

Dalam kasus di atas terlihat dengan jelas bahwa rumah tangga yang mempunyai sawah dan lahan pekarangan yang cukup luas mempunyai persediaan pangan yang cukup. Persediaan pangan rumah tangga yang diperoleh dari sawah milik sendiri cukup untuk persediaan satu tahun asalkan tidak ada yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya diperoleh dari hasil kebun karet, singkong dan upah membajak. Bagi rumah tangga di desa ini pemilikan kebun karet juga dijadikan sebagai indikator kecukupan suatu rumah tangga, karena penghasilan yang diterima dari getah karet cukup besar. Kebun karet juga dianggap sebagai tabungan karena bisa memberi penghasilan untuk jangka waktu yang cukup lama (25 tahun).

Dalam kasus lain terdapat rumah tangga yang tidak mempunyai sawah tetapi memiliki ladang singkong yang tidak terlalu luas⁷, seperti dapat disimak dari kutipan hasil wawancara dalam Kotak 3 berikut:

Kotak 3 : Punya ladang tapi tidak punya sawah

Keluarga Bapak T tidak mempunyai sawah tetapi hanya mempunyai kebun singkong seluas 1 ha. Hasil yang diperoleh dari kebun singkong tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga ia terpaksa harus bekerja sebagai pencabut singkong di kebun orang lain. Karena keluarganya tidak mempunyai sawah maka persediaan berasnya diperoleh dengan cara membeli dengan uang hasil penjualan singkong dan upah dari bekerja sebagai buruh cabut singkong. Persediaan beras yang biasanya dimiliki oleh keluarga ini hanya cukup untuk 10 hari (dari beras raskin sebanyak 12,5 Kg/bulan). Jika beras dari raskin habis, terpaksa membeli beras di warung, setiap membeli beras sekitar 5-10 Kg (3-7 hari). Pada saat persediaan beras masih kurang mereka terpaksa mengkonsumsi tiwul. Dari 1 ha singkong diperoleh hasil 15 ton dengan harga Rp.160,- per kg. Namun jumlah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya karena harus menghadapi potongan-potongan seperti untuk ongkos angkut sehingga harga per kg yang bersih diterimanya hanya Rp. 90,- dengan total pendapatan Rp. 1.350.000,- pertahun.

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung, PPK-LIPI, 2004

⁷ Umumnya rumah tangga di desa Cakar Buaya adalah transmigran yang memperoleh lahan seluas 5 ha. Namun dalam perkembangannya banyak rumah tangga yang terpaksa menjual tanahnya karena tidak sanggup mengolahnya atau karena himpitan ekonomi sehingga saat ini sebagian besar rumah tangga hanya mempunyai lahan yang sempit.

Dari kasus di atas dapat dijelaskan bahwa rumah tangga yang tidak mempunyai lahan sawah tetapi mempunyai lahan untuk kebun singkong tidak mempunyai persediaan pangan yang cukup berdasarkan standar untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu dari satu musim tanam padi ke musim tanam berikutnya. Hasil yang diperoleh dari penjualan singkong tidak mungkin digunakan untuk membeli persediaan beras dalam jumlah yang banyak sekaligus karena juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Pola penguasaan tanah lainnya yang ditemukan di Lampung adalah sistem sewa tanah. Rumah tangga yang tidak mempunyai tanah bisa menyewa tanah dari rumah tangga lain yang tidak mengolah lahannya. Biasanya lahan tersebut ditanami dengan singkong dan hasilnya dijual untuk membayar sewa tanah dan keperluan rumah tangga lainnya. Kasus sewa tanah ini juga ditemukan di Desa Ngesti Rahayu. Dalam salah satu kasus penyewaan tanah di Desa Ngesti Rahayu. Pemilik tanah lebih suka menyewakan tanahnya pada orang lain pada saat tidak mendapat pengairan sehingga tanah tersebut hanya bisa ditanami palawija. Pada saat itu ia memilih untuk mengerjakan usahanya yang lain dan menyewakan tanahnya. Imbalan yang diterima dalam sistem sewa tanah ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem bagi hasil atau dengan tenaga. Sistem bagi hasil dilakukan dengan pembagian 1:4 (satu untuk pemilik dan 4 untuk penggarap) dan jika dengan tenaga biasanya dilakukan dengan membantu si pemilik tanah pada waktu mulai menggarap sawah. Selain menyewa, rumah tangga yang tidak mempunyai lahan juga bisa bekerja sebagai buruh tani pada rumah tangga lain yang mempunyai lahan pertanian cukup luas. Di Desa Cakar Buaya pekerjaan buruh tani yang paling populer dikenal dengan *meleles* yaitu bekerja sebagai buruh cabut singkong dengan penghasilan sekitar Rp. 15.000,- per hari.

Rumah tangga yang tidak memiliki lahan di Desa Ngesti Rahayu juga dapat memperoleh persediaan pangan dengan cara *bawon*. *Bawon* adalah pekerjaan membantu orang lain pada saat panen dengan upah berupa padi. Besarnya jumlah padi yang diterima biasanya dilakukan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian antara pemilik sawah dengan pembawon, namun sistem yang biasa dipakai adalah 7:1, jika pemilik tanah mendapat 7 bagian maka pembawon mendapat 1 bagian. Menurut informasi dari beberapa orang pembawon, jumlah padi yang diterima dari kegiatan bawon bisa mencapai 5 kwintal, cukup untuk persediaan rumah tangga selama 3-4 bulan. Namun pekerjaan membawon ini hanya bisa dilakukan maksimal dua kali setahun pada waktu gadu dan satu kali pada saat rendeng. Jadi dalam satu tahun terdapat waktu dimana rumah tangga harus membeli beras untuk persediaan pangan. Pada periode tersebut, anggota keluarga juga melakukan pekerjaan lainnya untuk mendapatkan penghasilan. Jika rumah

tangga sudah tidak mempunyai penghasilan untuk memperoleh persediaan pangan maka salah satu *copying strategy* yang dilakukan adalah dengan berhutang, seperti dijelaskan salah seorang responden:

T: Biasanya kalau gini, kalau sekali panen, kemudian ibukan dapat bagi hasil dari bawon, itu untuk berapa lama, biasanya habisnya sampai berapa lama satu kali bawon?

J: Iya, 3 bulan, 4 bulan, nanti kalau tidak cukup ya nyambung beli. Uangnya dapat dari anak yang kerja. Kalau tidak punya uang untuk beli bisa ngebon ke warung dan bayar sehabis panen. Biasanya satu kali panen bisa dapat 5 kwintal

(Kutipan wawancara dengan seorang pembawon di Ngesti Rahayu)

Kutipan wawancara di atas juga menunjukkan bahwa untuk mengatasi kesulitan pangan dapat dilakukan dengan cara berhutang. Berhutang dilakukan pada saat rumah tangga tidak memiliki uang tunai untuk membeli pangan, saat persediaan pangan rumah tangga dari hasil produksi sendiri sudah habis sedangkan waktu panen masih lama. Kondisi ini terjadi di kedua desa penelitian di Lampung. Hal ini juga terlihat dari ungkapan salah seorang kepala keluarga di Desa Ngesti Rahayu:

Hasil panen sebagian dijual, kalau seperti sekarang itu ada 3 kantong, masalahnya apa? Kalau kita mau menunggu panen itu kan untuk dimakan kan enggak ada, istilahnya kita minjam ke warung, seperti kemaren kita pinjem sampai 3 kantong beras.

Pola pemilikan/penguasaan lahan/tanah juga mempengaruhi persediaan pangan rumah tangga di NTT. Rumah tangga yang mempunyai lahan yang cukup luas mempunyai persediaan pangan yang lebih baik jika dibandingkan dengan rumah tangga dengan luas lahan yang lebih kecil. Sistem sewa tanah juga bisa dilakukan oleh rumah tangga yang tidak mempunyai lahan pada rumah tangga yang mempunyai lahan.

Kelembagaan Sosial : Lumbung padi dan arisan

Kelembagaan sosial seperti lumbung dapat berfungsi sebagai cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga anggotanya pada waktu paceklik. Di desa-desa penelitian di Lampung, lumbung desa dalam pengertian konvensional sudah lama tidak berfungsi. Sebagai gantinya, masyarakat setempat membentuk kelembagaan sosial dalam bentuk

kelompok-kelompok kecil untuk mengatasi kesulitan pangan yang mereka hadapi pada saat paceklik atau untuk membantu meringankan kesulitan anggotanya untuk biaya bertanam padi. Sistem pengelolaan kelompok ini sebenarnya hampir sama dengan lumbung desa, tetapi masyarakat tidak menganggapnya sebagai lumbung desa karena tidak dikelola di tingkat desa (keanggotaan sukarela dalam kelompok-kelompok kecil sehingga dalam satu desa terdapat beberapa kelompok). Setiap anggota kelompok diharuskan menyetor sejumlah padi setiap habis panen. Hasil setoran tersebut kemudian akan dipergunakan untuk membantu anggotanya pada saat menghadapi kesulitan pangan. Setiap anggota boleh meminjam padi dan kemudian mengembalikannya dengan tambahan sebanyak 20 persen. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang peserta *Focus Group Discussion* (FGD) di Ngesti Rahayu

Iya kelompok, cuma anggotanya hanya 11 orang, ya orang-orang yang mau diajak berfikir untuk mengatasi paceklik itu. Saya sudah dua kali setoran. Nah kalau pada musim paceklik, pas mau penggarapan sawah itu biasanya biaya-biaya kurang gitu Pak. Lah itu dibongkar, kemudian dibagikan pada siapa yang membutuhkan. Ya nanti dipinjamkan, nanti pengembaliannya kalau sudah panen lagi itu kalau satu kwintalnya itu dia memberikan tambahan 20 kilo, ya 20 persen lah.

Selain bentuk di atas juga ada bentuk kegiatan lain yang dapat membantu pada saat kesulitan pangan yaitu "arisan gabah". Arisan ini biasanya diadakan setiap habis panen.

Iya, kalau dapat gadu, musim itu bisa dua kali (catatan: yang dapat arisan), itu enam tahun (catatan: lamanya siklus arisan), atau kalau enggak bisa ya delapan tahun, kalau cuma setahunnya sekali. Seperti sekarang kan nggak ada gadu. Istilahnya itu, dari padi ke padi lagi itu loh, kan namanya setahun cuma satu musim, kalau bisa dua musim, bisa enam tahun. Tapi wong habis bisa dua musim, tahun akan datang lagi enggak, jadi bisa delapan tahun, lama, namanya orang 12 (anggotanya).

(Kutipan hasil wawancara dengan salah seorang kepala rumah tangga di Ngesti Rahayu)

Di daerah penelitian di NTT, penduduk Desa Naukae tampaknya lebih siap menghadapi masa paceklik dengan membangun lumbung ketahanan pangan (dulu namanya lumbung desa) di tiap-tiap dusun. Dengan adanya lumbung

ketahanan pangan tersebut, penduduk terjamin kebutuhan pangan pokoknya meskipun dalam masa paceklik/kerawanan pangan. Selain dari itu, dalam setiap rumah juga sudah terdapat 'rumah bulat' tempat menyimpan hasil panen (jagung) mereka. Lumbung ketahanan pangan didirikan mulai tahun 2001, atas inisiatif warga sendiri. Dengan demikian dapat diharapkan rasa memiliki yang cukup tinggi diantara warga sendiri. Lumbung desa yang merupakan program dari pemerintah, seperti halnya terjadi di berbagai daerah, tidak dapat bertahan lama (bahkan untuk kasus di Lampung, lumbung desa sudah lama tidak ada, masyarakat terbiasa menyimpan persediaan pangan di rumah masing-masing).

Dalam sistem lumbung ketahanan pangan, di Desa Naukae, setiap tenaga produktif diwajibkan menyimpan di lumbung tersebut sebanyak 2 kudu (jagung) dan apabila dalam sebuah keluarga terdapat 3 anggota rumah tangga yang tergolong produktif, maka diwajibkan menyimpan 6 kudu di lumbung tersebut. Sistem peminjaman dilakukan berdasarkan seleksi, dimana keluarga yang tergolong rawan pangan akan mendapat prioritas. Selain adanya lumbung ketahanan pangan Tokoh Masyarakat Desa Naukae juga sangat aktif mensosialisasikan kepada warganya untuk senantiasa memperhitungkan secara tepat berapa besar persediaan pangan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ada kecenderungan dari masyarakat untuk menjual hasil panen jagungnya (karena dianggap ada kelebihan) sampai bulan-bulan rawan, sehingga Tokoh Masyarakat Desa selalu melakukan kontrol perhitungan kebutuhan makanan pokok rumah tangga di desanya.

Di Desa Enoneontes, berdasarkan kesepakatan musyawarah desa, rencananya pada tahun 2003 yang lalu didirikan 3 (tiga) lumbung desa, yang sebelumnya belum pernah ada di desa tersebut. Tetapi sampai tahun 2004, lumbung desa tersebut belum terealisasi. Selama ini, untuk mengatasi kesulitan warga Desa Enoneontes yang kekurangan pangan, keluarga yang kelebihan produksi jagung akan membantunya. Tetapi kegiatan ini lebih bersifat individual dan bukan merupakan kegiatan masyarakat bersama dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.

Persediaan pangan dan ketentuan adat "Banu panak lopo"

Faktor sosial lain yang dapat mempengaruhi persediaan pangan rumah tangga adalah aturan adat yang berlaku di daerah setempat. Besarnya pengaruh adat pada persediaan pangan rumah tangga dapat kita lihat di dua desa penelitian di NTT. Dalam aturan adat yang berlaku di kedua lokasi penelitian di NTT, merupakan suatu keharusan bahwa rumah tangga mempunyai persediaan pangan dari satu musim tanam jagung sampai dengan musim tanam berikutnya. Bagi rumah tangga yang tidak memenuhi aturan adat ini dianggap sebagai keluarga yang tidak bisa memperhitungkan kebutuhan

pangan keluarganya. Pentingnya persediaan jagung bagi penduduk setempat juga terlihat dari pembangunan rumah untuk suatu keluarga. Dalam adat di kedua desa ini setiap rumah tangga harus mempunyai rumah bulat terlebih dahulu sebelum membuat rumah yang biasa untuk ditinggali. Rumah bulat sebenarnya merupakan tempat penyimpanan dan pengasapan jagung untuk persediaan sampai panen berikutnya. Setiap pemuda atau pemudi yang akan menikah harus membuat rumah bulat terlebih dahulu. Jika mereka tidak sanggup maka dianggap belum dewasa dan belum cukup umur untuk menikah. Pada awal masa pernikahan umumnya pasangan muda ini tinggal di rumah bulat tersebut. Setelah mereka mampu membangun rumah tinggal (seperti umumnya rumah tinggal di daerah-daerah lain), rumah bulat hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan dan pengasapan jagung serta dapur, yang terletak di belakang rumah tinggal. Pada waktu memasak, jagung diletakkan di atas perapian sebagai cara pengeringan. Karena itu, rumah bulat juga dapat dijadikan indikator kemiskinan. Keluarga yang masih tinggal di rumah bulat karena belum mampu membangun rumah tinggal umumnya kondisi ekonominya masih lemah.

Dalam budaya mereka juga berlaku suatu aturan yang disebut “banu banak lopo”. Aturan ini tidak membolehkan warganya untuk menjual jagung yang masih muda. Pelarangan penjualan jagung muda ini dimaksudkan untuk menghindari kurangnya hasil yang akan diperoleh pada waktu panen sehingga akan mengurangi persediaan jagung untuk waktu satu tahun. Keluarga yang melanggar aturan ini akan terkena sanksi sosial dari masyarakat dengan dianggap sebagai keluarga yang tidak punya malu.

Selain aturan “banu panak lopo” di kedua desa penelitian juga dilarang untuk menjual bibit jagung yang sudah disisihkan dari awal panen. Bibit jagung tersebut tidak boleh dijual atau dihabiskan untuk makan kecuali jika keluarga yang bersangkutan sudah tidak memerlukan lagi bibit jagung tersebut untuk ditanam dikebunnya (selesai tanam). Jika suatu keluarga sudah tidak mempunyai jagung lagi untuk dimakan sedangkan yang tersisa hanya jagung untuk bibit maka keluarga yang bersangkutan harus membeli jagung untuk makan dan tidak boleh menyentuh jagung yang telah disisihkan untuk bibit. Aturan-aturan yang berlaku di masyarakat setempat merupakan strategi lokal dalam mensiasati persediaan pangan.

Faktor Manusia

Selain faktor alam dan sosial, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi persediaan pangan rumah tangga terutama yang berkaitan dengan produksi, adalah faktor manusia, baik dilihat dari motivasi manusia itu sendiri maupun cara bertani yang dilakukan.

Kurangnya motivasi

Menurut informasi yang disampaikan oleh narasumber, di Desa Cakar Buaya penduduk kurang optimal dan kurang tekun dalam mengolah lahan pertanian yang dimilikinya. Dari sisi ketersediaan lahan, misalnya, kebanyakan rumah tangga memiliki lahan pekarangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman sayuran seperti bayam dan jenis sayuran lainnya, seperti diungkapkan oleh seorang Tokoh Masyarakat Desa Cakar Buaya:

Pemanfaatan lahan pekarangan masih kurang, kalau semua lahan dapat dimanfaatkan secara optimal, maka tidak ada warga yang miskin di sini.

(Kutipan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Cakar Buaya).

Tetapi penduduk sangat sulit untuk dimotivasi. Dalam pertemuan warga yang diadakan di rumah Kepala Kampung, yang antara lain membicarakan masalah pertanian, biasanya hanya 5-6 orang warga saja yang datang. Kebiasaan gotong royong diantara warga juga dikatakan mulai memudar. Penduduk Desa Cakar Buaya cenderung lebih senang merantau keluar daerah/negri untuk bekerja dan pulang membawa uang.

Kondisi yang sama juga terjadi di desa Enoneontes. Informasi dari berbagai narasumber menunjukkan bahwa petani di desa Enoneontes kurang gigih mengelola lahan pertaniannya sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Meskipun kondisi lahan pertaniannya termasuk lahan kritis, namun apabila diolah dalam bentuk terasering, kemungkinan hasil produksi jagung dapat meningkat. Seperti yang diinformasikan oleh beberapa narasumber, motivasi para petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya sangat kurang. Umumnya mereka hanya menunggu instruksi dari atas untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertaniannya.

Semangat kerja petani 'pas-pasan', tidak terlalu tinggi. Mereka kerja karena ada yang suruh, tidak ada motivasi untuk meningkatkan pendapatan. Kebanyakan mereka kerja tanpa memperhitungkan jumlah keluarganya dalam kaitannya dengan produksi jagung. Ada banyak waktu luang yang tidak dimanfaatkan. Setelah panen mereka santai-santai menghabiskan hasil panen mereka sampai musim panen berikutnya.

(Kutipan wawancara dengan seorang aparat pemerintahan di tingkat Kecamatan Amanuban Barat).

Dengan kondisi tanah kritis, orang harus bekerja lebih keras lagi agar hasilnya dapat mencukupi.

(Kutipan wawancara dengan seorang Tokoh Masyarakat Desa Enoneontes).

Penduduk biasa mengolah lahannya bulan Oktober, padahal bisa memulai bulan Juli, namun biasanya bulan Juli banyak pesta sehingga penduduk terlena,.... Mereka juga mengharapkan turunnya bantuan raskin.

(Kutipan wawancara dengan seorang aparat pemerintah di Dinas Tanaman Pangan, Kabupaten TTS).

Pola tanam satu lobang dan perladangan berpindah

Faktor lain yang terkait dengan sumberdaya manusia adalah cara bercocok tanam. Di kedua desa penelitian di NTT, pola tanam jagung yang umumnya digunakan petani adalah menanam jagung dan kacang panjang dalam satu lobang, di selang-seling tanaman ubi kayu dan di pinggir lahan ditanami dengan pisang. Pada dasarnya produksi yang dihasilkan dengan pola tanam seperti ini akan lebih rendah dibandingkan jika penanaman jagung dilakukan secara terpisah. Dengan menanam dua jenis tanaman dalam 1 (satu) lubang akan terjadi perebutan unsur hara diantara tanaman tersebut. Keadaan akan lebih buruk untuk tanaman jagung jika ditanam bersama ubi karena ubi merupakan tanaman yang sangat rakus akan unsur hara. Namun di sisi lain pola tanam seperti ini lebih efektif karena penanaman jagung, kacang panjang, ubi kayu dan pisang dilakukan pada waktu yang bersamaan dan dalam lahan yang sama sehingga menghemat waktu. Disamping itu jika terjadi produksi jagung menurun atau gagal, tanaman lainnya dapat dijadikan sebagai makanan alternatif, atau dijual. Disamping pola tanam satu lobang, sebagian petani di kedua desa penelitian di NTT masih menggunakan sistem perladangan berpindah. Lahan yang sudah ditanami selama tiga tahun kemudian ditinggalkan dan untuk menggantinya dibuka lahan baru.

Di Desa Naukae, sejak tahun 1990-an, petani juga sudah menggunakan jenis bibit jagung unggul atau jenis hibrida. Dengan bibit jagung unggul, sekitar tahun 1995-1996, Desa Naukae mampu men-*supply* jagung untuk beberapa daerah disekitarnya, termasuk ke Kupang. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam, jagung saat itu lebih untuk komoditas perdagangan bukan untuk dikonsumsi. Penduduk justru mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Keadaan ini juga menunjukkan adanya kecenderungan perubahan pola konsumsi makanan pokok (dari jagung ke beras) jika kondisi ekonomi rumah tangga membaik.

3.1.2. Keberlangsungan (Kontinuitas) Persediaan Pangan

Frekuensi makan: Tiga kali sehari.

Frekuensi makan dalam penelitian ini menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberlangsungan (kontinuitas) ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Frekuensi makan yang dianggap umum dalam penelitian ini adalah tiga kali sehari, terdiri dari makan pagi, makan siang dan makan malam. Jika suatu rumah tangga mempunyai kebiasaan makan tiga kali sehari maka diasumsikan keluarga tersebut mempunyai keberlangsungan ketersediaan bahan pangan yang baik. Makan yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari makanan pokok ditambah lauk pauk. Tetapi frekuensi makan juga terkait dengan kebiasaan makan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui kebiasaan makan di keempat desa penelitian. Frekuensi makan ini tidak dengan sendirinya menunjukkan kondisi pemenuhan kebutuhan gizi anggota rumah tangga, karena keadaan ini sangat tergantung pada jumlah, jenis dan kualitas makanan yang dikonsumsi.

Mayoritas anggota rumah tangga di desa penelitian (kecuali di Desa Enoneontes) makan tiga kali sehari, seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei pada Tabel 3.4. Sekitar 96 persen rumah tangga di Desa Cakar Buaya dan 97 persen di Desa Ngesti Rahayu makan tiga kali sehari. Tidak ada anggota rumah tangga yang hanya makan satu kali sehari. Hasil ini selain dapat menunjukkan kontinuitas ketersediaan pangan rumah tangga juga dapat menjadi indikasi bahwa rumah tangga di kedua desa penelitian di Lampung ini memang mempunyai kebiasaan makan tiga kali sehari.

Frekuensi makan 3 kali tersebut diasumsikan berlaku untuk semua anggota keluarga. Meskipun secara umum tidak terdapat perbedaan makan antara orang dewasa dan anak-anak, beberapa nara sumber menyebutkan bahwa terkadang frekuensi makan anak-anak lebih sering dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak akan minta makan setiap kali mereka merasa lapar. Tidak ada perbedaan frekuensi makan untuk ibu hamil atau anak-anak dengan anggota rumah tangga dewasa lainnya.

Tabel 3.4. Distribusi rumah tangga menurut frekuensi makan anggota rumah tangga umumnya

Frekuensi makan dalam sehari	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Satu kali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dua kali	4.0	3.0	3.5	77.6	0.0	39.9	21.5
Tiga kali atau lebih	96.0	97.0	96.5	22.4	100.0	60.1	78.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	200	200	400	201	190	391	791

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Di Nusa Tenggara Timur terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara frekuensi makan penduduk di Desa Naukae dengan frekuensi makan penduduk di Desa Enoneontes. Di Desa Naukae hampir seluruh rumah tangga makan tiga kali sehari sedangkan di Desa Enoneontes hanya 22,4 persen rumah tangga yang makan tiga kali sehari (atau lebih) dan 77,6 persen rumah tangga hanya makan dua kali sehari. Hal ini dapat menunjukkan bahwa rumah tangga di desa Naukae lebih baik kondisi ketahanan pangannya dibandingkan dengan rumah tangga di desa Enoneontes. Tetapi kebiasaan makan penduduk juga perlu didalami untuk mengetahui salah satu sebab perbedaan pola makan ini.

Mengurangi frekuensi makan juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh rumah tangga di NTT pada saat terjadi kegagalan panen dan persediaan jagung rumah tangga mulai menipis. Saat penelitian ini dilakukan pada tahun 2004, kedua desa penelitian di NTT mengalami kegagalan panen karena musim kemarau yang panjang. Akibatnya sebagian besar rumah tangga mengurangi frekuensi makan jagung yang tadinya tiga kali satu hari menjadi dua kali, yaitu hanya pada waktu siang dan malam sedangkan pada pagi hari diganti dengan makanan lain seperti ubi dan pisang.

Dengan menggunakan asumsi bahwa frekuensi makan yang dianggap dapat menggambarkan keberlangsungan ketersediaan pangan di rumah tangga adalah 3 (tiga) kali sehari, penggabungan indikator (lama) persediaan pangan dan frekuensi makan, menghasilkan indikator stabilitas ketersediaan pangan. Kedua variabel tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Untuk mempertahankan persediaan pangan, rumah tangga seringkali mengurangi frekuensi makan ataupun mengurangi porsi makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu kedua variabel tersebut digabungkan dan dijadikan sebagai

variabel baru untuk menentukan stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga. Stabilitas ketersediaan pangan ini dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu "stabil", "kurang stabil", dan "tidak stabil". Kondisi stabil dicapai jika rumah tangga mempunyai persediaan pangan cukup untuk jangka waktu yang sudah ditentukan dan dapat makan 3 (tiga) kali sehari. Kondisi kurang stabil, jika persediaan pangan rumah tangga kurang cukup tetapi frekuensi makan masih bisa dipertahankan tiga kali sehari atau persediaan makanan pokok cukup tetapi frekuensi makan kurang dari tiga kali sehari dan kondisi tidak stabil jika tidak mempunyai persediaan pangan pokok meskipun dapat makan tiga kali sehari, atau persediaan pangan cukup tetapi tidak dapat makan tiga kali sehari (Tabel 2.1a dan 2.1b dalam Bab II).

Dengan menggunakan kategori stabil, kurang stabil dan tidak stabil Tabel 3.5 menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga di Ngesti Rahayu termasuk dalam kategori ketersediaan pangan stabil, 26 persen kurang stabil dan sisanya tidak stabil. Sementara itu rumah tangga yang tergolong stabil di Cakar Buaya hanya 4 persen, dan hampir 70 persen tergolong kurang stabil, sisanya tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga di desa tersebut. Rumah tangga di Desa Ngesti Rahayu tergolong lebih stabil dalam arti sebagian besar rumah tangga mempunyai persediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya dengan makan tiga kali sehari sampai mereka memperoleh hasil dari panen sawah berikutnya. Sementara itu sebagian besar rumah tangga di Cakar Buaya tidak mempunyai persediaan yang cukup baik untuk makan tiga atau dua kali sehari bagi seluruh anggota keluarga sampai musim panen padi berikutnya.

Perbedaan yang cukup mencolok juga terlihat di kedua desa penelitian di NTT. Sebagian besar atau sekitar 66,8 persen rumah tangga di Desa Naukae tergolong mempunyai ketersediaan pangan stabil, 32,1 persen kurang stabil dan hanya 1 persen yang tidak stabil. Sementara itu di Desa Enoneontes hanya 0,5 persen yang stabil, 21,9 persen kurang stabil dan sebagian besar adalah rumah tangga yang tergolong tidak stabil persediaan pangannya (77,6 persen). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga di Desa Naukae mempunyai tingkat kecukupan dan stabilitas pangan yang baik bila dibandingkan dengan rumah tangga di Desa Enoneontes.

Tabel 3. 5. Distribusi rumah tangga menurut stabilitas ketersediaan pangan

Stabilitas ketersediaan pangan	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Stabil	4.0	52.0	28.0	0.5	66.8	32.7	30.3
Kurang stabil	67.5	26.5	47.0	21.9	32.1	26.9	37.0
Tidak stabil	28.5	21.5	25.0	77.6	1.1	40.4	32.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	200	200	400	201	190	391	791

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

3.2. Akses atau Keterjangkauan Terhadap Pangan

Akses atau keterjangkauan terhadap pangan merupakan salah satu unsur dalam menentukan ketahanan pangan rumah tangga (FAO, 1996). Akses dan keterjangkauan tersebut mengandung makna bahwa setiap rumah tangga mempunyai akses baik secara fisik atau ekonomi agar dapat memperoleh pangan yang sehat. Secara fisik dapat diartikan bahwa setiap rumah tangga dapat memperoleh pangan secara mudah, jika harus membeli tersedia dimana-mana, sedangkan secara ekonomi mengandung makna bahwa pangan dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau.

Akses rumah tangga secara fisik dalam memperoleh pangan dapat diketahui melalui informasi tentang tempat perolehan pangan pokok serta cara mencapai tempat tersebut. Akses fisik di kedua desa penelitian di Lampung cukup baik. Kebutuhan pangan rumah tangga umumnya bisa diperoleh dengan mudah dimana-mana. Di kedua desa penelitian terdapat banyak warung yang menjual kebutuhan pangan. Di Desa Cakar Buaya, selain di warung, kebutuhan pangan juga dapat diperoleh di pasar Unit IV, di Ibukota kecamatan. Desa Ngesti Rahayu juga dekat dengan pasar kecamatan yang cukup lengkap. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar (sekitar 90 persen) dari rumah tangga di Desa Cakar Buaya mengaku membeli beras di dalam desa mereka sendiri yaitu di pasar tradisional yang diadakan pada hari-hari tertentu, atau membeli setiap hari di warung-warung dekat rumah penduduk. Mayoritas rumah tangga di desa tersebut dapat mencapai pasar atau warung untuk membeli bahan makanan pokok hanya dengan berjalan kaki (Tabel 3.6 dan Tabel 3.7) dan sebagian lainnya dengan menggunakan

kendaraan baik umum ataupun pribadi. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Ngesti Rahayu, dimana 98 persen rumah tangga memperoleh beras di pasar atau di warung-warung di dalam desa. Lebih dari separuh atau sekitar 63,3 persen dari rumah tangga tersebut dapat mencapai pasar atau warung dengan berjalan kaki, dan sisanya menggunakan kendaraan umum atau pribadi. Kondisi di atas menunjukkan rumah tangga di kedua desa di Lampung, mempunyai akses fisik yang baik untuk memperoleh pangan meskipun tingkat ketersediaan pangannya (di tingkat rumah tangga) berbeda.

Tabel 3.6. Distribusi rumah tangga menurut tempat perolehan pangan

Tempat memperoleh makanan pokok	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Dipasar/toko/warung dlm desa	90.6	98.2	93.5	9.5	16.0	11.8	50.8
Dipasar/tokok/warung luar desa dlm kec	5.9	0.9	3.9	24.0	49.1	32.7	19.0
Dipasar/toko/warung di kota kec	0.6	0.9	0.7	0.5	10.4	3.9	2.4
Diluar kecamatan	1.2	0.0	0.7	66.0	24.5	51.6	27.4
Lainnya	1.8	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Tabel 3.7. Disribusi rumah tangga menurut cara mencapai tempat perolehan pangan

Cara mencapai tempat	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Berjalan kaki	76.0	63.3	71.0	99.0	19.0	71.5	71.3
Dengan kendaraan sendiri	16.8	33.9	23.6	0.0	1.0	0.3	11.4
Dengan kendaraan umum	7.2	0.9	4.7	1.0	80.0	28.2	17.0
Lainnya	0.0	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Kondisi di kedua desa penelitian di Nusa Tenggara Timur menunjukkan keadaan yang berbeda dengan di Lampung. Kedua desa penelitian di NTT, mempunyai akses lebih sulit untuk memperoleh kebutuhan pangan terutama jika terjadi kekurangan untuk konsumsi dari hasil panen sendiri. Hampir tidak ada warung yang menjual kebutuhan sehari-hari di kedua desa ini. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga (sekitar 66 persen) di Enoneontes membeli bahan pangan pokok di luar kecamatan. Sekitar 99 persen dari rumah tangga yang membeli jagung di luar desanya mencapai tempat tersebut dengan berjalan kaki. Sementara itu proporsi terbesar (sekitar 49,1 persen) rumah tangga di Naukae memperoleh (membeli) jagung di desa lain masih dalam kecamatan yang sama (Amanuban Barat). Sebagian besar dari rumah tangga yang membeli jagung di luar desanya biasanya mencapai tempat pembelian dengan menggunakan kendaraan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap transportasi, yang mempengaruhi akses terhadap bahan pangan, di Desa Naukae lebih baik daripada di Enoneontes. Salah satu faktor penyebab kurangnya akses rumah tangga di Enoneontes terhadap pangan adalah letak desa yang cukup jauh dari pasar. Umumnya penduduk Enoneontes membeli dan menjual kebutuhan hidup sehari-hari di Pasar Soe yang jaraknya cukup jauh. Meskipun jarak tersebut cukup jauh, namun biasanya ditempuh dengan berjalan kaki. Sementara itu, jarak Desa Naukae dengan pasar cukup dekat, disamping itu sebagian wilayah Naukae terletak di dekat jalan raya sehingga akses ke pasar lebih baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan akses untuk mendapatkan kebutuhan pangan menjadi agak sulit di kedua desa penelitian di NTT berkaitan dengan aturan adat di kedua desa tersebut yang disebut "banu panak lopo". Aturan ini yang tidak membolehkan warga menjual jagung hasil panen jika diperkirakan hasil tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Dalam aturan ini juga tersimpan makna bahwa setiap rumah tangga harus mempunyai simpanan jagung untuk kebutuhan selama satu tahun sampai panen berikutnya sehingga hampir tidak ada rumah tangga yang menjual jagung kepada tetangganya sesama penduduk desa, karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Akibatnya jika terjadi kekurangan pangan di rumah tangga terpaksa harus membeli ke luar desa.

Akses rumah tangga secara ekonomi dapat dilihat dari kemampuan rumah tangga untuk memperoleh (membeli) pangan dengan harga yang terjangkau. Rumah tangga yang mempunyai lahan pertanian akan lebih baik dari pada rumah tangga miskin yang sebagian besar tidak mempunyai lahan pertanian. Rumah tangga miskin di keempat lokasi penelitian biasanya tidak mempunyai lahan dan hanya mengandalkan hidup dengan bekerja sebagai

buruh tani yang penghasilannya tidak pasti. Kemampuan mereka untuk membeli pangan akan semakin berkurang pada saat terjadi kegagalan panen sehingga upah yang mereka peroleh baik berupa produk pertanian maupun uang juga semakin berkurang. Meskipun pangan tersebut tersedia dimanamana mereka tidak mampu (tidak mempunyai cukup uang tunai) untuk membeli.

Akses ekonomi terhadap pangan dapat juga rendah pada rumah tangga yang mempunyai/menguasai lahan pertanian seperti misalnya di Desa Cakar Buaya. Sebagian besar rumah tangga di Desa Cakar Buaya adalah petani non beras sehingga untuk memenuhi kebutuhan beras mereka harus membeli. Harga beras per kg di desa ini adalah Rp.2.000,- untuk beras kualitas sedang. Penghasilan rumah tangga pada umumnya diperoleh dari penjualan singkong dan karet. Singkong biasanya dipanen setelah berumur delapan bulan sehingga hanya bisa panen satu kali dalam satu tahun. Penghasilan yang diperoleh dari bertanam singkong tidak besar karena harganya hanya Rp. 160,- per kg sehingga untuk 1 ha tanah yang biasanya menghasilkan 15 ton singkong hanya akan diperoleh hasil sebesar Rp.1.350.000,- per tahun. Hasil ini pun bukan hasil bersih karena petani singkong harus mengeluarkan biaya-biaya lain seperti upah untuk buruh cabut singkong dan biaya transportasi. Jika memperhatikan penghasilan rumah tangga dari kebun singkong saja, tidak mungkin bagi sebagian rumah tangga di desa ini untuk memenuhi kebutuhan pangannya sampai dengan panen berikutnya. Biasanya rumah tangga di desa ini bisa membeli beras secara tunai pada saat sehabis panen. Setelah itu mereka biasanya berhutang karena tidak mempunyai uang tunai lagi untuk membeli. Hutang tersebut baru dibayar pada saat panen berikutnya atau pada saat memperoleh uang dari hasil bekerja sebagai buruh tani.

Sebagian besar rumah tangga petani di Desa Ngesti Rahayu adalah petani beras sehingga beras diperoleh dari hasil produksi sendiri. Bisa dikatakan akses untuk memperoleh beras cukup baik. Selain untuk dimakan, sebagian gabah juga dijual untuk keperluan lainnya. Pada saat kebutuhan meningkat atau terjadi gagal panen maka rumah tangga terpaksa harus membeli beras. Pada saat seperti ini akses rumah tangga terhadap beras menjadi sulit meskipun secara fisik beras tetap dapat dijumpai dimana-mana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *copying strategy* yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memperoleh pangan pada saat itu adalah dengan cara berhutang. Harga beras juga menjadi pertimbangan rumah tangga dalam membeli pangan. Di Ngesti Rahayu, beras tidak hanya dapat di peroleh di warung tetapi juga dapat diperoleh di *huller* (tempat penggilingan beras) dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di warung.

Di NTT, pada umumnya rumah tangga memperoleh pangan pokok jagung, juga dari hasil produksi sendiri. Namun pada saat terjadi kegagalan panen atau produksi kurang maka untuk memenuhi kebutuhan jagung dapat diperoleh dengan membeli. Harga jual jagung di pasar bisa mencapai Rp.1.500,-/kg. Uang tunai untuk membeli jagung biasanya diperoleh dengan menjual hasil kebun lainnya seperti kacang panjang, pisang atau ubi. Bisa dikatakan dalam keadaan normal sebagian besar rumah tangga di Desa Naukae bisa mencukupi kebutuhan pangannya dengan baik jika dibandingkan dengan rumah tangga di Desa Enoneontes karena sebagian besar persediaan jagung rumah tangga di Desa Enoneontes yang berasal dari hasil kebun mereka sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan satu tahun.

3.3. Kualitas dan Keamanan Pangan

Ketahanan pangan rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh asupan bahan pangan yang dikonsumsi (Suryana, 2003). Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia agar dapat mempertahankan hidup dan mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan⁸. Manusia dari sejak dalam kandungan sampai usia lanjut memerlukan makanan dengan gizi yang memadai agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya, bahan pangan yang dikonsumsi juga harus memenuhi kualitas dan standar keamanan dalam arti tidak beracun.

Kualitas pangan dipengaruhi oleh kandungan gizi yang terdapat dalam makanan. Baik buruknya status gizi seseorang bergantung pada kondisi pangan yang dikonsumsi. Penelitian yang pernah dilakukan mengenai kecukupan gizi yang diperlukan manusia, menunjukkan bahwa tubuh manusia memerlukan asupan 6 golongan zat gizi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Kekurangan gizi dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental, perkembangan fisik, produktivitas dan kesanggupan kerja manusia yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesanggupan ekonomi bahkan dampak yang paling buruk dapat menyebabkan kematian (Karsin, 2004:6).

Analisis kualitas pangan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk secara mendalam menganalisa kandungan gizi yang terdapat dalam setiap

⁸ Hak setiap orang untuk mendapatkan pangan yang cukup sudah dideklarasikan sejak setengah abad yang lalu (1948) melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali pada Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1972; Konvensi Hak-hak Anak tahun 1990; Deklarasi Gizi Dunia tahun 1992; World Conference on Human Right tahun 1993; Deklarasi Ketahanan Pangan Dunia tahun 1996 dan Simposium "Pendekatan HAM dalam Kebijakan dan Program Pangan dan Gizi" oleh PBB tahun 1999 (Soekirman, 1999/2000 dalam Karsin, 2004:5).

komponen makanan, tetapi secara umum hanya melihat kualitas konsumsi di tingkat rumah tangga berdasarkan ada tidaknya asupan energi dan protein yang berasal dari bahan pangan nabati dan hewani, ke dalam tubuh manusia. Menurut ketentuan, yang digolongkan sebagai konsumsi pangan yang baik adalah, apabila makanan yang dikonsumsi sekurang-kurangnya terdiri dari sepuluh jenis pangan yang berlainan setiap hari. Makanan ini terdiri dari pangan pokok ditambah buah dan sayuran serta beberapa makanan yang mengandung lemak atau minyak, akan mengandung komponen pokok makanan seimbang, jika dimakan dalam jumlah yang cukup (Suhardjo, dkk, 1986). Dalam penelitian ini kualitas makanan hanya dilihat dari ada tidaknya protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi anggota rumah tangga setiap hari, yang dilihat dari ada tidaknya pengeluaran untuk konsumsi makanan yang mengandung protein tersebut serta dari besaran (jumlah) asupan energi dan protein. Untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai pola konsumsi dan kualitas asupan zat gizi, dilakukan pengamatan dan pencatatan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi satu rumah tangga, selama 3 hari berturut-turut. Dari hasil pengamatan dan pencatatan tersebut diperoleh angka rata-rata besarnya konsumsi energi dan protein setiap anggota rumah tangga. Untuk keperluan analisa angka tersebut dibandingkan dengan rata-rata kecukupan gizi yang dianjurkan AKG (Anjuran Kecukupan Gizi). Menurut standar minimum kebutuhan energi (kalori) dan protein, seseorang membutuhkan asupan sebesar 2,100 kkal energi/kapita/ hari dan 50 gram/protein/kapita/ hari (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, 1978).

Pembahasan pada sub bab ini akan difokuskan pada dua hal, yaitu: pertama melihat kualitas dari berbagai jenis pangan pokok yang biasa dikonsumsi dilihat dari kandungan gizinya dengan menggunakan ukuran dalam Modul Konsumsi Susenas tahun 2002. Hal lain yang juga diangkat dalam tulisan ini adalah persepsi tentang makanan bergizi, pembagian makanan dalam keluarga (apakah ada perbedaan antara orang tua dengan anak-anak, atau antara laki dengan perempuan, serta pola konsumsi bayi dan wanita menyusui⁹). Berkaitan dengan faktor keamanan, dibahas cara pengolahan maupun penyimpanan bahan pangan dikaitkan dengan kandungan gizinya. Masih dalam bagian ini juga dibicarakan mengenai kasus keracunan yang pernah terjadi dan faktor yang sekiranya berpotensi memicu terjadinya keracunan. *Kedua*, menganalisis ketahanan pangan dari kecukupan kebutuhan kalori dan protein anggota rumah tangga. Tercakup di dalamnya pembahasan mengenai kualitas dari sumber energi dan protein yang dikonsumsi yang antara lain dilihat dari jumlah dan keberagaman atau ketidakberagaman pangan yang dikonsumsi.

⁹ *Bayi, wanita menyusui adalah kelompok yang secara biologis, paling rawan terhadap kekurangan pangan atau gizi (Rimbawan dan Baliwati, 2004:24).*

3.3.1. Kualitas Konsumsi Pangan Pokok: *Yang penting kenyang, gizi nomor dua.*

Pembahasan tentang konsumsi pangan yang memenuhi persyaratan gizi dan kesehatan mencakup juga pembahasan mengenai jenis pangan, jumlah pangan yang dikonsumsi serta pantangan-pantangan yang berkaitan dengan konsumsi pangan. Soehardjo dkk (1986) mengemukakan bahwa keberagaman konsumsi pangan merupakan indikator¹⁰ untuk mengukur pola pangan yang baik (kualitas) meskipun tidak dapat menilai status gizi secara tepat dan langsung. Apabila seseorang mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu gizi yang memadai sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara aktif dan sehat, dikatakan berstatus gizi baik. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka disebut berstatus gizi salah (*malnutrition*), yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu gizi kurang dan gizi lebih (Heri Mis Cicih, Lilis, 1997: 26). Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas konsumsi pangan. Alan Berg (1986:86) menyebutkan faktor ekonomi dan harga, serta faktor sosio-budaya dan religi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pangan penduduk. Kemudian Harper dkk. dalam Soehardjo (1986) juga menyebutkan bahwa produksi pangan untuk keperluan rumah tangga, pengetahuan akan gizi dan tersedianya pangan adalah faktor utama yang mempengaruhi konsumsi pangan sehari-hari.

Bagi kebanyakan penduduk di kedua daerah penelitian, yang terpenting dalam pola konsumsi mereka bukanlah makanan yang bergizi tetapi yang dapat memberikan mereka tenaga sehingga dapat bekerja dan tidak sakit. Jenis pangan seperti tiwul, ubi, singkong rebus bagi sebagian besar penduduk, dianggap sudah mencukupi karena selain dapat memulihkan tenaga juga memberikan rasa kenyang lebih lama daripada nasi. Bagi masyarakat, yang terpenting adalah mereka mempunyai persediaan bahan makanan pokok yang cukup untuk beberapa waktu lamanya (terlepas dari makanan tersebut bergizi tinggi atau tidak), seperti dikatakan seorang narasumber:

.....dia makan tapi dia tidak mahami dan tidak mengerti makanannya bernilai gizi atau tidak, yang dipikirkan asal makan. (Kutipan wawancara dengan salah seorang Tokoh Masyarakat di desa Enoneontes).

¹⁰ Salah satu cara untuk menilai status gizi adalah melalui studi konsumsi pangan (selain melalui pemeriksaan fisik dan laboratorium). Pemeriksaan fisik dikenal melalui penilaian antropometrik yang meliputi pengukuran tinggi, berat, tebal lipatan kulit dan lingkaran lengan. Status gizi selain ditentukan oleh jumlah dan mutu pangan yang dikonsumsi, secara langsung juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan sanitasi lingkungan (Heri Mis Cicih, Lilis, 1997: 26).

Makan supaya kenyang dan bisa kerja. Jadi walaupun tidak pakai sayur, pakai jagung saja tidak apa-apa yang penting kenyang dan pikiran menjadi tenang.

(Kutipan wawancara dengan seorang responden dari kategori rumah tangga tahan pangan dan miskin, di Desa Naukae).

T: Kalau menurut Bapak yang dimaksud makanan sehat yang gimana?

J: Itu nggak tahu pak, pokoknya asal makan seadanya apa aja makan. Nggak tau tuh sehat nggak sehat makan.

T: Apa yang penting cuma kenyang aja?

J: He....he....

T: Kalau emang penting kenyang terus makan nggak pakai lauk gimana Pak?

J: Kalau itu perutnya lapar ya enak aja Bu.

(Kutipan wawancara dengan petani dari kelompok rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin, di Desa Cakar Buaya).

Sebagian besar alasan yang diberikan rumah tangga dalam mengkonsumsi pangan belum menunjukkan pemahaman akan fungsi makanan dikaitkan dengan kesehatan. Mereka masih mengemukakan alasan secara intuitif, seperti karena enak rasanya, mengenyangkan, tidak bosan dan kebiasaan saja. Kebanyakan narasumber yang ditemui tidak terlalu mengkhawatirkan ada tidaknya lauk-pauk, jadi “seketemunya lauk saja”. Terkadang hanya dengan menggunakan garam dan vetsin (istilah yang digunakan warga di daerah penelitian di NTT untuk menyebutkan makan jagung dengan garam atau vetsin saja adalah makan ‘kosong’) atau kerupuk dan cabe, sudah dapat dikatakan ‘teman makan’ nasi atau jagung. Kecenderungan tersebut berlaku untuk semua rumah tangga baik di NTT maupun di Lampung. Sementara bila dilihat alasan sosial ekonominya, pada umumnya jenis lauk-pauk yang dikonsumsi adalah yang dapat diproduksi sendiri, dalam arti tidak membeli, seperti sayur-sayuran. Keadaan ini juga dapat disebabkan karena kondisi ketidakmampuan untuk membeli lauk-pauk yang lebih berkualitas dan bergizi, bukan hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian.

Kotak 4: Lauk-pauk 'seketemunya' saja

Wawancara 1:

T: Pak, temen makan nasinya atau temen makan singkongnya biasanya apa? Lauknya gitu maksudnya ?

J: Kalau soal lauknya itu seketemunya kalau saya itu, kadang-kadang ya sayur gori, sayur nangka itu.

T: Beli atau punya sendiri (pohon nangkanya)?

J: Ya..kadang-kadang yang ngasih tetangga itu lah. Punya sendiri enggak ada, ya tetangga yang ngasih, ..ya daun singkong, kalau ada bayem, sayur bayem.

Wawancara 2:

T: Tapi kalo untuk kebutuhan lauk pauk gitu apatemannya makan tiwul itu?

J: Ya itu hanya ala kadar aja pak. Ya kadang ya kalau ada uang beli, kalau nggak ada ya apa adanya lah. Daun singkong cari di kebun-kebun gitugori tuh...nangka.

Sumber: Wawancara 1: dengan seorang buruh tani dari rumah tangga tidak tahan dan miskin, Desa Cakar Buaya

Wawancara 2: dengan seorang perempuan petani dari rumah tangga kurang tahan dan miskin, Desa Cakar Buaya.

Meskipun demikian ada sebagian narasumber yang memahami apa yang dimaksudkan dengan makanan yang bergizi, bahwa makan bukan semata-mata untuk mengenyangkan perut saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi. Namun demikian, pemahaman tersebut tidak dengan sendirinya dapat diterapkan dalam pola konsumsi sehari-hari karena keterbatasan ekonomi seperti yang diutarakan oleh salah seorang narasumber:

Makanan yang memenuhi standar pokok makanan, seperti nasi, bubur, ada lauk pauknya seperti, tahu-tempe, telur, kerupuk dan buah-buahan seperti jambu, rambutan, pisang.

Makan harus kenyang dan bergizi, tapi ini tergantung keadaan, kalau mau kenyang dan bergizi tiap hari, dari mana uangnya ?

(Kutipan wawancara dengan seorang responden di Desa Ngesti Rahayu).

Beras maupun jagung memang merupakan sumber karbohidrat yang baik¹¹ dan karena itu juga sumber tenaga. Demikian pula halnya dengan umbi-umbian (singkong, talas, kentang, ubi jalar dan ubi) merupakan sumber energi yang baik¹². Hanya dengan mengkonsumsi pangan tersebut, sudah dapat memberikan rasa kenyang dan tenaga untuk bekerja. Sebagian besar konsumsi pangan penduduk di daerah penelitian masih didominasi oleh asupan karbohidrat. Terutama di daerah penelitian di NTT, dalam satu hari, sebuah keluarga dengan jumlah anggota rumah tangganya 4-5 orang dapat menghabiskan kurang lebih 2 kg jagung dan 2 kg ubi kayu. Jumlah pangan sebanyak ini diakui sangat diperlukan untuk menghasilkan tenaga agar dapat bekerja di kebun dan melakukan aktivitas lainnya. Hampir semua narasumber beranggapan bahwa mengkonsumsi jagung atau umbi-umbian lebih mengenyangkan dibandingkan mengkonsumsi nasi, seperti yang diutarakan oleh salah seorang narasumber di bawah ini:

Walaupun makan 10 piring nasi juga masih terasa lapar, sedangkan kalau makan jagung 1 piring kuat dari pagi sampai malam.

(Kutipan wawancara dengan responden dari rumah tangga kategori kurang tahan dan tidak miskin, Desa Enoneontes)

Di lokasi penelitian di NTT, letak kebun dengan perumahan penduduk relatif jauh, juga dari lokasi permukiman ke luar desa tidak ada alat transportasi. Dibutuhkan kurang lebih 3 jam lamanya untuk ke luar desa dengan berjalan kaki melalui jalan pintas. Dengan demikian tidak mengherankan apabila kebanyakan warga di daerah penelitian di NTT membutuhkan asupan karbohidrat yang sedemikian besar. Makin banyak seseorang aktif secara fisik makin banyak energi yang diperlukan (Suhardjo dkk, 1986:109). Kebiasaan mengkonsumsi karbohidrat lebih banyak dari asupan energi lainnya merupakan gejala yang umumnya ditemukan di Asia Tenggara. Kira-kira 70 sampai 85 persen dari pangan yang dimakan penduduk di benua tersebut, bersumber dari butiran padi-padian, umbi-umbian dan akar-akaran, yang menyediakan sebagian besar karbohidrat yang digunakan tubuh (Berg, Alan, 1986)

Selanjutnya, apabila membandingkan kualitas antara beras, tiwul dan juga jagung dari kandungan energi, protein, lemak dan karbohidrat berdasarkan

¹¹ Bahan makanan tersebut juga merupakan sumber protein yang berguna, sebab 6 sampai 12 persen dari semua padi-padian biasanya terdiri dari protein. Padi-padian juga mengandung beberapa mineral dan beberapa vitamin yang dikenal sebagai vitamin B-kompleks. Khususnya butir padi-padian yang utuh merupakan sumber besi, thiamin, riboflavin dan niasin. Jagung kuning mengandung vitamin A.

¹² Akar-akaran, umbi-umbian (singkong, talas, kentang, ubi jalar dan ubi) dan pangan berpati (sukun atau pisang untuk dimasak), juga merupakan sumber energi yang baik, beberapa diantaranya juga merupakan sumber kalsium, vitamin C dan vitamin A.

tabel konversi kalori, yang diperoleh dari data Modul Konsumsi Susenas 2002, ternyata tiwul lebih besar kandungan energi/kalori dibandingkan dengan beras. Demikian pula halnya dengan kandungan karbohidratnya, tiwul lebih besar daripada beras. Namun kandungan protein dan lemak pada beras, jauh lebih besar di atas tiwul. Berdasarkan perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi tiwul sebagai bahan makanan pokok secara seimbang (disertai dengan lauk-pauk), juga dapat mencukupi kebutuhan energi dan proteinnya. Tetapi proses pengolahan tiwul lebih sulit dan jika tidak dilakukan dengan baik berisiko keracunan.

Keunggulan lainnya dari ubi kayu yang merupakan bahan dasar tiwul sebagai sumber energi utama dibandingkan dengan beras/padi adalah bila tepung ubi kayu dicampur dengan 18 persen tepung kedelai, tepung komposit tersebut menjadi bahan pangan pokok yang bergizi tinggi dan lebih lengkap dibandingkan dengan padi. Dengan demikian, diversifikasi dengan memanfaatkan tepung komposit tersebut berpeluang mengurangi jumlah penderita anemia, kekurangan zat besi, protein dan vitamin A dan C. Keunggulan tersebut memberikan gambaran bahwa ubi kayu merupakan sumber energi yang potensial dan dengan pengolahan sederhana dapat menjadi bahan pangan bergizi tinggi dan lengkap (J Wargiono, tanpa tahun, www.kompas.com).

Tabel 3.8. : Konversi energi, protein, lemak dan karbohidrat tiwul dan beras

Kandungan	Tiwul/ kg	Beras/ kg
Energi	3630,00	3622,00
Protein	11,00	84,75
Lemak	5,00	14,50
Karbohidrat	882,00	777,50

Sumber: Modul Konsumsi Susenas 2002

Kandungan energi jagung dalam bentuk pipilan maupun tepung jagung di bawah energi beras, meskipun perbedaannya relatif kecil. Namun untuk kandungan protein dan lemak, baik jagung pipilan maupun tepung jagung, di atas beras. Sementara untuk karbohidrat, jagung pipilan adalah yang terendah kandungannya, sementara antara tepung jagung dengan beras tidak terlampau besar perbedaannya. Seperti halnya dengan tiwul, ditinjau dari segi kualitasnya, apabila jagung dikonsumsi secara imbang (dengan lauk-pauk) juga dapat dikatakan mencukupi kebutuhan gizi. Tetapi melalui proses pengolahan dan penyimpanan lama yang memakan waktu kemungkinan kandungan gizi jagung bosc sudah berkurang.

Tabel 3.9. : Konversi energi, protein, lemak dan karbohidrat jagung pipilan,tepung jagung dan beras

Kandungan Komoditas	Jagung pipilan/ kg	Tepung jagung (maizena)/ kg	Beras/ kg
Energi	3200,00	3550,00	3622,00
Protein	82,80	92,00	84,75
Lemak	39,00	39,00	14,50
Karbohidrat	663,30	737,00	775,50

Sumber: Modul Konsumsi Susenas 2002

Pantangan Makanan

Menurut Alan Berg (1986:73) salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang adalah faktor sosial-budaya. Kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Kebudayaan juga menentukan kapan seseorang boleh atau tidak boleh memakan suatu makanan (tabu), walaupun tidak semua tabu rasional bahkan banyak jenis tabu yang tidak masuk akal. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Ada tiga kelompok masyarakat yang biasanya mempunyai pantangan makan, yaitu anak kecil, ibu hamil dan ibu menyusui.

Di Lampung maupun di NTT, ternyata sebagian besar rumah tangga, masih mengenal makanan yang dipantang (tidak boleh dimakan) meskipun pantangan ini hanya berlaku untuk wanita setelah melahirkan. Bentuk pantangan semacam ini sudah dikenal sejak dulu dan dijalankan secara turun temurun. Misalnya di NTT, tiga sampai tujuh hari setelah melahirkan seorang wanita tidak boleh makan ikan karena takut mencemari air susu dan bayi bisa gatal-gatal. Bahkan ada juga yang pantang tidak makan daging sampai 40 hari lamanya sejak setelah melahirkan. Selama masa pantangan tersebut, ibu hanya diperbolehkan makan jagung dan sayur-sayuran (namun ada juga yang mengatakan ibu yang telah melahirkan tidak boleh makan sayur selama 40 hari karena takut bayinya gatal-gatal), sementara telur diperbolehkan untuk dimakan. Di Lampung, dikenal beberapa jenis makanan yang dipantang perempuan sewaktu masa kehamilan dan setelah melahirkan, seperti tidak boleh makan semangka karena dapat menaikkan tekanan darah; ikan juga dilarang karena dapat mempengaruhi jahitan; kemudian tidak boleh makan bawang putih karena dapat mempengaruhi

puser bayi. Sebaliknya, kaum ibu dianjurkan untuk makan daun singkong atau daun pepaya untuk memperlancar produksi ASI. Hal yang cukup memprihatinkan, ASI yang pertama (*collustrum*) acapkali justru dibuang karena dianggap susu basi. Padahal *collustrum* tersebut berfungsi sebagai antibodi untuk bayi.

Kebiasaan pantangan semacam ini jelas dapat berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan ibu dan anak. Apabila sejak dalam kandungan asupan gizi untuk bayi sudah kurang, hal ini akan berdampak pada perkembangan mental maupun fisik sang bayi. Pola makan ibu hamil juga tidak terlihat ada perbedaan, baik sebelum maupun pada masa kehamilan. Menurut hasil wawancara mendalam baik di Lampung maupun di NTT, sebagian besar narasumber mengatakan jenis maupun jumlah (porsi) makanan yang dikonsumsi selama kehamilan sama saja dengan anggota keluarga yang lain. Menurut teorinya pemberian pangan harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing individu dalam keluarga seperti anak, perempuan yang mengandung dan ibu yang menyusui harus memperoleh sebagian besar pangan yang kaya akan protein (tidak hanya cukup karbohidratnya saja) (Suhardjo, dkk. 1986). Bahkan yang lebih memprihatinkan bukan hanya ibunya saja yang kurang memperhatikan kebutuhan gizi selama kehamilannya tetapi tidak jarang seorang bayi memperoleh makanan tambahan hanya berupa bubur (terbuat dari jagung atau nasi) dengan hanya diberi garam saja.

3.3.2. Keamanan Pangan: Pengolahan dan Penyimpanan

Prasayarat lainnya untuk mencapai ketahanan pangan adalah faktor keamanan pangan yang sangat tergantung pada proses pengolahan dan penyimpanan. Mata rantai timbulnya masalah keamanan pangan dimulai saat prapanen, pascapanen, pengolahan, penyimpanan, transportasi dan distribusi sampai saat pangan disajikan kepada konsumen. Setelah pangan dipanen, masalah keamanan pangan menjadi semakin kompleks akibat berbagai perlakuan dan penyimpanan. Nilai gizi suatu bahan makanan dipengaruhi oleh perlakuan yang diterima mulai saat panen sampai saat dikonsumsi. Hal ini tidak hanya meliputi cara-cara pengolahan tetapi juga cara penyimpanannya. Dikalangan petani dikenal serangkaian kegiatan dan dilakukan secara turun temurun berkaitan dengan produksi, panen, pengolahan, penyimpanan, penyiapan dan penyajian pangan. Rumah tangga petani sering mengandalkan pada satu tanaman tertentu seperti padi, gandum atau jagung sebagai pangan pokok. Tanaman pangan tersebut seringkali dipanen hanya satu kali dalam setahun, sehingga cara penyimpanan dan pengolahan pangan pokok tersebut sangat penting agar dapat menyediakan pangan bagi rumah tangga selama jangka waktu dari panen yang satu ke

yang lainnya. Namun, cara penyimpanan dan pengolahan yang digunakan seringkali merubah potensi simpanannya. Beberapa cara pengolahan pangan mengakibatkan pemborosan dan penggunaan pangan yang tidak efisien serta berpengaruh pada nilai gizinya. Beberapa zat gizi dapat terbuang dari pangan itu karena penanganan yang tidak baik pada waktu panen, penyimpanan dan pengolahan (Suhardjo dkk, 1986: 23-24, 47).

Di kedua desa penelitian di Lampung, rumah tangga tani seringkali menyimpan beras dalam bentuk gabah, dan pada saat diperlukan baru dibawa ke penggilingan (dari 50 kg gabah bisa diperoleh 35 kg beras). Umumnya, gabah disimpan dalam karung plastik dan diletakkan di dalam rumah (ada yang diletakkan dalam kotak kayu) dan dikeringkan dengan cara dijemur di panas matahari. Cara penyimpanan gabah harus dilakukan seefektif mungkin agar dapat mencegah penurunan mutu gabah tersebut. Selama masa penyimpanan akan selalu terjadi proses penurunan mutu beras (beras bersifat *perishable*, cepat rusak) berhubung dengan karakteristik butir beras yang terus mengalami respirasi (penguapan).

Agar gabah tahan lama, kandungan airnya harus dikurangi hingga mencapai 13-16 persen (pada saat panen, gabah padi biasanya mempunyai kandungan air yang bervariasi sampai 30 persen). Jika tidak, gabah cepat menjadi busuk (mengalami perubahan warna, lapuk) dan mutu gilingnya merosot karena gabah banyak yang rusak. Oleh karena itu, proses pengeringan gabah harus diperhatikan dengan benar karena jika gabahnya tidak cukup kering, kelembaban yang dihasilkan oleh pernapasan mengakibatkan pertumbuhan cendawan yang dapat merusak gabah secara cepat. Pengeringan secara tradisional dalam panas matahari merupakan salah satu cara efektif untuk memperkecil kelembaban. Gabah harus ditempatkan tinggi di atas tanah, dipelihara kering dan aman terlindungi. Sebelum digiling, gabah itu paling efektif disimpan dalam bentuk padi, karena kulitnya memberikan perlindungan terhadap serangan serangga, jamur bahkan juga *rhodensia* (Suhardjo dkk, 1986:137-138). Hal lain yang berpengaruh pada kualitas beras adalah penggilingan. Penggilingan padi umumnya didominasi oleh penggiling kecil dan umurnya sudah puluhan tahun sehingga berpengaruh buruk terhadap rendemen dan kualitas beras (Suhardjo dkk, 1986: 225).

Selain penyimpanan gabah yang perlu penanganan secara benar agar terhindar dari kerusakan, pembuatan tiwul juga harus melalui proses pengolahan yang benar dan bertahap untuk menghilangkan racun pada getah ubi kayu/singkong. Untuk sebagian penduduk di Desa Cakar Buaya, tiwul juga dibuat dari singkong racun yang biasanya sebagai bahan pembuat aci. Proses pembuatan tiwul diawali dari proses pencucian singkong, perendaman, penjemuran dan pengkukusan, seperti berikut ini:

Kotak 5: Proses pembuatan tiwul

- Singkong dikupas, dibelah-belah, dicuci lalu direndam sekitar tiga malam untuk menghilangkan racun yang melekat pada singkong.
- Setelah itu dicuci kembali dan dijemur sampai kering (untuk menjadi kering membutuhkan waktu antara 7-10 hari).
- Singkong yang sudah kering ditumbuk sehingga berbentuk tepung.
- Setelah menjadi tepung diberi air, lalu dikukus dan kemudian dijemur kembali sehingga menjadi oyek.
- Bila sudah menjadi oyek, menurut informasi bisa disimpan selama kurang lebih dua tahun lamanya.

Sumber: Hasil wawancara mendalam dengan narasumber, Penelitian di Provinsi Lampung tahun 2003.

Melalui proses yang bertahap tersebut, yang perlu diteliti lebih lanjut adalah kandungan gizinya. Karena cara penyiapan, pemasakan, penyajian dan pengawetan pangan yang ber' lapis-lapis' juga mempengaruhi kandungan zat gizi/vitamin. Pada umumnya jika pangan makin ditumbuk, dihaluskan, diiris, diperkecil atau diolah dengan suatu cara lain, makin besar pula kehilangan zat gizi/vitaminnya. Beberapa zat gizi/vitamin dapat rusak jika bahan makanan dimasak dalam air yang berlebihan untuk jangka waktu lama; beberapa lagi rusak karena adanya asam dan lainnya karena adanya basa (Suhardjo dkk, 1986:47). Seperti halnya dengan beras, apabila dicuci terlalu sering, kandungan vitamin B-nya dapat hilang/berkurang. Tetapi, dengan ubi kayu jenis beracun, apabila tidak diolah berulang kali, mungkin masih mengandung racun. Salah satu masalah yang terdapat di dalam ubi kayu/singkong adalah kandungan racun yang sangat kuat (HCN atau sianida). Perendaman sangat diperlukan untuk mengurangi HCN. Proses penjemuran pada sinar matahari dapat menguraikan HCN 80 %. Pengelupasan kulit perlu dilakukan karena justru dalam kulit ini terdapat HCN dengan konsentrasi mencapai 15 kali lebih besar dari konsentrasi HCN di dalam daging umbinya (Anwar, Faisal, 2004:86).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa mereka sudah terbiasa menggunakan singkong jenis beracun sebagai bahan dasar pembuatan oyek atau tiwul. Bahkan, penggunaan ubi kayu yang dapat dimakan (bukan jenis yang beracun) sudah jarang. Penduduk lebih banyak yang menanam ubi kayu jenis yang beracun tersebut karena ternyata kandungan 'aci' atau patinya untuk bahan dasar tapioka juga lebih besar dibandingkan dengan jenis ubi kayu yang tidak beracun. Meskipun

bahan dasarnya adalah dari jenis singkong beracun namun kasus keracunan di Desa Cakar Buaya jarang terjadi, hanya 1-2 kasus saja karena proses pengolahannya yang tidak sempurna, sehingga tiwul masih mengandung racun¹³. Di Desa Enoneontes, NTT, pernah terjadi kasus keracunan yang menimpa satu keluarga sehabis mengkonsumsi ubi kayu yang sudah ditanam lebih dari tiga tahun. Menurut penuturan salah satu anggota keluarga tersebut, mereka terpaksa mengkonsumsi ubi kayu tersebut karena tidak ada lagi yang dapat dimakan. Gejala keracunan yang dirasakan pusing dan muntah tapi tidak sampai berobat ke dokter/ puskesmas, mereka hanya minum air kelapa saja sebagai penawar racun.

Pada dasarnya, di NTT juga dikenal cara pengawetan ubi kayu agar dapat disimpan selama 5-6 bulan. Caranya adalah sebagai berikut: ubi diiris tipis-tipis kemudian dikeringkan (dijemur) selama dua minggu. Kadang pengeringan juga dengan cara di asap di dalam rumah bulat. Kalau ubi kayu tersebut sudah kering disimpan dalam karung. Saat akan dimakan, ubi kayu ditumbuk dahulu hingga menjadi tepung, kemudian dikukus. Dalam keadaan kering, ubi kayu tahan disimpan sampai 5-6 bulan. Pengolahan dengan cara ini juga diyakini dapat menghilangkan racun pada ubi kayu.

Seperti halnya dengan gabah, jagung sebagai makanan pokok penduduk di NTT, juga disimpan setelah melalui proses pengawetan dengan cara pengasapan, yang memakan waktu berbulan-bulan untuk mencegah pembusukan dan agar dapat bertahan lama. Menurut informasi, jagung yang sudah kering dapat disimpan selama kurang lebih 2 tahun (bahkan ada yang sampai 5 tahun). Seperti yang diuraikan oleh Saliem dkk (2002:89) penyimpanan jagung dilakukan dalam bentuk tongkol yang diikat. Setiap ikat terdiri dari 8 tongkol setara 1 kg. Setiap 20 ikat atau 160 tongkol jagung disebut 1 kuda. Penyimpanan jagung dalam bentuk tongkol dan ikatan, diletakkan dalam lumbung yang disebut 'rumah bulat'. Disebut demikian karena rumah tersebut berbentuk bulat, dengan dinding terbuat dari bebak atau batang pohon siwalan atau aren yang dipipihkan dan beratap daun alang-alang yang dikeringkan. Dalam lumbung, jagung diletakkan pada bagian atas atau 'para-para', dimana dibawahnya adalah tungku yang digunakan untuk memasak. Dengan demikian, rumah bulat selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan juga sekaligus sebagai dapur. Dapur umumnya menggunakan tungku berupa batu yang disusun segitiga dan menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Dengan menyimpan jagung dalam bentuk tongkol basah di atas tungku tersebut jagung akan kering dan

¹³ Meskipun kasus keracunan orang makan beras belum pernah terjadi baik di desa Cakar Buaya maupun Ngesti Rahayu, tetapi hal tersebut perlu diwaspadai karena umumnya penduduk menempatkan beras dalam karung plastik bekas pupuk. Meskipun karung tersebut sudah dicuci dengan air irigasi, namun kemungkinan keracunan karena pencemaran residu pupuk sangat besar peluangnya.

tahan lama. Penyimpanan jagung dalam rumah bulat selain sebagai persediaan pangan juga sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual bila diperlukan dan ada kelebihan persediaan setelah kebutuhan keluarga terpenuhi.

Pada dasarnya proses pengasapan dalam rumah bulat ini lebih alamiah karena tidak perlu menggunakan bahan kimia untuk mengawetkan jagung dan terbukti ampuh untuk mengusir rayap pemakan jagung. Tetapi untuk jagung jenis hibrida, jika pengasapan tidak dilakukan terus menerus, jagung akan lebih cepat busuk dibandingkan jagung jenis lokal. Tanpa pengasapan secara kontinyu jagung dari bibit hibrida hanya dapat bertahan selama 3 bulan saja, sedangkan kalau dilihat dari hasil produksinya jagung hibrida lebih tinggi dibandingkan jagung lokal. Petani di Desa Naukae pernah mengalami kerugian karena proses pengawetan dan penyimpanan jagung hibrida yang kurang sempurna sehingga cepat membusuk. Selain dari itu juga perlu diteliti apakah proses pengawetan dan penyimpanan yang begitu lama akan mempengaruhi kandungan gizi jagung tersebut.

Pengolahan jagung untuk konsumsi makan juga bermacam-macam tergantung jenis/macamnya: jagung titi, bose atau katemak. Cara memasak jagung bose seperti membuat bubur nasi. Sebelum dimasak kulit ari jagung dibuang lebih dulu kemudian dimasak bersama daun-daunan, kacang-kacangan serta garam atau vetsin. Jagung titi adalah jagung yang ditumbuk halus (biasanya diberikan pada anak-anak atau lanjut usia); sedangkan jagung katemak adalah jagung yang dipipil dari tongkol jagung yang sudah kering kemudian langsung dimasak bersama sayuran. Sayuran yang umum dicampur dalam katemak tersebut sesuai ketersediaan yang ada di kebun yaitu daun singkong, daun ubi, pucuk daun labu siam, daun labu kuning, daun atau buah pepaya muda serta jantung pisang. Sayur-sayuran ini kadang ditumis atau kalau tidak ada minyak, hanya direbus saja bersama jagung.

3.4. Ketahanan Pangan Rumah Tangga: Kecukupan Kebutuhan Energi dan Protein Didominasi oleh Asupan Karbohidrat dan Protein nabati

Mengukur ketahanan pangan rumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tim peneliti dari Fakultas Pertanian IPB, mencoba mengukur ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga berdasarkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Cara lain untuk mengukur ketahanan pangan adalah melalui perbandingan antara jumlah energi dan protein yang dikonsumsi oleh semua anggota rumah tangga dengan tingkat kecukupan energi dan protein yang dibutuhkan oleh anggota rumah tangga tersebut. Suatu rumah tangga disebut tahan pangan jika jumlah energi dan proteinnya yang dikonsumsi setiap anggotanya lebih besar dari standar energi

dan protein yang dibutuhkannya (Sumarwan, Ujang dan Dadang Sukandar, 1998). Menurut konsep ketahanan pangan dari FAO (tahun 1996), tingkat ketahanan pangan rumah tangga dapat diukur berdasarkan variabel stabilitas dan persediaan pangan, frekuensi serta kualitas makanan. Dengan mengacu pada definisi FAO, ketahanan pangan rumah tangga dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu:

1. Rumah tangga tahan pangan.
2. Rumah tangga kurang tahan pangan
3. Rumah tangga tidak tahan pangan
(Lihat Bab II)

Tabel 3.10.: Persentase Rumah Tangga di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur menurut Tingkat Ketahanan Pangan

Tingkat ketahanan pangan	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Tahan	4.0	47.5	25.8	0.5	59.5	29.2	27.4
Kurang tahan	59.5	29.0	44.3	13.4	34.2	23.5	34.0
Tidak tahan	36.5	23.5	30.0	86.1	6.3	47.3	38.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Tabel 3.10. menunjukkan bahwa untuk Provinsi Lampung, Desa Ngesti Rahayu merupakan desa yang ketahanan pangannya lebih baik dibandingkan Cakar Buaya. Keadaan ini memang sesuai dengan alasan pemilihan daerah penelitian, yaitu Desa Ngesti Rahayu sebagai desa yang mewakili daerah berketahanan pangan tinggi dan Desa Cakar Buaya mewakili desa di daerah yang berketahanan pangan kurang. Perbedaan ketahanan pangan kedua desa di Lampung ini, dapat dikatakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang dapat diolah sebagai lahan pertanian pangan (sawah). Seperti yang sudah disinggung sebelumnya (lihat sub bab 3.1 mengenai ketersediaan pangan), kondisi lahan di Desa Ngesti Rahayu relatif subur dibandingkan dengan Desa Cakar Buaya, sehingga untuk bercocok tanam padi sangat dimungkinkan. Dibantu dengan irigasi dari waduk Tegineneng, petani di desa ini dapat panen padi satu - dua kali setahun. Meskipun lahan yang dimiliki para petani di Desa Ngesti Rahayu relatif lebih kecil dibandingkan dengan pemilikan lahan di Desa Cakar Buaya, tetapi lahannya relatif lebih subur. Sebaliknya dengan Desa Cakar Buaya, meskipun diawal penempatan di desa tersebut, setiap rumah tangga transmigran memperoleh lahan seluas 5 Ha, namun kondisi tanahnya kurang subur untuk lahan pertanian padi,

lebih sesuai untuk ditanami singkong atau tanaman keras seperti kelapa sawit¹⁴. Di samping itu, masih banyak lahan tidur yang belum diolah penduduk karena keterbatasan tenaga dan modal. Dengan kondisi lahan yang demikian, dapat dimengerti apabila kehidupan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngesti Rahayu, yang antara lain dapat dilihat dari kondisi ketahanan pangannya, lebih baik dibandingkan dengan masyarakat di Desa Cakar Buaya.

Untuk Provinsi NTT, Desa Naukae, kondisi ketahanan pangan rumahtangganya lebih baik dibandingkan Desa Enoneontes (Tabel 3.10). Berdasarkan pendalaman yang dilakukan di kedua desa tersebut ada dua faktor yang menyebabkan kondisi ketahanan pangan di Enoneontes berbeda dengan di Naukae. *Pertama* berkaitan dengan kondisi lahan yang berbeda kesuburannya. Faktor *kedua* berkaitan dengan sumber daya manusianya dan faktor *ketiga* berkaitan dengan budaya masyarakat setempat, berkaitan dengan cara bercocok tanam serta budaya hidup gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk 'lumbung desa' atau 'lumbung ketahanan pangan'.

Membandingkan tingkat ketahanan pangan Desa Ngesti Rahayu dan Desa Naukae yang sama-sama tahan pangan, Tabel 3.10. menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang tergolong tahan pangan di Desa Naukae lebih tinggi dari Desa Ngesti Rahayu. Faktor utama yang menyebabkan Naukae lebih baik kondisinya dibandingkan dengan Ngesti Rahayu (dilihat dari tingginya persentase tersebut) adalah tingkat ketersediaan pangan. Di Naukae, dapat dikatakan hampir setiap rumah memiliki persediaan jagung untuk satu tahun lamanya sementara di Ngesti Rahayu tidak semua rumah tangga memiliki persediaan beras sampai ke panen berikutnya (hitungan 4 bulan) karena tidak semua penduduk di Ngesti Rahayu mata pencahariannya adalah bertani, tetapi ada juga yang bekerja sebagai pegawai yang digaji bulanan. Umumnya para pegawai ini tidak memiliki persediaan beras untuk jangka waktu sekian lamanya, tetapi membeli kebutuhan beras bulanan (sehabis gajian). Dengan kondisi demikian maka dapat dimengerti apabila saat disurvei rumah tangga tersebut tidak terhitung sebagai rumah tangga yang memiliki persediaan beras sampai ke panen berikutnya, meskipun mereka sebenarnya mampu untuk membeli beras dan tidak pernah mengalami kekurangan pangan karena dapat/mampu membeli setiap saat jika dibutuhkan. Latar belakang inilah yang membuat kondisi ketahanan pangan Desa Naukae relatif lebih 'baik' daripada Desa Ngesti Rahayu.

¹⁴ Menurut perkiraan, lima tahun mendatang, di Cakar Buaya akan terjadi penciutan lahan pertanian pangan karena dirasakan lebih menguntungkan untuk menanam tanaman keras, seperti kelapa sawit dan karet. Sementara untuk bercocok tanam ubi kayu dirasakan kurang menguntungkan, di samping harga pupuk yang relatif lebih mahal, harga ubi kayu cenderung menurun.

Uraian mengenai kondisi ketahanan pangan rumah tangga juga dilihat dari rata-rata asupan energi dan protein yang dikonsumsi anggota rumah tangga. Dalam penelitian pangan yang dilakukan pada tahun 2003, diperoleh pengetahuan mengenai kualitas pangan yang dilihat berdasarkan 'ada' atau 'tidaknya' protein nabati dan/atau hewani yang dikonsumsi anggota rumah tangga. Pengukuran kualitas pangan tersebut diperoleh dari data pengeluaran untuk jenis makanan (berasal dari nabati atau hewani) yang dikonsumsi. Ditetapkan tiga kriteria kualitas pangan (pada bab II dapat dilihat konsep dan ukuran yang digunakan) seperti dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.11: Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Pangan yang dikonsumsi di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Kualitas Pangan	Lampung			NTT			Total
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total	
Baik	90.0	92.0	91.0	59.2	86.8	72.6	81.9
Kurang baik	10.0	8.0	9.0	37.8	13.2	25.8	17.3
Tidak Baik	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.5	0.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Data pada Tabel 3.11 menunjukkan bahwa kualitas makanan yang dikonsumsi penduduk di desa penelitian di Lampung cukup baik. Di Desa Cakar Buaya, 90 persen penduduk mengkonsumsi protein hewani dan nabati sedangkan di Desa Ngesti Rahayu persentasinya lebih besar, 92 persen. Tidak ada satu rumah tanggapun di dua desa tersebut yang tergolong kualitas makanannya tidak baik karena hanya mengkonsumsi makanan pokok saja tanpa asupan protein. Tidak terlihat perbedaan yang mencolok di antara kedua desa tersebut, meskipun Desa Cakar Buaya tergolong sebagai desa yang berketahanan pangan lebih rendah dibandingkan Ngesti Rahayu. Di dua desa penelitian di NTT, proporsi terbesar rumah tangga juga sudah mengkonsumsi protein hewani dan nabati, tetapi di Desa Naukae proporsinya (86,8 persen) jauh lebih besar dibandingkan di Desa Enoneontes (59,2 persen). Di Desa Enoneontes tercatat 6 rumah tangga (3 persen) yang tergolong tidak baik kualitas konsumsi pangannya karena hanya mengkonsumsi makanan pokok saja, tanpa lauk pauk yang berasal dari bahan pangan nabati dan/atau hewani. Keterbatasan dari data kualitas pangan ini hanya mendapat informasi secara umum saja bahwa rumah tangga yang bersangkutan telah mengkonsumsi jenis pangan sumber protein hewani dan/atau nabati,

tetapi tidak dapat diketahui berapa besaran asupan dari masing-masing sumber protein tersebut setiap harinya per kapita .

Untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai kualitas pangan tersebut, pada penelitian pangan tahun 2004 dicoba untuk mencatat dan menghitung jumlah konsumsi energi dan protein yang dimakan oleh anggota rumah tangga yang menjadi sampel survei selama 3 hari berturut-turut. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12.: Rata-rata konsumsi energi dan protein anggota rumah tangga per hari berdasarkan kondisi ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Ketahanan pangan rumah tangga	Cakar Buaya		Ngesti Rahayu		Enoneontes		Naukae	
	Energi (kkal)	Protein (gr)						
Tahan	2083,0	40,4	2071,6	51,2	2393,5	58,3	2708,9	74,7
Kurang tahan	1889,0	36,4	1918,7	53,1	1627,2	41,8	2078,1	58,5
Tidak Tahan	1410,2	31,4	1462,2	36,2	1465,7	32,5	1968,2	43,8
Total	1735,9	36,1	1769,3	46,8	1546,5	37,1	2251,7	59,0

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2004

Tabel 3.12. menunjukkan bahwa bahwa rata-rata konsumsi energi¹⁵ untuk semua kelompok, dengan derajat ketahanan pangan yang berbeda di desa Cakar Buaya dan Ngesti Rahayu, Lampung tidak memenuhi/ lebih rendah dari standar kecukupan energi rata-rata perkapita pada tingkat konsumsi yang direkomendasikan oleh WNPC tahun 1978, yaitu 2,100 kkal energi/hari. Semakin rendah tingkat ketahanan pangannya, semakin kecil rata-rata asupan konsumsi energinya. Sementara untuk asupan proteinnya, hanya kelompok rumah tangga yang tahan dan kurang tahan di Ngesti Rahayu yang konsumsi proteinnya berada di atas standar 50 gram/hari. Di NTT, kelompok rumah tangga yang tergolong tahan, rata-rata konsumsi energinya, di atas 2,100 kkal energi/hari. Bahkan di Naukae jauh di atas standar yang dibutuhkan dan juga relatif tinggi bila dibandingkan dengan Cakar Buaya

¹⁵ Ukuran energi yang dikonsumsi dapat dinyatakan dalam berbagai satuan. Sebagai contoh untuk zat gizi karbohidrat dinyatakan dalam kalori, lemak dan protein dalam gram (Lilis Heri Mis Cicih, 1997: 27; Emmy S. Karsin, 2002:49-49). Satu kalori (kkal) adalah banyaknya energi/panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air menjadi satu derajat Celsius lebih tinggi. Jumlah kalori dalam zat gizi berbeda-beda, yaitu protein mengandung 4 kkal/g, lemak 9 kkal/g dan karbohidrat 4 kkal/g. Karbohidrat merupakan simpanan energi bagi tumbuh-tumbuhan.

dan Ngesti Rahayu. Demikian pula halnya dengan asupan protein di desa Naukae dan Enoneontes tersebut, untuk rumah tangga yang tergolong tahan, berada di atas standar kebutuhan per hari (rumah tangga kurang tahan di Desa Naukae, asupan proteinnya juga relatif tinggi).

Penjelasan mengenai relatif tingginya rata-rata tingkat konsumsi energi pada rumah tangga kelompok tahan di NTT, terutama disebabkan karena besarnya asupan makanan yang memang mengandung karbohidrat¹⁶. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa kecenderungannya penduduk baik di Enoneontes maupun Naukae, membutuhkan setiap harinya rata-rata 2 - 2,5 kg jagung dan 2 - 2,5 kg ubi (untuk anggota rumah tangga sekitar 4 - 5 orang). Dari pemantauan yang dilakukan selama tiga (3) hari, pangan sebanyak itu habis dimakan dalam sehari. Berbeda dengan di Lampung, asupan karbohidratnya setiap hari tidak sebesar di NTT (1 hari memasak antara 1 - 1,5 kg beras untuk 4-5 orang, bahkan untuk beberapa rumah tangga, jumlah sekian masih bersisa). Banyaknya unsur karbohidrat yang dikonsumsi responden di NTT dengan demikian akan memperbesar asupan energi tersebut. Besarnya protein yang dikonsumsi juga sangat berkaitan dengan banyaknya konsumsi makanan sumber karbohidrat. Penjelasan berikutnya akan memperlihatkan bahwa asupan protein hewani dan nabati¹⁷ masih belum seimbang, kecenderungannya masih didominasi oleh protein nabati dan fenomena ini ditemukan di keempat daerah penelitian.

Relatif tingginya rata-rata konsumsi protein pada rumah tangga di daerah penelitian dapat dikatakan sumbangan dari makanan pokok (jagung, beras, ubi-ubian) yang juga merupakan sumber protein nabati. Tabel 3.13. dan 3.14 menunjukkan bahwa jenis pangan yang dikonsumsi anggota rumah tangga yang disurvei didominasi oleh asupan jenis pangan yang banyak mengandung karbohidrat, yaitu beras dan jagung. Di Lampung, dapat dilihat bahwa 50 persen konsumsi anggota rumah tangga didominasi oleh beras. Di NTT, jagung merupakan penyumbang terbesar dalam konsumsi pangan rumah tangga, diikuti dengan beras. Selanjutnya, protein nabati nampak jelas mendominasi konsumsi pangan anggota rumah tangga selama tiga hari tersebut, baik di Lampung maupun di NTT. Di Lampung, misalnya, hampir 74 persen protein yang dikonsumsi bersumber dari nabati sedangkan di NTT lebih tinggi lagi yaitu 85,1 persen. Di Lampung, jenis protein hewani seperti ayam, telur dan ikan lebih banyak dikonsumsi (selama 3 hari survei) dibandingkan dengan di NTT. Tetapi di di NTT ada konsumsi daging

¹⁶ Pangan sumber karbohidrat adalah beras, ubi jalar, singkong, kentang, pisang, sagu, gandum.

¹⁷ Pangan sumber protein hewani adalah daging ayam, sapi, ikan, telur, susu dan produk olahannya. Pangan nabati yang banyak mengandung protein adalah kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Sebagian kecil protein terdapat dalam sayuran dan buah-buahan.

sedangkan di Lampung jenis protein hewani tersebut tidak ada dalam menu makanan rumah tangga yang disurvei.

Menurut data Susenas tahun 1996 dan tahun 1999 (BPS, 1997: 2000), secara nasional pola konsumsi pangan penduduk memang belum menunjukkan keseimbangan. Pada tahun 1999 rata-rata kontribusi pangan sumber karbohidrat (serelia dan umbi-umbian) adalah 66,3 persen dari total asupan energi. Kecenderungan ini terutama tinggi di beberapa provinsi Indonesia Timur, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan NTT, dengan kontribusi pangan sumber karbohidrat (serelia dan umbi-umbian) sebesar lebih dari 70 persen, yaitu masing-masing 72,3 persen dan 72 persen. Sementara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DKI Jakarta sumbangannya hanya sebesar 45,4 persen dan 48,2 persen. Mengonsumsi banyak karbohidrat memang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama namun di lain pihak semakin tinggi persentase serelia dan umbi-umbian maka komposisi pangan yang dikonsumsi semakin kurang beragam. Asupan pangan yang kurang beragam akan berakibat pada kurangnya beberapa zat gizi yang dibutuhkan untuk hidup sehat (Rimbawan dan Baliwati, 2004:26).

Dari Tabel 3.13 dan 3.14. dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi pangan sumber karbohidrat (jenis pangan jagung dan umbi-umbian) lebih tinggi, namun hal ini tidak diikuti dengan konsumsi pangan sumber protein lainnya secara seimbang. Kecenderungan ini berlaku untuk semua kelompok rumah tangga dengan berbagai derajat ketahanan pangan. Tingkat konsumsi pangan sumber protein, terutama hewani (seperti daging, telur, susu dan ikan segar) lebih rendah. Pada umumnya jika pendapatan rumah tangga meningkat, jumlah dan jenis makanan cenderung akan bertambah baik, dengan konsumsi pangan sumber protein yang semakin bervariasi dan meningkat¹⁸. Akan tetapi seringkali juga ditemui bahwa mutu makanan tidak selalu membaik, karena peningkatan pendapatan tidak digunakan untuk membeli bahan-bahan pangan sumber gizi berkualitas tinggi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

Menurut Alan Berg (1986:78) protein hewani seperti – daging, unggas, telur, ikan dan makanan dari susu – hanya merupakan sebagian kecil saja dari

¹⁸ *Keadaan ekonomi berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Dua peubah ekonomi yang cukup dominan sebagai determinan konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga. Perubahan pendapatan secara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi pangan keluarga. Meningkatnya pendapatan berarti memperbesar peluang untuk membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Sebaliknya penurunan pendapatan akan menyebabkan penurunan dalam hal kualitas dan kuantitas pangan yang dibeli (Alan Berg, 1986:86).*

Tabel 3.13: Konsumsi karbohidrat dan protein anggota rumah tangga di Provinsi Lampung berdasarkan jenis makanan

Jenis makanan	Energi (kkal)	Protein (gram)	% protein
Beras	891.1	21.1	50.9
Tiwul	101.7	0.3	0.7
Singkong	8.0	0.1	0.3
Mie Instant	49.9	1.0	2.5
Ayam	6.1	0.5	1.2
Telur	15.6	1.3	3.1
Ikan	31.5	5.0	12.0
Susu	21.3	0.5	1.3
Tempe/tahu	52.3	5.0	12.1
Sayuran	36.7	2.4	5.7
Buahan	48.1	0.7	1.6
Bumbu+minyak goreng	314.8	0.8	2.0
Kacang-kacangan	12.2	0.7	1.8
Lainnya	163.4	2.0	4.9
Total	1752.6	41.5	100.0

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2004

Tabel 3.14: Konsumsi karbohidrat dan protein anggota rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan jenis makanan

Jenis makanan	Energi (kkal)	Protein(gram)	% protein
Beras	420.7	9.8	20.4
Jagung	868.5	22.5	46.5
Ubi	223.8	1.6	3.4
Mie instant	23.2	0.5	1.0
Ayam	4.2	0.3	0.5
Daging	9.6	0.9	1.8
Telur	0.4	0.0	0.1
ikan	34.7	4.0	8.3
sayuran	60.5	5.1	10.5
Buahan	103.8	1.0	2.1
Bumbu+minyak goreng	55.8	0.4	0.8
kacang-kacangan	21.6	1.6	3.3
lainnya	72.4	0.6	1.3
Total	1899.1	48.3	100.0

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2004

protein dalam susunan makanan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang. Bagi kelompok penduduk yang berpendapatan rendah, makanan pokok biasanya rata-rata lebih banyak dimakan karena harga-harga pangan pokok tersebut relatif lebih murah/lebih mudah mendapatkannya, dibanding jenis pangan yang lainnya. Dengan tingkat pendapatan dan daya beli yang terbatas maka pilihan jenis pangan lebih banyak pada pangan sumber karbohidrat (yang juga dapat mengenyangkan).

Lauk pauk, sayuran dan buah yang dikonsumsi umumnya berasal dari kebun. Hampir setiap rumah tangga memiliki lahan pekarangan yang ditanami sayur-sayuran dan pohon buah-buahan, sehingga setiap kali akan masak/makan, mereka tinggal memetik di kebun sendiri. Kalaupun tidak memiliki kebun, penduduk dapat dengan mudah minta kepada tetangga. Cara pengolahannya pun sederhana, seringkali sayur-mayur hanya direbus atau dibuat sayur bening (sesekali dengan santan). Di Lampung, lauk-pauk yang sering dikonsumsi adalah tahu, tempe, ikan asin, sayur daun singkong, sayur gori, bayam dan kacang panjang. Di NTT, lauk-pauknya tidak berbeda jauh dengan di Lampung seperti sayur kumbang (sawi putih), sayur paha ayam (sejenis sawi juga), jantung pisang, kacang panjang dan labu siam. Jenis protein hewani yang sering dikonsumsi adalah ikan asin atau teri medan dan ikan basah jenis kembung (nipe/tembang). Jenis buah yang dikonsumsi adalah pisang dan pepaya atau buah lain yang tidak harus dibeli. Umumnya alasan mengkonsumsi pangan tersebut adalah karena tidak perlu membeli dan kalaupun harus membeli harganya relatif murah. Keadaan ini menunjukkan bahwa jenis pangan yang dikonsumsi terkesan apa adanya dan kurang beragam. Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan utama ketidakmampuan sebagian warga untuk membeli lauk-pauk. Kutipan wawancara mendalam dengan keluarga petani di desa Ngesti Rahayu yang tergolong kurang tahan dan tidak miskin dapat memperjelas fenomena tersebut:

Kotak 6: Lauk-pauk ? "...tergantung ada tidaknya uang saja"

T: Kalau membeli lauk-pauknya sehari sampai berapa?

J: Tidak setiap hari membeli lauk karena tidak mempunyai uang untuk membeli dan kadang membeli lauk untuk hari ini saja dan itupun paling hanya Rp. 1.000,- membeli ikan asin dan kadang-kadang daun singkong/gori itu setiap hari, itupun boleh minta dengan tetangga.

T: Itu yang selalu pasti teman makan nasi itu selalu sayur?

J: Ya, sayur daun singkong.

T: Kalau ikan asin?

J: .Tidak mesti kalau punya uang saja"

T: Kalau untuk mendapatkan ikan asin, tempe, tahu, itu untuk membelinya mudah tidak?

J: Ya, semua itu ada keinginan tapi berhubung tidak punya uang

Sumber: Wawancara mendalam dengan keluarga petani di desa Ngesti Rahayu yang tergolong kurang tahan dan tidak miskin.

Data pada Tabel 3.15. semakin memperjelas bahwa di keempat desa penelitian konsumsi protein nabati lebih dominan, sementara untuk protein hewannya, terbatas dari ikan asin saja. Di Cakar Buaya dan Ngesti Rahayu, tempe dan tahu merupakan jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi sedangkan ikan asin merupakan sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi baik di Lampung maupun NTT. Untuk jenis protein hewani lainnya seperti ayam/daging, ikan segar juga telur, relatif kecil persentasenya untuk kedua desa di Lampung. Jenis pangan tersebut jarang dikonsumsi (hanya sesekali saja). Dari hasil wawancara mendalam di Desa Cakar Buaya maupun di Ngesti Rahayu dapat diketahui bahwa protein hewani seperti telur ayam maupun ayamnya, kadang-kadang saja dikonsumsi rumah tangga tersebut. Untuk kelompok rumah tangga yang tergolong miskin, makan ikan apabila ada hasil pancingan anggota keluarganya saja (jarang membeli). Ayam berikut telurnya termasuk komoditas perdagangan yang dijual untuk menutupi kebutuhan rumah tangga lainnya. Hanya sesekali saja telur dikonsumsi dan itupun diprioritaskan untuk anak-anak saja (orang tua tidak).

Tabel 3.15.: Persentase rumah tangga menurut sumber protein yang dikonsumsi rumah tangga, di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Sumber protein yang dikonsumsi	Lampung				NTT			
	Cakar Buaya		Ngesti Rahayu		Enoneontes		Naukae	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Ikan segar	9	4,5	2	1,0	5	2,5	55	28,9
Telur	4	2,0	10	5,0	19	9,5	20	10,5
Ayam/daging	-	-	2	1,0	21	10,4	23	12,1
Tahu/tempe	88	44,0	157	78,5	1	0,5	1	0,5
Ikan asin	99	49,5	29	14,5	151	75,1	87	45,8
Lainnya	-	-	-	-	4	2,0	4	2,1
Total	200	100	200	100	201	100	190	100

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Demikian pula halnya dengan daging, hanya pada saat-saat tertentu saja dikonsumsi, seperti pada hari raya dan pesta pernikahan, seperti dinyatakan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

Paling sering beli tahu, tempe, ikan asin. Beli telur kadang-kadang saja, kalau tidak penting tidak makan ayam...kalau Lebaran baru motong ayam.

(Kutipan wawancara dengan seorang petani perempuan, di desa Ngesti Rahayu).

Makan dengan nasi, lauknya paling sering ikan asin pakai sambel, sering juga pakai sayur daun singkong yang dipetik dari kebun. Kalau ikan lainnya biasanya ikan gabus tetapi itupun cari sendiri alias tidak beli.

(Kutipan wawancara dengan seorang buruh tani dari kelompok rumah tangga kurang tahan dan miskin, di Desa Cakar Buaya).

T: Menurut ibu gimana, apa makan itu harus ada lauknya?

J: ya....harus ada lauknya”.

T: Lauknya itu tapi apa lauk sayur, apa lauk ikan?

J:yang penting ada sayur, lauknya sayur katuk, sayur gori...gori ambil di pohon”.

(Kutipan wawancara dengan keluarga petani dari kelompok rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin, di Desa Cakar Buaya).

Fenomena serupa juga ditemukan di daerah penelitian di NTT. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa rumah tangga di kedua desa, sehari-harinya warga masyarakat lebih sering mengkonsumsi protein nabati seperti sayur-mayur sebagai lauk daripada protein hewani. Seikat sayur kumbang (sebutannya untuk 1 ikat adalah 1 pohon) ukuran sedang bisa untuk makan pagi, siang dan malam (di tumis dengan bawang merah). Sayur-mayur umumnya diambil dari hasil kebun sendiri. Mengenai kebiasaan mengkonsumsi beragam jenis sayur-mayur ini dapat dikatakan baru dua tahun belakangan saja, sejak masuknya LSM asing dari Amerika. Seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya LSM tersebut tidak hanya memberi bantuan dalam bentuk beras sekantung dan minyak goreng 4 liter tetapi juga memberi bantuan bibit sayuran serta bimbingan bertanam sayuran tersebut. Dalam satu kali periode menanam sayur, petani mendapatkan satu kali bantuan pangan. Bantuan ini diberikan sebagai pengganti waktu yang digunakan untuk bertanam sayur (karena dalam waktu itu petani tidak dapat mengolah kebun jagung/ubinya). Sayuran tersebut ditanam dalam kebun-kebun kelompok yang tanahnya juga disediakan oleh anggota kelompok. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat baik di Naukae maupun Enoneontes, sangat terbantu tidak hanya secara finansial (sebagian sayur-mayur tersebut dijual) tetapi asupan gizinya juga dapat meningkat karena mengkonsumsi beragam sayuran tersebut.

Masyarakat biasa mengkonsumsi jagung bose (jagung yang sudah diolah) dengan menggunakan campuran daun pepaya atau ujung daun labu dan kacang panjang (ada juga yang mencampurkan dengan kacang tanah atau kacang hijau). Anak berumur dua tahun sudah bisa diberi makan jagung bose sedangkan kalau masih bayi, jagung harus dihaluskan terlebih dahulu sehingga menjadi bubur jagung. Dapat dikatakan sangat jarang penduduk mengkonsumsi daging (baik daging babi maupun ayam). Daging hanya dikonsumsi pada saat-saat tertentu/istimewa saja, misalnya pada saat ada perayaan/pesta pernikahan atau kematian. Selain itu, ternak babi maupun ayam (termasuk telur ayamnya), lebih merupakan aset yang sewaktu-waktu dapat dijual, jika rumah tangga membutuhkan uang. Sese kali anak yang masih bayi diberi telur yang dicampur dalam jagung yang ditumbuk. Ternak babi, bila dijual berharga 350 – 400 ribu rupiah (tergantung besar dan gemuknya) sedangkan harga jual ayam besar bisa mencapai Rp.50.000,-/ekor.

Hasil wawancara mendalam juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi ikan, terkadang hanya sebulan sekali atau saat hari pasar dan apabila mereka mempunyai kelebihan uang untuk belanja makanan. Menurut beberapa narasumber, makan ikan hanya 'untung-untungan' saja, karena sehari-harinya mereka lebih banyak mengkonsumsi jagung dengan sayur. Ikan biasanya

dimasak dengan cara dikuah/direbus dengan asam dan garam, kalau ada minyak baru digoreng. Masyarakat biasa membeli ikan basah¹ tumpuk atau 1 mok dengan harga berkisar antara Rp. 2.000,- - Rp. 5.000,- dan ikan satu tumpuk¹⁹ hanya cukup untuk 1-2 hari saja (dengan jumlah anggota rumah tangga 6 orang).

Kotak 7: "Makan ayam atau daging sekali-sekali saja"

Responden 1

- J : *Makan ikan itu kadang-kadang 1 bulan (sekali)... kalau ada uang kita beli sabun kalau uangnya lebih baru kita beli ikan*
- T : *Kalau makan ayam ?*
- J : *Biasanya sekali-sekali*
- T : *Terus kapan makan daging babi itu ?*
- J : *Kalau kita ke pesta baru kita makan pak, kita harus hemat mengatur rumah ini, kalau tidak hemat itu nanti dalam rumah tangga ini kita mau ambil ternak dari mana ?*

Responden 2

- T : *Ternak sapi dan babi untuk apa itu ?*
- J : *Kalau makan kurang, kita jual*
- T : *Oh jadi babi itu untuk di jual kalau nanti kurang makanan, nggak pernah dimakan sendiri pak ?*
- J : *Tidak lebih baik di jual untuk keperluan membeli barang di rumah. Kalau untuk keperluan pesta, umpama, baru kita potong.*
- T : *Jadi kalau pesta perkawinan dan kematian baru dipotong babi itu?*
- J : *Ya*
- T : *Kalau ayam dipelihara untuk dimakan sendiri atau dijual ?*
- J : *Ayam di jual, telornya juga*
- T : *Lebih sering mana dijual atau dimakan ?*
- J : *Kebanyakan di jual*

(Kutipan wawancara mendalam dengan dua orang petani di Desa Enoneontes mengenai konsumsi protein hewani)

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2004

Berkaitan dengan pembahasan di atas, maka ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, pertama adalah sehubungan dengan persediaan pangan rumah tangga. Dari empat daerah penelitian ditemukan bahwa persediaan

¹⁹ Satu tumpuk ikan nipe/tembang seharga Rp. 5.000,- biasanya berisi 20 ekor ikan ukuran sedang.

pangan rumah tangga sangat tergantung pada usaha masing-masing rumah tangga untuk memperoleh persediaan pangan sampai dengan panen berikutnya. Meskipun secara individu rumah tangga mempunyai *copying strategy* untuk mengatasi kesulitan pangan, namun keberadaan lumbung desa sangat bermanfaat apabila dioptimalkan fungsinya pada saat menghadapi kegagalan panen sehingga perlu dibentuk/dihidupkan kembali. Di samping itu adat yang mewajibkan penduduk untuk mempunyai persediaan pangan jagung maupun non jagung selama satu tahun, seperti yang berlaku di NTT, perlu dipertahankan. Ketentuan adat ini sangat efektif membantu rumah tangga pada saat mengalami kegagalan panen dan juga sebagai salah satu usaha untuk menunjang diversifikasi pangan.

Kedua, kesadaran masyarakat akan perlunya mengkonsumsi pangan yang seimbang untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan masih kurang. Terwujudnya ketahanan pangan tidak hanya tergantung dari persediaan pangan pokok tetapi juga dari kesanggupan penduduk untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai dengan kebutuhan agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Pola makan rumah tangga di Lampung maupun NTT dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Jika diukur dari segi norma gizi, pemenuhan zat gizi berupa karbohidrat tidak terlalu mengkhawatirkan. Tiap keluarga sudah dapat menjaga persediaan pangan pokoknya, termasuk vitamin dan mineral yang berasal dari sayuran yang dicampurkan bersama makanan pokok tersebut. Namun pemenuhan protein hewani masih perlu mendapat perhatian. Meskipun protein hewani dikonsumsi dalam jumlah banyak pada waktu pesta adat namun frekuensinya terbatas dan waktu konsumsinya sangat kurang (tergantung dari diselenggarakannya pesta adat). Untuk mencapai kebutuhan gizi yang seimbang dapat dilakukan dengan mengkonsumsi pangan yang beragam. Artinya harus ada diversifikasi pangan, minimal mengkonsumsi satu jenis dari setiap kelompok pangan (makanan pokok, lauk-pauk, sayuran dan buah) dalam jumlah yang cukup dan seimbang.

Ketahanan pangan dan kemiskinan berkaitan sangat erat. Kemiskinan sering mengindikasikan tingkat ketahanan pangan keluarga atau individu. Analisis tentang ketahanan pangan dalam banyak hal serupa dengan analisis kemiskinan (Nsemukila, 2001: 2). Analisis tentang kemiskinan maupun ketahanan pangan pada umumnya menjawab pertanyaan siapa rumah tangga/penduduk miskin atau tidak tahan pangan dan apakah penyebab serta konsekuensinya. Dengan demikian ketahanan pangan dan kemiskinan pada tingkat rumah tangga/individu dapat diukur dan dibandingkan satu dengan yang lain. Pada tingkat makro, membaiknya ketahanan pangan nasional dapat pula diukur dengan menurunnya angka kemiskinan dan membaiknya pendapatan masyarakat (Suryana, 2003).

Selama ini, pembahasan tentang hubungan antara ketahanan pangan dan kemiskinan lebih berfokus pada tingkat nasional. Informasi dan analisis tentang keterkaitan antara dua aspek tersebut pada tingkat rumah tangga belum banyak tersedia, padahal informasi pada tingkat ini bermanfaat untuk mengukur keberhasilan intervensi pembangunan, terutama di bidang ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Bagian ini membahas hubungan antara ketahanan pangan dan kemiskinan pada tingkat rumah tangga. Namun, sebelum membahas keterkaitan antara dua aspek tersebut, akan dijelaskan situasi kemiskinan pada tingkat rumah tangga.

4.1. Situasi Kemiskinan

Kemiskinan rumah tangga tidak semata-mata menyangkut persoalan material, tetapi terkait dengan berbagai dimensi kehidupan manusia lainnya, antara lain kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, serta kemampuan berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat multidimensi dari kemiskinan seperti ini menyebabkan pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai definisi dan indikator, tergantung pada fokus analisis.

Analisis situasi kemiskinan dalam bab ini dilihat dari tiga indikator yaitu (1) pengeluaran untuk kebutuhan pangan, (2) pemilikan lahan pertanian, dan (3) pemilikan hewan ternak. Dimensi pengeluaran untuk kebutuhan pangan diukur berdasarkan standar minimum kebutuhan makanan yang dibutuhkan

individu untuk hidup sehat yaitu setara dengan 2.100 kkal energi/kapita/hari dan 50 gram protein/kapita/hari (WNPG, 1978). Berdasarkan standar ini, rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang pengeluaran untuk kebutuhan pangannya berada di bawah nilai minimum untuk memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya sesuai dengan standar kebutuhan minimum tersebut. Indikator ini bersifat sangat umum dan dapat digunakan untuk daerah yang mempunyai ciri-ciri berbeda. Tetapi, perbedaan kualitas dan harga bahan makanan yang dikonsumsi penduduk akan berpengaruh terhadap total pengeluaran pangan rumah tangga, yang juga akan mempengaruhi jumlah rumah tangga yang masuk dalam kategori 'rumah tangga miskin'. Dua indikator kemiskinan lainnya (pemilikan lahan dan pemilikan ternak) merupakan indikator ekonomi untuk melihat kondisi kemiskinan, yang dipilih dengan mempertimbangkan daerah penelitian yang merupakan daerah pertanian, memberikan pemahaman kemiskinan yang dilihat dari ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar hidup yang sesuai dengan keperluan²⁰ (lihat Bab 2). Selanjutnya, apabila ke tiga dimensi ini dipakai secara bersama-sama, maka akan diperoleh rumah tangga miskin yang benar-benar miskin, artinya diukur dari dimensi apapun orang tersebut akan termasuk ke dalam kelompok rumah tangga miskin²¹.

Pemahaman situasi kemiskinan pada bab ini didasarkan pada pendekatan obyektif dan subyektif. Angka-angka kemiskinan absolut yang diperoleh dengan pendekatan subyektif dari data kuantitatif, kemudian dijelaskan dengan informasi kualitatif berdasarkan penilaian subyektif rumah tangga (anggota rumah tangga yang mewakili) di daerah penelitian.

²⁰ Sesuai dengan konsep yang dipakai pada analisis kemiskinan pada penelitian tahun sebelumnya, rumah tangga miskin lahan adalah rumah tangga yang memiliki sawah <0,7 ha dan ladang <0,3 ha, atau sawah <0,85 ha, atau ladang <1,7 ha diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin (Raharto dkk, 2003). Sedang rumah tangga miskin ternak adalah rumah tangga yang tidak memiliki sapi/kerbau. Kemiskinan dari dimensi pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan anggota rumah tangga (terutama anak) yang lebih tinggi dari tingkat pendidikan orang tuanya (dalam hal ini kepala rumah tangga).

²¹ Suryahadi & Sudarno Sumarto (2001) mengemukakan pendapatnya, ada empat alternatif pendekatan untuk mengetahui situasi kemiskinan. Pertama, kemiskinan yang diukur dari semua dimensi yang digunakan. Dalam pendekatan ini, yang disebut sebagai orang miskin adalah orang yang benar-benar miskin karena diukur dari dimensi apapun orang tersebut akan termasuk ke dalam kelompok miskin. Kelemahan dari pendekatan ini adalah seseorang yang berpendidikan tinggi tetapi tingkat konsumsinya di bawah garis kemiskinan tidak akan termasuk ke dalam kategori orang miskin. Kedua, kemiskinan dilihat berdasarkan salah satu saja dari berbagai dimensi kemiskinan yang digunakan. Berbeda dengan pendekatan pertama, dalam pendekatan ini orang yang disebut sebagai orang miskin belum tentu orang yang benar-benar miskin, sehingga angka kemiskinan yang dihasilkan dari pendekatan ini relatif lebih tinggi daripada pendekatan-pendekatan lain. Ketiga, kemiskinan yang diukur dengan menggunakan indeks komposit dari berbagai dimensi dengan bobot penimbang tertentu untuk masing-masing dimensi, dimana contoh yang terkenal dari pendekatan ini adalah Human Development Index dari UNDP. Kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa bobot yang diberikan kepada setiap dimensi ditentukan secara subyektif dan biasanya tidak memiliki dasar empiris yang kuat. Keempat, ukuran kemiskinan dengan menggunakan proses pendekatan fungsi kesejahteraan multi-dimensi. Secara teoritis pendekatan ini adalah paling tepat karena menggunakan pilihan aktual yang dilakukan individu dalam menentukan nilai masing-masing dimensi, tetapi sulit diterapkan karena sulit menentukan nilai dari dimensi kemiskinan yang sulit diukur (misalnya keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan).

4.1.1. Pengeluaran Untuk Kebutuhan Pangan

Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan dapat dijadikan indikator kemiskinan yang dapat diaplikasikan secara umum di berbagai wilayah karena makan merupakan kebutuhan manusia yang paling primer. Dengan demikian, dimanapun manusia berada mereka pasti membutuhkan makanan meskipun jenis dan banyaknya makanan yang dikonsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi (kemampuan untuk membeli/*purchasing power* dan memproduksi) maupun faktor budaya (kebiasaan makan/*food habit*).

Berdasarkan data SUSENAS 2002 didapatkan garis kemiskinan berdasarkan konsumsi makanan untuk perdesaan di Provinsi Lampung adalah Rp 67.776,- sedang untuk perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Rp 62.437,-. Mengacu pada angka ini, apabila di dalam satu rumah tangga rata-rata pengeluaran anggota rumah tangga per bulan, untuk konsumsi makanan, lebih kecil dari garis kemiskinan makanan di masing-masing provinsi, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (selanjutnya disebut miskin pangan). Dengan menerapkan garis kemiskinan ini, diketahui kelompok rumah tangga miskin dan tidak miskin, seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pangan, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Kategori rumah tangga	Lampung			Nusa Tenggara Timur		
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total
Miskin	58,5	41,5	50,0	61,2	28,4	45,3
Tidak Miskin	41,5	58,5	50,0	38,8	71,6	54,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
n	200	200	400	201	190	391

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Kecuali di Desa Naukae, proporsi rumah tangga responden yang teridentifikasi sebagai rumah tangga miskin di tiga desa penelitian lainnya cukup tinggi, yaitu sekitar separuh dari total rumah tangga contoh (*sample*). Keadaan ini menggambarkan bahwa kondisi kemiskinan berdasarkan pengeluaran untuk konsumsi makanan di daerah penelitian pada umumnya masih memprihatinkan.

Tingkat kemiskinan tinggi (yang dilihat dari persentase rumah tangga responden miskin terhadap total rumah tangga responden) di Provinsi Lampung ditemukan di Desa Cakar Buaya. Tingginya angka kemiskinan ini berhubungan dengan pengeluaran untuk kebutuhan pangan pokok maupun lauk pauk yang rendah. Rendahnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan dapat disebabkan karena kuantitas maupun kualitas makanan yang dikonsumsi. Desa studi ini merupakan daerah bertipologi lahan kering dengan produksi utama tanaman ubi kayu. Survei menemukan bahwa kira-kira 79 persen rumah tangga responden mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, dan sisanya mengkonsumsi ubi kayu. Tetapi dari pengamatan dan wawancara mendalam diketahui bahwa pada saat-saat tertentu rumah tangga yang mengkonsumsi beras juga mencampurnya dengan tiwul (olahan dari ubi kayu, lihat Kotak 5 pada Bab III) sebagai strategi untuk mempertahankan ketersediaan pangan rumah tangga (Lihat Bab. III). Keadaan ini berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok, karena harga tiwul lebih murah dari harga beras.

Seperti halnya dengan pengeluaran untuk bahan makanan pokok, pengeluaran untuk lauk-pauk juga tidak besar karena kebanyakan rumah tangga responden mengkonsumsi ikan asin (49,5 persen) dan tahu/tempe (44 persen). Untuk pengeluaran di luar makanan pokok dan lauk pauk juga rendah, yaitu hanya untuk membeli minyak, gula dan teh/kopi dengan pengeluaran tertinggi sebesar Rp 40.000,- per bulan per rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan yang rendah ini menjadikan kebanyakan rumah tangga responden (58,5 persen) di Desa Cakar Buaya masuk dalam klasifikasi pada rumah tangga miskin.

Kemampuan/daya beli rumah tangga menyebabkan rumah tangga miskin hanya dapat membeli lauk pauk yang harganya relatif murah dari jenis dan kualitas tertentu. Penghasilan sebagian besar masyarakat di desa ini umumnya rendah, karena hanya mengandalkan dari penjualan hasil produksi pertanian (umumnya ubi kayu). Pada umumnya pengeluaran lauk pauk hanya untuk sayur mayur yang mudah diperoleh di kebun, tanah pekarangan maupun dari para tetangga, baik membeli maupun hanya meminta. Hubungan yang baik antar tetangga ini salah satunya diwujudkan dengan saling memberi untuk kebutuhan pangan. Wawancara dengan seorang kepala rumah tangga miskin yang penghasilannya hanya mengandalkan hasil kebun dan buruh tidak tetap menggambarkan akan pemenuhan kebutuhan lauk, seperti berikut.

*T: Tapi kalau untuk kebutuhan lauk pauk gitu untuk apa
....temannya makan tiwul itu?*

J: Ya itu hanya ala kadar aja pak. Ya kadang ya kalau ada uang beli, kalau nggak ada ya apa adanya. Daun singkong cari di kebun-kebun gitugori tuh...nangka. Kalau singkong butuh daunnya juga tinggal ngambil. Kalau gori minta-minta kawan itulah yang punya. Kalau sayuran warung itu jarang saya beli, cuma bumbunya aja itu.
(Wawancara dengan seorang wanita yang berstatus sebagai kepala rumah tangga miskin dari Desa Cakar Buaya).

Pengeluaran untuk kebutuhan lauk pauk khususnya yang mengandung protein hewani seperti daging dan ikan sangat kecil, bukan disebabkan karena tidak tersedia di desa ini, tapi tampaknya lebih disebabkan karena daya beli yang rendah. Penjual ikan keliling selalu menjajakan dagangannya setiap hari di desa. Selain dari itu, beragam lauk pauk tersebut juga tersedia di pasar yang terletak tidak jauh dari desa

Keadaan rumah tangga miskin di Desa Ngesti Rahayu tidak jauh berbeda dengan keadaan rumah tangga miskin di Desa Cakar Buaya. Keluarga yang kurang mampu biasanya mempunyai pengeluaran untuk pangan yang sangat kecil karena kemampuan ekonomi atau daya beli mereka yang sangat rendah. Kemampuan untuk membeli lauk pauk juga sangat terbatas sehingga mereka tidak dapat membeli setiap hari. Lauk pauk yang umumnya mampu mereka beli hanya tahu/tempe atau ikan asin yang harganya relatif murah. Penuturan seorang responden dengan pekerjaan sebagai petani di Desa Ngesti Rahayu dengan kepemilikan lahan sempit berikut ini dapat menggambarkan keterbatasan pengeluaran untuk lauk pauk:

Tidak setiap hari membeli lauk karena tidak mempunyai uang untuk membeli dan kadang membeli lauk untuk hari ini saja dan itupun paling hanya Rp. 1.000,- membeli ikan asin dan hanya kadang-kadang. Daun singkong, gori itu setiap hari, itupun boleh minta dengan tetangga.

Seperti halnya di Desa Cakar Buaya, kebutuhan untuk sayur bagi sebagian besar responden di Desa Ngesti Rahayu dipenuhi dari produksi sendiri (menanam di kebun atau pekarangan) atau minta kepada para tetangga. Rasa saling membutuhkan diwujudkan dengan saling membantu dan tolong menolong dalam segala hal termasuk saling memberi untuk kebutuhan pangan. Pengeluaran uang tunai untuk kebutuhan lauk pauk umumnya hanya untuk membeli tempe atau tahu, sedang membeli ikan hanya dilakukan jika rumah tangga memiliki kelebihan uang setelah dibelanjakan untuk kebutuhan makanan pokok, seperti diungkapkan berikut ini.

Ya paling tahu, tempe, terus daun-daun singkong gitu, ada singkong kalau nggak ya nangka. Ya cuma nyari pepaya setiap hari, ya pasti, ya. Kalau nggak telat tahu, kadang-kadang diselingi yang tiap hari selalu ada itu tempe. Tahu ya nggak tiap hari, kalau tempe tiap hari, kalau tahu tempe, sayur. Ikan...Nggak, ya itu kadang-kadang, paling seminggu sekali nggak tentu Pak, ya rejeki lagi ada, agak mending ya beli, kalau nggak ya udah, metik di pohon aja, paya atau daun singkong. Pokoknya tiap hari itu buah-buah dari kebun itu pak, sawah, lauknya itu lho pak, ya minta nggak punya kebun sendiri, tetangganya.

(Wawancara dengan seorang petani yang juga mempunyai usaha membuat lemari dan kursi dari Desa Ngesti Rahayu)

Untuk mempertahankan hidup dan menghidupi keluarganya sebagian keluarga miskin di Desa Cakar Buaya maupun di Desa Ngesti Rahayu harus bekerja lagi (mencari pekerjaan tambahan/sampingan) sebagai buruh tani. Walaupun demikian, kebanyakan dari mereka tetap masih merasakan terlalu sulit menyisihkan uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Uang yang didapat dari hasil memburuh hanya habis untuk makan sehari-hari sedangkan untuk menyekolahkan anak-anaknya harus mencari biaya dari sumber yang tidak menentu. Saat ini keadaan lebih sulit lagi karena pekerjaan sebagai buruh juga sangat sulit didapat, karena terlalu banyak buruh dari desa lain yang mencari kerja, disamping sebagian pemilik lahan pertanian juga mengerjakan lahannya sendiri. Kesempatan kerja di bidang lainnya di luar sektor pertanian juga sulit didapat untuk tenaga kasar yang biasanya bekerja sebagai buruh pertanian. Informasi dari dua orang responden berikut ini menggambarkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai buruh tani yang berimplikasi pada rendahnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan:

Kadang-kadang dan tidak tentu, karena kita bekerja buruh di tempat orang sebagai tenaga kontrak. Mencangkul dalam 1 hektar tanah memang dapat upah tapi sisanya paling hanya untuk makan setiap hari dan andaikata disimpan hanya sedikit dan itupun bukan penghasilan tetap, apalagi sekarang sudah sumbangan banyak, dan penghasilan tidak ada.

(Wawancara dengan seorang buruh tani dari Desa Ngesti Rahayu)

Kalau buruh gitu nggak pasti, Pak. Kadang kalo ada yang nyuruh, ya kadang tiap hari, kadang kalau nggak ada ya sampai 1 bulan, 2 bulan nggak dapat kerjaan. Nggak dapat

uang. Di rumah kemarin itu sampai 2 bulan Bu, saya nggak dapat pengasih.

(Wawancara dengan seorang ibu yang menyewa lahan untuk menanam singkong dan juga bekerja sebagai buruh tani dari Desa Cakar Buaya).

Sumber penghasilan rumah tangga yang hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh (meskipun sebagian kecil juga menguasai lahan sewa yang sangat sempit) dirasakan sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berhutang adalah cara yang sering dilakukan oleh rumah tangga di dua desa ini. Berhutang ke warung merupakan alternatif pertama untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti beras, minyak goreng, minyak tanah, dan bumbu-bumbu dapur. Setiap pemilik warung di kedua desa ini memang bersedia untuk memberi hutang dengan pembayaran yang bisa diatur antara pemilik warung dengan pengutang. Dalam hal ini kedua belah pihak saling diuntungkan, karena 'kesempatan berhutang' ini juga merupakan salah satu daya tarik untuk orang selalu belanja di warung tersebut. Di Desa Ngesti Rahayu, berhutang beras di tempat penggilingan beras juga sudah merupakan hal yang biasa. Biasanya setelah panen tiba hutang beras baru dibayar, seperti dijelaskan seorang responden di bawah ini:

Paling ke warung, hutang kalau selesai panen baru membayar, dan kadang tidak. Perhitungan nanti Rp. 5.000,- menjadi Rp. 7.000,- yang penting tiap hari ada kadang-kadang kalau beras habis ke pabrik (penggilingan beras) dan kadang-kadang paling makan singkong dan yang penting apa saja yang penting kenyang, tapi itu kasihan dengan anak-anak.

(Wawancara dengan seorang petani yang kebetulan biasa berhutang dengan warung dan penggilingan padi dari Desa Ngesti Rahayu)

Jenis pekerjaan lain yang dilakukan untuk menambah penghasilan dan untuk menambah persediaan pangan terutama di Desa Ngesti Rahayu adalah "derep" atau "bawon". Kegiatan ini dilakukan di dalam desa maupun ke luar desa. Hasil dari kegiatan ini sebenarnya cukup baik dan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama jika dilakukan dengan rutin pada saat musim panen padi. Namun, kegiatan ini membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, sehingga sangat berat untuk mereka yang sudah cukup berumur seperti diungkapkan salah seorang informan berikut:

Panen, itu punya sawah sendiri, juga dengan bawon atau derep kumpul-kumpul dapat banyak. Tapi dulu masih muda, sekarang ini derep 3 kali doang udah nggak kuat, udah loyo, paling capek-capek nya kerja lho Pak, ... 8 karung kita cuma dapat 1, makanya kalau yang rumahnya jauh nganterin pakai sepeda berapa kilo meter, lha jam 12 malem udah berangkat ke sawah pakai lampu, nyabit sampai pagi. Pagi itu nanti ngusung di tempat yang punya, habis rapi ngusung, ngarit lagi ke tempat lainnya gitu lho Pak. Makanya berat-beratnya orang kerja, ya nama orang ngambil padi tadi, kemarin kita nderep 3 orang paling dapat 3 karung cuman udah nggak kuat. Dulu masih muda emang semangat banget, lha sekarang udah tua ya tenaganya nggak ada.

(Wawancara dengan seorang petani yang berumur sekitar 50 tahun yang juga sering 'mbawon' bersama isterinya ketika panen tiba untuk menambah penghasilannya dari Desa Ngesti Rahayu)

Secara ringkas, kondisi kemiskinan di Desa Ngesti Rahayu lebih baik dibandingkan dengan Desa Cakar Buaya. Perbedaan ini tampaknya dipengaruhi oleh faktor sumber dan besar pendapatan rumah tangga yang secara langsung berpengaruh terhadap besar pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan. Penduduk di Desa Ngesti Rahayu yang terletak dekat dengan ibukota Provinsi Lampung lebih mudah untuk memanfaatkan peluang usaha/kerja di sektor non pertanian di Kota Lampung yang umumnya dapat memberikan penghasilan yang lebih baik daripada sektor pertanian. Kemudahan ini kurang dapat dinikmati oleh penduduk Desa Cakar Buaya, karena letak desa ini cukup jauh. Temuan survei memperlihatkan, terdapat sekitar 28,2 persen rumah tangga responden di Desa Ngesti Rahayu yang bekerja di luar sektor pertanian, misalnya sebagai karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, buruh dan sopir. Responden di Desa Cakar Buaya yang bekerja di luar sektor pertanian hanya sebesar 19,7 persen. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh cukup signifikan terhadap perbedaan kondisi kemiskinan antara dua desa penelitian di Provinsi Lampung.

Di daerah penelitian di Provinsi NTT, angka kemiskinan pangan tinggi ditemukan di Desa Enoneontes, dimana kira-kira 62 persen rumah tangga responden termasuk dalam kategori miskin, jauh di atas persentase rumah tangga miskin di Desa Naukae. Keadaan ini terkait dengan pengeluaran untuk bahan pangan yang berharga murah, seperti jagung, ubi kayu dan beberapa jenis sayuran. Meskipun mereka kadang-kadang mengeluarkan uang untuk membeli beras yang harganya lebih mahal (Rp 2.500,- – Rp 3.000,- per kg) daripada jagung (Rp 1.500,-/kg) dan ubi kayu (Rp 1.500,-/kg), uang untuk

membeli beras tidak dikeluarkan secara rutin. Pengeluaran untuk kopi, gula, minyak goreng, meskipun ada setiap hari, tetapi jumlahnya sangat kecil, sedang pengeluaran untuk konsumsi makanan yang sangat jarang dilakukan adalah pengeluaran untuk membeli lauk dari protein hewani. Gambaran tentang pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga miskin di Desa Enoneontes dapat disimak dari kutipan berikut:

Tergantung dari uang Ibu, kalau ada uang beli ikan, kalau nggak ada uang ya sayur saja. Tapi umumnya makan (jagung) hanya dengan sayur saja. Beli garam dan minyak (goreng dan tanah) kalau habis jual sayur. Kalau masih ada uang, beli ikan kering yang kecil-kecil. Beli 1 kg, harga Rp 5.000,-, untuk makan 1 minggu. Beli ikan kalau lagi ke pasar, umpama sudah ada oto yang datang ambil kayu, biasanya 1 bulan sekali. Kita juga biasa beli jagung 10 kg, beli di pasar Soe²². Harga 1 kg jagung Rp 1.500,-. Saya juga pernah beli beras OPK, beli 18 kg harganya Rp 18.000,-. Beras OPK habis untuk 2 minggu. Beli beras OPK baru 2 kali, kalau tidak ada uang tidak bisa beli, sekarang katanya sudah tidak ada lagi.

(Wawancara dengan seorang petani berlahan sempit dan mempunyai usaha jualan kayu kering yang dikumpulkan/dicari sendiri dari hutan di Desa Enoneontes).

Walaupun angka kemiskinan di Desa Naukae hanya kira-kira kurang dari separuh angka kemiskinan di Desa Enoneontes, keadaan rumah tangga miskin di desa ini sama saja dengan di Enoneontes. Pengeluaran untuk bahan makanan yang didominasi oleh jagung dan ubi kayu, ditambah dengan sayur mayur sebagai campuran makanan pokok serta kadang-kadang membeli ikan asin yang berharga murah, memberikan nilai pengeluaran pangan sangat kecil, di bawah garis kemiskinan pangan yang dijadikan standar. Kutipan wawancara berikut ini, yang dikemukakan oleh salah seorang responden dari rumah tangga miskin di Desa Naukae menggambarkan bagaimana rumah tangga mengatur pengeluaran untuk kebutuhan pangan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka:

Beli jagung, garam, minyak tanah. Kalau ada uang lebih, beli ikan kering Rp1.000,- dapat 1 tumpuk. Kalau uang banyak beli ikan basah (ikan nipe), Rp 5.000,- dapat 5 potong/ekor. Santan dan sayur dari kebun. Beli beras murah,

²² Ibukota Provinsi yang dicapai dengan jalan kaki melewati jalan pintas dengan waktu perjalanan selama 3 jam sekali jalan (6 jam pulang pergi).

dulu 10 kg, sekarang 20 kg, harganya Rp 20.000,-. Bisa dimakan untuk 1 bulan, karena makan jagung dan ubi juga. Harga beras di pasar lebih mahal dari jagung, jadi jarang sekali beli.

(Wawancara dengan pasangan suami isteri yang tidak memiliki lahan tetapi menggarap tanah milik orang dengan cara bagi hasil dari Desa Naukae)

Pengeluaran yang cukup besar tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan adalah untuk membeli sirih-pinang. Makan sirih-pinang merupakan kebiasaan sehari-hari masyarakat NTT, umumnya penduduk usia dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Pengeluaran untuk membeli sirih-pinang berkisar antara Rp 2.000,- – Rp 2.500,-/orang/minggu.

Persentase rumah tangga miskin pangan di Desa Enoneontes yang lebih tinggi daripada Desa Naukae tampaknya juga terkait dengan perbedaan konsumsi lauk pauk, terutama jenis protein hewani. Data survei menunjukkan, bahwa 29 persen rumah tangga responden di Desa Naukae mengkonsumsi ikan segar, atau hampir lima belas kali lipat dibandingkan di Desa Naukae. Harga ikan segar cukup mahal (berkisar antara Rp 9.000,- - Rp 10.000,-/kg untuk ikan nipe, Rp 7.500,- – Rp 8.000,-/kg untuk ikan tongkol), sehingga cenderung hanya dikonsumsi oleh rumah tangga tidak miskin.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap perbedaan angka kemiskinan pangan di Desa Enoneontes dan Naukae adalah jenis dan luas pemilikan lahan. Rata-rata luas pemilikan lahan kering (kebun) di Desa Enoneontes adalah 0,7 ha; lebih sempit dibandingkan dengan rata-rata pemilikan di Desa Naukae (1,22 ha). Demikian pula jika dilihat distribusi luas pemilikan lahan, separuh rumah tangga sampel di Desa Enoneontes hanya mempunyai lahan antara 0,1-0,49 ha, sedangkan di Desa Naukae, lebih dari dua pertiga rumah tangga sampel memiliki kebun di atas 1 (satu) hektar. Pemilikan lahan yang sempit ditambah dengan keterbatasan alam (curah hujan kurang, kesuburan tanah rendah) dan pengolahan tanah yang belum optimal (misalnya penanaman berbagai jenis tanaman dalam satu lubang, tidak menggunakan pupuk maupun obat pemberantas hama), menyebabkan hasil pertanian tidak optimal sehingga pendapatan rumah tangga juga rendah. Akibatnya kebanyakan rumah tangga petani tidak bisa membeli kebutuhan makanan yang sesuai dengan kebutuhan minimum, dan masuk dalam kategori rumah tangga miskin pangan.

Meskipun sebagian rumah tangga miskin di Desa Enoneontes telah berusaha mencari pekerjaan di luar pekerjaan mengolah kebun miliknya, pendapatan

yang mereka peroleh belum dapat membantu mengangkat mereka keluar dari kemiskinan pangan. Pernyataan salah seorang kepala rumah tangga miskin di Desa Enoneontes yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan berikut ini menggambarkan kondisi kemiskinan dan usaha rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan melakukan diversifikasi pekerjaan:

Untuk mengatasi kebutuhan dapur, saya juga jual kayu kering. Kumpul kayu tiap hari, kemudian diikat-ikat dan dijual kalau ada oto datang. Oto datang untuk ambil kayu. Jual kayu 1 bulan dapat Rp 50.000,-. Itu ada 200 ikat. Cari kayu di hutan, sekaligus olah kebun di hutan. Pagi olah kebun, siang datang ke rumah sudah bawa kayu, kebunnya dekat hutan. Sudah lama jual kayu, pokoknya setelah nikah sudah mulai jual kayu. Saya juga sering kerja di kebun orang untuk dapat uang, 1 hari bisa tofa 2 are, dapat uang Rp 20.000,- kerja di kebun orang di dalam desa. Kadang kerja tanam padi di Weso, dekat Kupang. Kalau kerja tanam padi ada 10 orang, dari sini semua. Pergi Bulan Januari, pulang Bulan Maret. Di sana tinggal di rumah yang punya tanah (sawah). Dikasih bayar padi kalau sudah panen, nanti panennya bulan 5. Bulan 5 saya kembali ke Weso. Itu umpama kita tanam 3 ha 10 orang, dia bayar kita 40 blek (blek minyak). Hasil kerja tanam padi dan jual kayu untuk beli jagung atau beras, garam dan minyak. Beli pakaian anak kalau ada uang lebih, biasa hanya untuk kebutuhan dapur saja.

(Wawancara dengan seorang petani berlahan sempit dan mempunyai usaha jualan kayu kering yang dikumpulkan/dicari sendiri dari hutan di Desa Enoneontes)

Mencari pekerjaan di luar kebun miliknya tersebut bukan hanya dilakukan oleh rumah tangga miskin, tetapi juga rumah tangga tidak miskin baik di Desa Naukae maupun Desa Enoneontes. Sebagian dari rumah tangga tidak miskin di kedua desa tersebut juga melakukan pekerjaan di sektor non pertanian. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh rumah tangga tidak miskin cenderung memberikan upah/penghasilan yang lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga miskin, seperti pekerjaan sebagai tukang bangunan (umumnya rumah) di dalam maupun luar desa, membuat kusen jendela dan pintu rumah. Pekerjaan non pertanian ini terkadang menjadi pekerjaan utama, sehingga kegiatan pengolahan kebun jagung dilakukan oleh tenaga sewa. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan non pertanian ini dikatakan sangat membantu dalam upaya

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pengeluaran untuk konsumsi pangan bagi rumah tangga tidak miskin pada umumnya memenuhi standar minimum energi dan protein yang dibutuhkan, seperti dikatakan salah seorang responden berikut:

Saya biasa beli beras 10 kg, di pasar Niki-niki. Uang untuk beli beras dari upah tukang (sekarang suami sedang kerja tukang di Niki-niki, ada orang yang bangun rumah). Jarang beli jagung. Kalau jagung dari hasil kebun habis, seringnya beli beras saja. Kalau ke pasar juga beli ikan, kadangkala basah, tapi juga ikan kering. Ikan basah beli 1 ekor (ikan cakalang) harga Rp 10 ribu. Hanya beli 1 ekor saja, beratnya 2 kg, bisa untuk 2-3 hari. Kalau ikan teri bisa beli di warung, tapi harganya lebih mahal.

(Wawancara dengan seorang petani pendatang yang memiliki lahan luas yang ditanami tanaman pangan dan tanaman keras. Informan juga bekerja sebagai tukang yang dilakukan sampai di luar Desa Naukae)

Penghasilan dari pekerjaan non-pertanian bagi rumah tangga tidak miskin di dua desa penelitian bukan hanya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk kebutuhan pendidikan anak. Namun demikian, kecenderungan orang tua pada rumah tangga tidak miskin untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan tinggi juga didukung oleh kepemilikan lahan cukup luas, disamping mempunyai beberapa ekor ternak seperti sapi atau babi. Hewan ternak ini biasanya mereka beli ketika masih kecil dan dipelihara sebagai simpanan/tabungan yang dapat dijual jika rumah tangga membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar seperti misalnya untuk biaya sekolah anak.

4.1.2. Pemilikan lahan pertanian

Selain pengeluaran konsumsi makanan, studi ini juga melihat kondisi kemiskinan dari indikator pemilikan lahan pertanian. Pemilikan lahan pertanian bukan merupakan indikator yang dapat diaplikasikan secara umum di berbagai daerah karena tidak semua rumah tangga merupakan rumah tangga petani yang memerlukan lahan pertanian untuk melaksanakan aktivitas ekonominya. Tetapi karena sebagian besar rumah tangga di daerah penelitian mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian, indikator ini juga dapat memberikan gambaran tentang kemiskinan rumah tangga karena kurangnya akses terhadap sumber produksi seperti lahan pertanian.

Mengacu pada indikator yang dipakai untuk mengklasifikasikan rumah tangga responden dalam klasifikasi miskin dan tidak miskin, berdasarkan luas lahan (lihat Bab II) pertanian yang dimiliki/dikuasai, angka kemiskinan di empat desa penelitian termasuk tinggi (Tabel 4.2). Di Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan lahan yang tinggi ditemukan di Desa Ngesti Rahayu. Kira-kira 81 persen (162 rumah tangga) masuk dalam kategori miskin lahan. Angka ini lebih tinggi daripada angka di Desa Cakar Buaya yang bertipologi desa pertanian lahan kering. Penjelasan yang dapat diberikan terkait dengan cukup banyaknya rumah tangga yang tidak bermata pencaharian sebagai petani (termasuk kelompok ini adalah mereka yang memiliki sumber penghasilan dari luar sektor pertanian dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki lahan pertanian), di Desa Ngesti Rahayu. Meskipun rumah tangga ini dapat saja masuk dalam kategori tidak miskin berdasarkan garis kemiskinan pengeluaran konsumsi pangan, tetapi karena mereka tidak memiliki lahan pertanian (atau memiliki tetapi tidak memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai batas minimum pemilikan lahan dalam menentukan rumah tangga miskin lahan) maka mereka masuk dalam kategori miskin lahan. Bahkan, mereka yang memiliki pendapatan tinggi, tetapi karena tidak memiliki lahan pertanian (atau memiliki, tetapi di bawah batas kemiskinan lahan) maka mereka akan termasuk dalam kategori miskin lahan. Ini merupakan kelemahan indikator pemilikan lahan dalam melihat kemiskinan di tingkat rumah tangga.

Tabel 4.2: Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator pemilikan lahan pertanian*, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Kategori rumah tangga	Lampung			Nusa Tenggara Timur		
	Catur Karya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total
Miskin	61,5	81,0	71,3	98,0	75,3	87,0
Tidak Miskin	38,5	19,0	28,8	2,0	24,7	13,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
n	200	200	400	201	190	391

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Catatan: *) rumah tangga yang memiliki sawah <0,7 ha dan ladang <0,3 ha, atau sawah <0,85 ha, atau ladang <1,7 ha diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin

Jumlah rumah tangga responden miskin lahan di Desa Cakar Buaya lebih rendah (61,5 persen) dari Desa Ngesti Rahayu (81,0 persen). Keadaan ini mungkin berhubungan dengan status awal Desa Cakar Buaya yang merupakan daerah transmigrasi untuk perkebunan karet atau kelapa sawit. Pada awal

penempatan tahun 1978, setiap kepala keluarga transmigran di desa ini mendapatkan lahan seluas 5 hektar, termasuk lahan untuk perkebunan, ladang, pekarangan dan rumah. Meskipun sekarang ini sebagian lahan tersebut sudah berubah kepemilikan (karena dijual atau diwariskan), survei menunjukkan bahwa kepemilikan ladang masih cukup luas (rata-rata 1,63 Ha). Hanya terdapat sejumlah kecil rumah tangga responden yang memiliki sawah (7,5 persen dari total sampel) dengan luas rata-rata 0,21 Ha. Sawah pada umumnya merupakan sawah tadah hujan atau berupa sawah rawa.

Pemilikan lahan yang cukup luas di Desa Cakar Buaya pada umumnya dimanfaatkan untuk menanam ubi kayu. Namun demikian, belakangan ini, kebun yang ditanami ubi kayu hasilnya semakin menurun, sementara harga jual ubi kayu juga semakin rendah. Oleh karena itu, menanam ubi kayu kurang menguntungkan karena biaya produksi cenderung meningkat, bahkan terkadang tidak sebanding dengan hasil jual ubi kayu. Harga pupuk yang naik cukup tinggi dianggap sebagai penyebab membengkaknya biaya produksi. Sementara itu harga jual ubi kayu di pabrik sekitar desa tersebut sangat rendah. Berikut ini, ungkapan salah seorang responden mengenai penurunan pendapatan petani ubi kayu:

Singkong itu sebelum krisis, itu dari hasil 1 ton itu untuk beli pupuk itu dapat 1,5 kuintal. Sedangkan kalau sekarang misalnya panen 1 ton untuk beli pupuk tuh cuma dapat 1 kuintal aja masih nambah Rp. 50.000,-. Nah, selisihnya kan jauh. Jadi bukan arti kita itu menuntut harga singkong harus tinggi atau harus gimana gitu nggak. Maksudnya biar penyesuaian itu lho Bu, hanya itu aja. Itu banyak yang ngeluh kan disitu.

(Wawancara dengan seorang petani dan pedagang hasil pertanian dari Desa Cakar Buaya)

Walaupun sebagian rumah tangga mempunyai lahan yang cukup luas, hasilnya masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Upaya untuk merubah kehidupan mereka sudah mulai tampak. Bepindah usaha dari bertanam ubi kayu ke perkebunan karet dengan memanfaatkan lahan yang ada sudah mulai dilakukan, yang sebenarnya merupakan tujuan awal dari program transmigrasi di daerah ini. Secara umum, masyarakat berpendapat bahwa tanah di Desa Cakar Buaya ini cocok untuk ditanami karet. Beberapa rumah tangga telah berhasil menanam karet, bahkan menikmati hasilnya. Seorang petani yang mempunyai kebun karet menuturkan sebagai berikut:

Kalau disini kayaknya yang cocok karet itu Bu. Sebab kalau singkong kekuatannya cuma 3 tahun. Habis 3 tahun itu kalau nggak ganti bibit atau pupuknya kuat itu, udah

ambblas itu. Tapi kalau karet kan makin lama malah makin bagus. Disamping itu nggak bolak balik uang modal. Awalnya kalau singkong kan tiap tahun ngeluarin modal Rp. 1,5 juta tapi kalau nanam karet 1 ha itu paling pertama Rp. 2,5 juta itu aja terus habis itu tinggal mupuk aja sama ngoret.

(Wawancara dengan seorang petani singkong yang sudah mulai mencoba usaha perkebunan karet dari Desa Cakar Buaya)

Sudah cukup banyak petani yang menanam karet di sela-sela kebun ubi kayunya dan sebagian sudah menikmati hasilnya karena sudah sejak tahun 1994 mereka mulai menanam. Untuk pemasarannya pun mereka tidak mengalami kesulitan, karena sudah ada pembeli yang datang ke desa ini. Walaupun sebenarnya tanaman karet memang sangat cocok ditanam di daerah ini, sebagian petani baru mulai usaha perkebunan karet belum lama ini. Kelapa sawit kurang dapat berkembang karena dirasakan modalnya terlalu besar dibandingkan dengan tanaman karet sehingga mereka merasa tidak mampu dan memilih tanaman karet.

Bagi mereka yang tidak memiliki lahan cukup luas, usaha di sektor non-pertanian dapat membantu untuk menghidupi keluarganya. Beberapa pekerjaan non pertanian yang dilakukan penduduk di Desa Cakar Buaya seperti pegawai negeri, pedagang, sopir angkutan, dan lain-lain. Pada umumnya mereka dapat hidup cukup karena selain suami, istri juga ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Seperti misalnya dalam satu rumah tangga di Desa Cakar Buaya, karena lahan pertanian yang dimiliki sempit maka rumah tangga ini juga mempunyai usaha di bidang perdagangan. Suami berusaha di bidang pertanian dengan sistem menyewa lahan dan isteri berdagang baju. Dengan dua sumber pendapatan keluarga ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Secara umum, dengan memperhatikan pendapat beberapa responden tersebut baik dari hasil survei maupun wawancara mendalam, dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan lahan di Desa Cakar Buaya lebih rendah dari Desa Ngesti Rahayu (yang kondisi ketahanan pangannya lebih baik dibandingkan Desa Cakar Buaya lihat Bab I dan Bab III). Latar belakang Desa Cakar Buaya sebagai daerah transmigrasi pertanian perkebunan sangat berpengaruh terhadap perbedaan ini.

Secara subjektif, ukuran luas pemilikan lahan menurut masyarakat di kedua desa ini yang dapat menunjang kehidupan yang layak juga berbeda. Perbedaan ini mungkin juga disebabkan karena kondisi lahan yang juga berbeda, misalnya antara lahan perladangan dan persawahan. Untuk lahan persawahan (ditunjang oleh irigasi seperti di Desa Ngesti Rahayu), beberapa

narasumber berdasarkan pengalamannya mengungkapkan sebagai berikut

Sebenarnya kalau orang hidup itu memang tidak adaukupnya tapi kalau orang yang hidupnya di sawah dengan luas tanah 0,5 atau 1 (satu) hektar itu agak lumayan dan dapat bernafas...Ya cukup kalau anak baru 1 atau 2 anak. Ya, kalau tidak tambah lagi dan bagi kita sudah dapat makan setiap hari tu sudah Alhamdulillah.

(Wawancara dengan seorang petani yang memiliki lahan sempit dari Desa Ngesti Rahayu)

Ya minimal misalnya....tinggal liat keluarga ya. Kalau keluarganya paling tidak 5 orang, ayah-ibu dan 3 orang anak, itu supaya untuk cukup makan perharinya juga untuk biaya sekolah anaknya, paling tidak 0,5 hektar itu harus punya. Mungkin baru bisa teratasi, taruhlah 0,5 hektar dengan perincian begini: yang 0,26 hektar khusus untuk makan, kalau keluarga itu 5 orang, panen 0,25 hektar itu untuk makan 1 tahun pasti cukup. Kemudian yang 0,25 hektar itu untuk biaya anak sekolah, sumbangan-sumbangan, untuk belanja harian beli sayuran dan sebagainya itu cukup. Jadi minimal itu harus punya 0,5 hektar, kalau itu hanya khusus untuk tani ya.

(Wawancara dengan seorang pegawai negeri/guru yang juga mempunyai sawah dari Desa Ngesti Rahayu)

Orang miskin di sini kan pada umumnya minimal kan 1 ha. Itu istilahnya nggak punya, tapi berhubung dia tuh nggak punya termasuk miskin tadi. Yang aslinya transmigran dulu kan jatahnya 5 ha. Kadang namanya orang ada kebutuhan lain akhirnya banyak yang dijual, banyak yang kadang habis. Artinya kan dia bukan aslinya bukan miskin gitu, bukan, tapi hanya keliru apa itu istilahnya itu cara pemakaiannya itu Bu.

(Wawancara dengan seorang petani dan pedagang dari Desa Cakar Buaya)

Di daerah penelitian di Provinsi NTT data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kemiskinan lahan terlihat nyata di di Desa Enoneontes. Hampir semua rumah tangga responden di desa ini termasuk rumah tangga miskin lahan. Temuan survei memperlihatkan bahwa termasuk kelompok ini adalah mereka yang memiliki ladang/kebun dengan luas kurang dari 1,7 ha yang merupakan

batas untuk ukuran kemiskinan lahan (kering). Walaupun terdapat sebanyak 28 rumah tangga responden (13,9 persen) yang memiliki sawah, tetapi tidak ada rumah tangga responden yang memiliki sawah sama dengan atau di atas batas ukuran untuk penentuan kemiskinan lahan ($\geq 0,7$ ha sawah dan $\geq 0,3$ ladang, atau $\geq 0,85$ ha sawah). Hanya satu rumah tangga responden yang tidak memiliki ladang. Rata-rata pemilikan ladang adalah 0,7 ha, sedang rata-rata pemilikan sawah (dari 28 rumah tangga responden) hanya 0,1 ha. Angka kemiskinan lahan yang sangat tinggi di desa ini mungkin karena pemilikan lahan umumnya diperoleh dari warisan orang tua dengan ukuran yang tidak luas, seperti dikemukakan oleh dua informan berikut ini:

Memiliki kebun dua bidang, luasnya kira-kira 20 are (200 m²). Kebun diperoleh dari orang tua. Tidak punya kebun dari hasil beli sendiri. Ada tanah milik orang yang juga saya olah untuk tanam sayur, hanya ada 1 bidang.
(Wawancara dengan seorang petani miskin juga bekerja sebagai buruh tofa di dalam dan di luar Desa Enoneontes)

Hanya punya kebun jagung 30 are (300 m²). Tanah itu dapat dari orang tua. Tidak bisa beli, karena untuk cari buat makan saja sulit. Dari 30 are tersebut, juga untuk kebun sayur (sawi putih dan bayam), ada 5 bedeng, 1 bedeng ukurannya 3 m².
(Wawancara dengan seorang petani miskin dengan lahan sempit yang diperoleh dari warisan orang tua dan tidak memiliki ternak dari Desa Enoneontes)

Rumah tangga tidak miskin lahan yang hanya sekitar 2,0 persen dari total rumah tangga sampel di Desa Enoneontes, salah satunya adalah pendatang yang memiliki tanah seluas 5 ha yang diperoleh dengan cara membeli, seperti diungkapkan dibawah ini.

Punya 2 ha, ditanam jagung, ubi, sayur. Kebun saya juga dipakai untuk kebun sayur kelompok, dibentuk (oleh) CWS, ada 26 bedeng (84 m²). Pakai tanah saya karena dekat dengan air (sungai), (karena) CWS hanya untuk kegiatan tanam sayur, jadi pakai tanah penduduk yang dekat air. Ada tanah lagi yang tidak diolah (seluas) 3 ha, tapi ada tanaman keras (cengkeh, jati dan mahoni). Jati ada ratusan pohon. Tanah itu dulu dari beli pada tahun 1980-an. Belinya 300 ribu per ha. Kalau sekarang beli 1 hektar sudah belasan juta. Yang dekat sungai lebih mahal lagi.

Kondisi fisik tanah juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan. Tanah di desa ini termasuk tanah yang kurang subur dan tidak semua bagian

tanah di desa dapat dijadikan lahan pertanian, salah satunya disebabkan karena kurangnya air. Umumnya tanah-tanah yang agak baik untuk usaha pertanian yang terletak di dekat sungai, sedangkan untuk tanah pertanian lainnya hanya mengandalkan curah hujan yang juga termasuk sangat rendah dibandingkan, misalnya, wilayah Indonesia di bagian barat lainnya seperti Lampung.

Sebagaimana dengan kondisi kemiskinan lahan di Desa Enoneontes, persentase rumah tangga miskin lahan di Desa Naukae juga termasuk tinggi. Terdapat sekitar 75 persen rumah tangga miskin lahan, dari seluruh rumah tangga responden (Tabel 4.2). Walaupun beberapa rumah tangga memiliki sawah dan ladang, tetapi luas kepemilikan masih di bawah batas minimum pemilikan lahan untuk penentuan rumah tangga miskin/tidak miskin. Rata-rata pemilikan ladang di desa ini (1,22 ha) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pemilikan di Desa Enoneontes (0,7 ha). Sawah dimiliki oleh kira-kira 17,9 persen dari total rumah tangga responden dengan luas pemilikan rata-rata 0,5 ha. Namun, persentase rumah tangga yang tidak memiliki lahan kebun mencapai kira-kira empat kali lipat (2,1 persen) lebih besar dari proporsi rumah tangga tanpa lahan di Desa Enoneontes (0,5 persen). Keadaan ini menggambarkan adanya ketimpangan cukup besar dalam distribusi pemilikan lahan di Desa Naukae. Dikemukakan oleh salah seorang informan bahwa di Desa Naukae masih ada beberapa orang yang memiliki tanah hingga puluhan hektar. Mereka umumnya masih keturunan bangsawan di daerah tersebut. Sebagian besar luas tanah dibiarkan tidak diolah, sebagian lainnya dimanfaatkan untuk usaha tanaman keras (misalnya asam, kemiri, kelapa), dan hanya 1-1,5 ha untuk kebun tanaman pangan. Namun, ada juga pemilik tanah luas yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengolah tanah mereka dengan cara bagi hasil.

Meskipun hasil survei memperlihatkan bahwa hanya ada sejumlah kecil rumah tangga yang tidak miskin lahan, informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam menemukan bahwa pada kenyataannya jumlah rumah tangga tidak miskin lahan tersebut bisa lebih banyak lagi. Merupakan suatu kebiasaan masyarakat di daerah penelitian (masyarakat Timor dalam konteks yang luas) untuk cenderung 'menyembunyikan' luas tanah (juga ternak) yang dimiliki. Mereka beranggapan bahwa lebih baik orang lain yang mengatakannya, karena kalau dikatakan sendiri, maka orang lain akan menilai dirinya bersikap sombong. Salah seorang informan mengatakan: *Di sini untuk katakan mampu itu yang mengungkapkan harus orang lain, kami tidak omong sendiri, kalau yang omong sendiri dikira sombong*. Kebiasaan seperti ini memberikan pemahaman bahwa kajian tentang kemiskinan memerlukan metode/cara pengumpulan data dengan ketelitian tinggi, baik itu metode kuantitatif maupun kualitatif.

Penelitian ini telah menetapkan ukuran kemiskinan lahan dengan menggunakan batas $< 1,7$ ha untuk lahan kering dengan pertimbangan tertentu (lihat Bab II). Namun, masyarakat NTT, khususnya di lokasi penelitian memiliki konsep tentang batasan luas lahan yang dianggap bisa mencukupi kebutuhan pangan yang berbeda dengan ukuran yang dipakai dalam penelitian ini. Untuk menentukan apakah satu rumah tangga termasuk miskin/tidak miskin, masyarakat umumnya menggunakan indikator luas lahan yang diolah. Pengolahan lahan yang baik adalah melalui kegiatan persiapan dan perawatan kebun serta pemupukan. Jika tidak ada gangguan curah hujan (kurang atau kelebihan), maka tanaman jagung bisa tumbuh dengan baik, sehingga hasil panen cukup baik. Untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga dari satu panen hingga jangka waktu panen berikutnya paling tidak diperlukan kebun dengan luas antara 1,0 – 1,5 ha. Dua informan berikut mengemukakan pendapatnya tentang luas lahan yang harus dimiliki untuk mengklasifikasikan satu rumah tangga dalam kategori rumah tangga tidak miskin lahan:

Biar tanah luas, olahannya kurang, juga miskin. Hasil kurang, itu yang bikin orang miskin. Biarpun punya tanah 2 ha, kalau hujan tidak baik dan tanah tidak bagus, juga tidak diolah semua, itu hasil tidak cukup, bisa masuk (orang/ rumah tangga) miskin. Biar tanah hanya 1 ha atau 0,75 ha, kalau diolah baik dan hujan baik, akan dapat jagung banyak, dan bisa masuk tidak miskin.

(Wawancara dengan seorang petani dan memiliki warung kecil dari Desa Enoneontes)

Dengan luas tanah 1,5 ha sebetulnya sudah bisa mencukupi untuk makan kalau pengolahannya dan pemeliharannya baik.

(Wawancara dengan seorang petani miskin yang hasil pertaniannya hanya cukup untuk makan selama 7 bulan dari Desa Naukae)

Pengolahan kebun yang baik juga bisa dilakukan dengan menanam tanaman hortikultura (seperti jenis sayuran dan pisang) yang dapat dijual, dimana uang hasil penjualan bisa dipakai untuk membeli kebutuhan pangan dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Kecenderungan pemanfaatan kebun untuk tanaman sayuran dan pisang telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, tetapi untuk jenis sayuran hanya bisa dilakukan sepanjang tahun bagi mereka yang memiliki kebun di dekat sungai. Untuk pengelolaan kebun jagung tampaknya tidak bisa dilakukan dengan baik karena keterbatasan modal usaha, terutama uang untuk membeli pupuk. Temuan ini

menggambarkan bahwa, konsep kemiskinan lahan menurut masyarakat NTT mengacu pada luas lahan yang diolah dengan penekanan pada pengolahan yang baik dan variasi jenis tanaman yang diusahakan.

4.1.3. Pemilikan ternak

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu, penggunaan variabel pemilikan ternak untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di desa-desa penelitian adalah karena peran ternak sebagai simpanan (tabungan) sangat terkait dengan upaya rumah tangga untuk mengatasi kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mengacu pada indikator kemiskinan ternak yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu menggunakan batas minimal pemilikan satu ekor sapi/kerbau, terdapat kira-kira 75 persen rumah tangga responden di Desa Cakar Buaya yang termasuk dalam kelompok miskin ternak (Tabel 4.3). Rumah tangga responden yang memiliki sapi dan tergolong rumah tangga tidak miskin di desa ini termasuk mereka yang memelihara sapi milik orang lain (terkadang dari luar desa) dengan sistem 'gaduh', yaitu memelihara sapi bantuan pemerintah, dimana pemelihara akan mendapat bagian anak sapi, jika sapi tersebut beranak. Fenomena seperti ini tidak ditemukan di Desa Ngesti Rahayu. Keadaan ini tampaknya mempengaruhi kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan pemilikan hewan ternak, dimana Desa Ngesti Rahayu kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan Desa Cakar Buaya. Rumah tangga responden miskin ternak di desa Ngesti Rahayu mencapai sekitar 90 persen. Meskipun Desa Ngesti Rahayu merupakan daerah persawahan, tetapi pengolahan sawah jarang dilakukan dengan menggunakan bantuan tenaga sapi. Umumnya pengolahan sawah cukup dilakukan dengan menggunakan cangkul karena rata-rata luas pemilikan sawah hanya 0,64 ha atau traktor tangan, yang dapat disewa, bagi mereka yang memiliki lahan pertanian cukup luas.

Tabel 4.3. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator pemilikan hewan ternak (sapi atau kerbau)*, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Kategori rumah tangga	Lampung			Nusa Tenggara Timur		
	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Total	Enoneontes	Naukae	Total
Miskin	75,5	89,5	82,5	55,2	35,3	45,5
Tidak Miskin	24,5	10,5	17,5	44,8	64,7	54,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
n	200	200	400	201	190	391

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Catatan: *) Rumah tangga yang tidak memiliki ternak (sapi atau kerbau) diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, walaupun lebih dari separuh jumlah rumah tangga responden di Desa Enoneontes termasuk dalam rumah tangga miskin ternak, tetapi angka tersebut lebih kecil daripada angka kemiskinan di Provinsi Lampung. Bahkan di Desa Naukae, persentase rumah tangga responden miskin ternak hanya sekitar sepertiga dari total rumah tangga responden. Situasi kemiskinan ternak yang lebih baik di desa-desa penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur daripada di Lampung, mungkin karena pemilikan ternak seperti sapi, merupakan suatu bentuk 'tabungan' yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam jumlah cukup besar, misalnya untuk biaya sekolah anak di sekolah lanjutan serta biaya pesta. Namun demikian, dalam keadaan terpaksa, rumah tangga juga dapat menjual sapi untuk membeli kebutuhan pangan, tetapi sebagian lainnya untuk membeli sapi/babi yang lebih kecil, atau membeli beberapa ekor ayam yang harganya lebih murah. Dengan demikian, meskipun ada ternak yang dijual, mereka tidak menghabiskan hasil penjualan hanya untuk konsumsi, tetapi tetap menyisihkan untuk tabungan selanjutnya dalam bentuk ternak yang lebih "kecil". Bagi masyarakat NTT, termasuk di desa-desa penelitian, ayam memiliki peran sangat penting bagi rumah tangga miskin sebagai 'tabungan' yang sewaktu-waktu bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah seorang tokoh Desa Enoneontes berikut ini memberikan gambaran pentingnya pemilikan ternak sebagai salah satu jenis 'tabungan' yang dapat dimanfaatkan kapan saja ketika rumah tangga sedang membutuhkan:

Ternak sangat membantu untuk mengantisipasi kekurangan pangan, karena faktor pendapatan di dalam desa sini

(pendapatan rendah). Dia (rumah tangga) bisa jual ayam, kambing, babi atau sapi untuk bisa atasi kekurangan makan, atau sekolah anak. (Untuk) anak (sekolah), apalagi, kalau tidak mengharapkan dari ternak?

(Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat dari Desa Enoneontes)

Hal sama juga dikemukakan oleh salah satu tokoh informal di Desa Naukae sebagai berikut:

Di sini ibu, kalau orang punya ayam bisa dijual kapan saja untuk beli jagung pada musim-musim seperti sekarang ini (ketika persediaan jagung hasil kebun sudah habis atau tinggal sedikit), kadang untuk beli makanan lain, misalnya ikan kering, garam, minyak tanah. Kalau jual sapi itu untuk keperluan (biaya) sekolah anak, biasanya kalau sudah SMP atau SMA.

(Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat yang juga keturunan bangsawan dan sebagai PPL Pertanian dari Desa Naukae)

Peran ternak sebagai 'dewa penolong' jika terjadi kekurangan pangan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar lainnya juga ditemukan di desa lain di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Romdiati dkk, 1993). Tingginya manfaat ternak dalam membantu mengatasi berbagai kesulitan rumah tangga tersebut, tampaknya mendorong rumah tangga untuk berusaha memiliki ternak. Kondisi ini memberikan pemahaman tentang situasi kemiskinan ternak di dua desa penelitian di NTT yang lebih baik dibandingkan dengan situasi kemiskinan lahan (bandingkan Tabel 4.2 dan 4.3). Pemilikan ternak (sapi/babi) seringkali tidak diperoleh dari hasil usaha sendiri (membeli atau bagi hasil dengan pemilik), tetapi kebanyakan justru diperoleh dari warisan orang tua. Fenomena ini mengindikasikan adanya proses pemiskinan ternak, sebagaimana terjadi dengan proses pemiskinan lahan. Proses pemiskinan ternak ini juga terlihat dari 'konsep' kekayaan ternak yang mengalami perubahan. Sebagai contoh, jika pada masa lalu 'orang kaya' ternak adalah orang yang memiliki ternak dalam jumlah ratusan hingga ribuan, maka pada saat ini orang dengan jumlah ternak puluhan ekor sudah dianggap orang mampu. Informasi berikut ini menggambarkan adanya perubahan jumlah pemilikan ternak untuk mengelompokkan orang yang dianggap mampu (tidak miskin ternak) atau tidak mampu (miskin ternak):

Umpama punya 30-40 ekor, sudah bisa dibilang orang kaya. Kalau macam orang tua dulu, kalau 100 ekor lebih baru namanya (orang) kaya. Babi juga harus punya ratusan, tetapi sekarang kalau punya 20 ekor, sudah masuk orang kaya.
(Wawancara dengan seorang petani yang memiliki lahan puluhan hektar dan ternak puluhan ekor. Informan juga berhasil dalam menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi dari Desa Naukae)

Konsep kekayaan ternak tersebut tidak secara otomatis berfungsi sebagai 'garis batas' orang/rumah tangga miskin. Artinya, orang/rumah tangga yang tidak memiliki ternak sebanyak puluhan ekor tidak dianggap sebagai orang/rumah tangga miskin. Meskipun terdapat variasi jawaban tentang 'garis batas' jumlah pemilikan ternak untuk mengklasifikasikan rumah tangga miskin menurut konsep masyarakat, terdapat kecenderungan umum bahwa yang mereka maksud tentang rumah tangga miskin ternak adalah rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki sapi. Konsep masyarakat tersebut didasarkan atas suatu alasan bahwa walaupun hanya memiliki 1 ekor sapi, tetapi jika dapat memeliharanya dengan baik, maka mereka akan terus memiliki sapi. Pemeliharaan sapi tersebut bisa dilakukan dengan cara mengembangbiakkan, atau dibesarkan dan jika dijual, sebagian hasil penjualannya dibelikan anak sapi untuk dipelihara lagi.

Berdasarkan temuan tersebut, jelas terlihat bahwa kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan pengeluaran makanan tidak selalu konsisten dengan kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan pemilikan/penguasaan lahan atau ternak. Di Provinsi Lampung, desa dengan kondisi ketahanan pangan rendah, atau desa rawan pangan (yaitu Desa Cakar Buaya) adalah desa dengan proporsi rumah tangga miskin lebih besar/tinggi (dilihat dari pengeluaran makanan) daripada Desa Ngesti Rahayu, yang merupakan desa tahan pangan. Tetapi, keadaan menjadi terbalik ketika kondisi kemiskinan dilihat dari indikator pemilikan lahan dan ternak. Insiden miskin lahan dan miskin ternak lebih banyak ditemukan di Desa Ngesti Rahayu daripada di Desa Cakar Buaya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, desa dengan tingkat kerawanan pangan tinggi (Desa Enoneontes, lihat Bab III) juga merupakan desa dengan proporsi rumah tangga miskin (berdasarkan pengeluaran makanan, pemilikan lahan dan pemilikan ternak) yang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Naukae yang memiliki kondisi ketahanan pangan lebih baik. Kondisi kemiskinan rumah tangga di Desa Enoneontes yang lebih buruk dibandingkan dengan di Desa Naukae nampak lebih jelas ketika semua dimensi/ukuran kemiskinan (pengeluaran konsumsi makanan, pemilikan lahan, pemilikan ternak)

dipergunakan untuk melihat situasi kemiskinan rumah tangga. Kira-kira sepertiga (33,8 persen) rumah tangga sampel di Desa Enoneontes termasuk pada rumah tangga benar-benar miskin, dalam arti diukur dari dimensi apapun rumah tangga tersebut termasuk dalam kelompok miskin (Tabel 4.4). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Desa Naukae yang hanya sebesar 8,9 persen dari total rumah tangga sampel termasuk dalam kategori benar-benar miskin. Keadaan ini juga nampak dari pendapat masyarakat tentang pengertian kemiskinan, yaitu mengacu pada keadaan penghasilan yang 'identik' dengan pengeluaran kebutuhan pangan, pemilikan lahan dan ternak. Seseorang/rumah tangga miskin biasanya dicirikan oleh pendapatan kurang (misalnya panen jagung sedikit, hasil pencarian kurang), tanah sempit, tidak memiliki sapi atau babi, tetapi memiliki ayam sedikit. Situasi kemiskinan ini cenderung lebih banyak ditemukan di Desa Enoneontes yang secara geografis lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan Desa Naukae.

Tabel 4.4. Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan indikator pengeluaran, pemilikan lahan dan pemilikan hewan ternak (sapi atau kerbau), Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Status Kemiskinan	Cakar Buaya	Ngesti Rahayu	Enoneontes	Naukae
Tidak miskin	3,5	3,0	0,0	14,2
Miskin dari satu/dua indikator	67,0	65,0	66,2	76,9
Benar-benar miskin	29,5	32,0	33,8	8,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
n	200	200	201	190

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Temuan di Provinsi Lampung yang memperlihatkan bahwa hampir sepertiga rumah tangga sampel di Desa Ngesti Rahayu termasuk dalam kategori benar-benar miskin. Angka ini relatif hampir sama dengan di Cakar Buaya. Sementara itu, rumah tangga dengan kategori tidak miskin dan kategori miskin dari satu/dua indikator di Desa Cakar Buaya juga hampir sama dengan Desa Ngesti Rahayu. Secara umum, temuan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi fisik Desa Ngesti Rahayu yang terlihat lebih maju, bahkan kondisi sosial-ekonomi penduduk di desa ini juga nampak lebih baik dibandingkan dengan Desa Cakar Buaya. Hal ini dapat dijelaskan dari tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan kepemilikan lahan pertanian rumah tangga di Desa Cakar Buaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Ngesti Rahayu. Indikator kepemilikan lahan ini yang menyebabkan angka di ketiga kategori hampir sama. Namun demikian, lahan pertanian/perkebunan yang luas di Desa Cakar Buaya umumnya merupakan lahan yang tidak produktif. Sementara itu, kepemilikan lahan di Desa Ngesti Rahayu

relatif lebih sempit, namun tanahnya lebih subur dan dapat ditanami padi yang hasil produksinya lebih baik. Dengan demikian, penggunaan konsep kemiskinan dengan menerapkan semua dimensi kemiskinan tampaknya memiliki kelemahan, terutama jika daerah penelitian memiliki tipologi daerah dan masyarakat yang berbeda.

Memperhatikan temuan penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, dapat disimpulkan bahwa penggunaan indikator pemilikan lahan pertanian dan ternak memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda di setiap wilayah, dan tidak sensitif untuk ukuran kemiskinan secara umum, sebagaimana indikator pengeluaran makanan. Mengacu pada temuan di atas, maka hanya kemiskinan yang diukur dari pengeluaran makanan yang dipakai dalam analisis keterkaitan antara ketahanan pangan dan kemiskinan di semua desa penelitian, baik di Provinsi Lampung maupun Nusa Tenggara Timur.

4.2. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan

Analisis pada bagian ini secara umum difokuskan pada keterkaitan antara ketahanan pangan dan kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi makanan. Hasil tabulasi silang antara kemiskinan dan ketahanan pangan mengelompokkan rumah tangga menjadi enam kategori yaitu: (1) tahan pangan tidak miskin, (2) tahan pangan miskin, (3) kurang tahan pangan tidak miskin, (4) kurang tahan pangan miskin, (5) tidak tahan pangan tidak miskin, dan (6) tidak tahan pangan miskin. Lebih lanjut, bahasan tentang hubungan antara status rumah tangga dengan konsumsi energi dan protein juga dicakup dalam bagian ini.

4.2.1. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan Pengeluaran Konsumsi Makanan

Tabel 4.5 dan 4.6 memperlihatkan kondisi ketahanan pangan²³ dan kemiskinan, menurut pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga²⁴ di desa penelitian di Provinsi Lampung dan NTT. Berdasarkan proporsi rumah tangga dalam kombinasi kategori ketahanan pangan dan kemiskinan di tingkat rumah tangga, Desa Cakar Buaya di Provinsi Lampung dapat dikategorikan sebagai desa miskin dan kurang tahan pangan, sedangkan Desa Ngesti Rahayu masuk dalam kategori desa tidak miskin dan tahan pangan (Tabel 4.5). Untuk Provinsi NTT, Desa Enoneontes dapat dikategorikan sebagai desa miskin dan tidak tahan pangan, sedangkan Desa Naukae merupakan desa tidak miskin dan tahan pangan (Tabel 4.6).

²³ Urutan tingkat ketahanan pangan dilihat dari besarnya proporsi rumah tangga yang masuk dalam kategori "tahan pangan" adalah (1) Desa Naukae/NTT; (2) Desa Ngesti Rahayu/Lampung; (3) Desa Cakar Buaya/Lampung dan (4) Desa Enoneontes/NTT.

²⁴ Urutan tingkat kemiskinan dilihat dari pengeluaran untuk konsumsi pangan adalah (1) Enoneontes/NTT (paling miskin); (2) Cakar Buaya/Lampung; (3) Ngesti Rahayu/Lampung dan (4) Naukae/NTT

Meskipun secara umum Desa Ngesti Rahayu dan Naukae merupakan desa tidak miskin dan tahan pangan, tetapi jika dibandingkan proporsi rumah tangga yang masuk dalam kategori ini, kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan di Desa Naukae lebih baik dari Desa Ngesti Rahayu, sedangkan kondisi Desa Cakar Buaya lebih baik dibandingkan Desa Enoneontes. Keadaan ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi kemiskinan dan ketahanan pangan. Desa yang termasuk dalam kategori tidak miskin ternyata juga lebih tahan pangan dibandingkan desa yang termasuk dalam kategori miskin.

Tabel 4.5 Persentase rumah tangga menurut kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi pangan, Provinsi Lampung

Kondisi Ketahanan pangan	Kondisi kemiskinan					
	Cakar Buaya			Ngesti Rahayu		
	Miskin	Tidak miskin	Total	Miskin	Tidak miskin	Total
Tahan	2,5	1,5	4,0	19,0	28,5	47,5
Kurang tahan	31,0	28,5	59,5	14,5	14,5	29,0
Tidak tahan	25,0	11,5	36,5	8,0	15,5	23,5
Total	58,5	41,5	100,0 (200)	41,5	58,5	100,0 (200)

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Catatan: () jumlah kasus

Tabel 4.6 Persentase¹⁾ Rumah Tangga menurut kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi pangan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kondisi Ketahanan pangan	Kondisi kemiskinan					
	Enoneontes			Naukae		
	Miskin	Tidak miskin	Total	Miskin	Tidak miskin	Total
Tahan	0,5	0,0	0,5	18,4	41,1	59,5
Kurang tahan	8,5	5,0	13,5	6,3	27,9	34,2
Tidak tahan	52,2	33,8	86,0	3,7	2,6	6,3
Total	61,2	38,8	100,0 (201)	28,4	71,6	100,0 (190)

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Catatan: () Jumlah sampel (n)

Di tingkat rumah tangga, yang termasuk dalam kategori rumah tangga tidak miskin adalah rumah tangga dengan pengeluaran pangan di atas garis kemiskinan yang sudah ditentukan. Rumah tangga ini juga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang kondisi ekonominya lebih baik, dan lebih tahan pangan dibandingkan rumah tangga miskin. Tetapi data untuk desa-desa penelitian menunjukkan adanya beberapa pengecualian.

Tabel 4.7 Persentase rumah tangga menurut kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi pangan, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Kondisi ketahanan pangan	Provinsi Lampung				Provinsi Nusa Tenggara Timur			
	Cakar Buaya		Ngesti Rahayu		Enoneontes		Naukae	
	Miskin	Tidak miskin	Miskin	Tidak miskin	Miskin	Tidak miskin	Miskin	Tidak miskin
Tahan	4,3	3,6	45,8	48,7	0,8	0,0	64,8	57,4
Kurang Tahan	53,0	68,7	34,9	24,8	13,8	12,8	22,2	39,0
Tidak Tahan	42,7	27,7	19,3	26,5	85,4	87,2	13,0	3,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
n	117	83	83	117	123	78	54	136

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Seperti misalnya di Desa Ngesti Rahayu, hasil survei menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga tidak tahan pangan tetapi tidak miskin (26,5 persen) lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga tidak tahan pangan dan miskin (19,3 persen) (Tabel 4.7). Hal ini dapat terjadi karena ketersediaan pangan yang kurang (tidak memenuhi kategori waktu yang ditentukan dalam konsep ketahanan pangan) dalam rumah tangga yang dikategorikan sebagai tidak miskin. Umumnya rumah tangga ini merupakan rumah tangga dengan mata pencaharian di luar sektor pertanian. Rumah tangga ini tidak memproduksi bahan pangan pokok yang mereka butuhkan, tetapi mereka mempunyai pendapatan tunai untuk membeli kebutuhan pangannya, meskipun kemampuan ekonomi ini sangat tergantung dari jenis dan status pekerjaan yang dilakukan. Sebaliknya, penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani tidak mempunyai pendapatan tunai tetapi dapat menyimpan hasil produksi pertanian untuk persediaan bahan makanan pokok untuk jangka waktu tertentu, seperti dijelaskan oleh seorang tokoh masyarakat di Desa Ngesti Rahayu:

Saya yakin dan percaya bahwa setiap rumah yang mempunyai lahan pertanian itu masih punya simpanan

gabah rata-rata. Terus kaitan yang mengatakan boro-boro disimpan, habis memang yang nggak punya lahan pertanian statusnya sebagai buruh saja.

Petani yang memiliki lahan pertanian cukup luas kemungkinan selalu mempunyai persediaan bahan pangan (gabah/padi) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai musim panen berikutnya. Tetapi, untuk petani yang hanya berstatus sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan akan sulit untuk memenuhi persediaan ini. Seperti sudah dibahas dalam Bab II, kriteria pengukuran untuk ketersediaan pangan khususnya beras dalam survei ini adalah 4 bulan. Sebagai buruh tani, walaupun mereka mendapatkan hasil panen dengan sistem bagi hasil, atau sebagai buruh harian tentunya akan sulit untuk dapat menyediakan kebutuhan beras selama 4 bulan. Umumnya persediaan pangan mereka kurang dari kebutuhan empat bulan. Mereka biasanya membeli beras untuk kebutuhan makan dua atau tiga hari atau bahkan terkadang untuk kebutuhan makan satu hari saja. Demikian juga untuk penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian dengan penerimaan bulanan, tentunya tidak akan membeli persediaan pangan untuk kebutuhan 4 (empat) bulan.

Di Nusa Tenggara Timur, kondisi ketahanan pangan maupun kondisi ekonomi di Desa Naukae lebih baik dibandingkan dengan Desa Enoneontes. Walaupun terdapat lebih dari 38 persen rumah tangga responden yang termasuk dalam kategori tidak miskin di Desa Enoneontes, tetapi tidak ada rumah tangga dalam kelompok ini yang termasuk dalam kategori rumah tangga tahan pangan (Tabel 4.6 dan 4.7). Keadaan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di Desa Enoneontes berada pada kondisi rawan pangan tinggi. Meskipun ada rumah tangga yang mempunyai pengeluaran pangan di atas garis kemiskinan, tetapi tingkat ketersediaan pangan sangat rendah. Pengeluaran untuk belanja makanan umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat dasar seperti garam, gula, teh/kopi dan ikan asin, minyak goreng dan minyak tanah. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki ketersediaan bahan makanan pokok. Keadaan ini disebabkan karena penduduk di Desa Enoneontes pada umumnya memiliki lahan yang relatif lebih sempit dibandingkan di Desa Naukae. Meskipun sejumlah rumah tangga mencoba melakukan pekerjaan tambahan di luar sektor pertanian yang hanya dilakukan ketika tidak ada lagi pekerjaan di lahan pertanian mereka (misalnya menjadi buruh tani di dalam dan di luar desa), tetapi pendapatan yang mereka peroleh hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Artinya, penghasilan selama satu minggu, misalnya, juga hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pangan selama satu minggu. Dengan demikian, sumber

pendapatan uang tunai yang utama untuk belanja bahan makanan (termasuk makanan pokok jika telah habis persediaannya), hanya berasal dari penjualan hasil panen yang umumnya berupa sayuran. Penghasilan uang tunai yang relatif terbatas ini tidak banyak membantu dalam upaya menyediakan kebutuhan makanan pokok dalam jumlah yang mencukupi.

Sebaliknya, untuk Desa Naukae, lebih dari 60 persen rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin ternyata termasuk rumah tangga yang tahan pangan (Tabel 4.6 dan 4.7). Keadaan ini menunjukkan bahwa rumah tangga ini mempunyai cukup persediaan pangan dari hasil panennya tetapi mungkin tidak mempunyai sumber penghasilan tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya yang harus dibeli. Uang tunai diperoleh dari penjualan hasil pertanian (sayur dan sebagian hasil panen jagung), tetapi produksi jagung setelah sebagian dijual masih cukup untuk persediaan kebutuhan pangan sampai musim panen berikutnya, karena luas pemilikan lahan yang juga menunjang untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga (rata-rata pemilikan lahan ladang di Desa Naukae 1,22 Ha dibandingkan dengan 0,7 Ha di Desa Enoneontes).

4.2.2. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Konsumsi Energi-Protein

Bahasan mengenai keterkaitan antara ketahanan pangan, kemiskinan dan konsumsi energi dan protein dapat memberikan pemahaman tentang kondisi ketahanan pangan dan kondisi gizi rumah tangga (miskin dan tidak miskin) berdasarkan asupan energi dan protein per kapita/hari. Secara umum terdapat kecenderungan bahwa rumah tangga dengan konsumsi energi dan protein di bawah kebutuhan gizi minimum/standar adalah rumah tangga miskin dan tidak/kurang tahan pangan. Namun, tidak menutup kemungkinan rumah tangga tidak miskin dengan ketahanan pangan cukup baik terkadang juga mengalami kekurangan gizi.

Berdasarkan pengamatan selama tiga hari berturut-turut pada rumah tangga terpilih yang terdiri dari 6 kategori rumah tangga, terdapat kecenderungan bahwa hubungan antara kemiskinan dan konsumsi energi-protein tidak selalu linear. Kecuali rumah tangga di Desa Naukae, provinsi NTT, rumah tangga tidak miskin hanya mengkonsumsi energi dan protein di bawah standar minimal, yaitu kurang dari 2100 kalori/kapita/hari energi dan 50 gram protein/kapita/hari (Tabel 4.8). Keadaan ini menggambarkan bahwa kondisi ketahanan pangan tampaknya memiliki kaitan lebih signifikan dengan konsumsi energi dan protein dibandingkan dengan kemiskinan.

Tabel 4.8: Status rumah tangga berdasarkan konsumsi energi dan protein

Status Rumah tangga	Cakar Buaya		Ngesti Rahayu		Eno Neontes		Naukae	
	Energi	Protein	Energi	Protein	Energi	Protein	Energi	Protein
Tahan								
-Tdk Miskin	2344,1	50,5	2496,5	60,6	---	---	2681,1	77,9
- Miskin	1821,9	30,4	1646,7	41,7	2393,6	58,3	2736,7	71,4
Kurang Tahan								
- Tdk miskin	1776,1	40,7	2001,9	53,5	1835,5	48,8	2294,7	70,4
- Miskin	1652,7	32,1	1546,2	52,8	1418,9	34,7	1861,4	46,5
Tidak Tahan								
- Tdk miskin	1698,2	39,7	1479,1	34,8	1534,5	28,4	1970,7	42,6
- Miskin	1122,3	23,1	1445,4	37,6	1396,9	36,6	1965,7	45,1
Total								
- Tdk miskin	1939,5	43,6	1992,5	49,6	1685,0	38,6	2315,5	63,6
...- Miskin	1532,3	28,5	1546,1	44,0	1407,9	35,7	2188,0	54,4

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2004

Temuan penelitian di Provinsi Lampung memperlihatkan, rumah tangga tidak miskin maupun rumah tangga miskin masih belum dapat memenuhi batas yang ditetapkan untuk kebutuhan akan energi dan protein. Apabila dikaitkan dengan kondisi ketahanan pangan, hanya rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin di kedua desa penelitian ini yang dapat memenuhi standar kecukupan energi dan protein. Sementara itu, keluarga dengan kategori tidak miskin baik rumah tangga yang tahan, kurang tahan maupun tidak tahan pangan, kecukupan akan energi dan protein selalu lebih baik dibandingkan dengan keluarga miskin (baik yang tahan, kurang tahan maupun tidak tahan pangan). Tampaknya daya beli keluarga tidak miskin sedikit lebih baik sehingga dapat membeli pangan dalam kuantitas dan kualitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan minimum energi dan protein.

Secara umum kondisi kecukupan gizi bagi keluarga tahan dan kurang tahan pangan serta tidak miskin di Desa Ngesti Rahayu relatif lebih baik dibandingkan Desa Cakar Buaya. Hal ini berarti asupan energi dan protein yang didapatkan dari konsumsi makanan sehari-hari tersebut berbeda. Asupan

energi dan protein yang dikonsumsi keluarga di Desa Ngesti Rahayu selain dari konsumsi beras juga dari lauk pauk yang lebih banyak mengandung protein hewani, sedangkan di Desa Cakar Buaya, walaupun sama-sama mengkonsumsi beras, asupan protein nabati lebih dominan. Namun demikian, rumah tangga miskin (baik yang tahan, kurang tahan maupun tidak tahan pangan) di Desa Cakar Buaya memiliki kecukupan gizi di bawah standar kebutuhan minimal, tetapi masih sedikit lebih baik dibandingkan Desa Ngesti Rahayu (untuk rumah tangga dalam kategori tahan dan kurang tahan pangan).

Di dua desa penelitian di Provinsi Lampung, rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin memiliki sumber penghasilan cukup besar. Selain sebagai petani dengan lahan cukup luas, mereka juga memiliki pekerjaan di luar sektor pertanian, sehingga mereka tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang mengandung energi dan protein cukup baik. Tampaknya kemampuan daya beli rumah tangga sangat mempengaruhi konsumsi rumah tangga akan kebutuhan makanan yang mengandung energi dan protein yang cukup. Selain beras sebagai konsumsi pangan pokok, keluarga yang ekonominya lebih mampu akan mengkonsumsi lauk pauk yang terdiri dari protein nabati maupun hewani. Konsumsi makanan sehari-hari lebih beragam. Mereka tidak mengalami kesulitan untuk membeli ikan segar, ayam, telur, atau makanan bergizi lainnya. Bahkan, mereka juga mampu membeli susu yang mengandung protein cukup tinggi bagi anak-anak mereka yang masih balita. Selain itu asupan energi dan protein diperoleh dari jajanan, baik itu yang disediakan di rumah atau dengan cara membeli. Jajan anak-anak yang berupa roti atau kue kering dan lainnya hampir selalu ada setiap hari. Salah satu responden yang termasuk dalam rumah tangga tidak miskin menuturkan bahwa kebutuhan akan lauk pauk dapat dipenuhinya setiap hari dan dapat sangat bervariasi.

Ya kalau saya sih ya kadang tuh ya istilahnya lauk pauk itu kadang-kadang kita selingi, Pak, umpama sehari makan telur, sehari makan tempe terus tahu gitu kalau mau, kalau nggak ya, kita pokoknya nggaklah satu minggu itu harus nyembelihin ayam gitu lho Pak. Jadinya kita itu setiap hari makannya tuh nggak harus netep itu-itu aja, nggak. Kita selingi. Ya kalau kita ini Bu. Kadang kalau nyayur daun singkong itu ya kita kuah, kita cuma kadang goreng ikan asin gitu. Terus kadang kalau nyayur sop itu kita goreng tempe, apa ada ikan gitu. Jadinya nggak harus kuah terus gitu. Kuah itu kadang kalo kita mau ya kita bikin kuah, kalau nggak ya nggak. Kalau kayak tadi ayam itu ada... Ya kadang tuh kalau emang kita tuh lancar Bu lagi usaha gini

ya, kadang tuh 3 hari sekali, 4 hari sekali. Tapi kalau emang nggak lancar ya kadang seminggu sekali gitu.

(Wawancara dengan seorang petani dan pedagang yang dikategorikan kurang tahan dan tidak miskin dari Desa Cakar Buaya)

Untuk rumah tangga miskin, pola makan di Desa Ngesti Rahayu dan Cakar Buaya hampir sama. Sedikit lebih tingginya asupan energi di dalam rumah tangga di Desa Cakar Buaya lebih disebabkan karena lebih banyak konsumsi ubi kayu atau tiwul. Seperti di ketahui bahwa penduduk di Desa Cakar Buaya sebagian masih mengkonsumsi ubi kayu atau tiwul sebagai makanan pokok maupun sebagai campuran makanan pokok. Dengan demikian kebutuhan energi dan protein hanya didapatkan dari makan pokok saja (beras dan singkong), sedang untuk lauk pauknya hanya sayur. Pada umumnya keluarga miskin jarang sekali membeli lauk-pauk protein hewani. Kesempatan untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup biasanya hanya diperoleh ketika ada pesta atau dari "rantangan" yang didapat ketika akan ada hajatan. Menu saat pesta atau ketika mendapat rantangan dapat dikatakan cukup lengkap dan bergizi.

Tabel 4.8 juga memperlihatkan, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga di desa-desa penelitian di Provinsi NTT tampaknya dapat menjamin setiap anggota keluarga mengonsumsi zat gizi yang cukup. Hal ini terlihat dari rumah tangga tahan pangan (baik tidak miskin dan miskin) yang mengonsumsi energi-protein di atas standar minimal, baik di Desa Naukae maupun Enoneontes. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan dalam hal jumlah asupan energi-protein antara dua desa, dimana rumah tangga tahan pangan-miskin di Desa Naukae mengonsumsi energi dan protein yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tahan pangan di Desa Enoneontes. Konsumsi energi-protein yang lebih besar pada rumah tangga tahan-miskin di Desa Naukae dibandingkan dengan Desa Enoneontes mungkin dipengaruhi oleh jenis lauk yang dikonsumsi. Rumah tangga tahan pangan (walaupun berdasarkan pengeluaran untuk konsumsi pangan mereka termasuk miskin) diperkirakan memiliki kemampuan untuk mengonsumsi protein hewani (khususnya ikan segar) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga pada kelompok yang sama di Desa Enoneontes. Demikian pula dalam hal konsumsi makanan pokok yang merupakan sumber kalori. Meskipun ubi kayu dan jagung adalah sumber kalori utama bagi rumah tangga di dua desa, rumah tangga tahan pangan di Desa Naukae cenderung sering mengonsumsi beras, sebagaimana terlihat dari hasil pengamatan selama tiga hari. Keadaan ini mempengaruhi asupan energi-protein yang lebih tinggi, karena dari sisi gizi dan nutrisi, beras memang relatif lebih baik dibandingkan bahan pangan pokok lainnya. Seluruh bagian beras bisa dimakan, kandungannya mencapai 360 kalori per 100 gr. Dengan kandungan protein sebesar 6,8 gr per 100 gr, beras juga merupakan sumber protein yang baik (IPTEKnet, Nd).

Lebih lanjut, Tabel 4.8 juga memperlihatkan adanya perbedaan asupan energi dan protein antara rumah tangga di Desa Naukae dengan mereka di Desa Enoneontes yang terjadi di semua kategori status rumah tangga. Untuk rumah tangga kurang tahan pangan-tidak miskin di Desa Naukae, bahkan memiliki asupan energi dan protein di atas standar kebutuhan minimal. Termasuk rumah tangga ini mungkin adalah mereka yang memiliki pekerjaan di luar sektor pertanian, sehingga walaupun rumah tangga mereka termasuk kurang tahan pangan (karena tidak memiliki persediaan jagung selama 360 hari atau lebih), tetapi mereka bisa secara kontinyu membeli bahan makanan pokok (jagung atau beras) dan lauk-pauk. Sebagai contoh diungkapkan oleh salah seorang anggota rumah tangga kurang tahan pangan-tidak miskin mengenai konsumsi makanan sehari-hari seperti berikut:

Saya beli beras, garam, vetsin, minyak tanah, pinang kalau ke pasar. Kadang beli ikan basah dan ikan kering. Kalau ke pasar satu minggu sekali dan beli ikan. Jagung juga beli kalau ada kekurangan.

Sebaliknya, asupan energi dan protein bagi rumah tangga kurang tahan miskin yang berada di bawah standar kebutuhan minimal mungkin tidak hanya berhubungan dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok (jagung) selama satu tahun, tetapi juga keterbatasan kemampuan menyediakan jenis makanan lain, seperti sayur dan lauk-pauk. Kondisi seperti ini juga dihadapi oleh rumah tangga tidak tahan pangan (baik tidak miskin dan miskin). Meskipun sama-sama berada di bawah standar kebutuhan minimal, tetapi rumah tangga tidak tahan pangan-tidak miskin memiliki kondisi gizi yang lebih baik daripada rumah tangga tidak tahan pangan-miskin. Suatu kondisi yang mudah dipahami karena rendahnya ketersediaan bahan makanan pokok dan keterbatasan uang tunai membatasi rumah tangga tidak tahan pangan-miskin untuk bisa memenuhi kecukupan kebutuhan pangan.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, walau asupan energi dan protein untuk kategori rumah tangga di Desa Naukae (kurang tahan-miskin, tidak tahan-tidak miskin dan tidak tahan-miskin) berada di bawah standar kebutuhan minimal, tetapi angkanya hampir mencapai kebutuhan standar (kecuali untuk kategori kurang tahan-miskin). Keadaan ini berbeda dengan kondisi asupan energi dan protein untuk hampir semua kategori rumah tangga di Desa Eno Neontes yang cukup jauh dari batas kebutuhan minimal. Perbedaan yang cukup besar ini menggambarkan bahwa tingkat kerawanan pangan dan gizi di Desa Eno Neontes lebih buruk dibandingkan dengan Desa Naukae. Keadaan ini mungkin berkaitan dengan luas pemilikan lahan pertanian yang secara umum lebih baik di Desa Naukae, sehingga produksi pertanian mereka lebih banyak (termasuk antara lain sayuran, pisang dan kelapa), sehingga sebagian hasilnya bisa dijual untuk membeli kebutuhan pangan.

Memperhatikan bahasan tentang kemiskinan (diukur dari indikator pengeluaran untuk bahan makanan) dan kondisi ketahanan pangan tersebut di atas, secara umum tampak bahwa ada hubungan positif. Artinya, rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran (untuk bahan

makanan) yang lebih tinggi dari pada garis kemiskinan bahan makanan. Meskipun demikian, pengecualian ditemukan dalam penelitian ini, antara lain terlihat bahwa sebagian rumah tangga yang tidak tahan pangan juga merupakan rumah tangga tidak miskin. Termasuk kelompok ini adalah mereka yang bekerja di luar lahan pertanian (umumnya memiliki pendapatan yang berupa uang tunai). Dengan demikian, meskipun rumah tangga tidak tahan pangan tidak memiliki persediaan pangan dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka dapat secara kontinyu memenuhi kebutuhan pangan yang berimplikasi pada pengeluaran pangan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Kondisi rawan pangan cukup serius ditemukan di salah satu desa di Provinsi NTT, yaitu ditunjukkan tidak adanya rumah tangga yang termasuk kategori tahan pangan dan tidak miskin dilihat dari pengeluaran.

Namun demikian adanya pemilikan ternak yang juga dipakai sebagai indikator untuk mengukur kemiskinan (selain pemilikan lahan), tampaknya kerawanan pangan tersebut masih bisa diatasi oleh masyarakat. Hal ini karena memelihara ternak (sapi atau babi, bahkan ayam) merupakan salah satu strategi untuk memenuhi berbagai keperluan, termasuk untuk kebutuhan pangan. Bahkan, pemilikan ternak (terutama sapi dan babi) bagi masyarakat NTT dapat mengindikasikan apakah rumah tangga termasuk dalam rumah tangga miskin atau tidak miskin. Rumah tangga dengan ternak banyak, maka rumah tangga tersebut termasuk rumah tangga kaya. Termasuk rumah tangga banyak ternak pada umumnya juga rumah tangga yang memiliki lahan pertanian luas. Demikian pula terdapat kecenderungan bahwa rumah tangga dengan lahan luas dan banyak ternak cenderung termasuk rumah tangga tidak miskin diukur dari pengeluaran. Hal ini karena rumah tangga tersebut dapat mencukupi kebutuhan pangan (baik kuantitas maupun kualitas) yang dapat dipenuhi dari produksi lahan pertanian dan penjualan ternak. Oleh karena itu, ketika indikator kemiskinan (pengeluaran untuk bahan makanan, pemilikan lahan, dan pemilikan ternak) dipakai secara bersama-sama, maka terlihat jelas bahwa kondisi kemiskinan di desa-desa penelitian di Provinsi NTT menjadi lebih baik dari Desa Ngesti Rahayu di Provinsi Lampung yang termasuk kategori tahan pangan dan tidak miskin dari pengeluaran bahan makanan. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya proporsi rumah tangga yang benar-benar miskin di Desa Naukae di Provinsi NTT, bahkan Desa Enoneontes yang termasuk desa tidak tahan pangan dan miskin, memiliki proporsi rumah tangga benar-benar miskin yang hampir sama dengan angka di Desa Ngesti Rahayu.

Temuan penelitian yang mendasarkan pada tabulasi silang antara ketahanan pangan, kemiskinan dan konsumsi energi dan protein nampak bahwa ada hubungan yang cukup jelas. Rumah tangga yang tahan pangan dan tidak miskin cenderung mengkonsumsi energi-protein lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak tahan pangan dan tidak miskin. Demikian pula rumah tangga tahan pangan dan miskin memiliki asupan energi-protein lebih tinggi dari pada rumah tangga tidak tahan pangan, baik yang miskin maupun tidak miskin. Ini menggambarkan bahwa hubungan antara konsumsi protein dan energi tampak lebih terkait erat dengan ketahanan pangan dari kemiskinan.

Keadaan sosial demografi penduduk merupakan salah satu gambaran kondisi masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini antara lain terlihat dari berbagai variabel sosial demografi seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, umur, pekerjaan, pendidikan dan perkawinan. Variabel-variabel sosial demografi ini juga merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas sumberdaya manusia. Hubungan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan kondisi sosial-demografi rumah tangga dapat dikatakan merupakan hubungan yang timbal balik. Tetapi dalam penelitian ini, arah hubungan yang akan dilihat adalah bagaimana kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan berpengaruh terhadap kondisi sosial-demografi di tingkat rumah tangga di empat (4) desa penelitian (Lihat Skema 1.1). Selain memberikan pemahaman ilmiah, analisis ini juga akan dapat membantu memberikan masukan untuk perencanaan, pelaksanaan dan identifikasi kelompok target berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

Berbeda dengan analisis dalam bab-bab sebelumnya (Bab III dan Bab IV), pembahasan dalam Bab V ini tidak lagi melihat kondisi di tingkat desa, tetapi pada tingkat provinsi dengan fokus pada kombinasi fenomena ketahanan pangan dan kemiskinan. Dalam tiap provinsi, seperti juga telah diuraikan pada Bab IV, terdapat enam (enam) kategori rumah tangga yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinannya yaitu: (1) rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin; (2) rumah tangga tahan pangan dan miskin; (3) rumah tangga kurang tahan pangan dan tidak miskin; (4) rumah tangga kurang tahan pangan dan miskin; (5) rumah tangga tidak tahan pangan dan tidak miskin dan (6) rumah tangga tidak tahan pangan dan miskin. Analisis dalam bab ini akan didahului dengan pembahasan tentang karakteristik sosial-demografi rumah tangga untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi umum rumah tangga di daerah penelitian.

5.1. Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga

Karakteristik sosial demografi rumah tangga dapat dilihat antara lain dari karakteristik kepala rumah tangga (KRT), jumlah anggota rumah tangga (ART) serta perilaku kesehatan meliputi cara pengobatan, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Perilaku kesehatan ini penting karena akan sangat berkaitan dengan variabel demografi seperti fertilitas dan mortalitas. Tabel 5.1, menunjukkan bahwa karakteristik sosial demografi rumah tangga

terpilih di Provinsi Lampung tidak jauh berbeda dengan rumah tangga terpilih di Provinsi NTT. Sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia, hampir semua KRT di kedua daerah penelitian adalah laki-laki. Umumnya KRT dalam penelitian ini berusia separuh baya. Lebih dari separuh KRT di Lampung maupun di NTT berusia antara 30-49 tahun (57 persen di Lampung dan 55 persen di NTT). Keadaan ini menunjukkan bahwa KRT di kedua daerah penelitian berada pada usia produktif utama (*prime age*) baik ekonomi maupun reproduksi. Tetapi jika dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar KRT berpendidikan rendah. Hanya 24 persen KRT di Lampung yang menamatkan SLTP atau lebih tinggi, sedangkan di NTT proporsi tersebut lebih kecil lagi (16 persen).

Mengingat kedua daerah penelitian adalah daerah pertanian, tidak mengherankan bila hampir tidak ada KRT yang tidak bekerja dan hampir semua bekerja di sektor pertanian. Untuk daerah penelitian di Lampung, proporsi KRT yang bekerja di sektor non-pertanian jauh lebih besar dari NTT. Kondisi daerah penelitian baik fisik, akses transportasi maupun kondisi ekonomi umumnya tampaknya sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja yang tersedia di luar sektor pertanian. KRT yang bekerja di sektor pertanian tersebut umumnya adalah petani pada lahan milik sendiri, dengan luas yang bervariasi. Di NTT tidak ada satupun rumah tangga terpilih yang tidak memiliki lahan pertanian dan lahan tersebut umumnya merupakan lahan yang telah dimiliki secara turun-temurun. Hal ini dapat dipahami karena semua KRT di NTT yang menjadi subjek penelitian ini adalah penduduk setempat yang dilahirkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Sementara, lebih dari 74 persen KRT terpilih di Lampung adalah pendatang, umumnya berasal dari Jawa yang kemungkinan besar memperoleh lahan garapan sebagai peserta program transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah.

Dilihat dari jumlah anggota rumah tangga (ART), sebagian besar rumah tangga di kedua daerah penelitian adalah keluarga kecil, dengan jumlah ART satu sampai empat orang. Tetapi, bila dibandingkan antara Lampung dan NTT, jumlah anggota rumah tangga di NTT sedikit lebih besar. Hampir separuh (44 persen) rumah tangga terpilih di NTT beranggotakan lima orang atau lebih, sedangkan di Lampung jumlah tersebut lebih sedikit (39 persen). Hal ini mungkin dapat disebabkan antara lain, karena jumlah anak yang dimiliki oleh rumah tangga di NTT lebih besar daripada rumah tangga di Lampung. Selain dari itu, untuk masyarakat di daerah penelitian di NTT, ada kebiasaan untuk memelihara membesarkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu (anak piara) seperti yang dapat dijelaskan dari kutipan wawancara dengan seorang narasumber yang juga Pamong Desa di Desa Naukae, berikut ini:

Tanya (T): Ada berapa jumlah anggota keluarga bapak disini?

Jawab (J): A a...a... kalau a.....a...a... kami 5 orang.

T: Bapak, ibu.

J: Anak angkat, dengan anak piaraan dua, termasuk anak satu di Kupang juga saya kasih dia makanan, karena kan dia kuliah.

T: Di Kupang kuliah, jadi anak bapak 2 orang ?

J: Anak saya ada 5, tapi 2 sudah bekerja, yang no. 2, no. 1 yang pertama sudah dapat kerja, kuliah di Yogya dan sudah bekerja di Kupang. Kalau yang bungsu dengan kakak pertama di ... Pena disana. Jadi saya tanggung enam orang, enam orang saja dengan mama dan anak di sini 3 orang termasuk yang kuliah di Kupang.

J: Tiga anak disini, mama , bapak 3 orang tambah satu jadi enam. Anak kandung 2 orang sedangkan anak angkat 2 orang.

T: Anak kandung bapak sendiri semua ada berapa ?

J: Ada 5.

Salah satu kondisi sosial demografi penduduk yang penting adalah kesehatan, yang antara lain dapat dilihat dari tingkah laku dalam mencari pengobatan. Pendidikan seringkali dihubungkan dengan tingkah laku mencari pengobatan, namun tampaknya hal itu tidak terlalu mempengaruhi tingkah laku keluarga yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Meskipun berpendidikan relatif rendah, kesadaran untuk mencari pertolongan pengobatan kepada tenaga medis cukup tinggi. Di Lampung, 72 persen responden mengaku mencari pengobatan ke tenaga medis bila ada anggota rumah tangga yang sakit, sedangkan di NTT, meskipun pendidikan KRTnya relatif lebih rendah, proporsi rumah tangga yang berobat ke tenaga medis lebih tinggi (88 persen). Tingginya persentase rumah tangga yang mencari pengobatan pada tenaga medis di NTT dapat juga disebabkan karena tingkat keparahan penyakit yang diderita (tingkat kesakitan), sehingga keluarga merasa sudah perlu untuk mencari pertolongan medis. Sebaliknya, untuk pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, rumah tangga di Lampung lebih banyak yang memanfaatkan pertolongan tenaga medis dibandingkan rumah tangga di NTT. Dari hasil wawancara mendalam dengan penduduk di daerah penelitian di NTT terungkap bahwa kurangnya penggunaan tenaga medis pada waktu menolong persalinan, karena ketidakterediaan tenaga medis yang dapat mereka panggil sewaktu-waktu. Bidan desa yang ditempatkan di daerah penelitian tidak tinggal di pondok bersalin desa (polindes) yang telah disediakan di masing-masing desa, tetapi memilih tinggal di kota kecamatan. Menurut penduduk setempat, bidan hanya datang satu kali dalam satu bulan untuk imunisasi, memeriksa kehamilan dan kegiatan lainnya. Puskesmas terdekat terletak sekitar 6 km dari salah satu desa penelitian dan harus ditempuh dengan berjalan kaki, dengan waktu tempuh sekitar 1 (satu) jam.

Di salah satu desa penelitian (Desa Enoneontes) yang termasuk desa rawan pangan di NTT, tidak satupun rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor. Sementara, karena kondisi geografis desa yang berbukit-bukit, daerah ini hanya dapat dicapai dengan kendaraan bermotor atau berjalan kaki. Bila ada anggota rumah tangga yang sakit, biasanya harus ditandu untuk dapat mencapai puskesmas. Kondisi keuangan yang sangat terbatas tidak memungkinkan mereka untuk menyewa kendaraan bermotor seperti ojek atau angkutan penumpang umum. Sebaliknya di Provinsi Lampung, akses dari desa penelitian terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas lebih baik, baik karena jaraknya yang lebih dekat maupun ketersediaan sarana dan prasarana transportasi.

Tabel 5.1: Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Terpilih di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur

Karakteristik Sosial Demografi	Lampung		NTT	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT)				
Laki-laki	378	94,5	369	94,4
Perempuan	22	5,5	22	5,6
Usia KRT				
<29 tahun	40	10,0	51	13,0
30-39 tahun	119	29,7	124	31,8
40-49 tahun	108	27,0	83	21,2
≥50 tahun	133	33,3	133	34,0
Pendidikan KRT				
Tdk tamat SD	160	40,0	174	44,7
Tamat SD	142	35,5	154	39,6
SLTP +	98	24,5	61	15,7
Kegiatan KRT Seminggu Lalu				
Bekerja	388	97,0	385	98,5
Menganggur/mengurus Rumah tangga/lainnya	12	3,0	6	1,5
Jenis Pekerjaan KRT				
Pertanian	320	82,7	381	99,0
Non Pertanian	67	17,3	4	1,0
Status Migrasi KRT				
Migran	295	74,2	0	0,0
Non Migran	105	25,8	391	100,0
Jumlah ART				
1-3 orang	133	33,2	122	31,2
4 orang	112	28,0	98	25,1
≥ 5 orang	155	38,8	171	43,7
Jumlah ART rata-rata/rumah tangga	4,2		4,5	
Tempat berobat				
Medis	287	71,8	343	87,7
Non Medis	113	28,2	48	12,3
Periksa kehamilan (5 tahun terakhir)				
Medis	173	43,2	150	38,4
Non Medis	8	2,0	28	7,1
Tidak ada kehamilan	219	54,8	213	55,5
Penolong Persalinan (5 tahun terakhir)				
Medis	109	27,3	50	12,8
Non Medis	60	15,0	128	33,0
Tidak ada persalinan	231	57,7	213	54,2

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

5.2. Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Kemiskinan

Karakteristik sosial demografi rumah tangga mempunyai kaitan yang erat dengan ketahanan pangan dan kemiskinan. Hubungan yang terjadi bisa bersifat timbal balik, dalam arti karakteristik sosial demografi rumah tangga dapat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan atau sebaliknya, karakteristik rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi ketahanan pangan serta situasi kemiskinan rumah tangga. Dalam penelitian ini, kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan ditengarai mempunyai keterkaitan yang erat dengan kondisi sosial demografi rumah tangga (jumlah, komposisi, dan distribusi anggota rumah tangga) melalui perubahan variabel-variabel demografi: fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial. Berhubung hasil penelitian memperlihatkan beberapa variabel sangat homogen dan mengelompok pada salah satu kategori (lihat Tabel 5.1), hanya beberapa variabel sosial demografi yang dibahas lebih lanjut seperti usia KRT dan pendidikan KRT, status migrasi KRT serta status perkawinan KRT. Karakteristik KRT ini sebagai proksi karakteristik rumah tangga. Ini dilakukan untuk menghindari pengelompokan kategori dan jumlah kasus yang terlalu kecil. Variabel yang berhubungan dengan pekerjaan dan kesehatan tidak dianalisis lebih lanjut karena hampir semua KRT bekerja dan hampir semua (88 persen) rumah tangga di NTT dan 72 persen di Lampung berobat ke tenaga medis. Rumah tangga yang memiliki anggota yang hamil dalam lima tahun terakhir tidak sampai separuh (45 persen) dan hampir semua memeriksakan kehamilan ke tenaga medis. Pembahasan mengenai kaitan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan karakteristik sosial demografi rumah tangga dilakukan dengan mengelompokkan rumah tangga menurut kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan. Dalam penelitian ini, rumah tangga terpilih dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu (1) tahan pangan dan tidak miskin, (2) tahan pangan dan miskin, (3) kurang tahan pangan dan tidak miskin, (4) kurang tahan pangan dan miskin, (5) tidak tahan pangan dan tidak miskin serta (6) tidak tahan pangan dan miskin.²⁵

5.2.1. Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Lampung.

Data pada Tabel 5.2 memperlihatkan karakteristik sosial demografi rumah tangga sampel penelitian di Provinsi Lampung. Meskipun tidak terlalu mencolok, terdapat perbedaan karakteristik rumah tangga dalam kategori kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan yang berbeda. Sebagai contoh, terlepas dari kondisi kemiskinan, rata-rata umur kepala rumah tangga dengan

²⁵ Kondisi ketahanan pangan diukur dari kestabilan ketersediaan pangan pokok, sementara kondisi kemiskinan diukur dari jumlah pengeluaran untuk kebutuhan bahan makanan sesuai dengan standar hidup sehat dan layak. Indikator-indikator tersebut telah dibahas secara mendalam pada Bab II.

kategori tahan pangan lebih tua dibandingkan dengan rumah tangga kurang tahan pangan serta tidak tahan pangan. Data ini memperlihatkan bahwa umur KRT mempunyai korelasi dengan kondisi ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tua umur KRT, maka semakin baik kondisi ketahanan pangan, yang ditunjukkan dengan semakin terjaminnya ketersediaan bahan makanan pokok serta terpenuhinya kebutuhan protein (hewani dan nabati) seluruh anggota rumah tangga. Salah satu penjelasan untuk menerangkan fenomena ini adalah dengan umur yang semakin tua, maka semakin mapan pula kegiatan ekonomi rumah tangga. Bagi mereka yang berbasis pada kegiatan pertanian, ada kemungkinan lahan yang dimiliki lebih luas daripada rumah tangga dengan KRT lebih muda. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan mereka juga mempunyai sumber pendapatan di luar sektor pertanian.

Tabel 5.2. Karakteristik rumah tangga terpilih di Provinsi Lampung

Karakteristik sosial demografi rumah tangga	Tahan pangan			Kurang tahan pangan			Tidak tahan pangan		
	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total
Rata-rata umur KRT (tahun)	48,1	43,5	46,2	43,3	43,3	43,3	47,6	43,2	45,2
Umur KRT (%)									
< median	45,0	53,5	48,5	46,5	44,0	45,2	46,5	47,0	46,7
≥ median	55,0	46,5	51,5	53,5	56,0	54,8	53,7	53,0	53,3
Pendidikan KRT (%)									
< median	40,0	32,6	36,9	30,2	41,8	36,2	48,1	48,5	48,3
≥ median	60,0	67,4	63,1	69,8	58,2	63,8	51,9	51,5	51,7
Status migrasi KRT (%)									
Migran	53,3	58,1	55,3	79,1	78,0	78,5	77,8	89,4	84,2
Non migran	46,7	41,9	44,7	20,9	22,0	21,5	22,2	10,6	15,8
Status perkawinan KRT (%)									
Belum kawin	0,0	4,7	1,9	1,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Kawin	93,3	93,0	93,2	90,7	96,7	93,8	88,9	95,5	92,5
Cerai hidup	0,0	0,0	0,0	2,3	2,2	2,3	1,9	1,5	1,7
Cerai mati	6,7	2,3	4,9	5,8	1,1	3,4	9,3	3,0	5,8

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Dengan mempertimbangkan kondisi kemiskinan, perbedaan usia KRT sangat jelas dalam kategori rumah tangga tahan pangan dan tidak tahan pangan. Dalam kedua kelompok rumah tangga ini, KRT dalam rumah tangga tidak miskin cenderung berumur lebih tua dari KRT dalam rumah tangga miskin. Data memperlihatkan bahwa rata-rata umur KRT pada rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin adalah 48,1 tahun, sementara untuk rumah tangga tahan pangan dan miskin rata-rata usia KRT adalah 43,5 tahun. Pada rumah tangga tidak tahan pangan dan tidak miskin usia KRT rata-rata adalah 47,6 tahun sedangkan pada rumah tangga tidak tahan pangan dan miskin

43,2 tahun. Tetapi, dalam kelompok rumah tangga kurang tahan pangan, tidak ada perbedaan usia KRT berdasarkan kondisi kemiskinan.

Sejalan dengan penambahan usia KRT, maka dapat diharapkan kondisi ekonomi rumah tangga menjadi semakin mapan, sehingga memungkinkan rumah tangga mengalokasikan pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan yang akan berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan rumah tangga. Tetapi rata-rata usia KRT dalam kelompok rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin (48,1 tahun) dan KRT dalam kelompok rumah tangga tidak tahan pangan dan tidak miskin (47,6 tahun) hampir tidak berbeda. Ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan lebih mempunyai keterkaitan dengan usia KRT dibandingkan kondisi kemiskinan. Perbedaan usia KRT ini kemungkinan dipengaruhi oleh konsep dan definisi ketahanan pangan dan kemiskinan yang digunakan dalam klasifikasi rumah tangga. Rumah tangga tidak miskin berdasarkan definisi dan klasifikasi yang digunakan adalah rumah tangga yang mempunyai pengeluaran untuk kebutuhan pangan per kapita/hari di atas standar yang sudah ditentukan (lihat Bab II). Tetapi jika dikombinasikan dengan kondisi ketahanan pangan dapat saja rumah tangga yang mempunyai pengeluaran untuk pangan di atas standar minimum tidak dapat memenuhi kriteria ketersediaan pangan (ketersediaan beras untuk 120 hari) yang sudah ditentukan. Tetapi selama pengamatan yang dilakukan untuk mencatat pengeluaran untuk pangan selama kurun waktu seminggu yang lalu, rumah tangga ini dapat memenuhi kebutuhan pangannya karena mempunyai sumber pendapatan yang tetap, seperti pekerjaan di luar sektor pertanian. Konsep ketahanan pangan di sini lebih menunjukkan kondisi jangka panjang (ketersediaan pangan) dan kontinuitas (makan 3 kali sehari), sedangkan konsep kemiskinan hanya didasarkan pengeluaran untuk kebutuhan pangan selama seminggu yang lalu.

Dari semua variabel yang diukur, pendidikan kepala rumah tangga menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok di antara ketiga kelompok rumah tangga menurut kondisi ketahanan pangan (tahan pangan, kurang tahan dan tidak tahan pangan). Sebanyak 63,1 persen KRT yang termasuk kategori tahan pangan mempunyai tingkat pendidikan yang sama dan lebih tinggi dari median pendidikan KRT secara keseluruhan (median pendidikan KRT di kedua desa penelitian di Provinsi Lampung adalah Sekolah Dasar). Proporsi ini sedikit lebih besar pada KRT kurang tahan pangan, namun sebaliknya jauh lebih kecil diantara KRT dengan kategori tidak tahan pangan (51,7 persen). Kondisi ini menggambarkan bahwa kepala rumah tangga dari kategori tahan pangan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berasal dari rumah tangga tidak tahan pangan. Tidak dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu akses

untuk mewujudkan kondisi ekonomi yang lebih mapan. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, maka semakin tersedia pula pilihan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk juga di luar sektor pertanian, yang adakalanya membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh penghasilan lebih besar, apalagi jika mempunyai sumber penghasilan selain dari kegiatan pertanian. Karena tinggal di daerah pertanian dan kegiatan ekonomi yang dominan juga berbasis pertanian, besar kemungkinan kelebihan penghasilan diinvestasikan dalam bentuk lahan pertanian (sawah). Lahan pertanian yang lebih luas menyebabkan hasil produksi juga lebih banyak, sehingga kestabilan persediaan pangan terjamin sepanjang waktu.

Membandingkan tingkat pendidikan KRT menurut kondisi kemiskinan, terlihat bahwa tingkat pendidikan KRT tidak miskin lebih tinggi daripada KRT miskin, dalam kelompok rumah tangga kurang tahan pangan dan tidak tahan pangan. Untuk kelompok rumah tangga ini, pendidikan yang lebih baik memungkinkan KRT untuk mendapatkan penghasilan lebih besar, yang antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan seluruh anggota rumah tangga. Tetapi, dalam kelompok rumah tangga tahan pangan, proporsi KRT berpendidikan di atas median lebih besar dalam kelompok rumah tangga miskin. Jika dikaitkan dengan umur KRT, dalam kelompok rumah tangga tahan pangan dan miskin umur KRT juga lebih muda. Ini dapat berhubungan dengan pendidikan KRT, semakin muda umur KRT semakin mungkin KRT berpendidikan lebih baik karena lebih terbukanya kesempatan untuk bersekolah. Tetapi, meskipun KRT dalam kelompok ini berpendidikan tinggi, karena umur mereka relatif muda, kehidupan mereka juga belum mapan, dilihat dari kondisi kemiskinan yang lebih buruk. Kondisi ketahanan pangan mereka yang baik kemungkinan menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap perlunya makanan yang baik dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, yaitu dengan kombinasi jumlah pengeluaran untuk pangan serta jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan nabati.

Status migrasi KRT juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Dalam kelompok rumah tangga kurang tahan pangan dan tidak tahan pangan, mayoritas KRT berstatus migran (78,5 persen dan 84,2 persen). Sebaliknya, proporsi KRT yang berstatus non-migran lebih besar pada kelompok rumah tangga tahan pangan dibandingkan dengan kelompok yang lain. Namun demikian, dituntut kehati-hatian dalam menginterpretasi data ini. Status non migran di sini bukan berarti bahwa KRT adalah penduduk asli. Karena konsep migran yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada tempat lahir, maka besar kemungkinan kelompok non migran adalah keturunan/generasi kedua atau ketiga dari transmigran yang mayoritas berasal dari

pulau Jawa, yang lahir di Lampung. Seperti sudah dijelaskan dalam Bab I, kedua daerah penelitian di Lampung (Desa Ngesti Rahayu dan Desa Cakar Buaya) merupakan desa penerima transmigran yang umumnya berasal dari Pulau Jawa. KRT yang berstatus migran adalah mereka yang belum lama pindah dan menetap di Lampung. Dengan demikian, dapat dimengerti jika kondisi ketahanan pangan migran lebih rentan dibandingkan dengan non migran. Karena menempati daerah penelitian dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan non migran, maka besar kemungkinan lahan yang dimiliki (dan dikuasai) juga lebih sedikit, sehingga produksi pangan pun tidak sebanyak yang diperoleh non migran. Konsekuensinya, ketersediaan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein bagi anggota rumah tangga tidak sebaik mereka yang sudah lebih lama tinggal di daerah ini.

Pola yang sama juga ditemui jika masing-masing kelompok ketahanan pangan dibedakan berdasarkan status kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase KRT migran yang miskin lebih besar dibandingkan dengan yang tidak miskin. Perbedaan ini terlihat lebih mencolok pada kelompok rumah tangga tidak tahan pangan. Sebanyak 89,4 persen KRT tidak tahan pangan dan miskin mempunyai status migran, sementara untuk kelompok rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin proporsinya sebesar 77,8 persen. Sekali lagi, kenyataan ini memperkuat argumen bahwa kondisi ekonomi migran yang menempati lokasi penelitian dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek belum semapan non-migran yang telah menetap lebih lama.

Untuk status perkawinan, tidak terlihat perbedaan diantara masing-masing kelompok rumah tangga. Rumah tangga-rumah tangga dari semua kategori mayoritas mempunyai KRT dengan status kawin. Selanjutnya, KRT dengan status janda/duda cerai mati lebih banyak ditemukan pada rumah tangga tidak tahan pangan. Kenyataan ini dapat dimengerti karena kehilangan pasangan, terutama suami yang selama ini dipandang sebagai pencari nafkah utama, bagi sebagian rumah tangga dapat menyebabkan tidak optimalnya kegiatan ekonomi, baik di bidang pertanian maupun kegiatan-kegiatan di luar pertanian. Keadaan ini akan berdampak pada kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga. Proporsi KRT yang berstatus cerai mati juga lebih besar dari proporsi KRT yang cerai hidup. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat perceraian di daerah penelitian di Lampung cukup rendah. Perceraian lebih banyak terjadi karena meninggalnya salah satu pasangan dan bukan karena perceraian semasa kedua pasangan masih hidup. Satu hal yang menarik adalah bahwa persentase kematian pasangan lebih tinggi pada rumah tangga tidak miskin, untuk semua kelompok ketahanan pangan. Ini mungkin berhubungan dengan struktur umur KRT dalam kelompok rumah tangga tidak miskin yang lebih tua relatif terhadap rumah tangga dalam

kelompok miskin (perkecualian pada kelompok rumah tangga kurang tahan pangan dimana perbedaan umur KRT hampir tidak ada antara kelompok rumah tidak miskin dan miskin).

5.2.2. Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

Karakteristik sosial demografi rumah tangga sampel penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 5.3. Sama halnya dengan di Lampung, terdapat perbedaan karakteristik antara semua rumah tangga dengan kategori yang berbeda. Untuk beberapa variabel perbedaan yang muncul lebih mencolok dibandingkan dengan variabel lainnya. Perbedaan umur KRT untuk kategori rumah tangga yang berbeda tidak terlalu mencolok, sebagaimana yang juga ditemui di Lampung. Jika di Lampung ditemukan bahwa kelompok rumah tangga tahan pangan mempunyai KRT dengan umur rata-rata lebih tua dibandingkan dengan KRT tidak tahan pangan, di Nusa Tenggara Timur hasil penelitian menunjukkan keadaan yang berlawanan. Di provinsi ini, rata-rata umur KRT dari rumah tangga tidak tahan pangan lebih tua daripada rumah tangga tahan pangan. Keadaan ini dapat dimengerti mengingat sistem pertanian di lokasi penelitian di NTT belum banyak disentuh oleh teknologi. Artinya, pelaksanaan kegiatan pertanian masih bertumpu pada tenaga manusia. Dengan semakin tuanya usia KRT, kemampuan untuk mengolah lahan pertanian menjadi semakin berkurang, meskipun memiliki lahan yang luas. Hal ini berdampak terhadap lebih sedikitnya hasil produksi yang diperoleh pada setiap panen. Dengan demikian, tidak mengherankan jika lebih banyak rumah tangga dengan KRT lebih tua yang termasuk kelompok tidak tahan pangan. Lain halnya dengan di Lampung, keberadaan teknologi, seperti *hand tractor* untuk melakukan kegiatan pertanian, telah membantu KRT yang berusia tua untuk mengolah lahan, tanpa sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia. Oleh karena itu, meskipun berusia lebih tua, mereka tetap dapat bekerja dengan maksimal, sehingga bisa mendapatkan hasil produksi yang lebih banyak.

Jika diperhatikan dari kondisi kemiskinan, terlihat bahwa rumah tangga miskin (untuk semua kategori ketahanan pangan) mempunyai KRT dengan usia lebih tua. Sebagai contoh, dalam kelompok rumah tangga tidak tahan pangan, rata-rata usia KRT yang tergolong rumah tangga miskin adalah 45,9 tahun, sementara untuk kelompok tidak miskin yaitu 44,2 tahun (Tabel. 5.3). Kondisi fisik yang tidak memungkinkan karena usia yang lebih tua membatasi mereka dalam melakukan pekerjaan, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan di luar pertanian. Hal ini pada gilirannya menyebabkan terbatasnya

kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota rumah tangga.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pendidikan KRT dalam kategori rumah tangga yang berbeda. KRT dalam rumah tangga tahan pangan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada KRT dalam rumah tangga kurang tahan serta tidak tahan pangan. Jika di kontrol dengan kondisi kemiskinan, dalam semua kategori ketahanan pangan (tahan, kurang tahan dan tidak tahan pangan), proporsi KRT yang berpendidikan di atas atau sama dengan media pendidikan (sekolah dasar) lebih tinggi dalam kategori rumah tangga tidak miskin. Perbedaan terbesar terutama ditemukan dalam kelompok rumah tangga kurang tahan pangan, dimana 63,9 persen KRT dalam kelompok tidak miskin berpendidikan di atas median dibandingkan dengan 48,3 persen untuk kelompok rumah tangga miskin. Keterkaitan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan pendidikan KRT tampaknya lebih jelas untuk rumah tangga sampel di NTT dibandingkan di Lampung. Untuk sampel di NTT, makin baik tingkat pendidikan KRT, makin baik kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga.

Tabel 5.3. Karakteristik rumah tangga terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Karakteristik sosial demografi rumah tangga	Tahan pangan			Kurang tahan pangan			Tidak tahan pangan		
	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total
Rata-rata umur KRT (tahun)	43,2	43,8	43,4	42,4	42,5	42,5	44,2	45,9	45,2
Umur KRT (%)									
< median	50,0	38,9	46,5	54,0	51,7	53,3	50,7	42,9	45,9
≥ median	50,0	61,1	53,5	46,0	48,3	46,7	49,3	57,1	54,1
Pendidikan KRT (%)									
< median	25,6	27,8	26,3	36,1	51,7	41,1	56,2	58,9	57,8
≥ median	74,4	72,2	73,7	63,9	48,3	58,9	43,8	41,1	42,2
Status perkawinan KRT (%)									
Belum kawin	1,3	2,8	1,8	3,2	0,0	2,2	1,4	1,8	1,6
Kawin	91,0	88,9	90,4	84,1	93,1	87,0	80,8	86,6	84,3
Cerai hidup	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	5,5	0,0	2,2
Cerai mati	7,7	8,3	7,9	11,1	6,9	9,8	12,3	11,6	11,9

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Status perkawinan KRT juga menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan kondisi ketahanan pangan rumah tangga. Proporsi KRT yang berstatus 'kawin' lebih besar dalam kelompok rumah tangga tahan pangan. Makin baik kondisi ketahanan pangan rumah tangga, makin besar proporsi KRT yang berstatus 'kawin'. Keadaan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kemampuan

seorang KRT untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dengan 'keberanian' untuk membangun rumah tangga sendiri. Kepala Rumah Tangga yang masih berstatus 'belum kawin' mungkin adalah 'anak' yang harus menanggung beban rumah tangga orang tua dan belum 'berani' untuk menikah karena kondisi ekonomi yang sulit. Untuk KRT yang cerai hidup, proporsinya juga bertambah besar dengan memburuknya kondisi ketahanan pangan. Ini dapat menunjukkan adanya hubungan antara kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan tingkat perceraian. Kecenderungan yang sama juga ditemukan untuk KRT yang cerai mati, dimana proporsinya bertambah besar dengan memburuknya kondisi ketahanan pangan. Ini juga menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dengan tingkat kematian. Selain dari itu, fenomena tersebut di atas juga dapat memperlihatkan bahwa keberadaan pasangan suami istri secara lengkap mempunyai peranan penting terhadap kondisi ketahanan pangan, karena biasanya kedua pasangan terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga di sektor pertanian. Tetapi, ketika dikontrol dengan kondisi kemiskinan, hubungan ini tidak selalu linear. Perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) tidak menunjukkan hubungan yang positif dengan kondisi kemiskinan. Proporsi terbesar KRT yang berstatus 'cerai', baik cerai hidup maupun cerai mati berada pada kelompok rumah tangga tidak miskin, untuk kelompok kurang tahan dan tidak tahan pangan. Untuk kelompok rumah tangga tahan pangan pola agak berbeda. Keadaan ini juga dapat disebabkan pengaruh definisi dan konsep klasifikasi rumah tangga miskin dan tidak miskin (seperti yang sudah dibahas di muka).

5.3. Besar dan Tipologi Rumah Tangga

Besar rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini mencukup jumlah seluruh individu yang tinggal dalam satu rumah tangga. Jumlah anggota rumah tangga ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ketahanan pangan serta kemiskinan rumah tangga. Disatu sisi, jumlah anggota rumah tangga yang besar, menyebabkan beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik yang bisa dihasilkan oleh rumah tangga maupun yang harus dibeli, menjadi semakin berat. Disisi lain, untuk rumah tangga dengan mata pencaharian di sektor pertanian, jumlah anggota rumah tangga yang besar merupakan sumber tenaga kerja dalam proses produksi pertanian. Makin banyak tenaga kerja keluarga yang terlibat dalam proses produksi, makin besar produksi pertanian (khususnya bahan pangan) yang dapat dihasilkan. Selain dari itu, makin banyak jumlah anggota rumah tangga juga makin banyak kemungkinan 'sumber mata pencaharian' rumah tangga. Tetapi kondisi ini sangat tergantung pada usia anggota rumah tangga (untuk melihat beban rumah tangga ini akan dilihat rasio ketergantungan/*dependency ratio*).

Tipologi rumah tangga adalah jenis/struktur rumah tangga dilihat dari hubungan anggotanya dengan KRT atau komposisi anggota rumah tangga. Keluarga batih dimaksudkan untuk rumah tangga yang hanya terdiri orang tua (ayah/ibu) dengan anak-anak mereka. Sementara itu, keluarga luas adalah rumah tangga yang tidak hanya terdiri dari orang tua dengan anak-anak, melainkan juga dihuni oleh anggota lainnya, baik yang mempunyai hubungan darah maupun orang lain yang tidak mempunyai pertalian darah. Termasuk dalam kategori keluarga luas antara lain rumah tangga yang selain KRT dengan pasangan serta anak-anak mereka, juga beranggotakan adik/kakak KRT dan pasangannya, orang tua/mertua KRT, keponakan atau orang lain yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga (termasuk anak piara di NTT). Tipologi rumah tangga ini selain dipengaruhi oleh tingkat fertilitas dan mortalitas anggota rumah tangga, juga sangat dipengaruhi oleh besarnya migrasi masuk dan migrasi keluar diantara anggota rumah tangga.

5.3.1. Besar dan Tipologi Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Lampung

Tabel 5.4 memperlihatkan kondisi rumah tangga sampel penelitian di Provinsi Lampung menurut besar dan tipologinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua rumah tangga termasuk rumah tangga kecil. Hal ini terlihat dari jumlah rata-rata anggota rumah tangga kurang dari 5 orang, dengan rata-rata anak sebanyak 2 orang. Sedikitnya jumlah anak ini dapat sangat terkait dengan keberhasilan program KB, terutama melalui perluasan cakupan pelayanan, baik penyediaan tempat pelayanan maupun variasi jenis kontrasepsi yang ditawarkan. Tersedianya tenaga kesehatan di daerah penelitian dan sekitarnya mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB. Di Desa Ngesti Rahayu, Kecamatan Punggur (Kabupaten Lampung Tengah) dan sekitarnya, misalnya, lebih dari satu orang bidan desa memberikan pelayanan kesehatan dan KB, disamping juga ada Mantri Kesehatan Puskesmas yang berdomisili di desa tersebut. Dengan biaya sebesar Rp. 10.000,- dan tanpa mengeluarkan biaya transportasi, pelayanan kontrasepsi jenis suntik dapat diperoleh masyarakat. Disamping kontrasepsi suntik, pil juga mudah diperoleh di daerah penelitian. Dengan harga Rp. 3.000,- pil bisa diperoleh setiap bulan melalui kegiatan Posyandu di Desa Catur Karya Buana Jaya, Kecamatan Banjar Agung (Kabupaten Tulang Bawang). Selain itu, upaya untuk memasyarakatkan norma keluarga kecil, setelah tujuan menahan laju kelahiran berhasil dicapai (Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1998: 40-57), nampaknya juga memperlihatkan hasil dengan sedikitnya rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh rumah tangga terpilih. Cuplikan wawancara dengan salah satu KRT tahan pangan dan miskin yang mempunyai

2 orang anak berikut ini memperlihatkan bahwa mempunyai sedikit anak sudah menjadi pilihan diantara sebagian masyarakat.

T : Sekarang anak bapak yang besar kelas berapa?

J : Kelas 6 SD

T : Kemudian yang kecil lagi adiknya?

J : Masih nyusu itu

T : Mau tambah lagi?

J : Mungkin itu aja bu.

Membandingkan rumah tangga tidak miskin dengan rumah tangga miskin, terdapat perbedaan dalam rata-rata jumlah anak serta jumlah anggota rumah tangga. Rumah tangga miskin mempunyai jumlah anak dan anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (lihat Tabel 5.4). Pada kelompok tidak tahan pangan, contohnya, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin adalah 4,8 orang, sedangkan rumah tangga tidak miskin berjumlah 3,5 orang. Hal yang sama juga terjadi dalam jumlah anak, yaitu 2,5 orang pada rumah tangga miskin dan 1,3 orang untuk rumah tangga tidak miskin. Hubungan timbal balik dapat terjadi antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan jumlah anak dan anggota keluarga. Rumah tangga kurang tahan pangan dan miskin cenderung mempunyai anggota rumah tangga lebih besar karena jumlah anak dalam rumah tangga tersebut juga lebih besar. Rumah tangga miskin, mempunyai anak yang lebih banyak dengan pertimbangan anak-anak dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja (Berg, 1986). Dengan demikian anak dapat dipandang mempunyai nilai ekonomis dan sekaligus sebagai jaminan sosial di hari tua. Harapan ini menyebabkan keluarga miskin lebih memilih untuk memiliki banyak anak agar dapat menambah penghasilan rumah tangga. Selain dari itu, tingginya angka kematian anak dalam rumah tangga miskin kemungkinan menyebabkan mereka lebih berspekulasi untuk mempunyai lebih banyak anak. Namun sebaliknya, hubungan ini dapat terjadi dengan arah yang berlawanan. Jumlah anak yang lebih banyak membawa konsekuensi lebih banyaknya anggota rumah tangga yang harus dipenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan pangan sehingga rumah tangga menjadi terpuruk dalam kondisi kemiskinan. Dengan produksi pangan atau tingkat pendapatan yang sama, jika anggota rumah tangga lebih sedikit (jumlah anak lebih sedikit) kebutuhan pangan rumah tangga miskin akan dapat terpenuhi dengan lebih baik (Baliwati & Roosita, 2004).

Tabel 5.4. Besar dan tipologi rumah tangga terpilih di Provinsi Lampung

Karakteristik sosial demografi Rumah tangga	Tahan pangan			Kurang tahan pangan			Tidak tahan pangan		
	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga	4,3	4,7	4,5	3,6	4,6	4,1	3,5	4,8	4,2
Rata-rata jumlah anak	1,9	2,2	2,0	1,5	2,4	1,9	1,3	2,5	2,0
Rasio ketergantungan/ <i>Dependency ratio</i>	0,46	0,54	0,49	0,43	0,59	0,52	0,69	0,75	72,6
Tipe keluarga (%)									
Batih	61,7	65,1	63,1	81,4	81,3	81,4	83,3	83,3	83,3
Luas	38,3	34,9	36,9	18,6	18,7	18,6	16,7	16,7	16,7

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan angka ketergantungan (*dependency ratio*)²⁶ antara rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan yang berbeda-beda. Seperti terlihat dari data pada Tabel 5.4, semakin buruk kondisi ketahanan pangan rumah tangga, semakin besar angka ketergantungannya. Untuk rumah tangga tahan pangan, ada lebih dari dua orang produktif yang menanggung satu orang tidak produktif dalam rumah tangga. Tetapi dalam rumah tangga kurang tahan dan tidak tahan pangan, kurang dari dua orang produktif yang harus menanggung satu orang tidak produktif. Setelah di kontrol dengan kondisi kemiskinan rumah tangga, juga terlihat bahwa rumah tangga miskin mempunyai angka ketergantungan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Pola ini juga berhubungan dengan jumlah anak yang dimiliki. Rumah tangga miskin cenderung mempunyai rata-rata jumlah anak yang lebih besar. Dengan makin besarnya rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang harus diberi makan setiap individu yang produktif dalam rumah tangga akan mempengaruhi kuantitas maupun kualitas makanan yang dikonsumsi dalam rumah tangga miskin.

Dari tipologi rumah tangga, perbedaan terlihat antara rumah tangga tahan pangan dengan rumah tangga tidak tahan pangan. Persentase keluarga luas

²⁶ Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perkiraan rata-rata jumlah tanggungan (penduduk berumur 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) yang harus di tanggung oleh setiap orang dalam kelompok umur bekerja/produktif (umur 15-64 tahun) (East West Centre, 2002: 6).

dalam rumah tangga tahan pangan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga tidak tahan pangan. Keadaan ini dapat berhubungan dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan anggotanya. Rumah tangga yang mampu lebih mungkin 'membuka diri' untuk masuknya anggota rumah tangga diluar keluarga batih karena masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi dari sisi lain, jika dihubungkan dengan angka ketergantungan, kondisi ini mengindikasikan adanya anggota rumah tangga lain (selain anggota keluarga batih) dalam usia produktif yang turut menunjang ekonomi rumah tangga, sehingga kondisi ketahanan pangan juga lebih baik. Jika dikontrol dengan kondisi kemiskinan, perbedaan tipe rumah tangga hanya lebih jelas terlihat dalam kelompok rumah tangga tahan pangan. Dalam kelompok rumah tangga ini, proporsi rumah tangga luas lebih besar pada kelompok keluarga tidak miskin. Kembali pada penjelasan di atas, keadaan ini menunjukkan bahwa keluarga tidak miskin (dan tahan pangan) lebih mampu untuk mempunyai keluarga luas. Keadaan sebaliknya juga dapat terjadi: karena keluarga luas mempunyai lebih banyak anggota usia produktif, mereka lebih mampu untuk memperbaiki kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangganya.

5.3.2. Besar dan Tipologi Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

Besar rumah tangga terpilih dengan keenam kategori berdasarkan ketahanan pangan dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memperlihatkan pola yang sama dengan yang ditemui di Provinsi Lampung. Data pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rumah tangga tahan pangan memiliki rata-rata jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga tidak tahan pangan. Pola yang sama dengan Provinsi Lampung juga terlihat pada rata-rata jumlah anak yang dimiliki. Rumah tangga tahan pangan memiliki jumlah anak yang sedikit daripada rumah tangga tidak tahan pangan, meskipun dengan perbedaan yang sangat kecil (masing-masing 2,4 orang dan 2,6 orang). Jika dibandingkan dengan di Provinsi Lampung, rumah tangga terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mempunyai jumlah anak yang lebih besar sedangkan jumlah anggota rumah tangga tidak terlalu jauh berbeda. Ada kemungkinan hal ini disebabkan keberhasilan program KB belum sebesar apa yang dicapai oleh Provinsi Lampung. Mengingat mulainya pelaksanaan program tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur²⁷ lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Lampung, maka tidak mengherankan jika capaiannya juga belum sebesar di Lampung. Selain itu, perbedaan dalam ketersediaan sarana pelayanan KB serta aksesibilitasnya, terutama dari segi jarak, mempunyai

²⁷ Program KB di Nusa Tenggara Timur baru dimulai pada awal tahun 1980-an, sementara di provinsi-provinsi wilayah barat Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, pelaksanaannya sudah dimulai sejak akhir tahun 1970-an.

pengaruh yang besar dalam pencapaian tujuan program. Letak daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur yang terpencil secara geografis menyebabkan sebagian penduduk kesulitan untuk menjangkau tempat pelayanan kesehatan dan KB. Kondisi ini menjadi semakin buruk dengan tidak memadainya jumlah tenaga pemberi pelayanan KB, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Sama halnya dengan yang ditemui di Provinsi Lampung, rumah tangga miskin (untuk semua kategori ketahanan pangan) mempunyai jumlah anggota serta jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Sekali lagi, nilai ekonomi anak, yaitu sebagai tenaga kerja dan tempat memperoleh perlindungan di hari tua diduga kuat menjadi pendorong bagi rumah tangga miskin untuk memiliki lebih banyak anak. Sejalan dengan jumlah anak yang dimiliki, *dependency ratio* pada keluarga tidak tahan pangan (0,75) juga lebih besar daripada keluarga tahan pangan (0,58) dan keluarga kurang tahan pangan (0,71). Dalam setiap kategori ketahanan pangan rumah tangga, *dependency ratio* dalam keluarga miskin juga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Besarnya *dependency ratio* inilah, seperti juga yang ditemukan di Lampung kemungkinan besar menjadi salah satu penyebab kurangnya ketahanan pangan rumah tangga dan juga berpengaruh negatif terhadap kondisi kemiskinan atau sebaliknya.

Meskipun tidak ditunjang data hasil survei, wawancara mendalam dengan berbagai narasumber di lapangan menunjukkan bahwa banyak penduduk di lokasi penelitian yang melakukan migrasi ke luar daerah. Perpindahan tersebut tidak hanya di dalam wilayah Indonesia, namun juga melintasi batas negara. Ada kecenderungan penduduk usia kerja di lokasi penelitian pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, misalnya sebagai buruh kebun kelapa sawit atau sebagai pekerja rumah tangga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daerah penelitian merupakan salah satu pengirim migrasi keluar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan ini juga dapat menyebabkan tingginya *dependency ratio*, karena penduduk usia produktif yang harus menanggung penduduk dalam usia tidak produktif menjadi berkurang.

Tipe rumah tangga sampel di NTT menunjukkan bahwa dalam semua kategori ketahanan pangan, persentase terbesar adalah keluarga batih (lebih dari 83 persen). Setelah dikontrol dengan kondisi kemiskinan, ada kecenderungan bahwa rumah tangga miskin mempunyai proporsi keluarga luas yang lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin untuk semua kelompok ketahanan pangan rumah tangga. Ada kemungkinan karena rumah tangga menanggung beban jumlah anggota yang lebih besar (selain KRT dan pasangan serta anak-anaknya), maka kondisi ketahanan pangan serta

kemiskinan rumah tangga menjadi lebih buruk. Kenyataan ini berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Lampung, karena hanya rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan serta kemiskinan yang lebih baik yang mempunyai tipe keluarga luas. Artinya dengan kondisi ketahanan pangan yang lebih baik rumah tangga mampu menampung anggota lain disamping orang tua dan anak-anak mereka.

Tabel 5.5. Besar dan tipologi rumah tangga terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Karakteristik sosial demografi rumah tangga	Tahan pangan			Kurang tahan pangan			Tidak tahan pangan		
	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga	4,2	5,2	4,5	3,7	5,1	4,1	3,9	5,2	4,7
Rata-rata jumlah anak	2,1	3,0	2,4	1,7	2,8	2,0	1,9	3,0	2,6
Rasio ketergantungan/ Dependency ratio	0,51	0,70	0,58	0,61	0,89	0,71	0,65	0,82	0,75
Tipe keluarga (%)									
Batih	87,2	77,8	84,2	87,3	82,8	85,9	83,6	83,0	83,2
Luas	12,8	22,2	15,8	12,7	17,2	14,1	16,4	17,0	16,8

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Meskipun persentase rumah tangga dengan tipe keluarga luas di Nusa Tenggara Timur relatif kecil (lebih kecil dibandingkan dengan di Lampung), berdasarkan wawancara mendalam diketahui bahwa ada kebiasaan satu keluarga untuk memelihara anak-anak dari keluarga tidak mampu dan anak-anak yatim yang masih mempunyai hubungan darah dengan kepala rumah tangga (atau istri/suami) yang disebut sebagai 'anak piara'. Hasil wawancara mendalam dengan salah seorang kepala rumah tangga berikut ini memperlihatkan bahwa selain orang tua dan anak-anak kandungnya ada anggota keluarga lain yang tinggal dalam rumah tangganya,

T : Tadi yang anak angkat bapak yang satu anak kakak yang sudah meninggal, yang satu lagi?

J : Saudara perempuan, saya punya adik perempuan punya anak

T : Orang tuanya masih ada?

J : Masih

T : Orang tuanya di mana pak?

J : Agak jauh, ...

T : Nah, nanti kalau ikut di sini nanti biasanya kembali ke orang tuanya apa terus ikut bapak gitu pak?

J : Dilihat dari lulus SMP atau SMA tetap di sini. Kalau masuk perguruan tinggi tapi saya tidak ... sekian tidak.

5.4. Komposisi Anggota Rumah Tangga

Pembahasan mengenai komposisi anggota rumah tangga difokuskan pada beberapa aspek demografi yaitu umur, status perkawinan serta status migrasi dari individu-individu yang menjadi anggota rumah tangga. Ketiganya dipilih sebagai proksi dari variabel-variabel demografi yang berperan dalam membentuk/menentukan komposisi anggota rumah tangga. Umur anggota rumah tangga, misalnya, dianggap dapat merefleksikan kelahiran, dengan asumsi banyaknya penduduk usia muda (0-14 tahun) menggambarkan tingkat kelahiran yang juga tinggi.

5.4.1. Komposisi Anggota Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Lampung

Komposisi anggota rumah tangga terpilih di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 5.6. Data memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup mencolok pada komposisi umur anggota rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan yang berbeda-beda. Persentase anggota rumah tangga dengan umur muda (0-14 tahun) paling besar ditemui pada rumah tangga tidak tahan pangan (36,0 persen), diikuti oleh rumah tangga kurang tahan pangan (30,5 persen) dan rumah tangga tahan pangan (25,6 persen). Sebaliknya, anggota rumah tangga dalam usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak terdapat pada rumah tangga tahan pangan dibandingkan dengan rumah tangga tidak tahan pangan. Jika diperhatikan dari kondisi kemiskinan, terlihat bahwa rumah tangga miskin mempunyai lebih banyak anggota rumah tangga berusia muda dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Di lain pihak, anggota rumah tangga dalam usia produktif lebih banyak terdapat pada rumah tangga tidak miskin daripada rumah tangga miskin. Kenyataan ini ditemukan pada rumah tangga dalam semua kategori ketahanan pangan (tahan pangan, kurang tahan pangan serta tidak tahan pangan).

Data tersebut dapat menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah anggota rumah tangga usia produktif dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan, di satu pihak, sementara di lain pihak terdapat hubungan negatif

antara jumlah anggota rumah tangga usia muda dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga. Semakin banyak anggota rumah tangga dalam usia produktif, semakin banyak pula sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, misalnya dengan bekerja di lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan lebih banyak produksi bahan pangan yang dihasilkan, sehingga persediaannya untuk waktu yang lama juga lebih terjamin. Selain itu, sebagian mereka yang berusia produktif juga dapat bekerja di luar sektor pertanian yang memungkinkan rumah tangga mempunyai sumber penghasilan lain.

Jika usia anggota rumah tangga, khususnya kelompok 0-14 tahun dianggap sebagai proksi tingkat kelahiran, maka data di atas dapat menunjukkan bahwa semakin baik kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga, maka semakin sedikit jumlah kelahiran di rumah tangga tersebut. Sebaliknya, jumlah kelahiran lebih besar ditemukan pada rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan yang lebih buruk. Kenyataan ini terkait dengan nilai ekonomis anak yang mungkin dianut oleh sebagian masyarakat. Anak dianggap sebagai tenaga kerja untuk membantu mendapatkan penghasilan rumah tangga, sehingga dengan banyaknya anak yang dimiliki rumah tangga mempunyai jaminan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan pangan.

Tabel 5.6. Komposisi anggota rumah tangga terpilih di Provinsi Lampung

Komposisi anggota rumah tangga	Tahan pangan			Kurang tahan pangan			Tidak tahan pangan		
	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total
Usia ART (tahun, %)									
0-14	22,2	30,0	25,6	24,4	35,1	30,5	31,4	38,8	36,0
15-29	31,4	28,0	29,9	30,1	27,4	28,6	19,1	24,9	22,7
30-44	22,2	20,5	21,5	24,4	23,3	23,8	27,1	21,7	23,7
45-59	12,3	11,5	11,9	13,8	10,8	12,1	10,6	9,1	9,7
60-64	2,2	5,0	3,7	1,9	1,2	1,5	2,1	1,6	1,8
65 +	9,2	5,0	7,4	5,4	2,2	3,6	9,6	3,9	6,0
Rasio jenis kelamin (sex ratio)	82,5	98,0	88,9	91,4	80,9	85,2	84,3	85,0	84,8
Status migrasi ART									
Migran	31,9	32,0	32,0	50,2	45,9	47,7	48,9	48,2	48,5
Non-migran	68,1	68,0	68,0	49,8	54,1	52,3	51,1	51,8	51,5

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Rasio jenis kelamin (*Sex ratio*)²⁸ anggota rumah tangga menunjukkan bahwa secara umum jumlah anggota rumah tangga perempuan lebih banyak daripada laki-laki untuk semua kategori ketahanan pangan dan kemiskinan (rasio jenis kelamin di bawah 100). Berdasarkan kondisi ketahanan pangan, rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan yang lebih baik rasio jenis kelaminnya lebih besar, dalam arti jumlah anggota rumah tangga laki-laki lebih banyak. Dengan asumsi bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, ini dapat berarti (tanpa memperhitungkan usia) bahwa kondisi ekonomi rumah tangga tahan pangan lebih baik. Tetapi, setelah dikontrol dengan kondisi kemiskinan, perbedaan agak mencolok hanya terlihat pada kelompok rumah tangga tahan pangan, dengan rasio jenis kelamin lebih besar pada keluarga miskin dibandingkan keluarga tidak miskin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa justru rumah tangga tahan pangan dan miskin mempunyai anggota rumah tangga laki-laki yang lebih banyak dibandingkan rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin. Keadaan ini agak berbeda dengan pemahaman yang umum bahwa perempuan biasanya lebih miskin dari laki-laki. Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan tidak mempunyai pola hubungan yang jelas dengan jumlah anggota rumah tangga laki-laki atau perempuan.

Dari status migrasi, secara umum terlihat bahwa proporsi anggota rumah tangga non-migran lebih besar dari anggota rumah tangga migran. Data pada Tabel 5.6 menunjukkan bahwa rumah tangga non-migran cenderung mempunyai kondisi ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan rumah tangga migran (semakin baik kondisi ketahanan pangan rumah tangga, semakin besar proporsi anggota rumah tangga non-migran)²⁹. Tetapi setelah dikontrol dengan kondisi kemiskinan, tidak terlalu tampak perbedaan anggota rumah tangga berdasarkan status migrasinya. Hanya pada kelompok rumah tangga kurang tahan pangan, proporsi anggota rumah tangga yang berstatus non-migran pada rumah tangga miskin lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Keadaan ini menunjukkan bahwa status migrasi anggota rumah tangga lebih berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan dibandingkan dengan kondisi kemiskinan rumah tangga. Ada kemungkinan rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan yang lebih 'buruk' menerima migran masuk lebih besar. Tetapi dapat pula terjadi bahwa rumah tangga dengan jumlah migran yang lebih besar kehidupannya kurang mapan dibandingkan non-migran, yang selanjutnya berdampak terhadap kondisi ketahanan pangan rumah tangga.

²⁸ Rasio jenis kelamin (*Sex ratio*) anggota rumah tangga menunjukkan jumlah anggota rumah tangga laki-laki per seratus anggota rumah tangga perempuan (Boque, 1969:166).

²⁹ Anggota rumah tangga non-migran adalah mereka yang lahir dalam kabupaten daerah penelitian yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang di Provinsi Lampung dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.4.2. Komposisi Anggota Rumah Tangga dalam Enam Kategori Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

Komposisi anggota rumah tangga menurut umur di Provinsi Nusa Tenggara Timur memperlihatkan pola yang sama dengan di Lampung. Persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) lebih besar pada rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan lebih buruk (Tabel 5.7). Sebaliknya, penduduk usia produktif lebih besar persentasenya pada rumah tangga tahan pangan. Banyaknya penduduk usia muda serta penduduk usia lanjut (65 tahun dan lebih) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lebih tingginya *dependency ratio* di antara kelompok rumah tangga tidak tahan pangan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Pola yang sama juga ditemukan setelah kondisi tersebut dikontrol dengan kondisi kemiskinan. Kelompok rumah tangga miskin mempunyai beban anggota rumah tangga usia muda lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa rumah tangga yang mempunyai lebih banyak anggota berusia muda dan sebaliknya lebih sedikit anggota dalam umur produktif menjadi rentan terhadap kemiskinan.

Tabel 5.7. Komposisi anggota rumah tangga terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Komposisi anggota rumah tangga	Tahan pangan			Kurang tahan pangan			Tidak tahan pangan		
	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total	Tidak miskin	Miskin	Total
Usia ART (tahun, %)									
0-14	33,0	39,4	35,3	36,3	45,6	39,9	35,0	40,6	38,7
15-29	29,4	24,5	27,6	26,5	19,7	23,9	27,6	27,1	27,3
30-44	20,8	18,6	20,0	21,8	21,8	21,8	19,6	17,6	18,3
45-59	11,9	13,8	12,6	10,3	8,2	9,4	10,5	9,0	9,5
60-64	4,0	2,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,1	1,4	1,9
65 +	0,9	1,6	1,2	1,7	1,4	1,6	4,2	4,3	4,3
Rasio jenis kelamin (<i>Sex ratio</i>)	79,8	98,0	86,6	90,2	87,0	88,6	94,3	93,9	94,0

Sumber: Penelitian di Provinsi Lampung dan NTT, PPK-LIPI, 2003

Data pada Tabel 5.7 memperlihatkan rasio jenis kelamin di bawah 100 untuk semua kategori ketahanan pangan dan kemiskinan. Keadaan ini, seperti juga di Lampung, menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga perempuan lebih besar dari anggota rumah tangga laki-laki. Perbedaan rasio jenis kelamin anggota rumah tangga juga terlihat diantara keenam kategori rumah tangga. Semakin baik kondisi ketahanan pangan rumah tangga

semakin kecil rasio jenis kelamin yang berarti semakin berkurang jumlah anggota rumah tangga laki-laki relatif terhadap anggota rumah tangga perempuan. Setelah dikontrol dengan kondisi kemiskinan rumah tangga, perbedaan yang cukup jelas hanya terlihat pada kelompok rumah tangga tahan pangan dan kurang tahan pangan. Pada kelompok rumah tangga tahan pangan dan miskin, jumlah anggota rumah tangga laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin. Pada kelompok rumah tangga kurang tahan pangan kondisi sebaliknya yang terjadi, justru pada rumah tangga tidak miskin jumlah anggota rumah tangga laki-laki lebih besar. Keadaan ini tidak dapat menunjukkan kecenderungan keterkaitan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan komposisi jenis kelamin anggota rumah tangga. Pada rumah tangga kurang tahan pangan dan miskin, sedikitnya jumlah anggota rumah tangga laki-laki dapat menjadi penyebab kurangnya anggota rumah tangga yang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi pada rumah tangga tahan pangan banyaknya anggota rumah tangga laki-laki mungkin berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan (menjadi lebih baik) tetapi kurang berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan.

5.5. Distribusi Anggota Rumah Tangga

Migrasi masuk atau keluar anggota rumah tangga akan mempengaruhi jumlah dan komposisi anggota rumah tangga. Kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dapat menjadi sebab maupun akibat migrasi keluar atau migrasi masuk ke dalam suatu rumah tangga. Bertambahnya jumlah anggota rumah tangga karena adanya migrasi masuk, seperti pada fenomena 'anak piara' di NTT, akan menambah beban rumah tangga yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga. Tetapi, dapat pula terjadi bahwa kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga yang buruk akan mendorong anggota rumah tangga (terutama dalam usia produktif) untuk bermigrasi, mencari pekerjaan dan kesempatan ekonomi di daerah lain, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap komposisi anggota rumah tangga yang ditinggalkan. Kutipan wawancara dengan salah seorang kepala rumah tangga dalam kategori rumah tangga tahan pangan dan miskin di Lampung, berikut menunjukkan adanya fenomena migrasi keluar dari rumah tangga yang disebabkan karena kesulitan ekonomi yang dihadapi:

T : Memang di sini sekarang sulit mencari kerja pak?

J : Ya, kalau orang desa termasuknya sulit juga. Larinya ke proyek-proyek itu, kalau kadang yang mau. Ada yang cari kerja ke Jakarta, ada yang di Malaysia.

Kasus migrasi keluar di Provinsi Lampung umumnya terjadi pada rumah tangga yang termasuk kategori tidak tahan pangan dan miskin. Anggota rumah tangga yang melakukan migrasi pada umumnya adalah anak-anak, terutama setelah menamatkan pendidikan SD. Pulau Jawa, terutama daerah Tangerang, Banten dan Jakarta merupakan daerah tujuan utama mereka. Mereka yang bermigrasi ke daerah Tangerang pada umumnya bekerja sebagai buruh pabrik yang banyak terdapat di daerah tersebut. Selanjutnya, anak-anak perempuan yang melakukan perpindahan menuju Jakarta kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pengalaman yang dialami oleh sebuah rumah tangga dengan kategori tahan pangan dan miskin menunjukkan fenomena tersebut, seperti dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut,

T : Oh .. anak ibu kerja itu yang paling besar?

J : Iya

T : 15 tahun, lulus SD? Ke mana?

J : Iya, dia ke Jakarta

T : Kerjanya di Jakarta apa?

J : Di rumah tangga

T : Suka kirim uang?

J : Kalau pulang itu. Ngga pernah kirim

T : Kalau pulangnya berapa bulan sekali?

J : Satu tahun sekali, kalau mau lebaran

T : Banyak anak-anak di sini yang kerja di Jakarta?

J : Banyak kok Pak.

Kondisi yang sama juga ditemui di Nusa Tenggara Timur. Meskipun secara kuantitatif tidak ada anggota rumah tangga terpilih yang melakukan migrasi keluar dalam lima tahun terakhir, namun dari wawancara mendalam ditemukan bahwa dalam jangka waktu lebih jauh dari lima tahun ke belakang, ada rumah tangga yang anggotanya bermigrasi dengan tujuan utama mencari pekerjaan. Disamping bermigrasi keluar dan menetap dalam waktu lama (banyak yang pergi untuk bekerja di Malaysia), ada pula anggota rumah tangga yang bekerja ke luar daerah untuk masa yang pendek, seperti dikemukakan oleh salah satu anggota rumah tangga tahan pangan dan tidak miskin berikut ini:

T : Kalau Bapak, apakah pernah kerja keluar/menginap ke luar kota?

J : Pernah ke luar jauh di kota sana

T : Itu sering Bapak kerja seperti itu?

J : Ya

T : Sampai berapa lama biasanya?

J: Kalau dekat, misalnya di Niki-Niki 1 minggu dan 1 malam pulang
T: Kalau jauh?
J: Kalau jauh biasanya 1 bulan
T: 1 bulan baru pulang, kalau 1 tahun, apakah sering seperti itu?
J: Ya, kalau ada proyek besar.

Secara umum pembahasan pada bab ini memperlihatkan adanya hubungan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan karakteristik sosial demografi rumah tangga. Jumlah anggota rumah tangga merupakan variabel yang paling erat berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga. Sebagai contoh, jumlah anggota rumah tangga usia muda yang menyebabkan tingginya *dependency ratio* paling banyak ditemukan dalam keluarga tidak tahan pangan, dan sebaliknya paling sedikit terdapat pada rumah tangga tahan pangan. Namun demikian, kecenderungan hubungan agak sulit dilihat pada rumah tangga kurang tahan pangan. Keadaan ini mungkin disebabkan karena batasan yang sangat dekat antara ukuran ketahanan pangan pada rumah tangga kurang tahan pangan dengan rumah tangga tahan pangan atau tidak tahan pangan. Karena berada diantara keduanya (tahan pangan dan tidak tahan pangan) hubungan antar variabel pada rumah tangga kurang tahan pangan kadang-kadang mengikuti pola hubungan pada rumah tangga tahan pangan dan kadang-kadang juga mengikuti pola hubungan pada rumah tangga tidak tahan pangan.

6.1. Kesimpulan

Masalah ketahanan pangan sudah lama menjadi fokus perhatian dan sangat erat berkaitan dengan masalah kemiskinan karena kondisi rawan pangan tidak selalu disebabkan kurangnya suplai bahan makanan melainkan juga disebabkan karena lemahnya daya beli masyarakat (kemiskinan). Kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan ini juga berkaitan erat dengan kondisi kependudukan, karena pola konsumsi penduduk akan sangat berpengaruh terhadap perubahan variabel-variabel demografi seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi. Kondisi kerawanan pangan, sebagai contoh, menyebabkan status gizi yang rendah dan akan menurunkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit yang mungkin saja berakibat pada kematian. Untuk wanita usia produktif, kondisi rawan pangan juga akan berdampak terhadap kesehatan reproduksi dan fertilitas. Selain dari itu, kondisi kerawanan pangan dan kemiskinan di suatu daerah juga akan dapat menimbulkan dorongan pada penduduk usia produktif mencari alternatif kesempatan ekonomi dengan bermigrasi agar dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

Tiga fokus perhatian dalam penelitian ini adalah kondisi ketahanan pangan, kemiskinan dan sosial demografi rumah tangga. Secara umum studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman keterkaitan antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan kondisi demografi rumah tangga. Untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga digunakan 3 (tiga) indikator utama yaitu ketersediaan pangan, keberlanjutan dari ketersediaan pangan dan kualitas pangan yang dikonsumsi rumah tangga, dengan pangan pokok beras untuk daerah penelitian di Provinsi Lampung dan jagung untuk daerah penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketiga indikator ini merupakan indikator utama untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. Pengukuran kondisi kemiskinan mengacu pada konsep kemiskinan yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik, dengan penentuan garis kemiskinan makanan berdasarkan data pengeluaran konsumsi makanan, yang setara dengan nilai 2100 kkal energi dan 50 gram protein yang direkomendasikan untuk seseorang bisa hidup sehat dan layak. Garis kemiskinan makanan dapat mengindikasikan kemiskinan yang amat parah, sebagai perwujudan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, yaitu makanan. Berdasarkan garis kemiskinan untuk makanan, rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang

memiliki pengeluaran makanan lebih rendah dari batas garis kemiskinan di masing-masing daerah penelitian. Untuk Provinsi Lampung, garis kemiskinan makanan di daerah perdesaan adalah Rp 67.776,- per kapita per bulan, sedang untuk perdesaan NTT adalah Rp 62.437,- per kapita per bulan (perhitungan berdasarkan data SUSENAS 2002, BPS).

Kondisi kemiskinan rumah tangga juga dilihat berdasarkan pemilikan/penguasaan lahan pertanian dan pemilikan ternak. Untuk pemilikan lahan pertanian dipergunakan luas lahan sawah, luas ladang dan kombinasi keduanya. Ukuran kemiskinan lahan yang dipakai dalam studi ini adalah: rumah tangga yang memiliki sawah <0,7 ha dan ladang <0,3 ha (Lihat Singarimbun dan Penny 1984), atau sawah <0,85 ha, atau ladang <1,7 ha diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin. Penggunaan variabel pemilikan ternak untuk indikator kemiskinan didasarkan pada referensi bahwa penduduk miskin adalah petani dengan pemilikan ternak sedikit (Sayogyo, 1994). Kemiskinan ternak dalam studi ini mengacu pada pemilikan ternak besar (sapi, kerbau, babi). Rumah tangga yang tidak memiliki ternak diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin, sedang rumah tangga yang memiliki ternak minimal satu ekor, diklasifikasikan sebagai rumah tangga tidak miskin.

Berdasarkan kondisi ketahanan pangannya, rumah tangga di desa-desa penelitian di Provinsi Lampung dan Provinsi NTT diklasifikasikan dalam tiga tingkatan ketahanan pangan, (1) rumah tangga tahan pangan; (2) rumah tangga kurang tahan pangan dan (3) rumah tangga tidak tahan pangan. Untuk Provinsi Lampung, Desa Ngesti Rahayu di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah merupakan desa yang tingkat ketahanan pangannya lebih baik dibandingkan Desa Catur Karya Buana Jaya (Cakar Buaya) di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Desa Ngesti Rahayu merupakan desa dimana penduduknya 100 persen mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sedangkan penduduk Desa Cakar Buaya, selain beras, juga ada rumah tangga yang mengkonsumsi ubi kayu atau campuran beras dan ubi kayu sebagai makanan pokok. Perbedaan kondisi ketahanan pangan kedua desa ini, selain dipengaruhi oleh kondisi variabel ketahanan pangan (ketersediaan, keberlangsungan dan kualitas makanan) juga dipengaruhi oleh variabel-variabel antara seperti kondisi lahan pertanian dan ketersediaan sarana prasarana pertanian, kualitas sumber daya manusia serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Meskipun pemilikan/penguasaan lahan pertanian per rumah tangga di Desa Cakar Buaya lebih besar dari di Ngesti Rahayu, tetapi kondisi kesuburan tanah berpengaruh terhadap produktifitas dan produksi pertanian pangan terutama beras sebagai bahan makanan pokok. Selain dari itu di Desa Cakar Buaya juga banyak ditemukan "lahan tidur", karena pemiliknya tidak mampu untuk mengolah.

Untuk Provinsi NTT, kondisi ketahanan pangan Desa Naukae lebih baik dibandingkan Desa Enoneontes, keduanya di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Penduduk Naukae sebagian besar mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok tetapi ada sebagian kecil rumah tangga (kurang lebih 2 persen) yang mengkonsumsi ubi kayu, sedangkan penduduk Desa Enoneontes 100 persen mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok. Perbedaan tingkat ketahanan pangan rumah tangga di kedua desa ini terutama dipengaruhi oleh kondisi kesuburan tanah serta kondisi alam lainnya seperti bencana alam, angin ribut, longsor dan banjir yang mengganggu kegiatan pertanian penduduk dan produksi pangan pokok. Desa Enoneontes memang termasuk desa yang rawan bencana alam dan kondisi lahannya paling kritis dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Amanuban Barat. Selain kondisi alam, kualitas sumber daya manusia dan cara bercocok tanam serta penggunaan teknologi pertanian di dua daerah penelitian (Lampung dan NTT) juga berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan yang secara langsung akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan.

Di Provinsi NTT, adanya kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan penyediaan bahan pangan seperti lumbung ketahanan pangan ternyata sangat membantu masyarakat mengatasi masalah kekurangan pangan pada masa paceklik. Lumbung ketahanan pangan di NTT ditemukan di Desa Naukae sedangkan Desa Enoneontes baru tahun 2003 (rencana) masyarakat mendirikan lumbung desa. Selain dari itu, adanya perubahan pola makan dari jagung ke beras juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan. Desa-desa penelitian di NTT bukan merupakan daerah produksi beras. Perubahan pola makan ini dengan sendirinya menyebabkan desa-desa ini sangat tergantung pada daerah-daerah lain untuk mensuplai kebutuhan beras tersebut, yang selanjutnya mempengaruhi kondisi ketahanan pangan rumah tangga. Bantuan beras miskin (raskin) yang diberikan pemerintah dalam upaya mengatasi dampak krisis disatu sisi sangat membantu masyarakat, tetapi disisi lainnya membuat tingkat ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tinggi, karena ada kecenderungan masyarakat meninggalkan jagung sebagai makanan pokoknya.

Membandingkan kondisi ketahanan pangan Desa Ngesti Rahayu (Lampung) dan Desa Naukae (NTT), yang keduanya termasuk desa tahan pangan, proporsi rumah tangga yang masuk dalam kategori tahan pangan lebih besar di Desa Naukae dibandingkan di Desa Ngesti Rahayu. Ini disebabkan karena hampir seluruh rumah tangga di Desa Naukae memiliki persediaan pangan pokok (jagung) untuk kebutuhan selama satu (1) tahun, sedangkan di Ngesti Rahayu proporsi rumah tangga yang tidak mempunyai persediaan pangan untuk empat (4) bulan cukup besar. Ini disebabkan karena tidak semua

penduduk Desa Ngesti Rahayu bermata pencaharian sebagai petani, tetapi banyak pula yang bekerja sebagai pegawai yang digaji bulanan (karena lokasi desa membuat kesempatan kerja di luar sektor pertanian cukup terbuka). Dengan demikian, kemampuan rumah tangga dalam menyediakan kebutuhan pangan juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan (karena harus membeli) dan bukan ditentukan oleh lamanya musim tanam padi (4 bulan).

Kondisi ketahanan pangan juga dilihat berdasarkan asupan energi dan protein dari konsumsi sehari-hari penduduk di daerah penelitian, dengan standar kebutuhan minimum sebesar 2.100 kkal energi dan 50 gram protein seperti yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Nasional tahun 1978. Hasil pemantauan konsumsi pangan rumah tangga terpilih selama tiga hari berturut-turut di daerah penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngesti Rahayu tidak ada rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan minimum tersebut. Konsumsi energi dan protein terbesar di Desa Cakar Buaya adalah sebesar 2.083,0 kkal energi dan 40,4 gram protein/hari sedangkan di Desa Ngesti Rahayu sebesar 2.071,6 kkal energi dan 51,2 gram protein/hari. Di NTT, baik di Desa Naukae maupun Enoneontes, rumah tangga yang termasuk dalam kelompok tahan pangan rata-rata konsumsi energinya berada di atas 2.100 kkal/hari. Asupan protein di kedua desa ini juga berada di atas standard minimum 50 gram/hari. Jika hanya dilihat dari jumlah asupan energi dan protein, kondisi ketahanan pangan di desa-desa penelitian di NTT tampaknya lebih baik. Tetapi jika dilihat dari diversifikasi makanan yang dikonsumsi terlihat bahwa tingginya rata-rata asupan energi dan protein di NTT di dominasi oleh makanan yang banyak mengandung karbohidrat, terutama jagung dan ubi. Di Lampung, konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tidak sebesar di NTT dan jenis makanan yang dikonsumsi juga lebih bervariasi dan lebih berkualitas. Banyaknya konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat (dalam ukuran berat per individu) dengan sendirinya setelah di konversi akan memberikan asupan energi dan protein yang tinggi pula. Mengonsumsi banyak karbohidrat memang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama namun di lain pihak semakin tinggi persentase serelia dan umbi-umbian maka komposisi pangan yang dikonsumsi semakin kurang beragam. Asupan pangan yang kurang beragam akan berakibat pada kurangnya beberapa zat gizi yang dibutuhkan untuk hidup sehat.

Tingkat kemiskinan di daerah penelitian dilihat dari proporsi rumah tangga miskin terhadap total rumah tangga contoh (*sampel*). Berdasarkan pengeluaran untuk kebutuhan pangan, di Provinsi Lampung, Desa Cakar Buaya lebih miskin dibandingkan Desa Ngesti Rahayu. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan yang secara

langsung juga berhubungan dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Desa Ngesti Rahayu mempunyai akses yang lebih besar terhadap kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan tunai rumah tangga. Meskipun penghitungan pengeluaran untuk kebutuhan pangan juga memperhitungkan bahan pangan yang tidak dibeli (seperti sayur-sayuran dari kebun), tetapi pendapatan tunai secara langsung akan berhubungan dengan pengeluaran untuk konsumsi pangan rumah tangga. Untuk Provinsi NTT, Desa Enoneontes kondisi kemiskinannya lebih parah dibandingkan Desa Naukae. Kondisi lahan pertanian di Desa Enoneontes yang dapat dikatakan 'kritis' tampaknya sangat berpengaruh terhadap rendahnya kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi yang direfleksikan oleh rendahnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Selain dari itu, dilihat dari kepemilikan/penguasaan lahan pertanian, rata-rata kepemilikan/penguasaan lahan pertanian rumah tangga di Desa Enoneontes juga lebih kecil dibandingkan Desa Naukae.

Berdasarkan kepemilikan lahan pertanian (lahan kering dan sawah), kondisi kemiskinan di Lampung menunjukkan keadaan sebaliknya dari kondisi kemiskinan berdasarkan pengeluaran untuk pangan. Rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin lahan pertanian di Desa Cakar Buaya ternyata proporsinya lebih kecil dibandingkan di Desa Ngesti Rahayu. Keadaan ini mungkin berkaitan dengan cukup banyaknya rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan di luar sektor pertanian di Desa Ngesti Rahayu. Meskipun rumah tangga ini tidak termasuk kategori miskin berdasarkan pengeluaran untuk pangan, tetapi mereka tidak memiliki/menguasai lahan pertanian karena mereka bukan 'petani'. Sebaliknya, Desa Cakar Buaya pada awalnya merupakan desa transmigrasi tanaman perkebunan, dimana setiap keluarga transmigran mendapat 5 Ha lahan (untuk kebun, pekarangan dan rumah), sehingga meskipun saat ini sudah terjadi perubahan status kepemilikan lahan, masih cukup banyak rumah tangga yang memiliki lahan kering cukup luas. Di NTT, hampir semua rumah tangga di Desa Enoneontes termasuk dalam kategori miskin lahan dan kondisi ini lebih buruk dibandingkan di Desa Naukae meskipun lebih dari 75 persen rumah tangga di Desa Naukae juga termasuk dalam kategori miskin lahan.

Untuk kemiskinan berdasarkan kepemilikan ternak, Desa Ngesti Rahayu juga lebih miskin dibandingkan Desa Cakar Buaya. Desa Cakar Buaya merupakan salah satu desa yang mendapat bantuan hewan ternak dari pemerintah yang dipelihara dengan sistem 'gaduh', dimana si pemelihara akan mendapatkan bagian anak sapi yang lahir dan induk sapi akan digilirkan lagi pada penduduk lainnya. Bantuan ini tidak ada di Desa Ngesti Rahayu. Dengan demikian dapat dipahami jika kondisi kemiskinan ternak di Desa Cakar Buaya lebih baik dari Desa Ngesti Rahayu. Berdasarkan kepemilikan ternak,

kondisi kemiskinan di Desa Naukae juga lebih baik dibandingkan Desa Enoneontes. Jika dibandingkan kondisi di Lampung dan NTT, ternyata berdasarkan pemilikan ternak, rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin ternak di Lampung proporsinya lebih besar dibandingkan di NTT. Ini disebabkan karena di desa-desa penelitian di NTT ternak merupakan suatu bentuk tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, sedangkan di Lampung mungkin masyarakat lebih memilih (karena kemudahan fasilitas) untuk menabung di bank atau dalam bentuk tunai.

Dari kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan di desa-desa penelitian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang diukur berdasarkan pengeluaran untuk pangan tidak selalu konsisten dengan kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan pemilikan/penguasaan lahan atau ternak. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penggunaan indikator pemilikan lahan pertanian dan ternak memiliki tingkat sensitifitas yang berbeda-beda di setiap wilayah, dan tidak sensitif untuk ukuran kemiskinan secara umum, sebagaimana indikator pengeluaran makanan.

Prinsip-prinsip dalam pengukuran ketahanan pangan dan kemiskinan di dua provinsi sama tetapi indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat ketahanan pangan dan kemiskinan berbeda. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya kecenderungan yang sama. Di dua daerah penelitian ini rumah tangga tahan pangan juga cenderung merupakan rumah tangga yang masuk dalam kategori tidak miskin. Keadaan ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara ketahanan pangan dan kemiskinan. Temuan ini lebih jauh juga menunjukkan bahwa memang dalam pengukuran ketahanan pangan dan kemiskinan diperlukan indikator-indikator yang sesuai dengan kondisi daerah yang berbeda-beda, sehingga lebih sensitif terhadap perubahan kondisi geografis maupun sosial ekonomi masyarakat setempat.

Analisis soaial demografi rumah tangga difokuskan dalam enam kelompok rumah tangga berdasarkan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan yaitu: (1) rumah tangga tahan pangan tidak miskin, (2) rumah tangga tahan pangan miskin, (3) rumah tangga kurang tahan pangan tidak miskin, (4) rumah tangga kurang tahan pangan miskin, (5) rumah tangga tidak tahan pangan tidak miskin, dan (6) rumah tangga tidak tahan pangan miskin. Ukuran kemiskinan yang digunakan hanya berdasarkan pengeluaran untuk konsumsi pangan karena indikator ini merupakan indikator yang dapat digunakan secara umum di keempat desa penelitian, karena setiap rumah tangga di daerah penelitian pasti mempunyai 'pengeluaran untuk pangan', meskipun besarnya berbeda-beda tergantung pada kemampuan rumah tangga dan kondisi sosial-budaya lainnya. Kedua indikator lainnya, pemilikan/penguasaan lahan pertanian

dan pemilikan ternak tidak dapat berlaku umum di seluruh desa penelitian. Indikator ini hanya cocok untuk daerah-daerah tertentu, sesuai dengan kondisi fisik daerah maupun sosial budaya masyarakatnya.

Analisis kondisi sosial demografi rumah tangga yang dikaji adalah besarnya rumah tangga (jumlah anggota rumah tangga), tipologi rumah tangga (komposisi anggota rumah tangga) dan distribusi anggota rumah tangga. Besar rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini mencukupi jumlah seluruh individu yang tinggal dalam satu rumah tangga. Jumlah anggota rumah tangga ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ketahanan pangan serta kemiskinan rumah tangga. Disatu sisi, jumlah anggota rumah tangga yang besar, menyebabkan beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik yang bisa dihasilkan oleh rumah tangga maupun yang harus dibeli, menjadi semakin berat. Disisi lain, untuk rumah tangga dengan mata pencaharian di sektor pertanian, jumlah anggota rumah tangga yang besar merupakan sumber tenaga kerja dalam proses produksi pertanian. Makin banyak tenaga kerja keluarga yang terlibat dalam proses produksi, makin besar produksi pertanian (khususnya bahan pangan) yang dapat dihasilkan. Selain dari itu, makin banyak jumlah anggota rumah tangga juga makin banyak kemungkinan 'sumber mata pencaharian' rumah tangga. Tetapi kondisi ini sangat tergantung pada usia anggota rumah tangga (untuk melihat beban rumah tangga ini akan dilihat rasio ketergantungan/ *dependency ratio*).

Tipologi rumah tangga adalah jenis/struktur rumah tangga dilihat dari hubungan anggotanya dengan Kepala Rumah tangga (KRT) atau komposisi anggota rumah tangga. Keluarga batih dimaksudkan untuk rumah tangga yang anggotanya hanya terdiri dari orang tua (ayah/ibu) dengan anak-anak mereka. Sementara itu, keluarga luas adalah rumah tangga yang tidak hanya terdiri dari orang tua dengan anak-anaknya, melainkan juga dihuni oleh anggota lainnya, baik yang mempunyai hubungan darah maupun orang lain yang tidak mempunyai pertalian darah. Termasuk dalam kategori keluarga luas antara lain rumah tangga yang selain KRT dengan pasangan serta anak-anak mereka, juga beranggotakan adik/kakak KRT dan pasangannya, orang tua/mertua KRT, keponakan atau orang lain yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga (termasuk anak piara di NTT). Tipologi rumah tangga ini selain dipengaruhi oleh tingkat fertilitas dan mortalitas anggota rumah tangga, juga sangat dipengaruhi oleh besarnya migrasi masuk dan migrasi keluar diantara anggota rumah tangga.

Untuk daerah penelitian di Lampung, secara umum dapat dikatakan bahwa semua rumah tangga termasuk rumah tangga kecil. Hal ini terlihat dari jumlah rata-rata anggota rumah tangga kurang dari 5 orang, dengan rata-

rata anak sebanyak 2 orang. Sedikitnya jumlah anak ini dapat sangat terkait dengan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), terutama melalui perluasan cakupan pelayanan, baik penyediaan tempat pelayanan maupun variasi jenis kontrasepsi yang ditawarkan. Tersedianya tenaga kesehatan di daerah penelitian dan sekitarnya serta akses transportasi yang mudah mempermudah masyarakat di dua daerah penelitian di Lampung untuk memperoleh pelayanan KB. Membandingkan rumah tangga tidak miskin dengan rumah tangga miskin, terdapat perbedaan dalam rata-rata jumlah anak serta jumlah anggota rumah tangga. Rumah tangga miskin mempunyai jumlah anak dan anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Hubungan timbal balik dapat terjadi antara kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dengan jumlah anak dan anggota keluarga. Rumah tangga kurang tahan pangan dan miskin cenderung mempunyai anggota rumah tangga lebih besar karena jumlah anak dalam rumah tangga tersebut juga lebih besar. Rumah tangga miskin, mempunyai anak yang lebih banyak dengan pertimbangan anak-anak dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Dengan demikian anak dapat dipandang mempunyai nilai ekonomis dan sekaligus sebagai jaminan sosial di hari tua. Namun sebaliknya, hubungan ini dapat terjadi dengan arah yang berlawanan. Jumlah anak yang lebih banyak membawa konsekuensi lebih banyaknya anggota rumah tangga yang harus dipenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan pangan sehingga rumah tangga menjadi terpuruk dalam kondisi kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pangan juga terganggu.

Besar rumah tangga terpilih dengan keenam kategori berdasarkan ketahanan pangan dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara memperlihatkan pola yang sama dengan yang ditemui di Provinsi Lampung. Rumah tangga tahan pangan memiliki rata-rata jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga tidak tahan pangan. Pola yang sama dengan Provinsi Lampung juga terlihat pada rata-rata jumlah anak yang dimiliki. Rumah tangga tahan pangan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit daripada rumah tangga tidak tahan pangan, meskipun dengan perbedaan yang sangat kecil (masing-masing 2,4 orang dan 2,6 orang). Jika dibandingkan dengan di Provinsi Lampung, rumah tangga terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mempunyai jumlah anak yang lebih besar sedangkan jumlah anggota rumah tangga tidak terlalu jauh berbeda. Ada kemungkinan hal ini disebabkan keberhasilan program KB belum sebesar apa yang dicapai oleh Provinsi Lampung. Mengingat mulainya pelaksanaan program tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur³⁰ lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Lampung. Selain itu, perbedaan dalam ketersediaan sarana pelayanan KB

³⁰ Program KB di Nusa Tenggara Timur baru dimulai pada awal tahun 1980-an, sementara di provinsi-provinsi wilayah barat Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, pelaksanaannya sudah dimulai sejak akhir tahun 1970-an.

serta aksesibilitasnya, terutama dari segi jarak, mempunyai pengaruh yang besar dalam pencapaian tujuan program. Selain dari itu, tingkat migrasi keluar anggota rumah tangga di daerah penelitian di Provinsi NTT juga dapat dikatakan cukup tinggi sehingga jumlah anggota rumah tangganya tidak jauh berbeda dengan daerah penelitian di Lampung.

Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan angka ketergantungan (*dependency ratio*)³¹ antara rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan yang berbeda-beda di Provinsi Lampung. Semakin buruk kondisi ketahanan pangan rumah tangga, semakin besar angka ketergantungannya. Untuk rumah tangga tahan pangan, ada lebih dari dua orang produktif yang menanggung satu orang tidak produktif dalam rumah tangga, Tetapi dalam rumah tangga kurang tahan dan tidak tahan pangan, kurang dari dua orang produktif yang harus menanggung satu orang tidak produktif. Setelah di kontrol dengan kondisi kemiskinan rumah tangga, juga terlihat bahwa rumah tangga miskin mempunyai angka ketergantungan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Pola ini juga berhubungan dengan jumlah anak yang dimiliki. Rumah tangga miskin cenderung mempunyai rata-rata jumlah anak yang lebih besar. Dengan makin besarnya rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang harus diberi makan setiap individu yang produktif dalam rumah tangga akan mempengaruhi kuantitas maupun kualitas makanan yang dikonsumsi dalam rumah tangga miskin.

Dari tipologi rumah tangga di Provinsi Lampung, perbedaan terlihat antara rumah tangga tahan pangan dengan rumah tangga tidak tahan pangan. Persentase keluarga luas dalam rumah tangga tahan pangan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga tidak tahan pangan. Keadaan ini dapat berhubungan dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan anggotanya. Rumah tangga yang mampu lebih mungkin 'membuka diri' untuk masuknya anggota rumah tangga di luar keluarga batih karena masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi dari sisi lain, jika dihubungkan dengan angka ketergantungan, kondisi ini mengindikasikan adanya anggota rumah tangga lain (selain anggota keluarga batih) dalam usia produktif yang turut menunjang ekonomi rumah tangga, sehingga kondisi ketahanan pangan juga lebih baik. Jika di kontrol dengan kondisi kemiskinan, perbedaan tipe rumah tangga hanya lebih jelas terlihat dalam kelompok rumah tangga tahan pangan. Dalam kelompok rumah tangga ini, proporsi rumah tangga luas lebih besar pada kelompok keluarga tidak miskin.

³¹ Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perkiraan rata-rata jumlah tanggungan (penduduk berumur 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) yang harus di tanggung oleh setiap orang dalam kelompok umur bekerja/produktif (umur 15-64 tahun) (East West Centre, 2002: 6).

Sama halnya dengan yang ditemui di Provinsi Lampung, rumah tangga miskin di daerah penelitian di Provinsi NTT (untuk semua kategori ketahanan pangan) mempunyai jumlah anggota serta jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Sekali lagi, nilai ekonomi anak, yaitu sebagai tenaga kerja dan tempat memperoleh perlindungan di hari tua diduga kuat menjadi pendorong bagi rumah tangga miskin untuk memiliki lebih banyak anak. Sejalan dengan jumlah anak yang dimiliki, *dependency ratio* pada keluarga tidak tahan pangan (0,75) juga lebih besar daripada keluarga tahan pangan (0,58) dan keluarga kurang tahan pangan (0,71). Dalam setiap kategori ketahanan pangan rumah tangga, *dependency ratio* dalam keluarga miskin juga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Besarnya *dependency ratio* inilah, seperti juga yang ditemukan di Lampung kemungkinan besar menjadi salah satu penyebab kurangnya ketahanan pangan rumah tangga dan juga berpengaruh negatif terhadap kondisi kemiskinan atau sebaliknya.

Meskipun tidak ditunjang data hasil survei, wawancara mendalam dengan berbagai narasumber di lapangan menunjukkan bahwa banyak penduduk di lokasi penelitian di provinsi NTT yang melakukan migrasi ke luar daerah. Perpindahan tersebut tidak hanya di dalam wilayah Indonesia, namun juga melintasi batas negara. Ada kecenderungan penduduk usia kerja di lokasi penelitian pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, misalnya sebagai buruh kebun kelapa sawit atau sebagai pekerja rumah tangga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daerah penelitian merupakan salah satu pengirim migrasi keluar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan ini juga dapat menyebabkan tingginya *dependency ratio*, karena penduduk usia produktif yang harus menanggung penduduk dalam usia tidak produktif menjadi berkurang.

Tipe rumah tangga contoh (*sampe*) di NTT menunjukkan bahwa dalam semua kategori ketahanan pangan, persentase terbesar adalah keluarga batih (lebih dari 83 persen). Setelah di kontrol dengan kondisi kemiskinan, ada kecenderungan bahwa rumah tangga miskin mempunyai proporsi keluarga luas yang lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin untuk semua kelompok ketahanan pangan rumah tangga. Ada kemungkinan karena rumah tangga menanggung beban jumlah anggota yang lebih besar (selain KRT dan pasangan serta anak-anaknya), maka kondisi ketahanan pangan serta kemiskinan rumah tangga menjadi lebih buruk. Kenyataan ini berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Lampung, karena rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan serta kemiskinan yang lebih baik yang cenderung mempunyai tipe keluarga luas. Artinya dengan kondisi ketahanan pangan yang lebih baik rumah tangga mampu menampung anggota lain di samping orang tua dan anak-anaknya.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis keterkaitan antara ketahanan pangan dan kemiskinan dengan kondisi sosial demografi rumah tangga di daerah penelitian dapat diberikan beberapa rekomendasi sehubungan dengan pengembangan konsep dan pengukuran maupun untuk perencanaan program dan kebijakan.

Masukan untuk pengembangan konsep dan pengukuran:

1. Dalam pengembangan indeks ketahanan pangan perlu dipertimbangkan beberapa variabel yang tampaknya akan juga berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan yaitu cara memperoleh persediaan pangan. Dalam penelitian ini definisi ketahanan pangan lebih berat ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk memproduksi sendiri bahan makanan pokok. Meskipun desa-desa penelitian merupakan daerah pertanian, ternyata ada pula variasi jenis pekerjaan di sektor non-pertanian. Untuk itu perlu juga dipertimbangkan indikator yang berhubungan dengan jenis kegiatan di luar sektor pertanian. Kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan keberlanjutan dalam penyediaan pangan pokok rumah tangga.
2. Jarak waktu yang digunakan untuk menentukan indikator ketersediaan pangan berdasarkan waktu antara satu panen dengan panen berikutnya (untuk padi dan jagung) perlu di pertajam dengan melihat data empirik ketersediaan pangan dalam rumah tangga. Ini akan memberikan indikator yang lebih sensitif terhadap kondisi ketersediaan pangan berdasarkan kondisi subjektif masyarakat di daerah penelitian.
3. Berdasarkan temuan jelas terlihat bahwa kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan pengeluaran makanan tidak selalu konsisten dengan kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan pemilikan/penguasaan lahan atau ternak. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan indikator pemilikan lahan pertanian dan ternak memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda di setiap wilayah, dan tidak sensitif untuk ukuran kemiskinan secara umum, sebagaimana indikator pengeluaran makanan. Untuk itu perlu dikembangkan indikator yang sesuai dengan kondisi geografis maupun sosial demografi masyarakat setempat. Indikator yang lokal sensitif ini sangat diperlukan untuk penentuan target intervensi program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

4. Analisis kondisi sosial demografi rumah tangga dan anggota rumah tangga berdasarkan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga menunjukkan bahwa kecenderungan sosial demografi dalam hubungan antara variabel-variabel sosial demografi tidak selalu berlaku sama ketika kemiskinan diukur berdasarkan indikator-indikator yang berbeda. Ini juga menunjukkan perlunya untuk mengembangkan indikator yang lokal sensitif. Misalnya, untuk Provinsi Lampung, pemilikan lahan pertanian ternyata lebih sensitif dibandingkan pemilikan ternak.
5. Pemilikan lahan merupakan indikator yang kurang sensitif dalam pengukuran tingkat kemiskinan kecuali dikombinasikan dengan kemampuan rumah tangga untuk mengolah lahan tersebut, baik dari sisi ketersediaan sumberdaya manusia maupun penggunaan teknologi.

Masukan Kebijakan Berkaitan dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan

1. Dalam perencanaan program bantuan (seperti program bantuan dalam mengatasi dampak krisis), juga perlu diperhatikan kondisi sosial budaya dan kebiasaan masyarakat. Seperti misalnya, bantuan pangan, harus disesuaikan dengan pola dan kebiasaan makan (makanan pokok) masyarakat setempat sehingga tidak merubah pola-pola yang sudah ada yang umumnya terbangun sesuai dengan potensi daerah serta tidak meningkatkan ketergantungan daerah terhadap daerah lainnya. Terutama untuk daerah-daerah terpencil seperti desa-desa di NTT, ketergantungan ini akan memperburuk kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan.
2. Persediaan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada saat persediaan pangan rumah tangga terganggu seperti pada saat terjadi kegagalan panen diperlukan adanya lumbung desa yang berfungsi sebagai cadangan pangan di tingkat desa. Hasil penelitian di empat lokasi penelitian menunjukkan bahwa hampir di seluruh lokasi penelitian kecuali di Desa Naukae sudah tidak mempunyai lumbung desa. Keberadaan lumbung desa sebagai salah satu cara untuk mengatasi kesulitan pangan di tingkat desa perlu dibentuk kembali. Meskipun secara individu rumah tangga mempunyai strategi sendiri untuk mengatasi kesulitan pangan namun keberadaan lumbung desa akan sangat bermanfaat terutama pada saat terjadi kegagalan panen sehingga desa mempunyai cadangan pangan.

3. Meskipun indikator-indikator ketahanan pangan dan kemiskinan di tingkat rumah tangga sangat diperlukan dalam penentuan target program intervensi, pada tingkat yang lebih tinggi (desa, kecamatan dan kabupaten) diperlukan pula pengembangan indikator yang bersifat umum yang lebih sensitif untuk dapat menggambarkan keadaan yang berlaku umum, sehingga perbandingan dapat dilakukan berdasarkan indikator yang sama.
4. Besarnya asupan energi dan protein dibandingkan kebutuhan minimum berdasarkan standar yang sudah ditentukan (2.100 kkal energi dan 50 gram protein) untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga harus diiringi dengan pengetahuan dan pemahaman diversifikasi pangan dan pola konsumsi pangan di rumah tangga. Kecukupan asupan energi dan protein saja tidak cukup untuk intervensi program yang komprehensif karena perbedaan pola konsumsi dan diversifikasi pangan rumah tangga akan berdampak pada berbedanya program intervensi yang dibutuhkan.
5. Konsumsi masyarakat masih mengandalkan pada asupan karbohidrat, terutama makanan pokok dan belum tercapai keseimbangan komposisi pangan. Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup ketidakseimbangan komposisi pangan yang dikonsumsi penduduk, tetapi juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Pola konsumsi pangan seharusnya mencakup aneka ragam pangan dari berbagai kelompok pangan baik pangan pokok, lauk pauk, sayuran maupun buah dalam jumlah yang cukup. Meskipun faktor keterbatasan ekonomi seringkali dijadikan alasan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, namun, faktor pengetahuan akan gizi juga merupakan faktor yang turut mempengaruhi pola konsumsi. Meskipun seseorang/rumah tangga secara ekonomi mampu, tapi belum tentu penghasilannya akan dibelikan makanan yang bergizi. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, tidak jarang kelompok rumah tangga yang tergolong tahan tapi pola makannya boleh dikatakan 'seadanya' saja, 'yang penting kenyang'. Untuk memberi pemahaman akan pentingnya makanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat, perlu diberikan penyuluhan gizi yang cara dan metode penyampaiannya dapat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.
6. Perencanaan untuk program intervensi seyogyanya memperhatikan perbedaan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan dalam enam kategori kelompok rumah tangga yaitu: (1) rumah tangga tahan pangan tidak miskin, (2) rumah tangga tahan pangan miskin, (3) rumah tangga kurang tahan pangan tidak miskin, (4) rumah tangga

kurang tahan pangan miskin, (5) rumah tangga tidak tahan pangan tidak miskin, dan (6) rumah tangga tidak tahan pangan miskin.

7. Indikator kemiskinan berdasarkan pengeluaran untuk pangan untuk jangka pendek dapat digunakan untuk menentukan target program intervensi dalam mengatasi masalah kerawanan pangan transitori (*transitory food insecurity*), sedangkan gabungan ketiga indikator kemiskinan (Pengeluaran pangan, pemilikan lahan dan ternak) dapat membantu dalam menentukan target program intervensi dalam mengatasi masalah kerawanan pangan kronis (*chronic food insecurity*).
8. Kondisi sosial demografi rumah tangga di dua daerah penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga mempunyai keterkaitan yang erat dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga. Dengan demikian, intervensi program-program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui program kependudukan, berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk. Salah satunya dengan mengintensifkan kembali program keluarga berencana, dengan pendekatan yang mungkin harus berbeda dari pendekatan yang selama ini sudah diterapkan.
9. Pendidikan kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa program-program di bidang pendidikan (bantuan pendidikan seperti JPS Pendidikan) secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap perbaikan kondisi ketahanan pangan dan kemiskinan. Tetapi, bagaimana mekanisme hubungan keterkaitan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Lampiran 1.1 :

Kondisi ketahanan pangan Kabupaten di Provinsi Lampung, 2001

Kabupaten/Kota	Skor Data Rawan Pangan (DRP)	Tingkat risiko
Lampung Tengah	4 (hijau)	Ringan
Metro	5 (hijau)	Ringan
Lampung Barat	5 (hijau)	Ringan
Lampung Timur	5 (hijau)	Ringan
Tanggamus	6 (kuning)	Sedang
Lampung Selatan	6 (kuning)	Sedang
Bandar Lampung	6 (kuning)	Sedang
Tulang Bawang	7 (kuning)	Sedang
Way Kanan	7 (kuning)	Sedang
Lampung Utara	7 (kuning)	Sedang

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Lampung, 2001.

Lampiran 1.2.

Kondisi ketahanan pangan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang, Provinsi Lampung 2001.

Kabupaten dan Kecamatan	Skor Data Rawan Pangan (DRP)	Tingkat risiko
Kab. Lampung Tengah	4 (hijau)	Ringan
1. Kec. Tb. Besar	3 (hijau)	Ringan
2. Kec. Pd. Ratu	4 (hijau)	Ringan
3. Kec. Gn. Sugih	4 (hijau)	Ringan
4. Kec. Trimurjo	4 (hijau)	Ringan
<i>5. Kec. Punggur</i>	<i>4 (hijau)</i>	<i>Ringan</i>
6. Kec. Spt. Raman	4 (hijau)	Ringan
7. Kec. Rumbia	4 (hijau)	Ringan
8. Kec. Spt. Banyak	4 (hijau)	Ringan
9. Kec. Kalirejo	5 (hijau)	Ringan
10. Kec. Bangunrejo	5 (hijau)	Ringan
11. Kec. Spt. Mataram	5 (hijau)	Ringan
12. Kec. Spt. Surabaya	6 (kuning)	Sedang
13. Kec. Trs. Nunyai	6 (kuning)	Sedang
Kab. Tulang Bawang	7 (kuning)	Sedang
1. Kec. Menggala	6 (kuning)	Sedang
2. Kec. Gd. Aji	6 (kuning)	Sedang
3. Kec. Tl. Bw. Udik	6 (kuning)	Sedang
4. Kec. Tl. Bw Tengah	7 (kuning)	Sedang
5. Kec. Mesuji	7 (kuning)	Sedang
6. Kec. Sp. Pematang	8 (kuning)	Sedang
<i>7. Kec. Banjar Agung</i>	<i>9 (merah)</i>	<i>Tinggi</i>
8. Kec. Gn. Terang	10 (merah)	Tinggi

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Lampung, 2001.

Lampiran 1. 3 :

Kondisi ketahanan pangan Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 2001.

Kabupaten dan Kecamatan	Skor Data Rawan Pangan (DRP)	Tingkat risiko
Kab. TTS		Rendah
1. Kec. Kuanfatu	7 (kuning)	Sedang
2. Kec. Mollo Utara	8 (kuning)	Sedang
3. Kec. Mollo Selatan	8 (kuning)	Sedang
4. Kec. Amanuban Barat	8 (kuning)	Sedang/Tinggi¹⁾
5. Kota Soe	8 (kuning)	Sedang
6. Kec. Ki'e	8 (kuning)	Sedang
7. Kec. Atun Utara	8 (kuning)	Sedang
8. Kec. Aban Selatan	9 (merah)	Tinggi
9. Kec. Aban Tengah	9 (merah)	Tinggi
10. Kec. Aban Timur	9 (merah)	Tinggi
11. Kec. Atun Selatan	10 (merah)	Tinggi

Sumber: Badan Bimas dan Ketahanan Pangan NTT bekerjasama dengan Kelompok Kerja pangan, Gizi dan Kesehatan masyarakat, 2001.

Catatan: 1).Penelitian Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian Balitbang Pertanian Departemen Pertanian (2002) menyimpulkan bahwa Kecamatan Amanuban Barat termasuk dalam kategori rawan pangan tinggi.

Lampiran 1.4.

Penduduk miskin di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur menurut Kabupaten/Kota (persen)

Provinsi/Kabupaten/Kota		Persentase Penduduk Miskin
1.	Provinsi Lampung	26,6
	1. Kabupaten Lampung Barat	28,1
	2. Kabupaten Tanggamus	27,4
	3. Kabupaten Lampung Selatan	25,8
	4. Kabupaten Lampung Timur	25,0
	5. Kabupaten Lampung Tengah	25,8
	6. Kabupaten Lampung Utara	24,3
	7. Kabupaten Way Kanan	32,4
	8. Kabupaten Tulang Bawang	33,8
	9. Kota Bandar Lampung	22,7
	10. Kota Metro	18,4
2.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	47,7
	1. Kabupaten Sumba Barat	59,2
	2. Kabupaten Sumba Timur	47,3
	3. Kabupaten Kupang	51,5
	4. Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS)	51,8
	5. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)	48,3
	6. Kabupaten Belu	48,9
	7. Kabupaten Alor	42,4
	8. Kabupaten Lembata	44,0
	9. Kabupaten Flores Timur	44,8
	10. Kabupaten Sikka	47,7
	11. Kabupaten Ende	42,3
	12. Kabupaten Ngada	48,3
	13. Kabupaten Manggarai	46,1
	14. Kabupaten	32,1
15. Kota Kupang		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004.

Lampiran 1.5.

Penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Kecamatan (persen)

Kabupaten dan Kecamatan		Persentase Penduduk Miskin
1.	Kabupaten Lampung Tengah	25,8
	1. Kecamatan Rumbia	37,4
	2. Kecamatan Terusan Nunyai	37,2
	3. Kecamatan Bangunrejo	30,9
	4. Kecamatan Padang Ratu	30,4
	5. Kecamatan Seputih Mataram	27,0
	6. Kecamatan Cuning Sugih	27,0
	7. Kecamatan Seputih Surabaya	26,6
	8. Kecamatan Terbanggi Besar	22,0
	9. Kecamatan Kalirejo	21,0
	10. Kecamatan Seputih Banyak	20,3
	11. Kecamatan Punggur	18,8
	12. Kecamatan Seputih Raman	16,5
	13. Kecamatan Trimurjo	13,5
2.	Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)	51,8
	1. Kecamatan Mollo Utara	55,5
	2. Kecamatan Mollo Selatan	59,2
	3. Kota Soe	36,7
	4. Kecamatan Amanuban Barat	42,1
	5. Kecamatan Amanuban Selatan	53,8
	6. Kecamatan Kuan Fatu	53,9
	7. Kecamatan Amanuban Tengah	43,4
	8. Kecamatan Amanuban Timur	53,7
	9. Kecamatan Kie	56,8
	10. Kecamatan Amanatun Selatan	61,9
	11. Kecamatan Amanatun Utara	49,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004.

Lampiran 2.1.

Indikator keluarga miskin dan tidak miskin menurut BKKBN

(Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1997).

Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I. Keluarga Pra-Sejahtera dan keluarga Sejahtera I diklasifikasikan sebagai keluarga miskin.

Keluarga Sejahtera I:

1. Anggota keluarga menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
5. Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau pengobatan modern

Keluarga Sejahtera II: harus memenuhi syarat seperti keluarga Sejahtera I dan syarat (6) sampai (13) berikut ini.

6. Paling kurang dalam seminggu, keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
7. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun terakhir
8. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
9. Seluruh anggota keluarga yang berumur di bawah 60 tahun dewasa bisa membaca tulisan latin
10. Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah pada saat ini
11. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai pekerjaan tetap
12. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
13. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing

Keluarga Sejahtera III: keluarga yang memenuhi syarat (1) sampai (13) ditambah dengan syarat-syarat berikut:

14. Anak hidup paling banyak dua orang atau lebih, bila lebih dari 2 orang dan keluarga masih PUS memakai kontrasepsi saat ini
15. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
16. Keluarga biasanya ikut dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal
17. Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang dalam 3 bulan
18. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
19. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat
20. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama

Keluarga Sejahtera III plus: keluarga yang memenuhi syarat (1) sampai (20) dan syarat-syarat berikut ini.

21. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
22. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat lainnya.

- Soehoed, A.R. 2002. *Bunga Rampai Pembangunan. Antara Harapan dan Ancaman Masa Depan*. Jakarta: Puri Fadjar Mandiri dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Suhardjo, dkk. 1986. *Pangan, Gizi dan Pertanian*. Jakarta: UI Press
- Sumarwan, Ujang dan Dadang Sukandar. 1998. *Identifikasi Indikator dan Variabel serta Kelompok Sasaran dan Wilayah Rawan Pangan Nasional*. Jurusan Gizi masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian IPB, UNICEF dan Biro Perencanaan – Departemen Pertanian RI.
- Sumodiningrat, G; B. Santosa dan M. Maiwan. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: Impac.
- Surono, Sulastri. 2001. 'Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Impor Beras Serta Kebijakan Pemerintah untuk melindungi Petani', dalam Suryana, A dan S. Mardianto (penyunting), *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-FEUI).
- Suryahadi, Asep dan Sudarno Sumarto. 2001. 'Pengukuran Kemiskinan dan Aspek Multidimensinya'. SMERU Newsletter. No. 03:May-Jun/2001 <http://www.smeru.or.id/newslet/2001/ed03/200103focus.htm>
- Suryana, Achmad., I.W Rusastra dan M. Rahmat. 1998. *The Development of Food Farming Policy Towards 21st Century*. Bogor: Center of Agriculture, Social and Economic Research.
- Suryana, Achmad dan Sudi Mardianto (Penyunting). 2001. *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Suryana, Achmad. 2003. 'Kinerja Ketahanan Pangan 2002 dan Prospek 2003'. *Suara Pembaruan*.
- Suryana, Achmad. 2003. *Tinjauan Umum Situasi Ketahanan Pangan dan Gizi*. Jakarta: Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- Tabor, S.S; Soekirman dan D. Martianto. 2000. 'Keterkaitan antara krisis ekonomi, kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi'. *Prosiding Widya Karya Pangan dan Gizi VII*, 29 Februari – 2 Maret 2000, hal 41-92. Jakarta: LIPI.

- Rimbawan dan Yayuk F. Baliwati. 2004. "Masalah Pangan dan Gizi" dalam Yayuk Farida Baliwati, Ali Khomsan dan C. Meti Dwiriani (ed): *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Romdiati, H. 1998. *Laporan Pengembangan Manusia Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-LIPI
- Rothchild, C.S. 2001. 'Food security and poverty: definitions and measurement issues' *Dialogue Working Paper 4*. www.iwmi.cgiar.org/dialogue.
- Saliem, Handewi P, Meiwa Ariani, Yuni Marisa dan tri Bastuti. 2002. *Laporan Hasil Penelitian Analisis Kerawanan Pangan Wilayah Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan*. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan penelitian dan pengembangan
- Saliem, Handewi P. dan Mewa Ariani. Ketahanan pangan, konsep, pengukuran dan strategi. *Forum penelitian agro ekonomi, FAE*, Volume 20, No. 1, Juli 2002, Pusat penelitian pengembangan social ekonomi pertanian, Badan penelitian dan pengembangan pertanian, Deptan.
- Sayogyo (ed), 1994, *Kemiskinan dan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Senauer, Ben dan Terry Roe. 1997. *Food Security and the Household*. Paper prepared for the 1997 IAAE Meetings in Sacramento, California.
- Setiawan, Budi. 2004. "Ketahanan Pangan" dalam Yayuk Farida Baliwati, Ali Khomsan dan C. Meti Dwiriani (ed): *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Simatupang P. 1999. 'Toward sustainability food security: the need for a new paradigm'. *International Seminar: Agricultural Sector During the Turbulence of Economic Crisis, Lessons and Future Directions*, 17-18 February 1999, Center fo agro-Socioeconomic Reseach, AARD, Bogor.
- Singarimbun, M dan D.H. Penny. 1984. *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

- McNicoll, Geoffrey. 1999. *Population and Poverty: the Policy Issues*, Part 1. Sustainable Development Department (SD). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). <http://www.fao.org/sd/WPdirect/WPre0087.htm>
- Maxwell, DG. 1996. "Measuring Food Security: The Frequency of Severity of Coping Strategies". *Food Policy* 21 (3): 291-303.
- Nsemukila, B. 2001. *Poverty and Food Security Indicators in Zambia: Analysis of Household Survey Data*. Paper, dipresentasikan pada Workshop on Strengthening and Agricultural Statistics in Africa in Support of Security and Poverty Reduction Policies and Program, 22-26 November 2001. <http://216.239.57.104/search?q=cache:q086gkfln08j:www.fao.org/WAIQ>.
- Penny, David H dan Masri Singarimbun. 1984. *Penduduk dan Kemiskinan. Kasus Sriharjo dan Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Quibria, M.G, 1991, "Understanding Poverty: An Introduction to Conceptual and Measurement Issues", dalam *Asian Development Review*, Vol. 9, No.2:91-112.
- Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO) .1986. *General Recommendation. Food Security in Developing Countries. Research needs and conditions*. The Hague: RAWOO.
- Raharto, Aswatini, 1999. "Kehidupan Nelayan Miskin di Masa Krisis" dalam Tim Peneliti PPT-LIPI: *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kehidupan Keluarga Kelompok Rentan: Beberapa Kasus* Jakarta: PPT-LIPI bekerjasama dengan Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Raharto, Aswatini dan Haning Romdiati. 2000. "Identifikasi Rumah Tangga Miskin", dalam Seta, Ananto Kusuma et.al (editor), *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII*, hal: 259-284. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2000 Tentang Ketahanan Pangan*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.

- Hugo, Graeme. 1992. 'Women on the move: changing patterns of population movement of women in Indonesia', dalam Sylvia Chant (ed): *Gender and Migration in Developing Countries*. London: Belhaven Press.
- Huxley, Julian. 2004. "Ledakan Penduduk", dalam Thomas Malthus, Julian Huxley dan Frederich Osborn, *Ledakan penduduk, Prinsip-prinsip Kependudukan dan pengendaliannya*. Diterjemahkan dari Three Essay on Population oleh Dindin Solahudin. Jakarta: Penerbit Nuansa.
- Irawan, Puguh B dan Haning Romdiati. 2000. "Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya untuk Strategi Pembangunan", dalam Seta, Ananto Kusuma et.al (editor), *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII*, hal: 193-258. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Irawan, Puguh B, Aswatini Raharto, Eka Rumanitha dan Haning Romdiati. 2000. *Analisis Studi Evaluasi Penentuan Kriteria Rumahtangga Miskin Tahun 2000*. Kerjasama BPS, LIPI dan UNICEF.
- Irawan, Puguh B, Erman A. Rahman, Haning Romdiati dan Uzair Suhaimi. 2001. *Anti-Poverty programs in Indonesia. Analysis, Prospect and Policy Recommendations*. BPS, BAPPENAS DAN UNESCAP.
- Kantor Meneg Kependudukan dan BKKBN. 1996. *Informasi dasar Gerakan KB Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Kantor Meneg Kependudukan dan BKKBN.
- Karsin, Emmy S. 2004. "Klasifikasi pangan dan Gizi" dalam Yayuk Farida Baliwati, Ali Khomsan dan C. Meti Dwiriani (ed): *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Karsin, Emmy S. 2004. "Peranan dan Gizi dalam Pembangunan" dalam Yayuk Farida Baliwati, Ali Khomsan dan C. Meti Dwiriani (ed): *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Malthus, Thomas R. 1970. *An Essay on the Principle of Population* (Publikasi pertama tahun 1798). Harmondsworth: Penguin.
- Malthus, T.R, J. Huxley dan Frederich Osborn. 2004. *Ledakan Penduduk, Prinsip-prinsip Kependudukan dan Pengendaliannya*. Diterjemahkan dari Three Essay on Population oleh Dindin Solahudin. Jakarta: Penerbit Nuansa.

- Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. 2002. *Lampung Tengah Dalam Angka 2001*. Kerjasama Bappeda Kabupaten Lampung Tengah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Bandar Lampung.
- Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. 2002. *Profil dan Rencana Program pengembangan potensi Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah*. Gunung Sugih: Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Berg, Alan. 1986. *Peranan Gizi dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- BKKBN. 1996. *Buku Saku Provinsi DKI Jakarta 1995*. Jakarta: BKKBN.
- Booth, Anne dan R.M. Sundrum. 1987. "Distribusi Pendapatan", dalam H.W. Arndt (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Boque, Donald.J. 1969. *Principles of Demography*. Chicago: John Wiley & Sons, Inc.
- Cicih, Lilis Heri Mis. 1997. "Pemantauan Status Gizi dalam Rangka Pemantauan Ketahanan Pangan Rumah Tangga" dalam *Warta Demografi*, Tahun ke-27, No.3. Jakarta: LD-FEUI.
- East-West Center. 2002. *The Future of Population in Asia*. Honolulu: East-West Center.
- Eastwood, R and M. Lipton .2003. "Demographic transition and poverty: effects via economic growth, distribution and conversion", dalam Nancy Birdsall and others, *Population Matters. Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World*. New York: Oxford University Press.
- FAO. 1996. *World Food Summit*, 13-17 November 1996. Rome, Italy: Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
- FAO. 2002. http://www.fao.org/apfs/intro_en.stm.
- Hatmadji, Sri Harjati and Mursitama, Tirta Nugraha. 2003. "Social Safety Net Programmes in Indonesia: Some Efforts to Survive", dalam Aris Ananta (ed), *The Indonesia Crisis. A Human Development Perspective*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Faisal. 2004. "Keamanan Pangan" dalam Yayuk Farida Baliwati, Ali Khomsan dan C. Meti Dwiriani (ed): *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ashford, Lori.S and Jeanne A. Noble. 1996. 'Population Policy: Consensus and Challenges' dalam *Consequences*, vol. 2, Number 2.
- Badan Bimas dan Ketahanan Pangan NTT. 2001. *Laporan Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur*. Kerjasama Badan Bimas dan Ketahanan pangan Nusa Tenggara Timur dengan Kelompok Kerja Pangan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Kupang: Fakultas Peternakan, Universitas Nusa Cendana.
- Badan Pusat Statistik. 1992. *Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Penduduk Lampung: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Penduduk Nusa Tenggara Timur: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2002. *Lampung Dalam Angka 2001*. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. 2002. *Tulang Bawang Dalam Angka 2001*. Kerjasama Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. Menggala.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Peta Penduduk Miskin Indonesia 2000*. Jakarta: BPS.
- Baliwati, Yayuk Farida dkk. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Tim Peneliti, 1999, *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kehidupan Keluarga Kelompok Rentan: Beberapa Kasus* Jakarta: PPT-LIPI bekerjasama dengan Departemen Sosial Republik Indonesia.

Tim Peneliti Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. 2002. *Analisis Ketahanan pangan Wilayah Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan*. Makalah Seminar Hasil Penelitian T.A 2002. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Tjondronegoro, Sediono M.P. 1991. "Colonist and Transmigrants in Agricultural Development: Planned and Sponsored Resettlement in Indonesia in J.A. Mollett, *Migrants in Agricultural Development*. London: Macmillan Academic and Professional Ltd.

United Nation. 1973. *The Determinant and Consequences of Population Trends*. New York: United Nation.

United Nation. Department for Economic and Social Information and Policy Analysis. 1995. *Population and Development. Programme of Actions Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994*. Volume I. United Nations Publication Series No. E. 95. XIII.7.

United Nations Development Programme (UNDP). 1997. *Human Development Report 1997*. New York:Oxford University Press.

World Bank. 1990. *World Development Report 1990. Poverty. World Development Indicators*. New York: Oxford University Press





363.8

HADIAH

